



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

**KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2025 2029**





BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

dan

BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut BAPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buru Selatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Buru Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buru Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II
RPJMD
Pasal 2

- (1) Bupati melalui BAPELITBANG menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Umum Daerah
 - c. bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - d. bab IV Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - e. bab V Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - f. bab VI Penutup
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui BAPELITBANG melakukan pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melalui BAPELITBANG melakukan Perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole

Pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BURU SELATAN,



Diundangkan di Namrole

Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026
NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI
MALUKU : 1/6/2026

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif – alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berakhirnya periodisasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025 – 2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal

263 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Buru Selatan. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun, telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD ini mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Secara umum, Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dalam 5 (Lima) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan, Bab IV membahas tentang Program Perangkat Daerah dan Kinerja dan BAB V Penutup.

Dokumen RPJMD ini juga disempurnakan berdasarkan masukan-masukan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pijakan dalam tahapan selanjutnya dari proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun dan senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	5
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
2. Gambaran Umum Daerah	12
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.2. Gambaran Umum Keuangan Daerah	115
2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis	136
3. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan	149
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	149
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	180
3.3. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	266
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	268
4.1. Program Perangkat Daerah	268
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	345
5. Penutup	378
5.1. Kesimpulan Substansial	378
5.2. Kaidah Pelaksanaan	379
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	380
5.4. Penutup	381
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas dan Jumlah Desa di setiap Kecamatan pada Kabupaten Buru Selatan, 2024	12
Tabel 2.2. Kondisi Unsur Iklim di Wilayah Buru Selatan Tahun 2024	17
Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan (Ha)	18
Tabel 2.4. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Buru Selatan (ha).	20
Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Buru Selatan (ton)	21
Tabel 2.6. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Buru Selatan	22
Tabel 2.7. Produksi Buah-Buahan dan Sayuran (Kuintal) Kabupaten Buru Selatan	23
Tabel 2.8. Jumlah Populasi Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan (ekor)	24
Tabel 2.9. Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Buru Selatan	25
Tabel 2.10. Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan	29
Tabel 2.11. Dasar Pertimbangan Penetapan Fungsi Kota dalam Pusat-Pusat Permukiman di Kabupaten Buru Selatan	30
Tabel 2.12. Produksi dan Konsumsi Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Buru Selatan, 2024	31
Tabel 2.13. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, 2020–2024	32
Tabel 2.14. Komposisi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan	41
Tabel 2.15. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Buru Selatan	54
Tabel 2.16. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024	60
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Buru Selatan	71
Tabel 2.18. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Buru Selatan	73
Tabel 2.19. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Buru Selatan	74

Tabel 2.20. Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan	79
Tabel 2.21. Ruas Jalan di Kabupaten Buru Selatan	83
Tabel 2.22. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Buru Selatan	91
Tabel 2.23. Capaian Aksi HAM Kabupaten Buru Selatan	94
Tabel 2.24. Indikator Keamanan dan Ketertiban Proxy Provinsi Maluku	96
Tabel 2.25. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buru Selatan	98
Tabel 2.26. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2020 – 2024 (Rp)	118
Tabel 2.27. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Buru Selatan	120
Tabel 2.28. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Buru Selatan	120
Tabel 2.29. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	123
Tabel 2.30. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	126
Tabel 2.31. Neraca Daerah Buru Selatan	127
Tabel 2.32. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan	129
Tabel 2.33. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Buru Selatan	133
Tabel 2.34. Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buru Selatan	133
Tabel 2.35. Kondisi Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buru Selatan	134
Tabel 2.36. Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buru Selatan	134
Tabel 2.37. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	135
Tabel 2.38. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan	135
Tabel 2.39. Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan	136
Tabel 2.40. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional	142
Tabel 2.41. Isu Strategis RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	143

Halaman

Tabel 2.42	Isu Strategis RPJPD, RPJMN, dan KLHS RPJMD Kabupaten Buru Selatan	144
Tabel 3.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Indikator RPJMD Kabupaten Buru Selatan	156
Tabel 3.2.	Visi, Misi, Strategi dan Arah Pembangunan Kabupaten Buru Selatan 2025-2029	181
Tabel 3.3.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	191
Tabel 3.4.	Program Prioritas dan Indikasi Kegiatan Prioritas	245
Tabel 3.5.	Penahapan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029	267
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	276
Tabel 4.2.	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2030	345
Tabel 4.3.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan	346
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Kabupaten Buru Selatan	347

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	6
Gambar 1.2. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	8
Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buru Selatan	13
Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Buru Selatan	17
Gambar 2.3. Peta Tutupan Lahan Di Kabupaten Buru Selatan	19
Gambar 2.4. Sebaran Potensi Mineral Logam dan Batuan di Kabupaten Buru Selatan	20
Gambar 2.5. Potensi Pertanian Unggulan di Kabupaten Buru Selatan	21
Gambar 2.6. Potensi Lahan Sawah dan LP2B untuk Ketahanan Pangan Lokal di Kabupaten Buru Selatan	24
Gambar 2.7. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043	27
Gambar 2.8. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Buru Selatan	39
Gambar 2.9. Ringkasan Capaian Hasil Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, 2024	55
Gambar 2.10. Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa di Kabupaten Buru Selatan, 2024	56
Gambar 2.11. Kondisi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buru Selatan	97
Gambar 2.12. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan	116
Gambar 2.13. Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Buru Selatan	117
Gambar 2.14. Perkembangan Realisasi Pendapatan PAD di Kabupaten Buru Selatan	119
Gambar 3.1. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku	154

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Buru Selatan	32
Grafik 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan	33
Grafik 2.3. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Buru Selatan	34
Grafik 2.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Buru Selatan	36
Grafik 2.5. Timbulan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Buru Selatan	36
Grafik 2.6. Infografis Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan, 2020-2024	38
Grafik 2.7. Infografis Kondisi Kependudukan di Kabupaten Buru Selatan	40
Grafik 2.8. Infografis Proyeksi Penduduk di Kabupaten Buru Selatan, 2025-2029	42
Grafik 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan	44
Grafik 2.10. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan	45
Grafik 2.11. Kedalaman, Keparahan, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan	45
Grafik 2.12. PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan	47
Grafik 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan	47
Grafik 2.14. Indeks Gini Kabupaten Buru Selatan	48
Grafik 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan	49
Grafik 2.16. Usia Harapan Hidup Kabupaten Buru Selatan	50
Grafik 2.17. Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Buru Selatan	51
Grafik 2.18. Prevalensi Stunting Kabupaten Buru Selatan	52
Grafik 2.19. RLS dan HLS Kabupaten Buru Selatan	54
Grafik 2.20. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Buru Selatan	57
Grafik 2.21. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku	58
Grafik 2.22. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Buru Selatan	59
Grafik 2.23. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku	61

Grafik 2.24. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku	62
Grafik 2.25. Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Buru Selatan	63
Grafik 2.26. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku	64
Grafik 2.27. IBANGGA Kabupaten Buru Selatan	65
Grafik 2.28. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buru Selatan	66
Grafik 2.29. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Buru Selatan	67
Grafik 2.30. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buru Selatan	68
Grafik 2.31. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku	69
Grafik 2.32. Angka Ketergantungan Kabupaten Buru Selatan	69
Grafik 2.33. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buru Selatan	71
Grafik 2.34. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Buru Selatan	72
Grafik 2.35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buru Selatan	74
Grafik 2.36. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buru Selatan	75
Grafik 2.37. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Buru Selatan	76
Grafik 2.38. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku	77
Grafik 2.39. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku	80
Grafik 2.40. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Buru Selatan	81
Grafik 2.41. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan	82
Grafik 2.42. Indikator Proxy Infrastruktur (Pilar 2 IDSD) Kabupaten Buru Selatan	83
Grafik 2.43. Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Buru Selatan	84
Grafik 2.44. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Buru Selatan	85
Grafik 2.45. Capaian ID di Kabupaten Buru Selatan	86
Grafik 2.46. Capaian ID Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2024	87
Grafik 2.47. Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan	88
Grafik 2.48. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan	89
Grafik 2.49. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Buru Selatan	91
Grafik 2.50. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Buru Selatan	92
Grafik 2.51. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku	95
Grafik 2.52. Kontribusi Sumber PAD terhadap PAD Buru Selatan	119

Grafik 2.53. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	121
Grafik 2.54. Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Buru Selatan	121
Grafik 2.55. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Buru Selatan	122
Grafik 2.56. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Buru Selatan	124
Grafik 2.57. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Buru Selatan	125
Grafik 2.58. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buru Selatan	132

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan perlu melakukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan tepat guna, karena perencanaan ini merupakan aspek kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan yang tersusun secara sistematis dan berbasis data akan mendukung pelaksanaan program serta kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan potensi sumber daya lokal. Selain itu, perencanaan yang terorganisir juga berfungsi penting dalam membantu pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara optimal, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ketentuan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan disusun berdasarkan landasan hukum perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. kedua Undang-Undang ini menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bagian integral dari sIstem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang disusun dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, Partisipasi dan Berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi panduan strategi bagi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, serta merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai amanat pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan periode 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian kembali. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 29 ayat 3, setiap daerah diamanatkan untuk menyusun RPJMD paling lambat harus disampaikan 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri tersebut, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Buru Selatan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029.

Selain pendekatan Teknokratik, penyusunan RPJMD juga telah memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas bawah dan bawah atas (top down dan bottom up). Dengan prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen ini kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan, yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja-OPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada akhirnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2029 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, La Hamidi, SH dan Gerson Eliezer Selsily, SE terpilih secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2029 dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Sehubungan dengan pelantikan tersebut, disusunlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi,

arah kebijakan, program prioritas daerah, serta strategi pencapaian pembangunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan janji kepala daerah terpilih dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

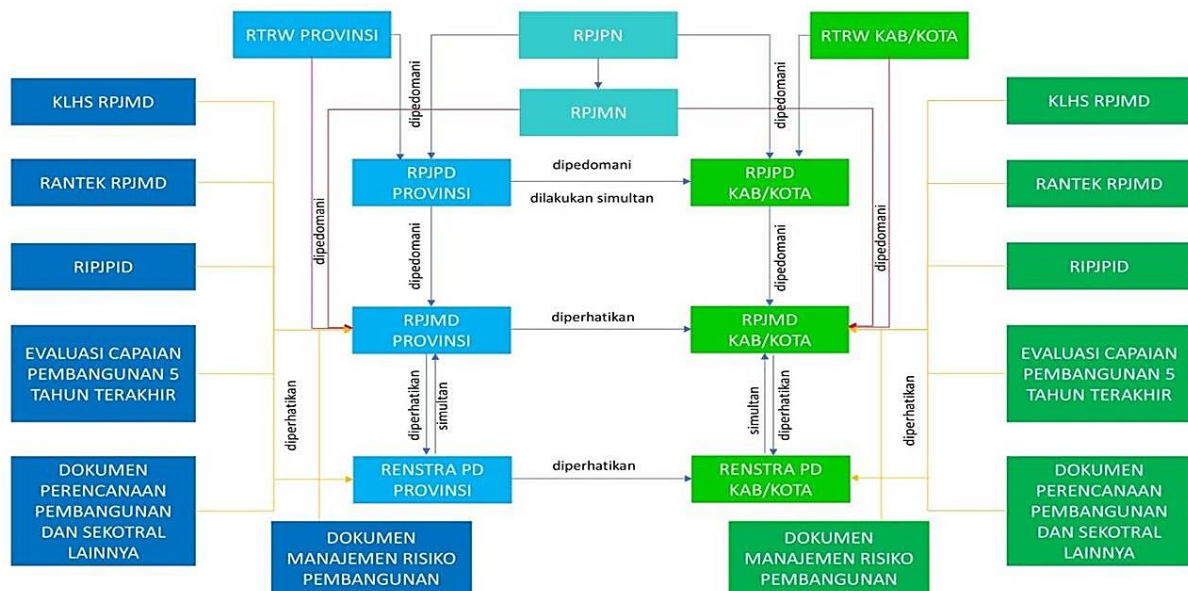
- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045.
 32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Buru Selatan merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Buru Selatan.

Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 Kabupaten Buru Selatan bukan hanya bersifat operasional dan kontekstual daerah, tetapi juga menjadi bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan berkelanjutan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029

RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan RPJMN 2025- 2029 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat kabupaten, RPJMD disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

Dalam penyusunannya, RPJMD Buru Selatan menerjemahkan agenda nasional ke dalam konteks lokal, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi ekonomi hijau, penguatan tata kelola pemerintahan, dan ketahanan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, sinkronisasi antara RPJMD dan RPJMN juga mendukung harmonisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah, termasuk dalam hal pendanaan, program strategis, dan integrasi kebijakan pusat-daerah. Dengan demikian, program pembangunan Kabupaten Buru Selatan dapat memperoleh dukungan kebijakan, regulasi, dan intervensi pemerintah pusat secara lebih optimal.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029

RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 disusun sejalan dengan RPJMD Provinsi Maluku 2025- 2029 sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam satu sistem perencanaan daerah. Sinkronisasi ini memastikan bahwa arah pembangunan kabupaten mendukung prioritas pembangunan provinsi, seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu, keterkaitan kedua dokumen ini memungkinkan koordinasi kebijakan dan program strategis lintas kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku. Melalui keselarasan perencanaan tersebut, RPJMD Kabupaten Buru Selatan menjadi bagian integral dari pencapaian target lima tahunan Provinsi Maluku, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih efektif, sinergis, dan memberi dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal dan regional.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 merupakan penjabaran lima tahunan dari arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025–2045. dengan visi jangka panjang daerah, yaitu "Buru Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan." RPJPD 2025-2045 memuat visi besar, arah pembangunan strategis, dan target jangka panjang daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut secara bertahap, RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025- 2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPD dengan fokus pada **Penguatan Prioritas dan Fokus Pondasi Transformasi** (2025-2029), yang menjadi landasan penguatan untuk pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buru Selatan pada tahap pertama meliputi:

1. Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter
2. Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)
4. Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana
5. Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya.

Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai penjabaran operasional RPJPD, yang menerjemahkan tujuan jangka panjang ke dalam sasaran, indikator kinerja, dan program konkrit yang dapat diukur dalam lima tahun pertama. Sinkronisasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkesinambungan, terarah, dan terukur dari periode ke periode hingga tahun 2045.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029

RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan KLHS sebagai instrumen utama untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. KLHS disusun bersamaan dengan RPJMD untuk mengkaji sejauh mana kebijakan, rencana, dan program pembangunan lima tahunan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

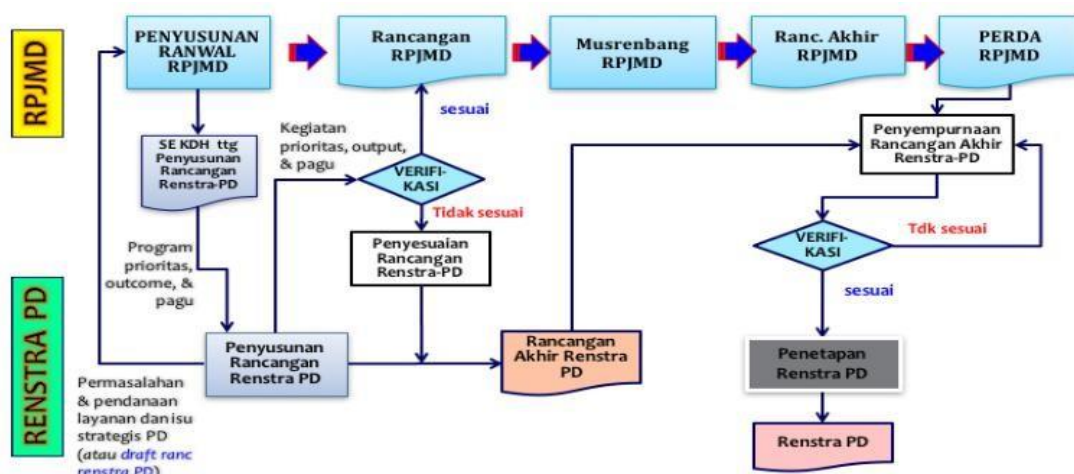
Dalam proses penyusunan RPJMD, KLHS berperan sebagai alat penapisan dan pengarah, sehingga setiap tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melalui KLHS, isu-isu strategis seperti perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, deforestasi, pencemaran, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

Selain itu, KLHS memastikan RPJMD selaras dengan prinsip pembangunan rendah karbon dan adaptif terhadap perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan Permendagri 7 Tahun 2018. Rekomendasi dalam KLHS menjadi dasar penyempurnaan arah kebijakan dan prioritas RPJMD, agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD 2025-2029 dan KLHS-nya merupakan satu kesatuan dokumen yang saling menguatkan. RPJMD menjadi rencana pelaksanaan pembangunan, sementara KLHS menjadi instrumen pengaman dan pengarah agar pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan tekanan baru terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

1.3.5. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Buru Selatan.



Sumber: Kemendagri, 2017

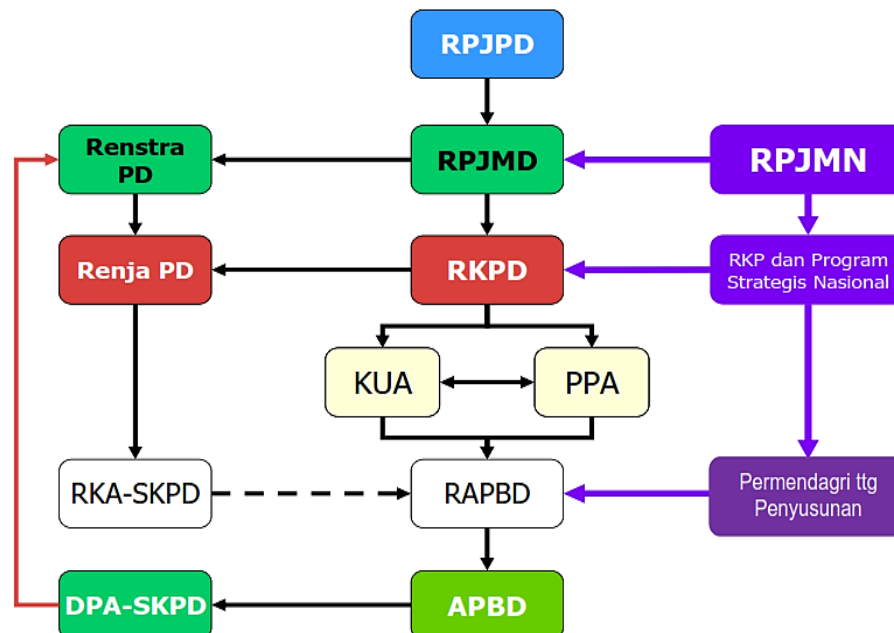
Gambar 1.2. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3.6. Hubungan RPJMD dan RKPD

Substansi RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena itu RPJMD harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memuat prioritas program dan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Buru Selatan secara berjenjang mulai dari tingkat Negeri/Desa hingga Kabupaten.

Selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penajaman RKPD dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai landasan untuk penyusunan RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan lainnya. Penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis Daerah, serta rekomendasi.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka menengah Kabupaten Buru Selatan yang berpedoman pada RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RTRW, dalam rangka:

1. Menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan, sehingga seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas, terpadu, dan berkesinambungan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 melalui penajaman program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2025 sampai dengan 2029;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
6. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, serta menyediakan pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
- 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak Geografis dan Batasan Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Buru Selatan adalah 3.780,56 km². Jumlah pulau di Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 11 pulau dengan 3 Pulau yang berpenghuni dan 8 Pulau tidak berpenghuni. Sejak terbentuknya, wilayah administrasi kabupaten Buru Selatan terdiri dari lima (5) kecamatan yaitu kecamatan Kepala Madan, Leksula, Namrole, Waesama dan Ambalau. Pada akhir tahun 2013, kabupaten Buru Selatan dimekarkan menjadi enam (6) kecamatan yaitu kecamatan Kepala Madan, Leksula, Fena Fafan, Namrole, Waesama dan Ambalau. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah kecamatan Leksula dan kecamatan Ambalau merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Luas dan sebaran jumlah desa di Kabupaten Buru Selatan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1. Luas dan Jumlah Desa di setiap Kecamatan pada Kabupaten Buru Selatan, 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Desa
1	Kepala Madan	Biloro	953,36	25,22	16
2	Leksula	Leksula	1.419,29	37,54	19
3	Fena Fafan	Waekatin	394,78	10,44	11
4	Namrole	Elfule	243,57	6,44	17
5	Waesama	Wamsisi	540,93	14,31	11
6	Ambalau	Siwar	228,63	6,05	7
Kabupaten Buru Selatan		Namrole	3.780,56	100,00	81

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS), 2025

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan terletak pada posisi 2°30' – 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' - 127°00' Bujur Timur. Kabupaten Buru Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda sebelah Selatan dan Barat, serta Kabupaten Buru dan Selat Manipa di sebelah timur.

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima buah dataran dengan luas sekitar 5.750 Ha, meliputi dataran Waekatin seluas 1.500 Ha, dataran Waekanu seluas 1.250 Ha, dataran Waemala seluas 1.250 Ha, dataran lembah Rana seluas 1.250 Ha, dan dataran Waelo seluas 500 Ha. di Kabupaten Buru Selatan terdapat sungai besar yaitu Waemala, Waetina dan Waekuma, dengan 12 (dua belas) anak sungai. Kabupaten Buru Selatan memiliki sebuah gunung yaitu Gunung Kapala Madan yang terletak di kecamatan Kapala Madan dengan ketinggian mencapai 2.429 meter dari permukaan laut.

Kondisi Geostrategis dan Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara nasional dan internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi undang-undang 17 tahun 1985 memberikan penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III Dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi

ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur.

Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistem tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan Tol Laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar.



Sumber: RTRW Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2043

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buru Selatan

2. Topografi, Fisiografi dan Geomorfologi

Topografi Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi 3 satuan, yaitu pegunungan, perbukitan dan dataran.

- Satuan Pegunungan, terbentang dari di bagian tenggara, selatan, barat dan tengah pulau Buru yang menempati sekitar 70% dari luas pulau dengan kemiringan lereng yang relatif curam.
- Satuan Perbukitan, tersebar mengelilingi morfologi pegunungan yang membentuk rangkaian perbukitan yang membulat dan berlereng landai sampai agak curam dengan ketinggian sampai 800 meter di atas permukaan laut.
- Satuan Dataran, terbagi ke dalam dataran rendah dan dataran antar gunung. Dataran rendah tersebar di daerah utara dan di sepanjang daerah aliran sungai.

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan bumi pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan secara makro (makro relief) yang terdiri atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan termasuk di dalamnya Dataran Tinggi (plateau/Piedmont). Fisiografi dataran tersebar pada areal

dengan ketinggian 0 - 100 m dari permukaan laut (dpl), fisiografi perbukitan tersebar pada areal dengan ketinggian 100-500 m dpl, sedangkan fisiografi pegunungan tersebar pada areal dengan ketinggian lebih dari 500 m dpl. Pada fisiografi perbukitan terdapat perbukitan rendah dan perbukitan tinggi, demikian juga fisiografi pegunungan terdapat pegunungan rendah dan pegunungan tinggi. Secara mikro (mikro relief) bentuk lahan dan persentase kelerengan terdiri atas: Datar (0 – 3 %), Bergelombang (3 – 8 %), Landai (8 – 15 %), Agak Curam (15 – 30 %), Curam (30 – 45 %), Sangat Curam (> 45 %).

Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Buru dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentang alam yaitu bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusional dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah dan sungai.

Buru Selatan merupakan salah satu kawasan di luar busur Banda (jalur gunung api) dengan formasi geologi bervariasi antara batuan sedimen dan metamorfik. Dalam peta sketsa geologi Pulau Buru dan Seram, diuraikan bahwa secara umum ditemukan 3 (tiga) material utama penyusun Pulau Buru. Tiga Formasi dimaksud berada pada bagian Selatan, Utara dan Formasi deposisi di bagian Timur Laut, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- Batuan Sedimen di bagian selatan yang kebanyakan dijumpai pada tempat-tempat dengan permukaan air yang dangkal;
- Batuan metamorfik yang mirip dengan tipe batuan benua yang meliputi filit, batu sabak, sekis, arkose serta greywacke meta yang dominan berada pada bagian Utara Pulau Buru;
- Endapan batuan sedimen berumur Neogen bagian atas ditemukan pada bagian Timur Laut tersusun dari endapan Aluvium dan Kolovium berupa bongkahan, kerikil, lanau, konglomerat, lumpur dan gambur. Di sepanjang pantai Utara terdapat jalur endapan pantai dan Aluvio- kolovium yang diselingi dengan terumbu karang angkatan (uplifted coral reef).

Jenis tanah yang berada di Kabupaten Buru Selatan yaitu: Regosol (Psamments), Aluvial (Fluvents), Gleisol (Aquepts), Litosol (Orthents), Renzina (Rendolls), Kambisol (Udepts), Molisol (Udepts) dan Podsolik (Udults). Penamaan Jenis-jenis tanah ini menggunakan sistem Klasifikasi Tanah Nasional (Subardja et al., 2014) dan diberikan padanannya menurut sistem Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014).

Sifat-sifat umum dari 8 jenis tanah tersebut disajikan sebagai berikut:

Regosol (Psamments). Tanah Regosol adalah tanah Regosol gunung yang berkembang dari Formasi Dalam terdiri dari batu pasir, serpih dan batu lanau, mempunyai lapisan- lapisan tanpa perkembangan horizon. Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak kasar hingga kasar dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam hingga netral. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (kentang, wortel, hotong, keladi, petatas, buncis, jagung, ubi kayu, kacang tanah, padi ladang, daun bawang, labu, tomat, cabe, kubis, sawi, kacang panjang, kelapa, cengkeh, mangga, alang-alang dan waru). Tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (Udepts) dan Litosol (Orthents).

Aluvial (Fluvents). Tanah Aluvial adalah tanah yang berkembang dari bahan alluvium, bongkah, kerikil, pasir lanau dan lumpur yang mempunyai lapisan-lapisan tanpa perkembangan horizon. Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur sedang hingga agak halus dan drainase agak baik hingga baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah kebun campuran dan tegalan (kelapa, kakao, tanaman buahan, jagung, pisang, ubi kayu, kacang tanah, sawi, bawang merah, bayam, labu). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Gleisols (Aquepts).

Gleisol (Aquepts). Jenis tanah Gleisol memiliki solum tanah dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan berdrainase agak buruk, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah semak belukar (kayu waru, waringin, gondal, nibong, sagu). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Aluvial (Fluvents).

Litosol (Lithic orthents). Tanah Litosol memiliki solum tanah sangat dangkal, dengan tekstur sedang dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) masam. Menyebar pada bentuk wilayah berbukit hingga bergunung yang didominasi dinding batuan dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan, kebun campuran, semak belukar. Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (Udepts) dan Rensina (Rendolls) dan Brunizem (Udepts).

Renzina (Rendoll). Tanah Rensina memiliki solum tanah sedang, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah berbukit hingga bergunung dengan bahan induk batu gamping. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan, kebun campuran (kayu meranti, matoa, kelapa dan kakao). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Kambisol (Udepts) dan Brunizem (Udepts).

Kambisol (Udepts). Tanah Kambisol memiliki solum tanah sedang hingga dalam, dengan tekstur sedang hingga agak halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah berbukit hingga bergunung. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan primer, sekunder, kebun campuran, semak belukar (kayu meranti, matoa, kelapa, alang-alang). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Renzina (Rendolls).

Molisol (Udepts). Tanah Molisol adalah termasuk tanah yang sedang berkembang, mempunyai horizon terselubung yang berkembang dari formasi Wakatin (batugamping koral). Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Penggunaan lahan yang ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (keladi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang tanah, jeruk, kelapa, langsung, durian, mangga, nangka, kakao dan alang-alang). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Renzina (Rendolls).

Podsolik (Udults). Tanah Podsolik termasuk tanah yang sudah berkembang, ditemukan pada daerah kajian dengan bentuk wilayah dataran perlembahan. Berkembang dari formasi Hotong. memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Penggunaan lahan yang ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (kelapa, nangka, sukun, langsung, durian, jambu mete, gojawas, jambu air, keladi, ubi kayu, pisang,

kacang tanah, alang-alang). Sungga-sungga, mimosa, paku-paku dan sagu). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (udepts) dan Litosol (Orthents).

3. Klimatologi

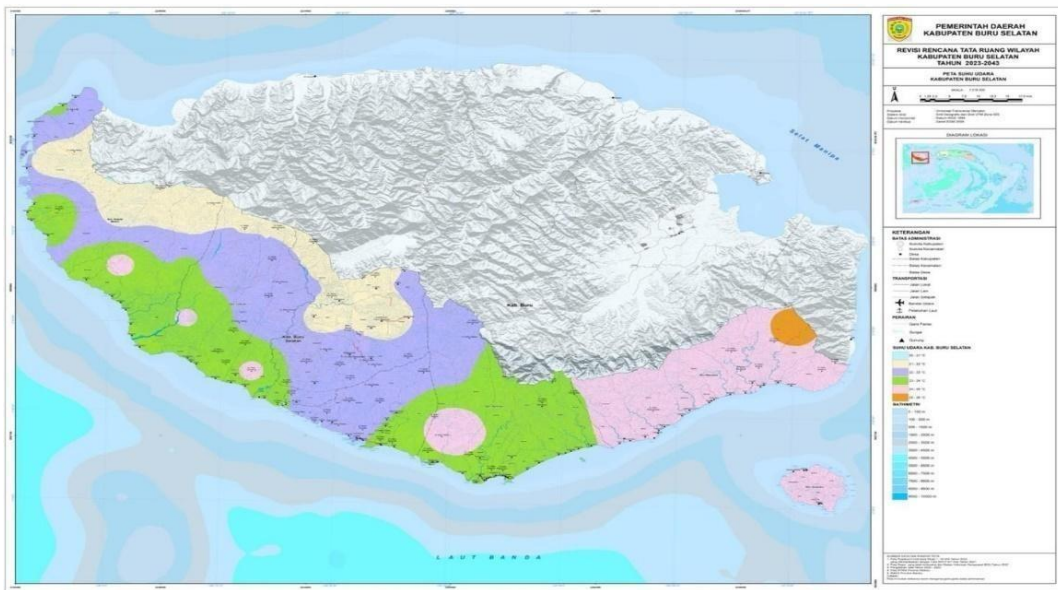
Kondisi Iklim. Iklim Pulau Buru berbeda antara wilayah, yaitu Kabupaten Buru di bagian utara dan Kabupaten Buru Selatan di bagian selatan. Menurut Laimeheriwa (2014), wilayah Kabupaten Buru memiliki pola hujan monson-uni modal dengan curah hujan tahunan relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Buru Selatan yang umumnya memiliki pola hujan lokal-unimodal; kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kapala Madan di bagian utara yang pola hujannya sama dengan pola hujan Pulau Buru bagian utara, yaitu monson-unimodal.

Wilayah Kabupaten Buru Selatan tidak memiliki stasiun iklim lengkap sehingga untuk menggambarkan kondisi iklim daerah ini digunakan data iklim dari stasiun iklim representatif yang datanya tersedia lengkap dengan mempertimbangkan posisi geografis dan pola hujan wilayah. Terkait dengan pertimbangan tersebut, maka penggunaan data iklim dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon dianggap dapat mewakili wilayah Buru Selatan karena letaknya yang relatif berdekatan serta memiliki pola hujan yang sama. Data iklim yang digunakan terdiri dari (i) data curah hujan dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon selama 30 tahun pengamatan; periode 1993 – 2022, (ii) data unsur iklim lainnya dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon selama 15 tahun pengamatan; periode 2008 – 2022, dan (iii) data historis curah hujan; nilai rata-rata dari Stasiun Hujan Tifu.

Gambar 2.2. menyajikan kondisi curah di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya Tabel 2.2 menyajikan kondisi bulanan unsur iklim lainnya, yaitu suhu udara, kelembaban udara, lama penyinaran surya, angin, dan evapotranspirasi.

Hujan dan tipe iklim. Wilayah Kabupaten Buru Selatan dapat dibagi dalam 4 wilayah/zone hujan dan dinyatakan sebagai wilayah beriklim agak basah (subhumid tropic) sampai dengan daerah sangat basah (perhumid tropic) dengan kisaran curah hujan rata-rata 1.918 (Waihotong) hingga 3.207 mm/tahun (Pulau Ambalau). Wilayah Kecamatan Kapala Madan di bagian utara memiliki pola hujan yang mirip dengan wilayah Kabupaten Buru yaitu pola monsun-unimodal dengan puncak curah hujan terjadi dalam bulan Desember/Januari/Februari, sedangkan bulan September dan Oktober merupakan bulan-bulan terkering dalam setahun. Musim hujan umumnya berlangsung dalam periode Desember s/d Mei dan musim kemarau umumnya berlangsung dalam periode Juni s/d November.

Wilayah-wilayah di bagian selatan Kabupaten Buru Selatan memiliki pola hujan lokal-unimodal yang mirip dengan wilayah Pulau Ambon, dengan puncak hujan dalam bulan Juni-Juli dan bulan terkering berlangsung dalam bulan Oktober dan November. Musim hujan umumnya berlangsung dalam periode April s/d September dan musim kemarau umumnya berlangsung dalam periode Oktober s/d Maret. Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Oldeman Wilayah Kabupaten Buru Selatan memiliki tipe iklim D2 dan C2 yang dicirikan oleh jumlah bulan basah (curah hujan > 200 mm) selama 4 - 5 bulan berturut-turut, dan jumlah bulan kering (curah hujan < 100 mm) selama 2 - 3 bulan berturut-turut, serta panjang periode pertumbuhan dalam setahun 9 – 10 bulan. Menurut sistem klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, wilayah ini mempunyai tipe iklim C dan B; tipe C yaitu daerah agak basah dengan vegetasi hutan lebat dan nilai Q (rasio bulan kering dan bulan basah): 36,3 – 48,2%, sedangkan tipe B merupakan daerah basah dengan vegetasi hutan hujan tropis dan nilai Q: 20,1 – 24,8%.



Sumber : RTRW Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2043

Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Buru Selatan

Suhu udara, kelembaban udara, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Rata-rata suhu udara harian di wilayah Buru Selatan berkisar antara yang paling rendah pada bulan Juli (27,0°C) hingga tertinggi pada bulan November (29,9°C). Kelembaban nisbi udara bulanan berkisar antara yang paling rendah 69 persen hingga tertinggi sebesar 85 persen. Lamanya surya bercahaya cerah berkisar dari yang terendah pada bulan Juni-Juli (4,2 – 4,5 jam) ketika curah hujan maksimum hingga tertinggi pada bulan Oktober (8 jam) ketika curah hujan minimum. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 14 knot pada bulan Februari hingga 19 knot pada bulan September (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Kondisi Unsur Iklim di Wilayah Buru Selatan Tahun 2024

Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)		Lama Penyinaran (jam)
Januari	27,5	84,0	15	1.008,4	150,8		5,2
Februari	27,3	85,0	14	1.008,4	146,7		3,9
Maret	27,7	82,0	17	1.009,7	161,4		6,9
April	27,8	82,0	15	1.008,9	139,1		7,0
Mei	28,0	80,0	17	1.010,5	180,9	14	6,7
Juni	27,5	82,0	16	1.010,3	112,4	9	6,0
Juli	27,0	81,0	19	1.010,9	255,7	12	5,8
Agustus	27,9	73,0	18	1.012,3	11	5	8,5
September	27,9	71,0	19	1.011,6	68,7	7	7,9
Oktober	29,3	69,0	18	1.011,9	-	1	9,1
November	29,9	71,0	16	1.010,0	-	1	9,4
Desember	28,9	79,0	15	1.009,5	192,1	16	4,1

Sumber: Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025

4. Penggunaan Lahan

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima dataran dengan total luas sekitar 5.750 Ha, terdiri dari dataran Waekatin seluas 1.500 Ha, dataran Waekanu seluas 1.250 Ha, dataran Waemala seluas 1.250 Ha, dataran lembah Rana seluas 1.250 Ha, dan dataran Waelo seluas 500 Ha. Terdapat 12 sungai di Kabupaten Buru Selatan yang merupakan anak sungai dari sungai besar yaitu Waemala, Waetina, dan Waekuma. Di kabupaten ini juga terdapat gunung Kapala Madan dengan ketinggian mencapai 2.429 meter dari permukaan laut yang terletak di kecamatan Kapala Madan.

Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan (Ha)

Jenis Tutupan Lahan	Kecamatan					
	Ambalau	Fena Fafan	Kepala Madan	Leksula	Ambalau	Waesama
Danau/Situ		0,24	0,89	1,12		
Hutan Lebat	6.744,74	42.287,52	77.095,25	82.558,15	58.974,36	55.152,94
Landas Pacu						
Padang Rumput			1.134,18	582,25		
Pasir/Bukit Pasir Darat			15,82	18,77		1,67
Pasir/Bukit Pasir Laut			1,62			
Pelabuhan Samudera				0,01		
Perkebunan/Kebun			539,11	39,31		1.666,18
Permukiman dan Tempat Kegiatan	32,53	34,29	64,74	127,64	87,11	83,08
Semak Belukar	183,11	8.021,69	5.754,32	6.596,97		1.057,47
Sungai	0,70	74,59	211,74	344,12	215,07	243,42
Tegalan/Ladang	55,50	6.924,97	2.268,68	1.863,34	1.742,38	1.788,59

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Secara umum, Kabupaten Buru Selatan memiliki dua jenis penggunaan lahan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun meliputi lahan untuk perumahan, perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan sarana permukiman lainnya. Sementara itu, lahan tidak terbangun meliputi lahan pertanian, kehutanan, semak/belukar, lahan kosong, dan lahan terbuka lainnya. Luas lahan terbangun di Kabupaten Buru Selatan adalah 1.159,50 Ha, sedangkan lahan tidak terbangun seluas 504.840,50 Ha (total lahan di luar pemukiman dan sarana transportasi udara/bandara).



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.3. Peta Tutupan Lahan Di Kabupaten Buru Selatan

Rencana Alih Fungsi Lahan, Rencana alih fungsi hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain seluas kurang lebih 40.700 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir dan alih fungsi hutan produksi dan produksi terbatas menjadi kawasan lindung seluas kurang lebih 10.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Namrole.

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

1. Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kepadatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat; dan
2. Mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota agar mewujudkan hutan kota.

Arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Buru Selatan pada pola ruang diarahkan untuk pemantapan pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan meliputi kawasan peruntukan yang paling besar di Kabupaten Buru Selatan yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yaitu sekitar 95.113,90 Ha.

B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Pertambangan

Potensi sumber daya alam Kabupaten Buru Selatan meliputi mineral logam, non logam dan batuan, panas bumi, air permukaan, dan air tanah. Berdasarkan dari berbagai sumber penelitian, maka gambaran umum terhadap potensi sumber daya alam di Buru Selatan dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4. Sebaran Potensi Mineral Logam dan Batuan di Kabupaten Buru Selatan

2. Potensi Unggulan Daerah

Sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap sektor memiliki karakteristik, basis sumber daya, serta rantai nilai yang berbeda, namun secara sinergis berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pertanian

a. Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Buru Selatan. Gambaran umum terkait kondisi perkebunan di Kabupaten Buru Selatan Secara keseluruhan sesuai jenis tanaman yang diusahakan pada perkebunan rakyat di Kabupaten Buru Selatan meliputi tanaman kelapa, kopi, kakao, cengkeh, dan pala. Kondisi umum potensi dari tanaman-tanaman tersebut diperlihatkan pada **Tabel 2.4** dan **Tabel 2.5**.

Tabel 2.4. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Buru Selatan (ha)

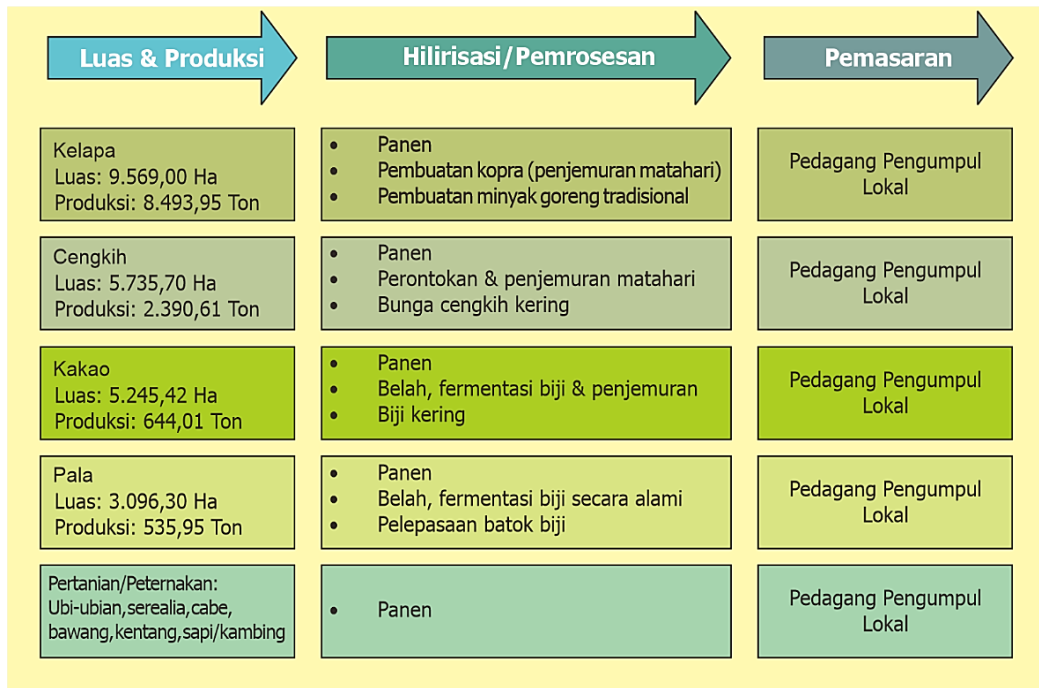
Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	9.424,00	9.424,00	9.524,00	9.524,00	9.569,00
Kopi	56,83	56,83	56,83	56,83	64,83
Kakao	554,90	582,40	596,40	612,95	5.245,42
Cengkeh	5.607,70	5.607,70	5.607,70	5.653,70	5.735,70
Pala	2.654,30	2.954,30	3.014,30	3.079,30	3.096,30

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025

Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Buru Selatan (ton)

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	7.742,00	7.892,00	7.963,40	8.090,00	8.493,95
Kopi	14,15	16,02	16,56	14,36	22,38
Kakao	554,90	582,40	596,40	612,55	644,01
Cengkeh	2.278,70	2.246,60	2.339,20	2.277,66	2.390,61
Pala	507,35	515,85	596,40	509,20	535,95

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025



Sumber: LP2B Kabupaten Buru Selatan dan PSP Unpatti Tahun 2024

Gambar 2.5. Potensi Pertanian Unggulan di Kabupaten Buru Selatan

Pada tahun 2024, luas tanam kelapa mencapai 9.569,00 hektare dengan produksi sebesar 8.493,95 ton, diolah melalui proses pembuatan kopra dan minyak goreng tradisional. Komoditas cengkih menempati luas 5.735,70 hektare dengan produksi 2.390,61 ton, diolah melalui perontokan dan penjemuran bunga cengkih. Kakao dengan luas 5.245,42 hektare dan produksi 644,01 ton, melewati proses pascapanen berupa pembelahan buah, fermentasi biji, serta penjemuran hingga menjadi biji kering. Sementara itu, pala memiliki luas 3.096,30 hektare dengan produksi 535,95 ton, diproses melalui penjemuran alami serta pelepasaan batok biji. Seluruh komoditas tersebut dipasarkan melalui pedagang pengumpul lokal, yang menjadi penghubung utama antara petani dan pasar, sekaligus menggambarkan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal Buru Selatan.

b. Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan potensi pengembangan yang besar. Didukung oleh kondisi agroklimat yang sesuai, wilayah ini mampu menghasilkan berbagai komoditas seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, subsektor ini berperan dalam peningkatan nilai

ekonomi masyarakat melalui penguatan rantai pasok, pengolahan pascapanen, dan perluasan akses pasar. Optimalisasi produksi hortikultura menjadi strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi daerah. Kondisi produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Buru Selatan disajikan pada **Tabel 2.6** dan **Tabel 2.7**.

Tabel 2.6. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Buru Selatan

Jenis Tanaman	Produksi Tahunan (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	-	0	116	99	111
Bawang Merah	42	142	130	122	208
Bayam	-	114	170	727	472
Buncis	-	181	179	246	300
Cabai Keriting	4	111	110	66	260
Cabai Rawit	70	1.239	1.160	249	1.503
Kacang Panjang	-	540	432	1.238	866
Kangkung	110	612	378	830	450
Kentang	6	110	44	242	136
Ketimun	-	374	220	461	280
Kubis	8	0	0	21	37
Labu Siam	-	220	462	362	251
Petsai	-	90	90	568	397
Terung	-	648	540	1.212	973
Tomat	-	414	306	453	343
Wortel	-	0	0	71	105
Petai	-	44	45	303	308

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Buru Selatan periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dengan variasi tren antar komoditas, baik pada kelompok sayuran maupun buah-buahan. Pada kelompok sayuran, komoditas cabai rawit, terung, dan bawang merah mencatat peningkatan signifikan hingga tahun 2024, disusul oleh bayam, kacang panjang, dan petsai yang mengalami lonjakan pada 2023. Sementara itu, kubis dan wortel mulai dibudidayakan sejak 2023, menandakan adanya perluasan jenis tanaman hortikultura. Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti kangkung, ketimun, dan labu siam menunjukkan penurunan produksi pada tahun terakhir, sehingga diperlukan optimalisasi teknik budidaya dan pengelolaan lahan.

Pada kelompok buah-buahan, komoditas unggulan seperti durian, mangga, pisang, dan duku/langsat memperlihatkan peningkatan produksi yang konsisten, mencerminkan potensi besar pengembangan hortikultura tropis di wilayah ini. Beberapa komoditas lain seperti pepaya, rambutan, dan jambu air juga menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, sedangkan tanaman seperti salak, nangka, dan manggis mengalami fluktuasi produksi. Secara keseluruhan, subsektor hortikultura di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan arah pertumbuhan yang positif dan semakin beragam, dengan peluang peningkatan nilai ekonomi melalui penguatan rantai pasok, pengolahan pascapanen, serta perluasan akses pasar berbasis sumber daya lokal.

Tabel 2.7. Produksi Buah-Buahan dan Sayuran (Kuintal) Kabupaten Buru Selatan

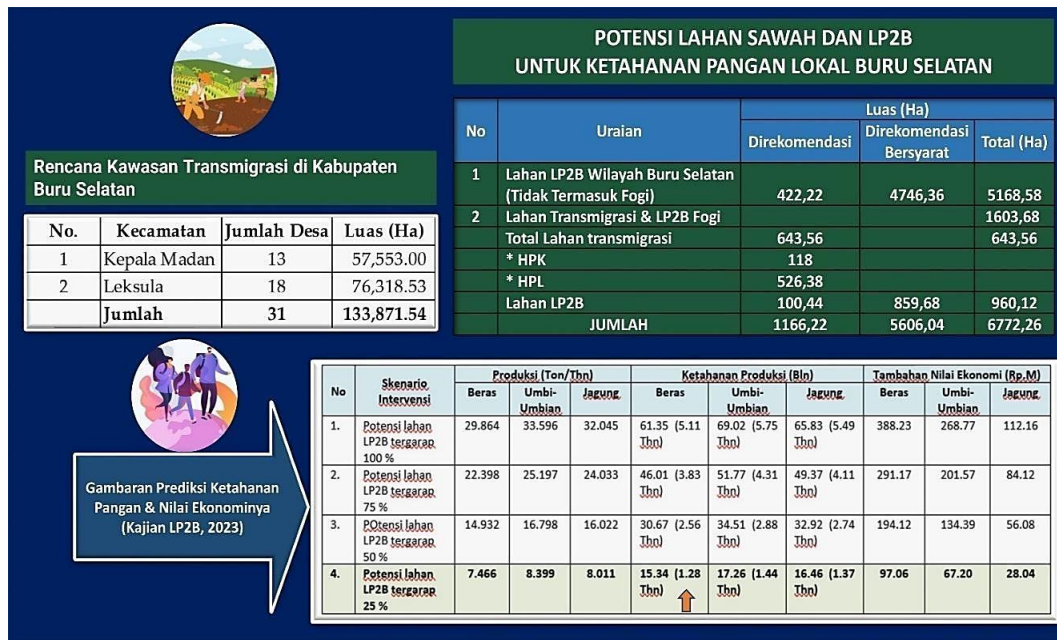
Jenis Tanaman	Produksi Tahunan (kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	-	224	252	557	464
Belimbing	-	102	108	50	61
Duku/Langsar/Kokosan	-	289	306	564	680
Durian	-	357	378	1.066	1.346
Jambu Air	-	85	90	168	353
Jambu Biji	-	102	108	272	247
Jeruk Pamelor	-	171	180	60	140
Jeruk Lemon	-	0	0	97	17
Jeruk Siam/Keprok	-	160	171	427	228
Mangga	-	389	396	694	889
Manggis	-	187	198	678	290
Nanas	-	218	220	371	411
Nangka/Cempedak	-	410	414	570	390
Pepaya	-	202	216	359	751
Pisang	-	1.306	1.471	2.311	1.713
Rambutan	-	117	119	307	337
Salak	-	113	121	34	104
Sawo	-	0	0	0	0
Sirsak	-	11	13	29	30
Sukun	-	151	158	120	130

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025

c. Potensi Pengembangan Tanaman Pangan Utama

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan lokal, terutama melalui pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan transmigrasi. Berdasarkan hasil kajian LP2B tahun 2023, total lahan yang direkomendasikan untuk pengembangan mencapai 6.772,26 hektar, terdiri atas 5.168,58 hektar lahan LP2B wilayah Buru Selatan (tidak termasuk Fogi) dan 1.603,68 hektar lahan transmigrasi serta LP2B Fogi. Dari total tersebut, 1.166,22 hektar direkomendasikan langsung untuk dikembangkan, sementara 5.606,04 hektar bersifat rekomendasi bersyarat.

Simulasi skenario intervensi terhadap lahan LP2B menunjukkan bahwa jika lahan potensial dimanfaatkan 100%, maka dapat menghasilkan 29.864 ton beras, 33.596 ton umbi-umbian, dan 25.045 ton jagung per tahun, dengan ketahanan produksi mencapai 63–65 bulan dan tambahan nilai ekonomi lebih dari Rp768 miliar. Bahkan dengan tingkat pemanfaatan 50%, kapasitas produksi masih mampu menghasilkan sekitar 14.932 ton beras dan 12.523 ton umbi-umbian per tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan LP2B dan kawasan transmigrasi di Kabupaten Buru Selatan berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan nilai ekonomi masyarakat, serta diversifikasi sumber pangan berbasis lahan lokal.



Gambar 2.6. Potensi Lahan Sawah dan LP2B untuk Ketahanan Pangan Lokal di Kabupaten Buru Selatan

Potensi Peternakan

Peternakan adalah sektor penting yang memiliki berbagai potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Produk dari sektor peternakan memberikan sumber protein hewani: daging sapi, ayam, kambing, dan babi adalah sumber protein hewani utama yang penting untuk gizi masyarakat. Produk Susu Segar dan Produk Olahan Susu. Produk Telur Ayam merupakan sumber protein hewani murah dan mudah diakses.

Tabel 2.8. Jumlah Populasi Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan (ekor)

Kecamatan	Sapi Bali	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Itik Manila
Kepala Madan	422	203	3.835	122	38.487	1.208
Leksula	842	-	444	2.268	5.245	661
Fena Fafan	451	-	154	1.153	2.626	175
Namrole	616	40	304	193	228.685	1.926
Waesama	545	16	799	91	166.05	3.125
Ambalau	389	-	1.735	-	250.978	1.447
Buru Selatan	3.265	259	7.271	3.827	692.071	8.542

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka 2024

Subsektor peternakan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan potensi yang cukup besar dengan sebaran populasi ternak yang bervariasi antar kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah ternak yang tercatat meliputi 3.265 ekor sapi Bali, 259 ekor kerbau, 7.271 ekor kambing, 3.827 ekor babi, 692.071 ekor ayam kampung, dan 8.542 ekor itik Manila. Populasi unggas, khususnya ayam kampung, mendominasi struktur peternakan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Namrole dan Ambalau, masing-masing mencapai 228.685 ekor dan 250.978 ekor.

Untuk ternak besar, Kecamatan Leksula mencatat jumlah sapi Bali tertinggi sebanyak 842 ekor, sedangkan Kecamatan Kepala Madan unggul dalam populasi kambing dengan 3.835 ekor. Populasi kerbau relatif kecil dan tersebar di beberapa kecamatan, terutama Kepala Madan dan Namrole. Sementara itu, ternak babi cukup signifikan di Leksula dan Fena Fafan, yang juga menunjukkan potensi pengembangan peternakan berbasis komunitas lokal. Secara umum, pola distribusi ini menggambarkan bahwa subsektor peternakan di Kabupaten Buru Selatan memiliki diversifikasi komoditas yang kuat dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penguatan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya lokal.

Perikanan

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi perikanan yang besar yang berasal dari dua sumber utama: perikanan laut dan perikanan darat. Perairan laut di Kabupaten Buru Selatan kaya akan berbagai jenis ikan seperti tuna, cakalang, tongkol, kerapu, dan kakap. Sedangkan perikanan darat berasal dari **Budidaya Ikan Air Tawar. Potensi perikanan laut terbesar terdapat di kecamatan Kepala Madan 3.970.313 ton**, sedangkan perikanan darat hanya terdapat pada Namrole sebesar 1.478 ton.

Tabel 2.9. Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Buru Selatan

Kecamatan	Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepala Madan	5,223.87	5,223.87	3,421.84	3,456.85	3,491.41
Leksula	4,836.30	4,836.30	2,323.40	2,345.68	2,454.79
Fena Fafan	-	-			
Namrole	4,926.10	4,926.10	2,904.72	2,951.57	3,018.87
Waesama	1,789.98	1,789.98	2,199.20	2,224.06	2,275.58
Ambalau	1,206.84	1,206.84	1,558.85	1,588.57	1,600.12
Buru Selatan	17,983.09	17,983.09	12,408.01	12,566.73	12,840.77

Sumber: Buru Selatan Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020-2024 produksi perikanan laut mengalami fluktuasi, dimana produksi perikanan terbesar terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yakni sebesar 17.983,09 ton.

Pada tahun 2024 produksi perikanan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan total produksi mencapai 12.840,77 ton yang berasal dari perikanan laut, dimana kontribusi produksi perikanan terbesar terdapat pada kecamatan Kepala Madan sebesar 3.491,41 ton dan yang terkecil pada kecamatan ambalau sebesar 1.600,12 ton.

Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor 6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020, total luasan kawasan hutan di Kabupaten Buru Selatan mencapai 379.571,04 hektar, atau sekitar 75,01 persen dari total luas wilayah daratan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Buru Selatan berada dalam fungsi kawasan hutan dengan karakter ekosistem yang masih terjaga relatif baik.

Secara spasial, pembagian fungsi kawasan hutan di Kabupaten Buru Selatan meliputi:

- Hutan Lindung seluas 75.531,80 hektar, berfungsi utama sebagai kawasan penyangga tata air, pelindung keanekaragaman hayati, dan pengendali erosi;
- Hutan Produksi Terbatas seluas 103.846,48 hektar, yang dimanfaatkan secara selektif dengan prinsip kelestarian untuk komoditas hasil hutan kayu dan non-kayu;
- Hutan Produksi Tetap seluas 92.300,15 hektar, yang berpotensi menjadi sumber bahan baku industri berbasis kayu melalui pengelolaan hutan lestari; dan
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 79.565,12 hektar, yang dapat dialokasikan bagi kegiatan pembangunan lain di luar kehutanan melalui mekanisme perencanaan tata ruang.

Adapun Areal Penggunaan Lain (APL) di Pulau Buru secara keseluruhan tercatat seluas 28.327,49 hektar, yang menjadi ruang utama bagi aktivitas pertanian, permukiman, dan pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah.

Dari sisi potensi produksi, hasil hutan kayu yang paling dominan di Kabupaten Buru Selatan adalah kayu bulat jenis Meranti, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bahan utama industri pengolahan kayu di tingkat lokal maupun regional. Sementara itu, hasil hutan non-kayu yang menonjol adalah minyak kayu putih, yang dihasilkan dari penyulingan daun pohon kayu putih (*Melaleuca cajuputi*) dan memiliki prospek pengembangan industri berbasis bioekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, subsektor kehutanan termasuk dalam kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru Selatan. Selama lima tahun terakhir, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan nilai tambah bruto. Pada tahun 2024, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Buru Selatan tercatat mencapai 36 persen, menegaskan peran strategisnya sebagai penggerak utama ekonomi gugus Pulau Buru.

Potensi kehutanan yang besar ini, apabila dikelola secara terpadu dengan subsektor pertanian dan perkebunan, dapat memperkuat ketahanan ekologis dan ekonomi daerah, sekaligus mendukung agenda pembangunan hijau (*green economy*) serta penerapan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan.

Parawisata

Salah satu sektor strategis di Buru Selatan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi adalah parawisata. Potensi yang dimiliki meliputi Pantai, Terumbu Karang, Ekosistem

Laut dan Darat serta Warisan Budaya yang unik. Sektor ini dapat digerakan untuk peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya seperti transportasi, perhotelan dan kuliner. Buru Selatan memiliki 37 potensi wisata yaitu potensi bahari, alam, sejarah dan budaya. Parawisata berperan penting dalam mempromosikan identitas Buru Selatan dan Provinsi Maluku di kancah Global dan mendukung pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Potensi Wisata Pantai yang cukup dikenal Adalah Pantai Wamsoba, Pulau Oki, Teluk Tifu, Pantai Masnana dan Air Terjun Babunyi. Sebaran potensi parawisata sebagai berikut:

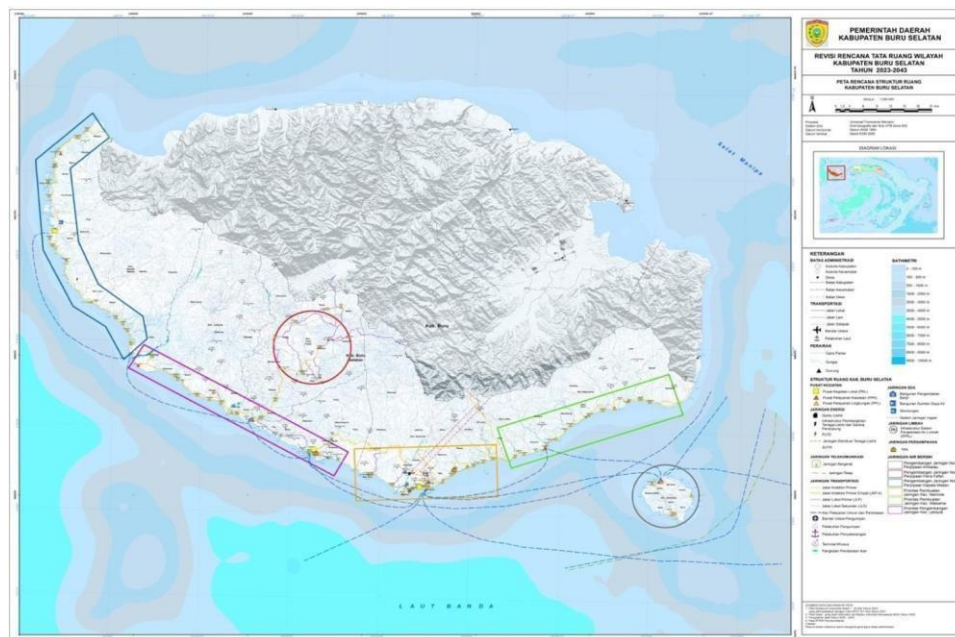
- Potensi Wisata Bahari: 8
- Potensi Wisata Alam: 21
- Potensi Wisata Sejarah/Budaya: 8

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai RTRW Kabupaten Buru Selatan

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.



Gambar 2.7. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

2. Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pengembangan sistem perkotaan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi berbasis pertanian lahan kering. Pengembangan sistem kota-kota juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya; baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Buru Selatan maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Maluku.

Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Buru Selatan adalah sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pengembangan hirarki kota di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan pada arahan kebijakan nasional dan provinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Buru Selatan. Hirarki sistem pusat-pusat permukiman bagi Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, dan Desa Kamanglale memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala, memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima

memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Tabel 2.10. Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan

RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023-2043	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Fatmite dan Desa Kamanglale;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di seluruh Desa;	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Tabel 2.11. Dasar Pertimbangan Penetapan Fungsi Kota dalam Pusat-Pusat Permukiman di Kabupaten Buru Selatan

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2015	RTRW PROVINSI DI KABUPATEN BURU SELATAN	REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023
Sistem Pusat-Pusat Permukiman		
PKWp Namrole	PKL Namrole	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale
PKL Leksula	PKL Leksula	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi
PPL Fogi (Kecamatan Kepala Madan)	PKL Kepala Madan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala
PPK Biloro (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro,
PPK Wamsisi (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi,
PPL Waemulang (Kecamatan Leksula)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang,
PPL Tifu (Kecamatan Leksula)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu,
PPL Ulima (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima
PKLp Waekatin (Kecamatan Fena Fafan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Elfule (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Lena (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Elara (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Nanali (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Sekat (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Fakai (Kecamatan Fena Fafan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Labuang (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Wamkana (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Waetawa (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Lumoy (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

Kawasan perkotaan dalam hal ini adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Energi

Ketahanan energi listrik di Kabupaten Buru Selatan merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pertumbuhan sektor ekonomi dan industri. Sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang, penyediaan dan pemerataan akses terhadap energi listrik masih menjadi tantangan utama. Ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis diesel yang tidak efisien dan mahal, serta keterbatasan infrastruktur jaringan distribusi, menyebabkan pasokan listrik belum sepenuhnya stabil dan merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, penguatan ketahanan energi listrik di Buru Selatan memerlukan strategi berkelanjutan yang mencakup diversifikasi sumber energi, terutama pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro, pengembangan infrastruktur kelistrikan, serta peningkatan kapasitas institusi pengelola energi di tingkat lokal.

Tabel 2.12. Produksi dan Konsumsi Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Buru Selatan, 2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Terpasang (kVA)	-	-	-	-	14.05
Produksi Listrik (kWh)	-	-	-	-	15,262,353
Listrik Terjual (kWh)	-	-	-	-	13,710,170
Dipakai Sendiri (kWh)	-	-	-	-	211,145
Susut/Hilang (kWh)	-	-	-	-	1,341,038

Sumber: ULP PLN Namrole, 2025

Produksi listrik PT PLN (Persero) Cabang Namrole Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 sebesar 15.262.353 kWh. Sementara listrik terjual sebesar 13.710.170 kWh. Hal tersebut belum terdistribusi pada Kecamatan Kepala Madan dan Fena Fafan. Kondisi pelanggan Listrik per Kecamatan diperlihatkan pada **Tabel 2.13** berikut.

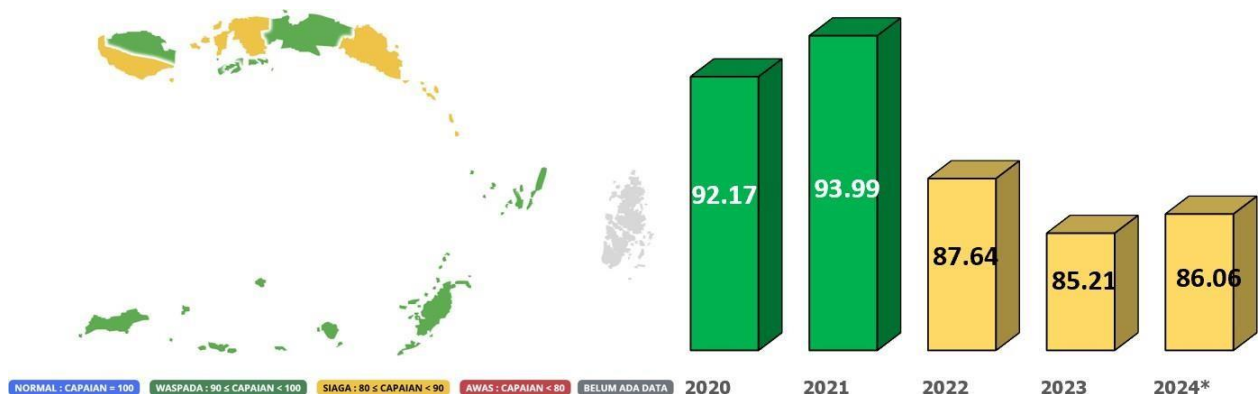
Tabel 2.13. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepala Madan	-	-	-	-	-
Leksula	1.456	2.256	2.527	2.907	3.155
Fena Fafan	-	-	-	-	-
Namrole	2.411	3.599	4.444	5.371	6.268
Waesama	1.299	2.017	2.411	2.827	3.383
Ambalau	636	804	950	1.105	1.182
Buru Selatan	5.802	8.676	10.332	12.210	13.988

Sumber: Buru Selatan dalam Angka, 2025

2. Ketahanan Air

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Buru Selatan dilaksanakan melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan. Sistem perpipaan mencakup unit air baku, produksi, distribusi, pelayanan, dan pengelolaan. Sistem non-perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki, instalasi air kemasan, dan bangunan pelindung mata air, diatur oleh instansi teknis terkait. Pemanfaatan air tanah dan air permukaan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan sistem geologi kawasan, dengan pengaturan batas pemanfaatan untuk menghindari degradasi sumber daya air. Penyediaan air bersih dipadukan dengan sistem sumber daya air dan pengelolaan air limbah secara terpadu guna menjamin kualitas dan keberlanjutan sumber air baku.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti 2025

Sumber: Data Susenas BPS (data diolah)

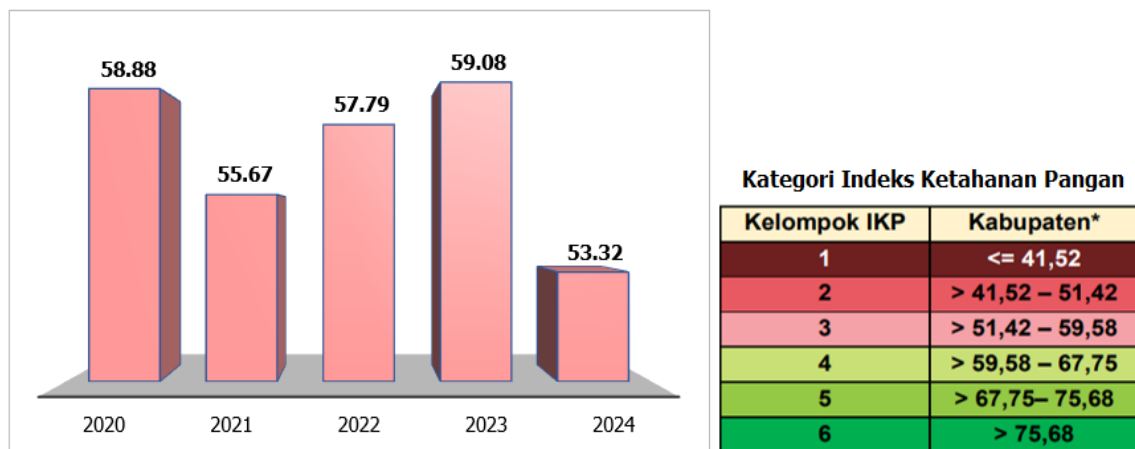
Grafik 2.1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Buru Selatan

Rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Buru Selatan tergolong dalam kategori Siaga.

3. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan merupakan indikator terintegrasi yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan daerah berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pengukuran indeks ini mengacu pada indikator indikator kuantitatif yang mencerminkan kemampuan wilayah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung status gizi dan kesehatan. Penghitungan indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan serta menentukan intervensi yang diperlukan guna meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran indeks ini menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan ketahanan pangan yang lebih terarah dan berbasis data.

Berdasarkan data capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan periode 2019–2024, terlihat adanya pola fluktuatif dengan kecenderungan penurunan pada tahun-tahun tertentu. Sepanjang periode tersebut, nilai IKP berkisar antara 53,32 hingga 59,28, di mana berada dalam kategori IKP 3 (rentang 51,42–59,58). Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 (55,67) dan terutama pada tahun 2024 (53,32), yang mendekati batas bawah kategori. Tren ini mengindikasikan adanya dinamika yang memengaruhi ketahanan pangan daerah, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan.



Sumber: Badan Pangan Nasional (Data diolah 2025)

Grafik 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan

Fluktuasi indeks tersebut mencerminkan adanya tekanan eksternal seperti gangguan distribusi pangan, ketidakstabilan ekonomi, serta perubahan kebijakan sektoral yang berdampak pada aksesibilitas dan kualitas pangan masyarakat. Penurunan pada tahun 2024 perlu mendapat perhatian khusus karena dapat mengarah pada peningkatan kerentanan ketahanan pangan jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan strategis berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap determinan IKP serta penguatan sinergi lintas sektor dalam perencanaan program ketahanan pangan ke depan.

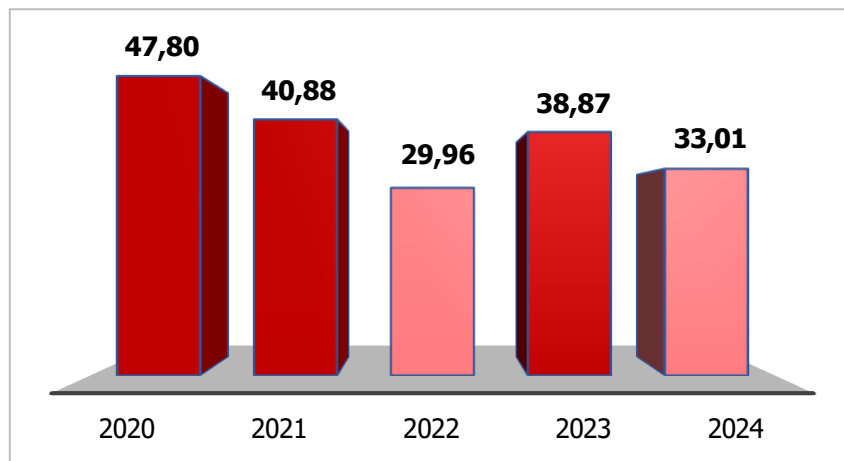
4. Prevalensi ketidakcukupan pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Buru Selatan merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian, yaitu sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Indikator ini memberikan

gambaran mengenai tingkat kerawanan pangan kronis yang dihadapi oleh suatu wilayah, terutama dari sisi keterbatasan akses ekonomi dan fisik terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan pangan berfungsi sebagai salah satu parameter penting dalam menilai efektivitas intervensi program, mengidentifikasi kelompok sasaran prioritas, serta merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan tingkat kerentanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan kecenderungan masih tingginya proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian. Berdasarkan data, prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 47,80%, yang dikategorikan sebagai Sangat Tinggi, dan diperkirakan dipicu oleh gangguan akses pangan akibat pandemi COVID-19 serta penurunan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan hingga 29,96% (kategori Tinggi), yang mengindikasikan adanya perbaikan akses pangan, kemungkinan sebagai hasil dari pemulihan ekonomi dan berbagai intervensi program sosial. Namun, tren kembali meningkat pada tahun 2023 (38,87%) ke kategori Sangat Tinggi, sebelum menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 33,01%, masuk dalam kategori Tinggi. Secara keseluruhan, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Buru Selatan berada dalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi, yang menunjukkan bahwa kerentanan pangan di wilayah ini masih bersifat struktural dan belum sepenuhnya tertangani secara sistemik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah 2025)

Grafik 2.3. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Buru Selatan

Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Buru Selatan masih rentan terhadap tekanan eksternal seperti bencana, gangguan pasokan, dan volatilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi lintas sektor yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, perbaikan sistem logistik dan distribusi, serta penguatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan guna menurunkan prevalensi ketidakcukupan pangan secara konsisten.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

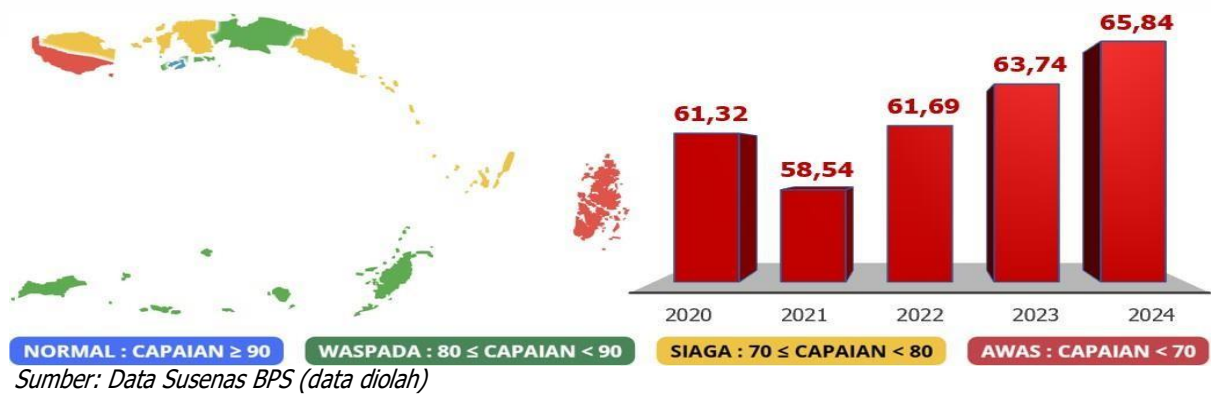
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi dan tekanan terhadap lingkungan hidup di suatu wilayah, dengan mengukur tiga komponen utama yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. IKLH digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan berkelanjutan, serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buru Selatan berada pada angka 83,62 berdasarkan data SITALA Kementerian Lingkungan Hidup, yang mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di wilayah ini masih berada pada kategori baik sehingga upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan harus terus dilakukan melalui penguatan pengawasan pencemaran, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem. Nilai ini mencerminkan adanya tekanan terhadap komponen lingkungan, khususnya pada aspek tutupan lahan dan kualitas air, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, pertambangan, serta perubahan penggunaan lahan yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kelestarian. Rendahnya nilai indeks juga menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan belum optimal, sehingga memerlukan intervensi strategis melalui perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ekosistem lokal. Ke depan, peningkatan IKLH harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Sanitasi yang layak dan aman tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas hidup, tetapi juga berperan dalam menurunkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Di Kabupaten Buru Selatan, upaya peningkatan akses sanitasi menjadi bagian integral dari pembangunan sektor kesehatan dan infrastruktur dasar, seiring dengan komitmen untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang tersebar, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Data rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman tercatat sebesar 61,32 persen. Angka ini mengalami penurunan menjadi 58,54 persen pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak dari berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran infrastruktur sanitasi, tantangan geografis, atau menurunnya efektivitas program intervensi di tingkat komunitas. Namun demikian, pada tahun 2022-2024 terjadi peningkatan menjadi 65,84 persen. Kenaikan tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya pemulihan dan penguatan program sanitasi yang lebih terarah dan adaptif.

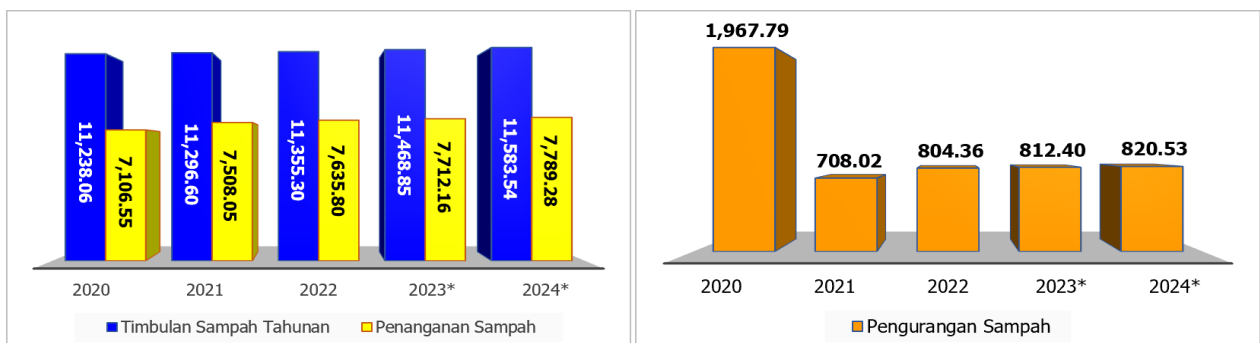


Grafik 2.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Buru Selatan

Meskipun menunjukkan tren positif sampai dengan tahun 2024, capaian tersebut masih berada dalam kategori Awas (Rendah) berdasarkan klasifikasi akses sanitasi aman yang ditetapkan secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Buru Selatan masih menghadapi risiko terhadap sanitasi yang tidak layak, yang dapat berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk integrasi perencanaan lintas sektor, peningkatan literasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk mendukung percepatan pencapaian akses sanitasi aman secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Buru Selatan merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sarana dan prasarana pengolahan yang tersedia. Indikator ini menggambarkan volume sampah yang berhasil diproses melalui berbagai metode, seperti pemilahan, daur ulang, komposting, dan teknologi pengolahan lainnya, sebelum akhirnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dalam konteks pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pencapaian timbulan sampah terolah menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana upaya pengurangan sampah di sumber dan peningkatan efisiensi pengolahan sampah telah berjalan secara optimal. Data ini juga berperan strategis dalam perencanaan kebijakan pengelolaan persampahan yang berbasis data, terintegrasi, dan ramah lingkungan di Kabupaten Buru Selatan.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti 2025

Sumber: SIPSN KEMENLHK (data diolah, 2025)

Grafik 2.5. Timbulan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Buru Selatan

Data pengurangan sampah di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa efektivitas upaya pengurangan masih mengalami dinamika dan belum menunjukkan tren yang konsisten. Pada tahun 2020, volume pengurangan sampah tercatat sebesar 1.967,79 ton, menjadi capaian tertinggi selama periode pengamatan. Nilai ini mengindikasikan adanya intervensi signifikan, baik berupa kampanye pemilahan di sumber, program 3R (reduce, reuse, recycle), maupun optimalisasi fasilitas pengolahan berbasis masyarakat atau skala kecil.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, capaian pengurangan menurun drastis menjadi 708,02 ton pada 2021 dan hanya sedikit meningkat menjadi 804,36 ton pada 2022. Penurunan ini mencerminkan belum kuatnya kelembagaan, keterbatasan sarana pengolahan di tingkat lokal, serta minimnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pengurangan sampah dari sumber.

Jika dibandingkan dengan total timbulan sampah tahunan yang relatif konstan di atas 11.000 ton, maka kontribusi pengurangan sampah terhadap total timbulan masih sangat rendah—berkisar antara 6% hingga 17%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah di Kabupaten Buru Selatan masih belum terintegrasi secara sistemik dan memerlukan penguatan regulasi daerah, insentif berbasis kinerja, serta peningkatan peran aktif masyarakat dan sektor informal.

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi sejumlah kawasan yang berpotensi rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi pantai, tanah longsor, kebakaran hutan, serta gempa tektonik dan vulkanik. Hasil analisis dalam dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa kawasan yang rentan terhadap bencana gempa bumi mencakup wilayah Kecamatan Namrole secara keseluruhan, yang dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi.

Zonasi kawasan berisiko bencana tsunami diidentifikasi mengelilingi pesisir Pulau Buru dan Pulau Ambalau, menjadikan seluruh wilayah pesisir sebagai area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana tsunami. Penekanan khusus perlu diberikan pada kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang tersebar di sepanjang garis pantai Kecamatan Namrole, Wamsisi, dan Ambalau. Beberapa desa di wilayah pesisir ketiga kecamatan tersebut—yakni Desa Namrole, Oki Baru, Pohon Batu, Wamsisi, Wailikut, Waeteba, Uluma, dan Selasi—terklasifikasi memiliki tingkat risiko tinggi terhadap dampak bencana tsunami.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis pengembangan kawasan rentan bencana banjir di Kabupaten Buru Selatan, diketahui bahwa konsentrasi risiko bahaya banjir dominan berada di Kecamatan Namrole, Leksula, dan Waisama, terutama pada wilayah-wilayah yang berada di sekitar muara sungai. Kawasan-kawasan tersebut perlu menjadi fokus dalam perencanaan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem peringatan dini.

2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian akibat kejadian bencana di suatu wilayah. Pengukuran ini didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu tingkat bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Di Kabupaten Buru Selatan, nilai IRB mencerminkan risiko kumulatif terhadap berbagai

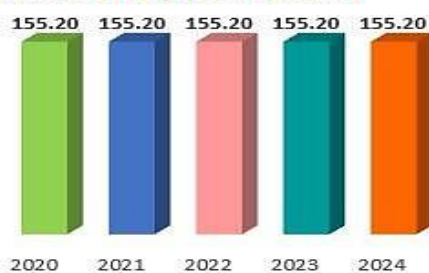
jenis ancaman, antara lain gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem, kekeringan, serta cuaca ekstrem. Risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, karakteristik sosial ekonomi penduduk, serta kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam melakukan mitigasi dan respons terhadap bencana.

Berdasarkan data IRB dari tahun 2015 hingga 2023, Kabupaten Buru Selatan mencatat nilai indeks sebesar 155,20 yang tetap konsisten selama hampir satu dekade. Nilai ini menempatkan wilayah pada kategori **risiko tinggi**, mencerminkan bahwa belum terdapat peningkatan kapasitas adaptif dan ketahanan wilayah yang signifikan selama periode tersebut. Konsistensi ini diperkuat dengan temuan dari indikator **tingkat kapasitas daerah**, yang menunjukkan posisi pada kategori **rendah**, menandakan kelemahan sistemik dalam hal kesiapsiagaan, efektivitas mitigasi, respons cepat darurat, serta sistem pemulihan pascabencana.

Kondisi risiko tersebut semakin diperjelas dengan tingginya proporsi penduduk yang terpapar berbagai bencana. Fakta ini menggambarkan urgensi peningkatan ketahanan masyarakat dan penguatan sistem manajemen risiko bencana secara menyeluruh. Analisis terhadap prioritas kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa seluruh aspek strategis masih berada dalam kategori yang memerlukan penguatan. Ketujuh prioritas nasional, mulai dari perkuatan kelembagaan, kajian risiko terpadu, pengembangan sistem informasi dan logistik, penanganan kawasan rawan, peningkatan efektivitas mitigasi, kesiapsiagaan darurat, hingga sistem pemulihan pascabencana, masih berada pada tingkat implementasi yang terbatas. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat krusial untuk menurunkan nilai IRB dan meningkatkan resiliensi daerah secara signifikan.

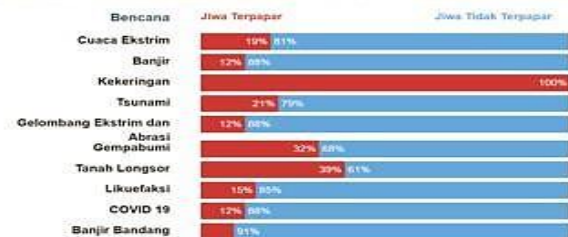
Dengan demikian, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Buru Selatan harus difokuskan pada penguatan kapasitas adaptif lintas sektor, reformulasi kebijakan kelembagaan, serta peningkatan investasi dalam infrastruktur mitigasi dan sistem peringatan dini. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa wilayah memiliki ketahanan yang memadai dalam menghadapi ancaman multihazard, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan.

INDEKS RISIKO BENCANA



KONDISI TAHUN 2024

PERSENTASE JIWA YANG TERPAKAR BENCANA



TINGKAT KAPASITAS DAERAH & PRIORITAS KEBIJAKAN



RENDAH

Sumber: InaRISK, BNPB (Data diolah, 2025)

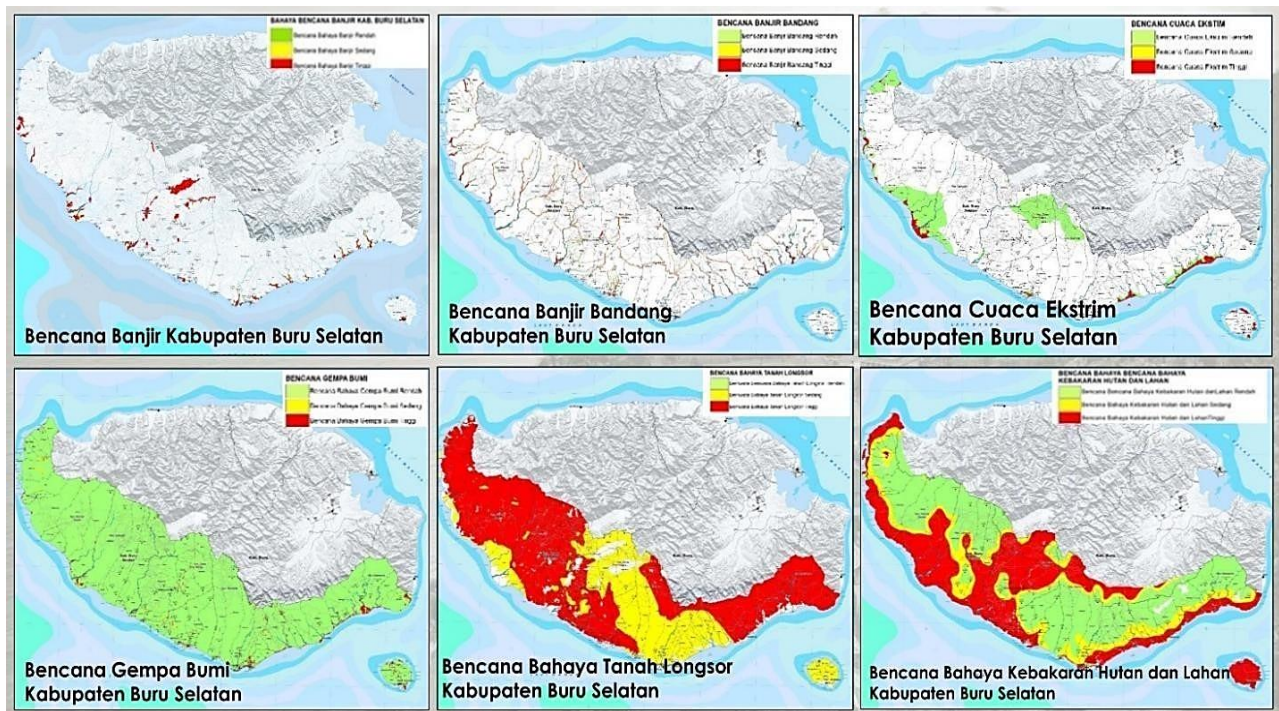


- Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
- Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
- Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Grafik 2.6. Infografis Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan, 2020-2024

Sebagai bagian integral dari upaya perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan spasial yang adaptif dan tanggap terhadap potensi ancaman alam. Infografis yang disusun berdasarkan Laporan Induk KLHS RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023–2043 menyajikan representasi spasial enam jenis bencana utama yang mengancam wilayah ini, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Setiap jenis bencana dipetakan secara visual melalui skema warna yang mengindikasikan tingkat risiko—merah untuk risiko tinggi, kuning untuk sedang, dan hijau untuk rendah—sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebaran spasial ancaman di tingkat lokal.

Peta-peta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi risiko, tetapi juga sebagai dasar evidensial dalam pengambilan keputusan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan terhadap populasi rentan. Identifikasi terhadap wilayah terdampak memungkinkan optimalisasi strategi mitigasi yang spesifik dan berbasis lokasi, seperti pengendalian alih fungsi lahan di zona rawan longsor, penguatan vegetasi penahan di daerah rawan banjir bandang, hingga pengelolaan ekosistem untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dengan memahami distribusi dan intensitas risiko secara spasial, pemerintah daerah dapat merumuskan pendekatan pengelolaan risiko bencana yang lebih terukur, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan iklim serta tekanan pembangunan.



Sumber: Laporan Induk KLHS RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 – 2043

Gambar 2.8. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Buru Selatan

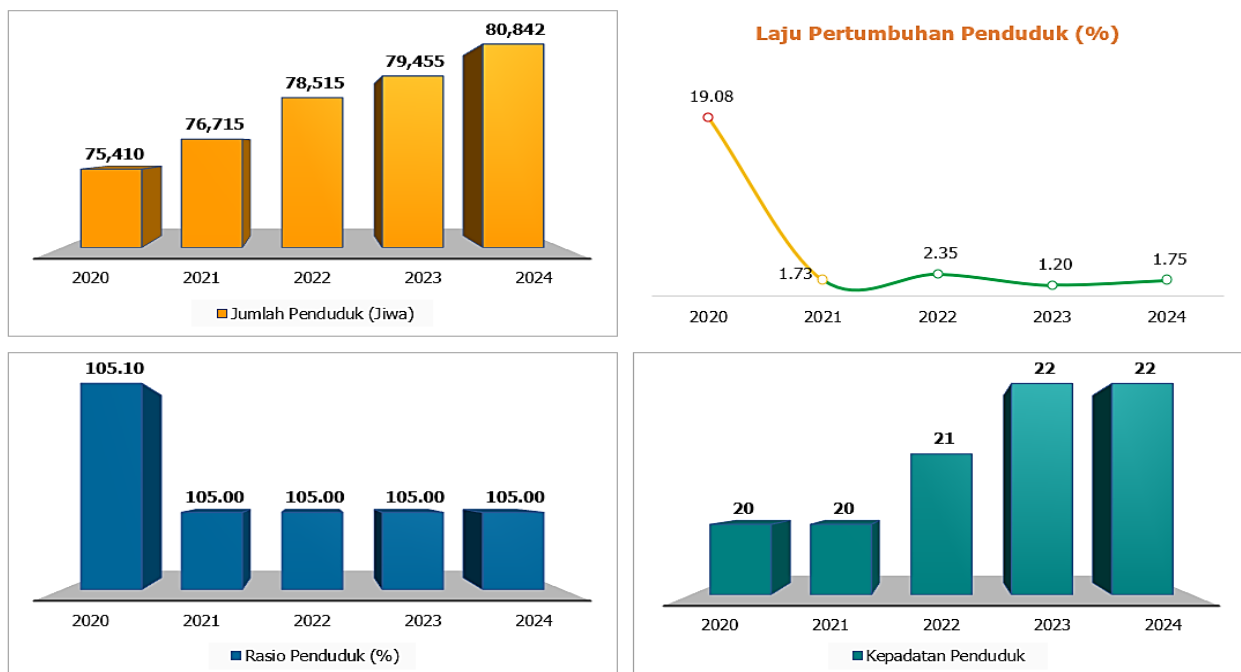
G. Demografi

Memahami kondisi demografi suatu wilayah merupakan langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Karakteristik demografi mencerminkan dinamika kependudukan yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan layanan dasar, kapasitas ekonomi, serta arah pengembangan wilayah. Oleh karena itu, analisis demografi Kabupaten Buru Selatan menjadi penting untuk mengidentifikasi struktur dan distribusi penduduk, laju pertumbuhan, serta karakteristik sosial-ekonomi yang menyertainya. Kajian ini akan menjadi dasar dalam merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun pengembangan wilayah secara umum.

1. Pertumbuhan Penduduk

Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup dinamis selama periode 2019–2024. Jumlah penduduk meningkat secara konsisten dari 63.328 jiwa pada tahun 2019 menjadi 80.842 jiwa pada tahun 2024. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2020, dengan laju pertumbuhan mencapai 19,08 persen, yang mengindikasikan kemungkinan adanya peristiwa demografis khusus, seperti peningkatan mobilitas penduduk atau penyesuaian data kependudukan akibat intensifikasi pencatatan administratif. Setelah tahun tersebut, laju pertumbuhan kembali stabil di kisaran 1–2 persen per tahun.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif seimbang, tercermin dari rasio jenis kelamin yang konsisten berada pada kisaran 105 persen selama lima tahun terakhir. Sementara itu, kepadatan penduduk menunjukkan tren peningkatan moderat dari 17 jiwa per km² pada tahun 2019 menjadi 22 jiwa per km² pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perubahan dalam distribusi penduduk yang dapat berdampak pada tekanan terhadap ruang dan ketersediaan layanan dasar, khususnya di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Grafik 2.7. Infografis Kondisi Kependudukan di Kabupaten Buru Selatan

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif seimbang, tercermin dari rasio jenis kelamin yang konsisten berada pada kisaran 105 persen selama lima tahun terakhir. Sementara itu, kepadatan penduduk menunjukkan tren peningkatan moderat dari 17 jiwa per km² pada tahun 2019 menjadi 22 jiwa per km² pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perubahan dalam distribusi penduduk yang dapat berdampak pada tekanan terhadap ruang dan ketersediaan layanan dasar, khususnya di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi.

Tabel 2.14. Komposisi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan

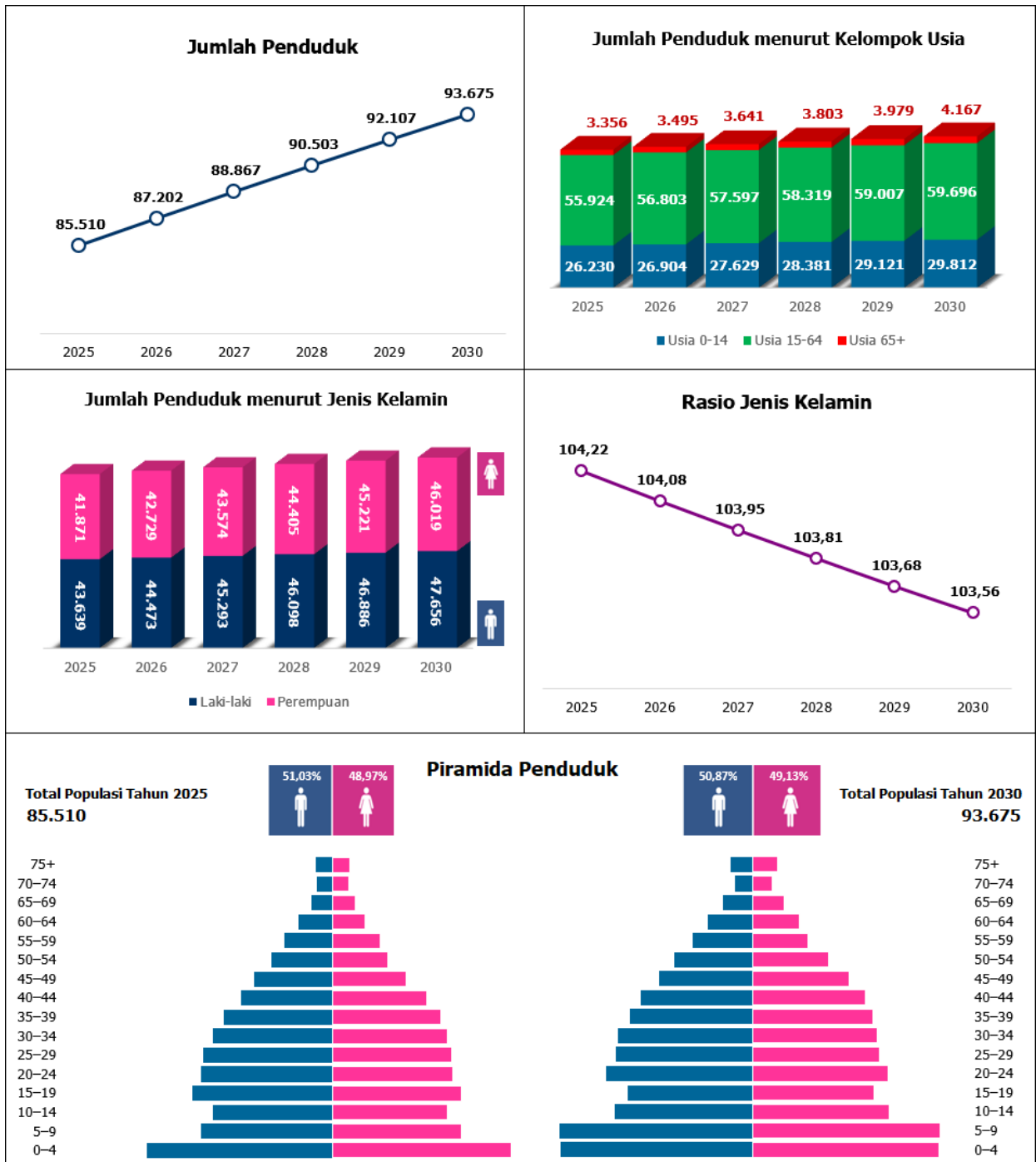
Kabupaten/ Kota	Persentase dan Kepadatan Penduduk per km ²									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Persentase	Kepadatan	Persentase	Kepadatan	Persentase	Kepadatan	Persentase	Kepadatan	Persentase	Kepadatan
Kepala Madan	16,19	9,57	16	15	16	15	16,44	10,18	16,21	13,83
Leksula	18,66	7,44	19	15	19	15	18,06	7,51	18,10	10,37
Fena Fafan	5,18	7,39	5	5	5	5	5,45	8,15	5,60	11,54
Namrole	27,68	64,03	28	37	28	37	28,31	68,63	28,62	95,56
Waesama	20,15	20,99	20	26	20	26	20,06	21,90	19,96	30,01
Ambalau	12,14	29,92	12	139	12	139	11,67	30,15	11,51	40,93

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS) 2024

Kondisi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan memberikan gambaran rinci mengenai dinamika kependudukan di tingkat wilayah administratif terkecil. Informasi ini menjadi dasar penting dalam memahami variasi pertumbuhan penduduk antar kecamatan, serta tingkat tekanan penduduk terhadap daya dukung lahan dan infrastruktur yang tersedia. Melalui analisis laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk, dapat diidentifikasi wilayah-wilayah dengan kecenderungan peningkatan populasi yang signifikan maupun wilayah yang relatif stagnan. Pemahaman ini diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, baik dalam konteks penyediaan layanan dasar, perencanaan penggunaan lahan, maupun strategi pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Buru Selatan.

2. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 dan perkembangannya diperlihatkan pada grafik berikut ini.



Sumber: Proyeksi PSP&K 2025

Grafik 2.8. Infografis Proyeksi Penduduk di Kabupaten Buru Selatan, 2025-2029

3. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Buru Selatan merupakan bagian integral dari konfigurasi sosial budaya Pulau Buru yang bercorak multi-etnis dan multikultural. Komposisi penduduk di wilayah ini tidak hanya mencakup komunitas asli Pulau Buru (Geba Bupolo), tetapi juga mencakup kelompok pendatang seperti etnis Buton, Maluku Utara, Bugis, Timor, Kei, Seram, Tionghoa, dan Jawa yang menetap terutama di kawasan pesisir dan ibu kota kecamatan. Sementara itu, masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan pada umumnya merupakan penduduk asli yang mempertahankan identitas dan tradisi lokal secara kuat.

Secara historis, masyarakat Buru merupakan bagian dari rumpun suku Alifuru yang diyakini terbentuk dari percampuran ras Kaukasoid, Mongoloid, Arab, dan Papua. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi berbagai sub-suku seperti Alune dan Waemale, yang masing-masing menyebar ke berbagai wilayah di Maluku. Identitas genealogis masyarakat adat di Buru Selatan terpelihara melalui sistem kekerabatan berbasis marga atau fena, yang memiliki peran dominan dalam penguasaan wilayah, pelestarian nilai-nilai adat, serta pembentukan pemerintahan adat lokal.

Pembagian marga di Buru Selatan secara historis menentukan struktur sosial dan penguasaan tanah adat. Tanah di Pulau Buru dimiliki secara komunal oleh masing-masing fena dan diwariskan turun-temurun, sementara struktur pemerintahan adat berlapis terbentuk dari kepala-kepala soa hingga figur pemimpin tertinggi seperti Mat Gugul. Sistem kepemimpinan ini mencakup fungsi administratif, spiritual, hingga keamanan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh adat seperti Matlea, Geb'puji, Geba'rama, Henolon, hingga Emmrimu.

Masyarakat adat di kawasan Danau Rana dan pegunungan bagian dalam umumnya masih menganut pola hidup nomaden, dengan penghidupan berbasis pertanian ladang berpindah dan perburuan. Bahasa lokal seperti Lipa-Liam dan Liam-Garam digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun upacara adat, menunjukkan pelestarian identitas linguistik yang khas. Di sisi lain, masyarakat pesisir lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan mayoritas telah memeluk agama Islam, membentuk dinamika sosial keagamaan yang khas di Buru Selatan.

Dalam konteks struktur hukum adat, masyarakat Buru terbagi dalam empat petuanan utama—Kaiely, Liliy, Tagalisa, dan Leisela—masing-masing dipimpin oleh seorang Raja dan membawahi sejumlah soa dan marga. Struktur kelembagaan adat ini memiliki legitimasi kultural yang tinggi, dan diakui dalam sistem penyelesaian konflik lokal melalui mekanisme musyawarah adat serta pemberlakuan sanksi berbasis norma kolektif. Wilayah-wilayah hukum adat seperti Petuanan Kaiely memiliki struktur kewilayahan dan pembagian kekuasaan yang terdefinisi dengan jelas, mencakup batas-batas geografis, distribusi penguasaan tanah, serta pengelolaan sumber daya alam secara adat.

Secara keseluruhan, eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Buru Selatan tidak hanya mencerminkan keberlanjutan warisan budaya leluhur, tetapi juga memainkan peran penting dalam sistem sosial-politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta pelestarian harmoni sosial berbasis nilai-nilai tradisional.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

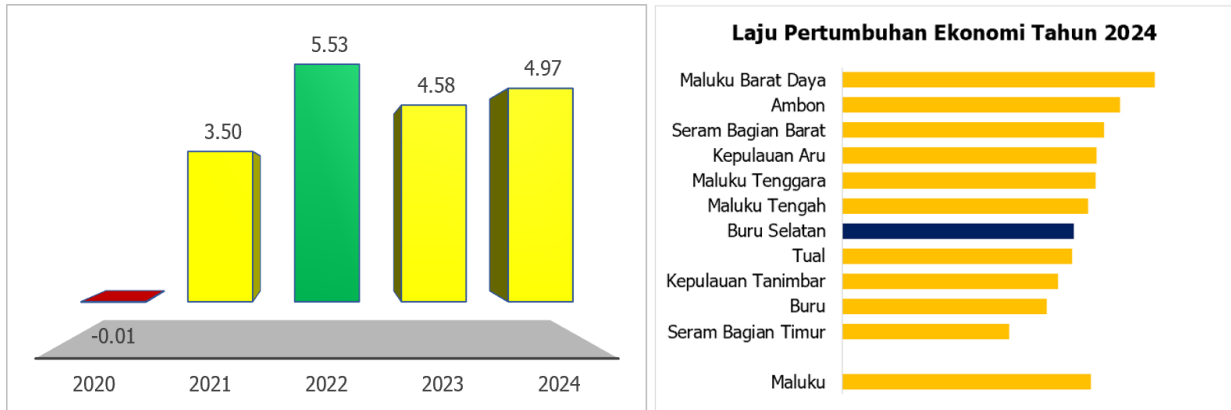
A. Kesejahteraan Ekonomi

Aspek Kesejahteraan ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat melalui pengukuran pencapaian beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini mencerminkan dinamika pembangunan yang terus berlangsung, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan

infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Buru Selatan menunjukkan tren yang positif, didorong oleh peningkatan produksi komoditas unggulan serta dukungan program pembangunan daerah. Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi yang tepat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

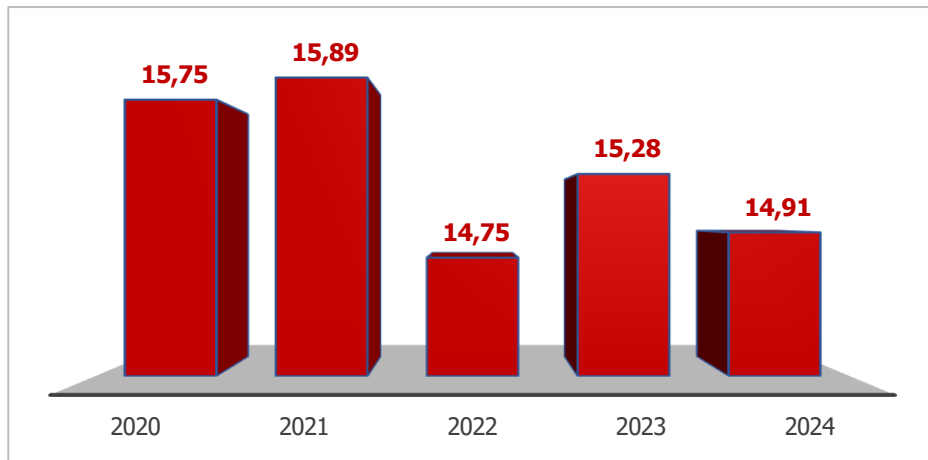
Grafik 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan

Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dalam enam tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika perekonomian daerah. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,01 persen, yang disebabkan oleh faktor Pandemi COVID. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan menjadi 4,97 persen.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya proses pemulihan dan stabilisasi ekonomi pascapandemi, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat pertumbuhan optimal. Pada tahun 2024, Kabupaten Buru Selatan berada di peringkat ke-7 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku dalam hal laju pertumbuhan ekonomi. Posisi ini menunjukkan kinerja ekonomi yang moderat, dengan ruang perbaikan yang masih terbuka lebar, terutama melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta perbaikan konektivitas dan infrastruktur pendukung ekonomi daerah.

2. Tingkat Kemiskinan

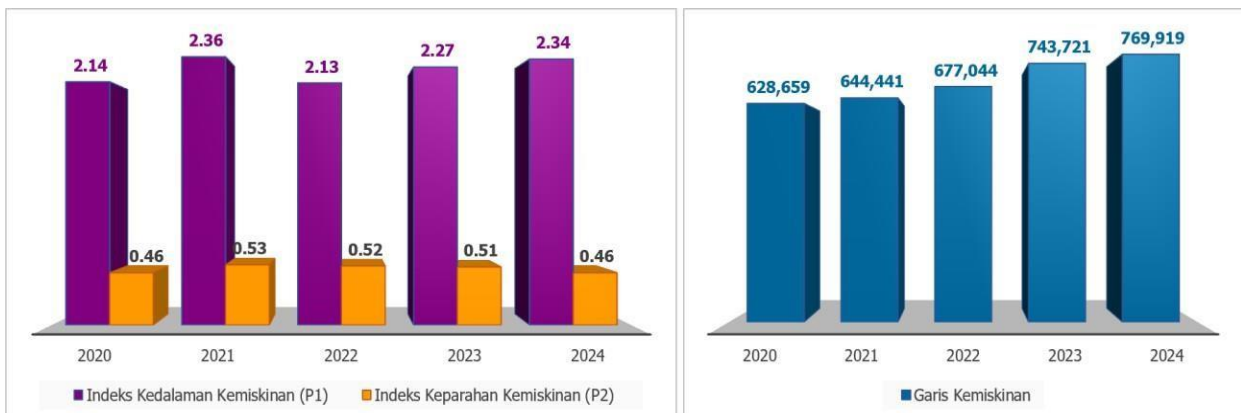
Indikator angka kemiskinan merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas intervensi pembangunan sosial ekonomi di suatu wilayah. Angka ini menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik dari sisi konsumsi pangan maupun non-pangan. Selain menunjukkan jumlah dan proporsi penduduk miskin, indikator ini juga sering dianalisis bersama dengan indikator lain seperti kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dalam konteks perencanaan pembangunan, angka kemiskinan berfungsi sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan serta sebagai acuan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

Grafik 2.10. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buru Selatan

Analisis terhadap data persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan secara umum. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 15,75 persen dan berhasil ditekan menjadi 14,91 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, pola penurunan tersebut tidak bersifat linier. Tahun 2021 mencatat persentase tertinggi dalam 5 tahun terakhir, sebaliknya tahun 2022 merupakan capaian terbaik dalam 5 tahun terakhir dimana kemiskinan ditekan hingga 14,75 persen. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya dinamika sosial ekonomi yang kompleks, termasuk kemungkinan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas, dampak pandemi, serta efektivitas program perlindungan sosial.



Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, BPS (data diolah, 2025)

Grafik 2.11. Kedalaman, Keparahan, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan

Indikator kedalaman kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, meningkat dari 2,14 pada tahun 2020 menjadi 2,34 pada tahun 2024, dengan nilai tertinggi tercatat sebesar 2,36 pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sehingga

upaya untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan menjadi lebih menantang.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memperhitungkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan, yaitu stagnan pada angka 0,46 pada tahun 2019 dan 2024. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,53. Hal ini mencerminkan bahwa kemiskinan tidak hanya lebih dalam, tetapi terjadi juga ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan, dengan sebagian penduduk miskin berada dalam kondisi yang jauh lebih parah dibandingkan yang lain.

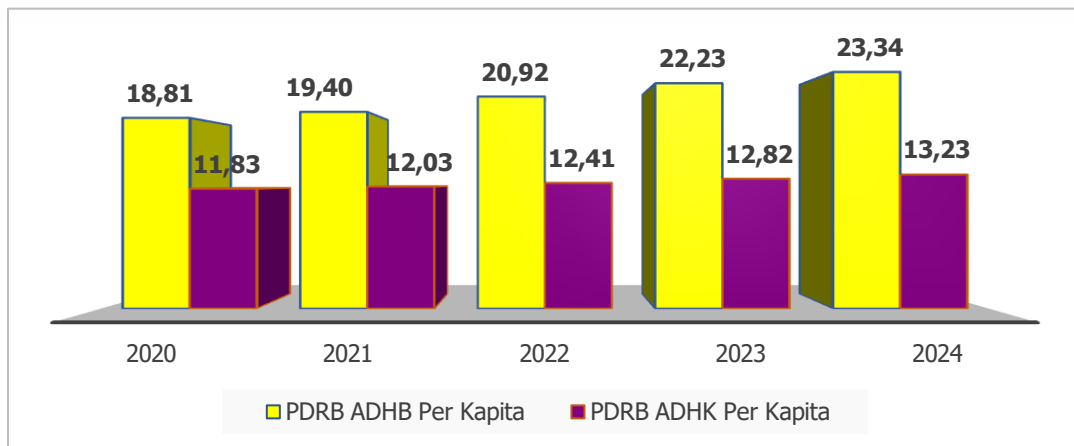
Di sisi lain, kenaikan garis kemiskinan dari Rp. 628.659 pada tahun 2020 menjadi Rp. 769.919 pada tahun 2024 mencerminkan meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi yang semakin besar, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini memperkuat urgensi kebijakan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga memperkecil kedalaman dan keparahannya secara struktural.

Dinamika kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Meskipun angka kemiskinan secara persentase menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun ke tahun, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan dan konsentrasi kemiskinan ekstrem. Kondisi ini mencerminkan bahwa intervensi yang telah dilakukan sejauh ini berdampak, namun masih memerlukan penguatan dari sisi ketepatan sasaran, keberlanjutan, dan cakupan kebijakan.

3. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dan menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Buru Selatan, PDRB per kapita memberikan informasi penting mengenai kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan wilayah serta distribusi hasil pembangunan kepada penduduk. Perubahan nilai PDRB per kapita dari waktu ke waktu tidak hanya mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, analisis terhadap PDRB per kapita sangat krusial dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi nasional maupun kondisi lokal. Berdasarkan data atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan, dari Rp. 18,81 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 23,34 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan nominal ekonomi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga-harga umum. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) — tanpa pengaruh inflasi — terjadi penurunan dari Rp. 11,83 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 13,23 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara riil, daya beli dan output ekonomi per kapita mengalami kontraksi. Dengan kata lain, meskipun nilai nominal ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi riil justru melambat, menunjukkan adanya penurunan produktivitas atau stagnasi dalam kegiatan ekonomi riil di daerah tersebut.



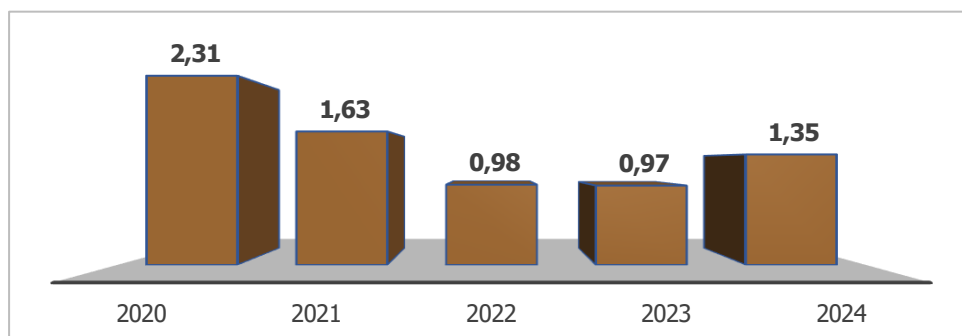
Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

Grafik 2.12. PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan

Pada tahun 2020 merupakan kondisi terendah dalam 5 tahun terakhir, mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Meski demikian, tren pemulihan terlihat mulai tahun 2021, dengan pertumbuhan bertahap setiap tahunnya. Ketidakeimbangan antara laju kenaikan ADHB dan ADHK juga menunjukkan kemungkinan adanya tekanan inflasi atau pergeseran struktur ekonomi yang belum sepenuhnya menciptakan nilai tambah secara riil. Dalam konteks perencanaan pembangunan, data ini memberikan dasar kuat bagi perlunya penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, seperti pertanian dan perikanan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, TPT mencerminkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini tidak hanya merefleksikan dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap TPT menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan berkelanjutan, khususnya dalam rangka memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat daerah.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

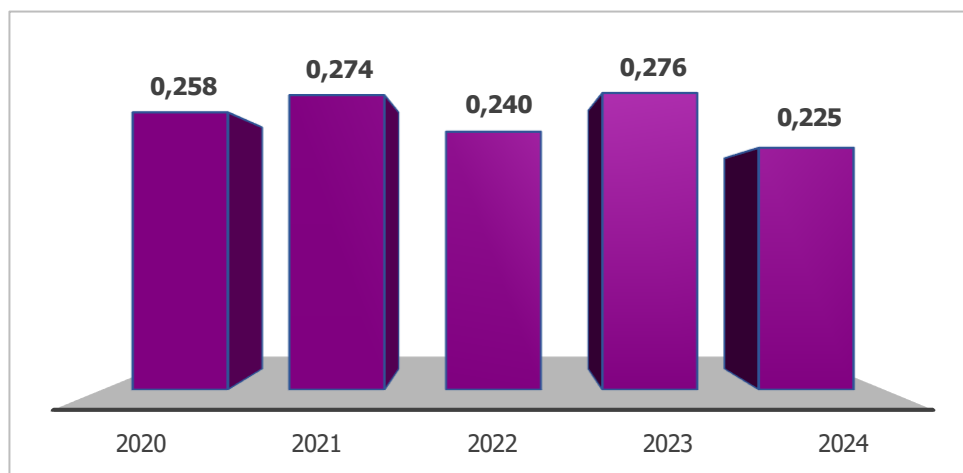
Grafik 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2023, dari 2,38% menjadi 0,97%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi lokal serta implementasi program-program pemberdayaan tenaga kerja yang relatif efektif. Namun, kenaikan kembali TPT pada tahun 2024 menjadi 1,35% memberikan sinyal potensi hambatan struktural dalam penciptaan lapangan kerja, baik akibat perubahan komposisi sektor ekonomi dominan, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, maupun faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi regional.

5. Indeks Gini

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi suatu wilayah. Salah satu alat ukur yang umum digunakan adalah Indeks Gini, yang merepresentasikan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari pemerataan sempurna. Di Kabupaten Buru Selatan, penghitungan Indeks Gini menjadi dasar dalam menilai kondisi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Indeks Gini Kabupaten Buru Selatan dalam enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah, dengan nilai berada di bawah 0,4. Nilai Indeks Gini tercatat sebesar 0,258 pada tahun 2020 dan menurun ke titik terendah pada tahun 2024 dengan nilai 0,225. Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Buru Selatan relatif terkendali. Penurunan nilai Indeks Gini pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan membaiknya distribusi pendapatan masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan efektivitas program-program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ekonomi, perluasan akses terhadap layanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi lokal.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

Grafik 2.14. Indeks Gini Kabupaten Buru Selatan

Meskipun demikian, fluktuasi nilai antar tahun menandakan perlunya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang pro-pemerataan dan inklusif. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran tetap menjadi prioritas dalam menjaga dan menurunkan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan penduduk suatu wilayah dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Kabupaten Buru Selatan, IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai IPM mencerminkan sejauh mana penduduk memperoleh akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oleh karena itu, pencapaian IPM menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2020–2024, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Nilai IPM tercatat sebesar 66,14 pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 66,25 pada tahun 2021, 66,81 pada tahun 2022, 67,68 pada tahun 2023, dan mencapai 68,54 pada tahun 2024. Adapun nilai tahun 2019 sebesar 64,42 dihitung berdasarkan metode lama dan tidak dapat dibandingkan secara langsung.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

Grafik 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan

Tren positif pertumbuhan IPM dalam lima tahun terakhir (2020–2024) mencerminkan perbaikan di tiga dimensi utama IPM, yakni peningkatan angka harapan hidup, peningkatan rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian IPM Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 berada di bawah IPM Provinsi Maluku, yakni berada pada posisi 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

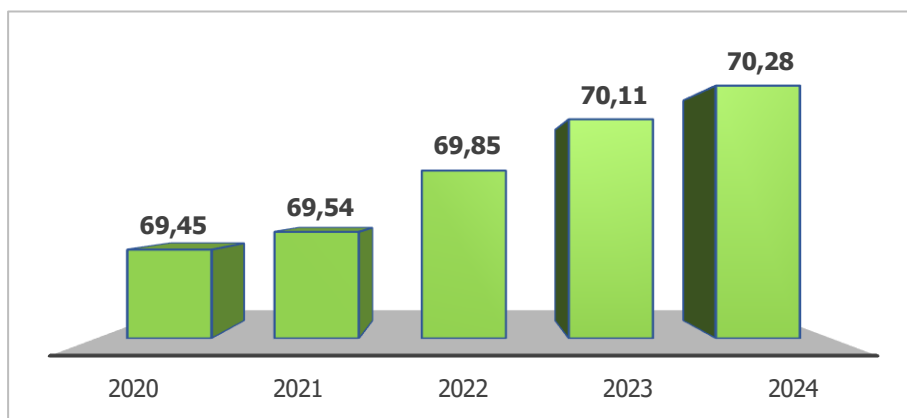
Capaian ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk. Meskipun demikian, nilai IPM masih berada pada kategori —sedang|| dan memberikan kontribusi

yang rendah bagi peningkatan IPM Provinsi Maluku, sehingga diperlukan penguatan intervensi kebijakan yang lebih terfokus, terutama untuk mempercepat transisi ke kategori —tinggi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan kesempatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH menggambarkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola mortalitas saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. Di Kabupaten Buru Selatan, Usia Harapan Hidup menjadi salah satu komponen utama dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, kualitas hidup, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, peningkatan UHH mencerminkan kemajuan dalam sistem pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat masyarakat, dan efektivitas intervensi pembangunan di bidang kesehatan secara menyeluruh.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah)

Grafik 2.16. Usia Harapan Hidup Kabupaten Buru Selatan

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2020–2024. Setelah penghitungan dengan metode baru mulai diberlakukan pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 69,45 tahun dan mengalami peningkatan hingga mencapai 70,28 tahun pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan UHH selama lima tahun terakhir mencapai sekitar 0,6 tahun per tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta efektivitas program intervensi kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah.

Secara substansial, peningkatan Usia Harapan Hidup mencerminkan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk penurunan angka kematian bayi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Namun demikian, capaian ini perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, pemerataan tenaga medis, serta penyediaan infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

2. Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Buru Selatan selama periode 2022–2024, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten dalam tingkat fertilitas total penduduk perempuan usia reproduktif. Nilai TFR mengalami penurunan bertahap dari 2,96 pada tahun 2022, menjadi 2,89 pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 2,79 pada tahun 2024.

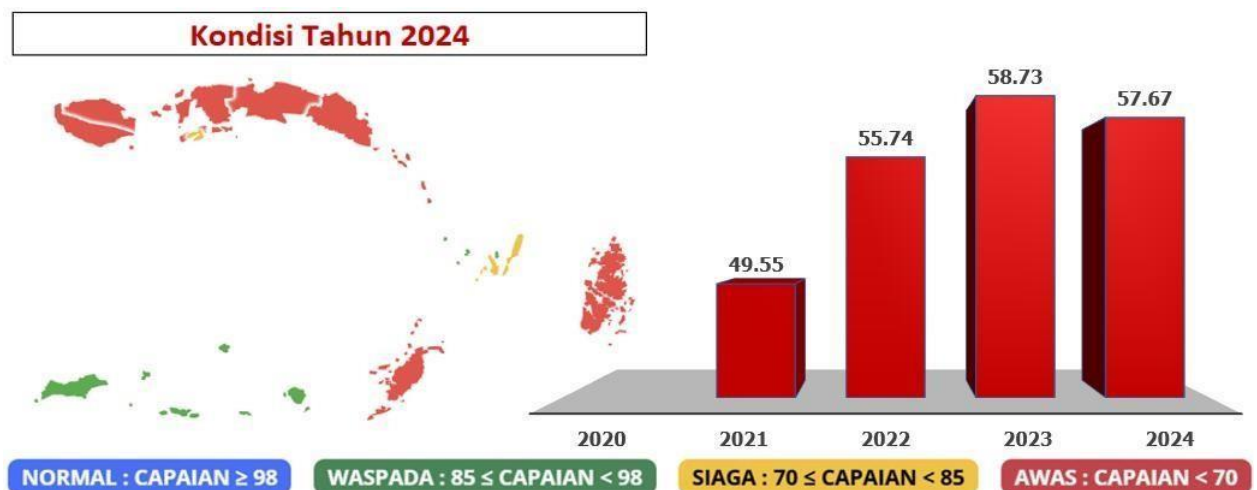
Meskipun penurunan ini menunjukkan arah yang positif dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, secara klasifikasi kinerja indikator, capaian tersebut masih berada dalam kategori —AWAS|| (Capaian $\geq 2,7$). Artinya, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan usia subur di Kabupaten Buru Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan target ideal TFR nasional, yakni berada dalam kisaran 2,0–2,19 (kategori Normal).

Secara teknis, kondisi ini mencerminkan bahwa transisi fertilitas di Kabupaten Buru Selatan belum mencapai tahap optimal, meskipun telah menunjukkan perbaikan gradual. Penurunan sebesar 0,17 poin dalam dua tahun terakhir dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari intervensi program Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga, serta perluasan akses terhadap alat dan pelayanan kontrasepsi.

Namun demikian, laju penurunan TFR yang relatif lambat mengindikasikan masih adanya tantangan struktural dan kultural dalam pelaksanaan program pengendalian fertilitas. Faktor-faktor seperti preferensi terhadap jumlah anak ideal yang tinggi, ketimpangan akses pelayanan KB di wilayah perdesaan, serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja perlu mendapatkan perhatian strategis

3. Cakupan Jaminan Kesehatan

Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu indikator yang mengukur tercapainya masyarakat sehat dan produktif. Data cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Buru Selatan diperlihatkan pada **Gambar 2.26**.



Sumber: Data Susenas BPS (diolah)

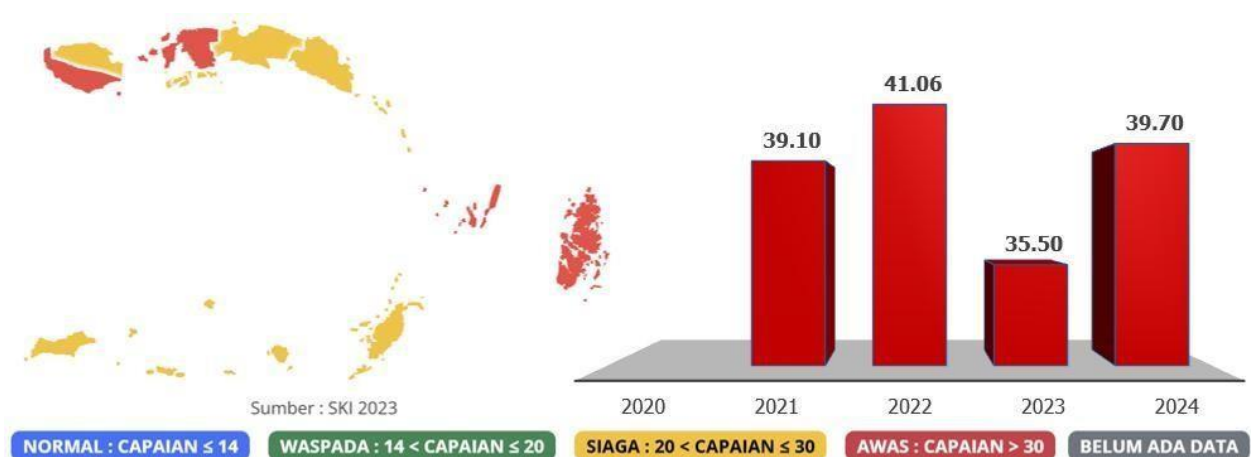
Grafik 2.17. Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Buru Selatan

Capaian cakupan jaminan kesehatan Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan moderat selama periode 2020–2024, dari 49,55% (2021) menjadi 55,74% (2022), 58,73% (2023), dan sedikit menurun ke 57,67% (2024). Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan kondisi awal, nilai tersebut masih berada pada kategori —Awass|| (capaian < 70). Hal ini menandakan bahwa cakupan kepesertaan penduduk dalam program jaminan kesehatan belum optimal, serta masih terdapat kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Diperlukan penguatan kebijakan integrasi data kepesertaan, perluasan cakupan BPJS Kesehatan, serta peningkatan sosialisasi dan kemudahan pendaftaran agar cakupan jaminan kesehatan dapat meningkat menuju kategori —Siagaa|| ($70 \leq \text{capaian} < 85$).

4. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu indikator utama dalam menilai status gizi dan kualitas kesehatan anak balita, serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Prevalensi stunting menunjukkan persentase anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Di Kabupaten Buru Selatan, prevalensi stunting menjadi perhatian strategis dalam agenda pembangunan sumber daya manusia, mengingat dampaknya yang bersifat jangka panjang terhadap kapasitas kognitif, produktivitas, dan kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, pengendalian stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga merupakan prioritas pembangunan lintas sektor yang memerlukan intervensi terintegrasi dari hulu ke hilir.

Prevalensi stunting di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2020–2024 tetap berada pada tingkat tinggi dalam kategori —awass|| (>30%), dengan fluktuasi yang menunjukkan belum tercapainya efektivitas intervensi secara konsisten. Prevalensi stunting tercatat sebesar 39,10% pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 41,06% pada 2022. Penurunan sementara terjadi pada tahun 2023 (35,50%), tetapi kembali naik menjadi 39,70% pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa strategi penanganan stunting belum berjalan optimal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun kesinambungan program di tingkat daerah.



Sumber: SSGBI 2019, SSGI 2021-2022, SKI 2023 (data diolah dan diakses dari Siperindu, 2025)

Grafik 2.18. Prevalensi Stunting Kabupaten Buru Selatan

Tingginya prevalensi stunting mencerminkan belum optimalnya konvergensi program lintas sektor, terbatasnya akses masyarakat terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta rendahnya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, masih minimnya pemahaman keluarga terhadap pola asuh, konsumsi pangan bergizi, dan perilaku hidup bersih dan sehat turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola program penurunan stunting yang terintegrasi, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk intervensi berbasis keluarga berisiko, serta peningkatan cakupan layanan dasar dan edukasi gizi masyarakat secara berkelanjutan. Percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas strategis daerah, sejalan dengan target nasional dan rekomendasi WHO untuk menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 20% pada akhir periode perencanaan.

5. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesehatan keluarga yang mencerminkan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. IKS digunakan sebagai instrumen untuk menilai capaian Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif.

Berdasarkan data IKS Kabupaten Buru Selatan periode tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai IKS tercatat sebesar 0,087. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,089, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,099. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 0,102, serta meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 0,109.

Peningkatan nilai IKS ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam kondisi kesehatan keluarga di Kabupaten Buru Selatan, yang mencerminkan semakin meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan anggotanya.

Meskipun demikian, capaian IKS Kabupaten Buru Selatan masih berada pada kategori yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam periode perencanaan RPJMD ke depan, diperlukan penguatan intervensi lintas sektor, peningkatan cakupan kunjungan keluarga sehat, optimalisasi peran puskesmas, serta peningkatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat peningkatan status kesehatan keluarga secara menyeluruh.

Dengan strategi pembangunan kesehatan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan nilai IKS Kabupaten Buru Selatan dapat terus meningkat dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel. 2.15. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Buru Selatan

Indikator Pembangunan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Keluarga Sehat	0.087	0.089	0.099	0.102	0.109

	Keluarga Sehat	> 0.800
	Keluarga Pra Sehat	0.500 - 0.800
	Keluarga Tidak Sehat	< 0.500

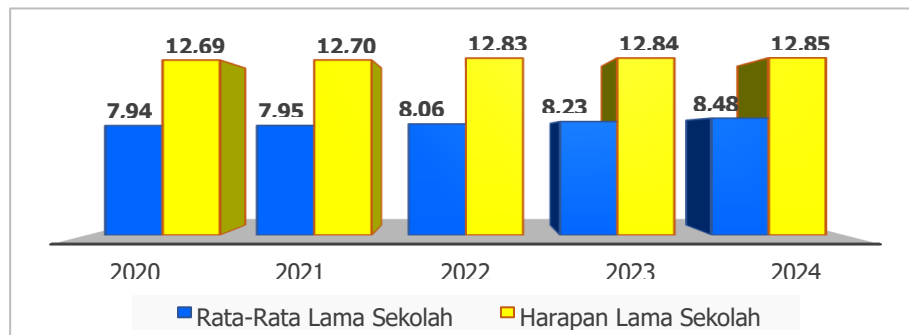
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2025

C. Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

1. Rata-Rata dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan dua indikator penting dalam mengukur dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS menggambarkan jumlah tahun rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan formal, sedangkan HLS mencerminkan perkiraan lama waktu sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak usia sekolah pada masa mendatang. Di Kabupaten Buru Selatan, capaian RLS dan HLS menjadi cerminan langsung dari aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan dasar hingga menengah. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang keberhasilan intervensi pendidikan di daerah, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu dan partisipasi pendidikan guna mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 7,94 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,48 tahun pada tahun 2024. Kenaikan selama lima tahun terakhir mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan penduduk usia dewasa di wilayah ini. Peningkatan RLS ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam mendorong warga untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, serta memperbaiki layanan pendidikan nonformal dan kesetaraan bagi penduduk dewasa. Meskipun demikian, angka RLS sebesar 8,48 tahun pada 2024 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Buru Selatan baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang setara kelas VIII (SMP), sehingga masih terdapat tantangan dalam meningkatkan penyelesaian pendidikan jenjang menengah atas (SMA/SMK).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

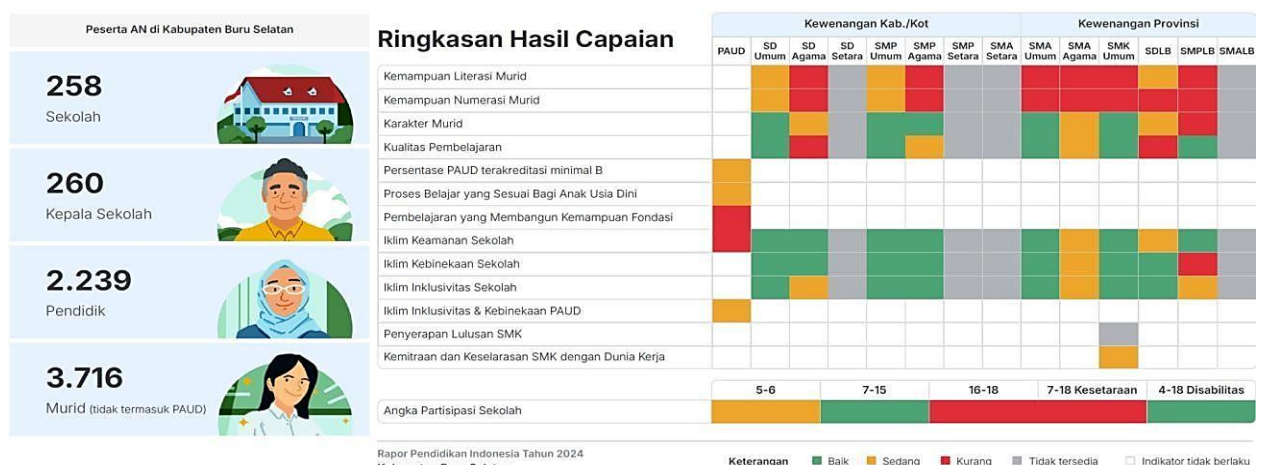
Grafik 2.19. RLS dan HLS Kabupaten Buru Selatan

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat secara stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,69 tahun dan mengalami peningkatan hingga mencapai 12,85 tahun pada tahun 2024. Kenaikan dalam lima tahun terakhir tersebut menggambarkan membaiknya ekspektasi terhadap akses pendidikan anak-anak usia sekolah di daerah tersebut, yang setara dengan harapan menempuh pendidikan hingga tahun pertama perguruan tinggi. Stabilitas pertumbuhan HLS menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat dan efektivitas program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan jumlah guru, dan dukungan beasiswa. Meski demikian, nilai HLS yang masih berada di bawah 13 tahun menandakan perlunya dorongan lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan pendidikan hingga tingkat tinggi, terutama melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan tinggi, baik secara geografis maupun ekonomi.

Secara keseluruhan, tren peningkatan RLS dan HLS di Kabupaten Buru Selatan mengindikasikan arah pembangunan pendidikan yang positif. Namun, intervensi strategis tetap diperlukan untuk mempercepat peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, mengurangi angka putus sekolah, serta memperkuat pendidikan vokasi dan keterampilan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing sumber daya manusia di wilayah ini.

2. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan dan kemampuan dasar masyarakat dalam memahami informasi serta mengaplikasikan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Buru Selatan, data mengenai angka literasi dan numerasi memberikan gambaran mengenai tingkat kecakapan penduduk dalam membaca, menulis, serta kemampuan berhitung yang sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi dan partisipasi dalam kegiatan produktif. Pencapaian angka literasi dan numerasi yang baik tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendorong kemajuan di berbagai sektor. Oleh karena itu, analisis terhadap angka literasi dan numerasi di Kabupaten Buru Selatan akan memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kemampuan dasar masyarakat.

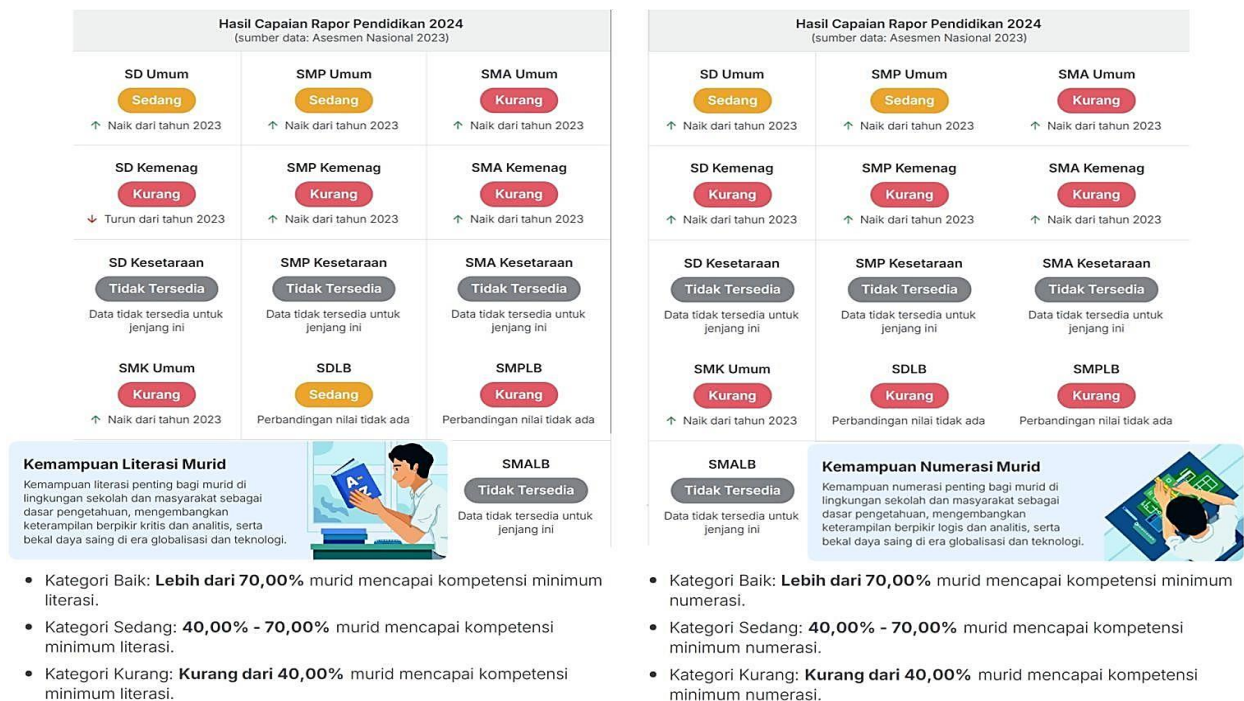


Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2024 Kabupaten Buru Selatan

Gambar 2.9. Ringkasan Capaian Hasil Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, 2024

Perkembangan literasi dan numerasi di Kabupaten Buru Selatan dapat dipantau melalui data Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan merupakan instrumen evaluasi sistem pendidikan yang mencakup capaian belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan layanan, tata kelola satuan pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Sejak 2022, Rapor Pendidikan digunakan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu layanan.

Secara umum data rangkuman dari Rapor Pendidikan Kabupaten Buru Selatan diperlihatkan pada **Gambar 2.9**. Sedangkan, kondisi literasi dan numerasi di Kabupaten Buru Selatan diperlihatkan pada **Gambar 2.10**. Data Rapor Pendidikan dihimpun dari berbagai sumber, antara lain Asesmen Nasional (AN), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Dapodik, EMIS (Kementerian Agama), data BPS, aplikasi pendukung tenaga pendidik dan kependidikan (seperti PMM, ARKAS, dan SIMPKB), Badan Akreditasi Nasional (BAN), serta Tracer Study untuk jenjang SMK.

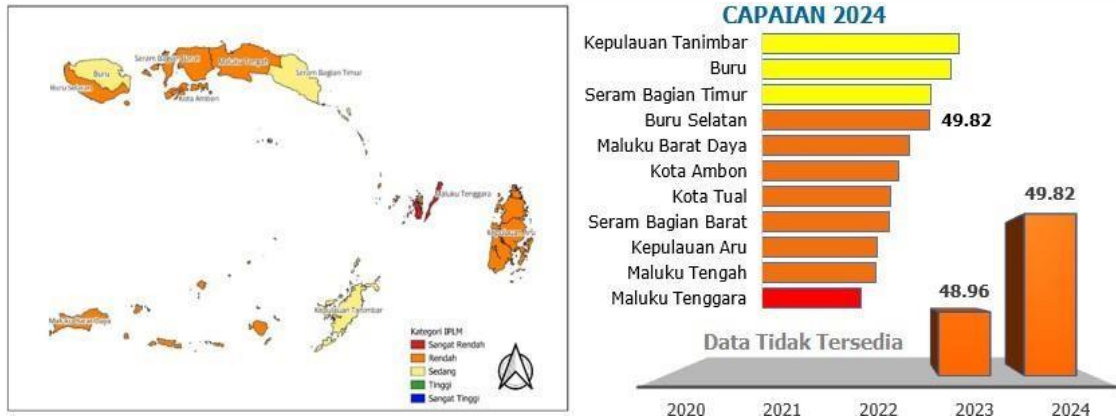


Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia Kabupaten Buru Selatan, 2024 (data diolah)

Gambar 2.10. Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa di Kabupaten Buru Selatan, 2024

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator komposit yang dirancang untuk mengukur kinerja pembangunan literasi di tingkat daerah secara holistik, mencakup dimensi akses terhadap bahan bacaan, kualitas penyelenggaraan layanan literasi, dan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan literasi secara fungsional. Di Kabupaten Buru Selatan, IPLM menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam memperkuat budaya baca, memperluas jangkauan literasi digital, serta mengembangkan ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Grafik 2.20. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Buru Selatan

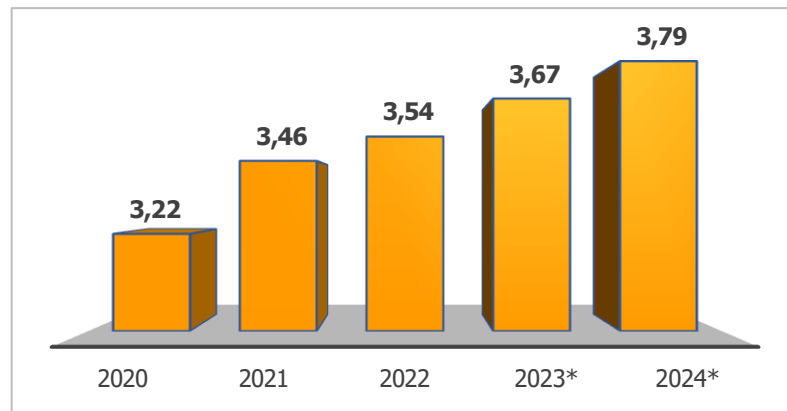
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam peta tematik dan grafik tren, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Buru Selatan menunjukkan peningkatan dari 48,96 pada tahun 2023 menjadi 49,82 pada tahun 2024. Meskipun indeks tersebut masih berada dalam kategori rendah, tren positif ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek akses, kualitas, dan keberdayaan literasi masyarakat, sebagai hasil dari berbagai intervensi kebijakan dan program pembangunan literasi yang telah diimplementasikan.

Kenaikan sebesar 0,86 poin pada periode tersebut menjadi indikasi awal atas efektivitas inisiatif literasi yang bersifat lokal maupun sektoral. Namun demikian, posisi Kabupaten Buru Selatan yang masih berada dalam kategori rendah (ditandai dengan warna oranye dalam peta regional) menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Maluku, seperti Kepulauan Tanimbar dan Buru, yang telah mencapai kategori lebih tinggi.

Dalam konteks kebijakan, peningkatan IPLM harus direspons melalui strategi penguatan ekosistem literasi yang lebih menyeluruh, antara lain melalui optimalisasi infrastruktur literasi—seperti revitalisasi perpustakaan, digitalisasi konten baca, dan peningkatan distribusi bahan bacaan ke wilayah terpencil. Selanjutnya, integrasi literasi ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal perlu diperluas, termasuk melalui kurikulum berbasis teknologi informasi dan penguatan literasi digital. Kolaborasi multipihak dengan komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga menjadi krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat.

4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan produktif. Meskipun hingga saat ini data Indeks Literasi Digital belum tersedia secara spesifik pada level kabupaten, termasuk Kabupaten Buru Selatan, informasi di tingkat provinsi tetap memberikan gambaran awal yang dapat dijadikan acuan. Di Provinsi Maluku, nilai indeks ini dapat digunakan sebagai proksi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan literasi digital di wilayah kabupaten/kota. Keterbatasan data di level mikro ini menjadi catatan penting dalam perencanaan kebijakan, terutama untuk mendorong penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyusunan program literasi digital yang kontekstual dan inklusif. Upaya ini menjadi semakin penting di tengah percepatan transformasi digital dan kebutuhan akan ketahanan informasi di masyarakat.



Sumber: Komdigi RI dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2025

Grafik 2.21. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku

Meskipun data Indeks Literasi Digital (ILD) belum tersedia secara spesifik di tingkat kabupaten, tren peningkatan ILD di Provinsi Maluku, dari 3,22 pada 2020 menjadi 3,79 berdasarkan hasil estimasi pada tahun 2024, dapat menjadi cerminan awal bagi kondisi literasi digital di daerah-daerah seperti Kabupaten Buru Selatan. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kapasitas masyarakat menggunakan teknologi digital secara produktif, aman, dan kritis. Bagi Kabupaten Buru Selatan, yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, tren ini menjadi dorongan penting untuk mempercepat pemerataan akses digital dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Strategi yang bisa dikembangkan mencakup pelatihan keterampilan digital dasar dan lanjutan, penyediaan akses internet di kawasan pedesaan, serta integrasi literasi digital ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Penguatan literasi digital di tingkat lokal menjadi krusial untuk mendukung transformasi ekonomi, pelayanan publik berbasis teknologi, serta pengembangan literasi masyarakat secara menyeluruh.

5. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan indikator komposit yang dikembangkan untuk mengukur kesiapan dan kapabilitas masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan inklusif. Indeks ini mencakup empat dimensi utama, yaitu infrastruktur digital, keterampilan digital, keterlibatan digital, dan keamanan digital. IMDI bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana masyarakat dapat mengakses, menggunakan, serta berpartisipasi dalam ekosistem digital nasional secara efektif. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pemantauan terhadap IMDI menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan digital antarwilayah, terutama antara daerah maju dan tertinggal. Bagi daerah seperti Kabupaten Buru Selatan, di mana transformasi digital masih menghadapi tantangan dari sisi akses dan kapasitas sumber daya manusia, IMDI dapat menjadi rujukan strategis untuk mendorong pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital, serta penguatan ekosistem digital lokal yang berkelanjutan dan merata.



Sumber: Komdigi RI (Data diolah, 2025)

Grafik 2.22. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Buru Selatan

Dari grafik yang ditampilkan, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Buru Selatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencatat peningkatan dari 40,91 pada tahun 2022 menjadi 43,55 pada tahun 2023, indeks ini kembali mengalami penurunan menjadi 40,06 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem digital yang merata dan berkelanjutan di wilayah ini.

Secara rinci, capaian dimensi Keterampilan Digital yang cukup tinggi (62.95) mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, aspek Infrastruktur dan Ekosistem Digital (36.99) serta Pemberdayaan (24.77) masih relatif rendah, menunjukkan keterbatasan baik dari sisi akses maupun pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dimensi Pekerjaan (35.44) juga menggambarkan bahwa integrasi teknologi digital dalam sektor ketenagakerjaan belum optimal, terutama dalam konteks pengembangan UMKM, pertanian, dan perikanan lokal.

Kondisi ini menuntut respon kebijakan yang lebih terarah, seperti peningkatan infrastruktur TIK di wilayah terpencil, integrasi teknologi dalam layanan dasar seperti telemedicine dan sistem informasi geografis (GIS), serta penguatan pelatihan digital berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif, IMDI dapat menjadi landasan strategis dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berdaya saing di Kabupaten Buru Selatan.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan indikator penting dalam menilai tingkat perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Buru Selatan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, dan hari tua. Di daerah dengan dominasi sektor informal dan usaha kecil, seperti Buru Selatan, tingkat kepesertaan ini kerap menghadapi tantangan akibat keterbatasan informasi, akses layanan, dan kemampuan finansial para pekerja. Oleh karena itu, pemantauan terhadap cakupan kepesertaan menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk mereka di sektor nonformal, memperoleh perlindungan sosial yang layak. Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial bukan hanya memperkuat ketahanan tenaga kerja, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan inklusif.

Data September 2024 menyatakan bahwa capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Buru Selatan mencapai 22,55%, atau setara dengan 4.010 tenaga kerja aktif yang telah mendapatkan perlindungan. Angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar 55% dan menempatkan Kabupaten Buru Selatan sebagai kabupaten dengan capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Dengan demikian, diperlukan tambahan kepesertaan sebesar 5.900 tenaga kerja untuk mencapai target tersebut di akhir tahun 2024.

Tabel 2.16. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

Segmentasi		Jumlah Kepesertaan Aktif	Cakupan Kepesertaan (%)
Penerima Upah (Formal)	Ekosistem Desa	666	26,12
	Non ASN	1.823	71,49
	Perusahaan	61	2,39
	Total	2.550	63,59
Bukan Penerima Upah (Informal)	Nelayan	992	72,46
	Pertanian	377	27,54
	Total	1.369	34,14
Jasa Konstruksi, dan Lainnya	Total	91*	2,27
GRAND TOTAL		4.010*	100,00

*angka sementara: estimasi

Sumber: BPJS Tenaga Kerja, September 2024 (data diolah)

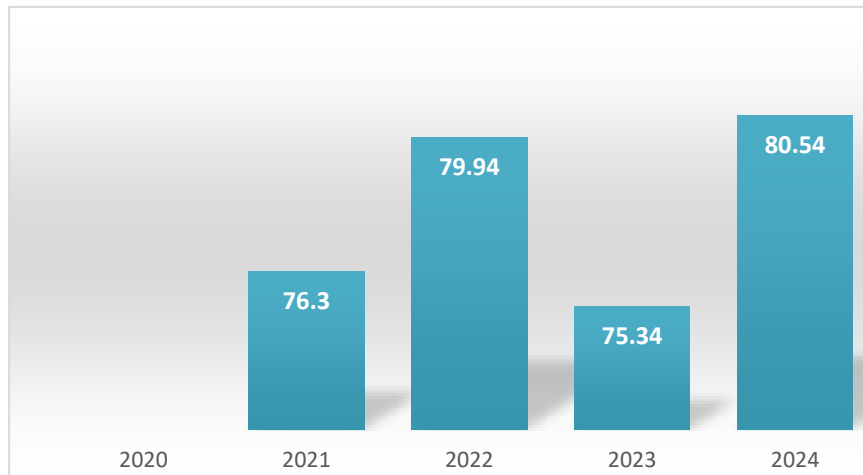
Distribusi kepesertaan menunjukkan bahwa segmen Penerima Upah (Formal) mendominasi total peserta aktif, dengan jumlah 2.550 orang atau sekitar 63,59% dari grand total. Di antara segmen formal tersebut, tenaga kerja Non-ASN merupakan kelompok terbesar, mencakup 71,49% dari peserta formal, disusul oleh peserta dari ekosistem desa (26,12%) dan perusahaan (2,39%). Segmen Bukan Penerima Upah (Informal) tercatat sebanyak 1.369 peserta aktif (34,14% dari grand total). Dari kelompok ini, nelayan merupakan segmen dominan, mencakup 72,46% dari total peserta informal, diikuti oleh pekerja sektor pertanian sebesar 27,54%. Selain itu, terdapat pula kepesertaan dari segmen Jasa Konstruksi yang bersumber dari proyek-proyek pembangunan atau preservasi jalan di wilayah Kabupaten Buru Selatan. Meskipun tidak dirinci secara kuantitatif, segmen ini berpotensi menjadi salah satu pendorong peningkatan kepesertaan ke depan.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan tenaga kerja di Buru Selatan telah berjalan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan terhadap target nasional. Oleh karena itu, strategi peningkatan ke depan dapat difokuskan pada perluasan jangkauan di sektor informal seperti pertanian dan nelayan, optimalisasi perlindungan pada proyek-proyek konstruksi daerah, serta penguatan program pada ekosistem desa dan ASN non-struktural.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen strategis untuk memantau dan mengevaluasi kondisi hubungan antarumat beragama dalam suatu wilayah, berdasarkan dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Meskipun pengukuran IKUB secara kuantitatif baru tersedia pada tingkat provinsi, kondisi sosial-keagamaan di kabupaten/kota tetap menjadi determinan utama terhadap nilai indeks tersebut.



Sumber: Kemenag RI (Data Diolah, 2025)

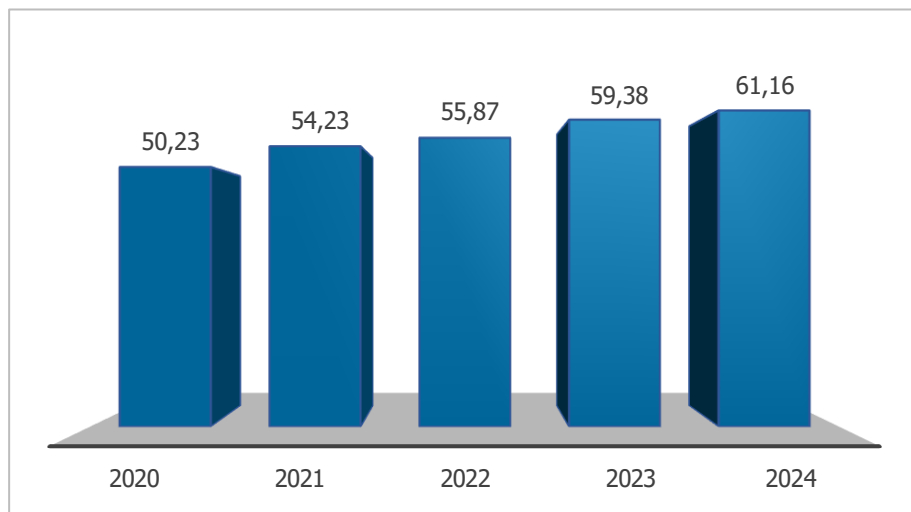
Grafik 2.23. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku

Dalam konteks Provinsi Maluku, dinamika IKUB yang menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 data IKUB belum tersedia. Capaian tertinggi IKUB sebesar 80,54 pada tahun 2024 dan terendah 77,46 pada tahun 2023, mengindikasikan adanya pengaruh lokal yang signifikan. Kabupaten Buru Selatan, sebagai salah satu wilayah dengan struktur masyarakat yang majemuk, berperan dalam membentuk capaian ini melalui interaksi sosial-keagamaan di tingkat akar rumput. Inisiatif lokal seperti penguatan forum-forum lintas agama, peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam mediasi sosial, serta pengelolaan isu keagamaan secara inklusif, menjadi faktor yang dapat mendukung perbaikan IKUB secara agregat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kerukunan di kabupaten/kota, termasuk di Buru Selatan, merupakan langkah teknokratis yang relevan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan kohesi antarumat beragama di tingkat provinsi.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara sistematis dan berkelanjutan. IPK tidak dimaksudkan untuk menilai tinggi rendahnya nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk menilai efektivitas pembangunan kebudayaan melalui tujuh dimensi utama, yaitu: (1) ekonomi budaya, (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial budaya, (4) warisan budaya, (5) ekspresi budaya, (6) budaya literasi, dan (7) gender. Meskipun saat ini pengukuran IPK masih terbatas pada level provinsi, capaian tersebut sejatinya merupakan hasil akumulatif dari kontribusi kabupaten/kota sebagai ruang utama berlangsungnya aktivitas sosial dan kebudayaan

masyarakat. Program pelestarian adat istiadat, pemajuan seni dan ekspresi budaya, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang dijalankan di tingkat kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam membentuk kualitas pembangunan kebudayaan di tingkat provinsi. Dengan demikian, intervensi kebijakan budaya di level lokal merupakan elemen kunci dalam mendorong pencapaian IPK yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti 2025

Sumber: Kemendikdasmen RI (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.24. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku

Data menunjukkan bahwa IPK Provinsi Maluku mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 berdasarkan hasil estimasi adalah 59,38 dan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 50,23. Tren ini mencerminkan kemajuan positif dalam upaya pembangunan kebudayaan di wilayah provinsi, meskipun keberlanjutan capaian ini masih memerlukan perhatian. Dalam konteks ini, Kabupaten Buru Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung peningkatan IPK Maluku. Keberadaan masyarakat adat yang masih aktif menjaga nilai dan praktik tradisional, seperti tradisi lisan, musik daerah, dan ritus adat, turut memperkuat dimensi warisan budaya dan ketahanan sosial budaya.

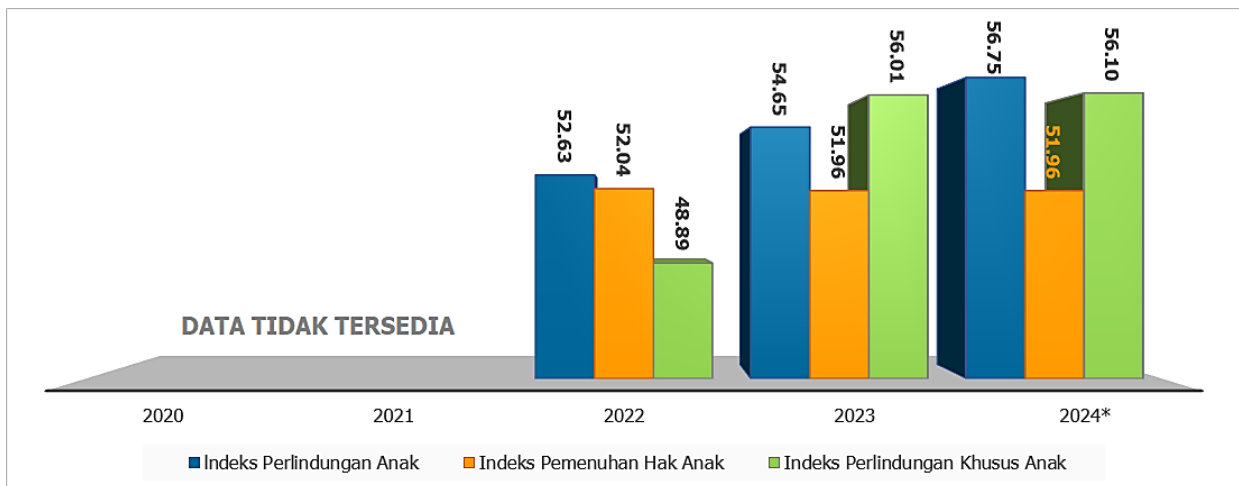
Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam kegiatan budaya serta tumbuhnya ekonomi berbasis sumber daya dan kearifan lokal turut berkontribusi pada dimensi gender dan ekonomi budaya. Meskipun IPK belum tersedia pada level kabupaten/kota, dinamika sosial budaya di Buru Selatan secara nyata memberi pengaruh terhadap capaian IPK Provinsi Maluku secara agregat, sehingga patut menjadi fokus dalam strategi pembangunan kebudayaan ke depan.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan instrumen pengukuran yang disusun untuk mengevaluasi capaian pembangunan perlindungan anak secara komprehensif di Indonesia. Ketiga indeks ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang

menekankan pada pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta jaminan terhadap kebutuhan khusus anak-anak dalam situasi rentan. IPA memberikan gambaran umum tentang upaya perlindungan anak secara agregat, IPHA menilai sejauh mana hak-hak dasar anak terpenuhi seperti hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi, sedangkan IPKA fokus pada perlindungan anak dari kondisi khusus seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, atau konflik hukum. Ketiga indeks ini tidak hanya menjadi alat pemantauan kinerja pembangunan anak, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak secara lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti 2025

Sumber: Kementerian PPPA (Data diolah, 2025)

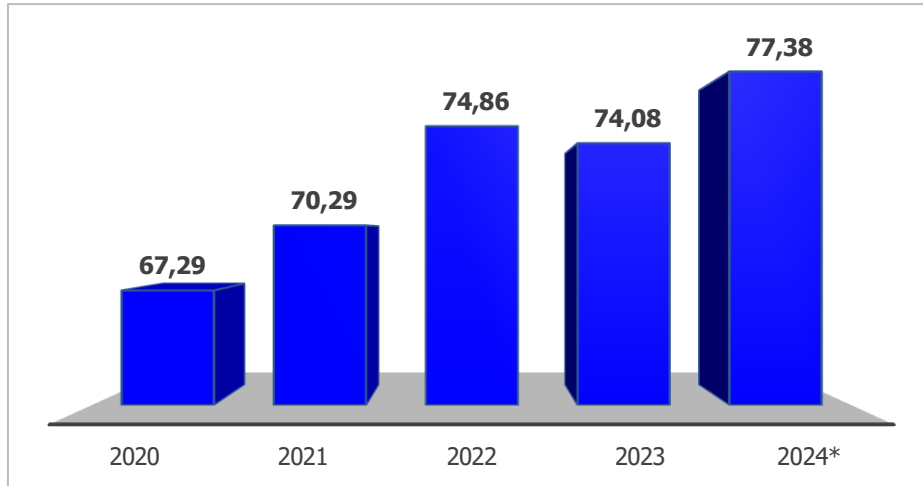
Grafik 2.25. Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Buru Selatan

Analisis tren dari tahun 2020 ke 2024 menunjukkan bahwa pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Buru Selatan mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan di sisi lain. Kenaikan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dari 52,63 pada tahun 2022 diestimasi menjadi 56,75 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kinerja secara umum dalam upaya melindungi anak, terutama terlihat dari Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang melonjak tajam dari 48,89 pada tahun 2020 diestimasi menjadi 56,10 pada tahun 2024. Hal ini dapat diasosiasikan dengan efektivitas program yang menyasar anak-anak dalam situasi khusus, seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau anak berhadapan dengan hukum. Namun, penurunan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dari 52,04 menjadi 51,96 menunjukkan adanya stagnasi atau regresi dalam aspek-aspek fundamental seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, atau partisipasi anak. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu lebih menyeimbangkan antara perlindungan khusus dan pemenuhan hak-hak dasar anak agar capaian yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud secara utuh.

2. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga dalam hal kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK ini terdiri dari lima dimensi utama yang saling terkait, yakni: (1) Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), yang mencakup pengaturan hukum dan struktur keluarga yang mendukung kesejahteraan; (2) Kualitas

Ketahanan Fisik (KKF), yang mengukur aspek kesehatan dan kebugaran anggota keluarga; (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), yang mengacu pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan stabil; (4) Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), yang mencakup faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga; dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB), yang mencerminkan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti
2025 Sumber: KemenPPPA RI (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.26. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku

Kontribusi Kabupaten Buru Selatan terhadap Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku dapat dilihat melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada penguatan kualitas hidup keluarga, terutama dalam dimensi kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kabupaten Buru Selatan, dengan karakteristik budaya dan sosial yang khas, memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi capaian IKK di tingkat provinsi.

Dari data yang diperoleh, Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai signifikan pada 2022 (74.86), kemudian diestimasi meningkat pada tahun 2024 (77.38). Peningkatan ini tidak terlepas dari program-program yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Buru Selatan. Peningkatan kualitas ketahanan sosial budaya (KKSB) di Buru Selatan, yang sangat dipengaruhi oleh pelestarian tradisi lokal dan pemberdayaan masyarakat adat, tentunya memberi dampak positif pada dimensi sosial budaya di IKK provinsi. Selain itu, keberhasilan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga (KKE), seperti melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan pemberdayaan perempuan di Buru Selatan, mendukung pencapaian IKK yang lebih tinggi di tingkat provinsi.

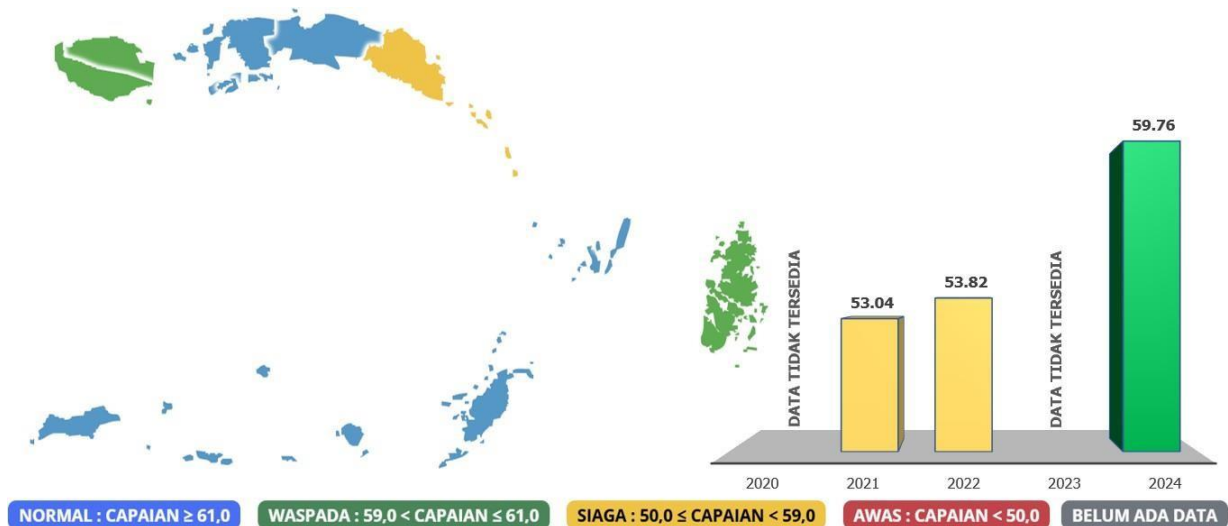
Meskipun pada 2023 terjadi penurunan sedikit menjadi 74.08, yang mungkin dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi atau kebijakan tertentu, kontribusi Kabupaten Buru Selatan tetap terlihat jelas dalam memperbaiki kualitas keluarga melalui berbagai intervensi lokal. Program berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan struktur keluarga yang lebih inklusif, serta pengembangan layanan pendidikan yang lebih merata, berpotensi menjadi faktor penggerak

dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan IKK di Provinsi Maluku pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, meskipun data IKK saat ini hanya tersedia pada level provinsi, dinamika sosial dan kebijakan di Kabupaten Buru Selatan jelas memiliki pengaruh terhadap capaian IKK di tingkat provinsi. Intervensi kebijakan dan program di tingkat kabupaten/kota akan sangat berperan dalam menciptakan IKK yang lebih baik dan berkelanjutan.

3. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga di tingkat kabupaten/kota. IBangga mengintegrasikan berbagai dimensi penting dalam kehidupan keluarga, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Di Kabupaten Buru Selatan, penerapan IBangga sangat relevan mengingat karakteristik sosial budaya masyarakat yang beragam dan kental dengan nilai-nilai tradisional. Melalui pengukuran IBangga, dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai upaya pemenuhan hak dasar keluarga, peningkatan kualitas hidup, serta peran keluarga dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil dari pengukuran IBangga ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan intervensi program yang lebih terarah dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Buru Selatan, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, maupun pendidikan.



Sumber: BKKBN, 2025

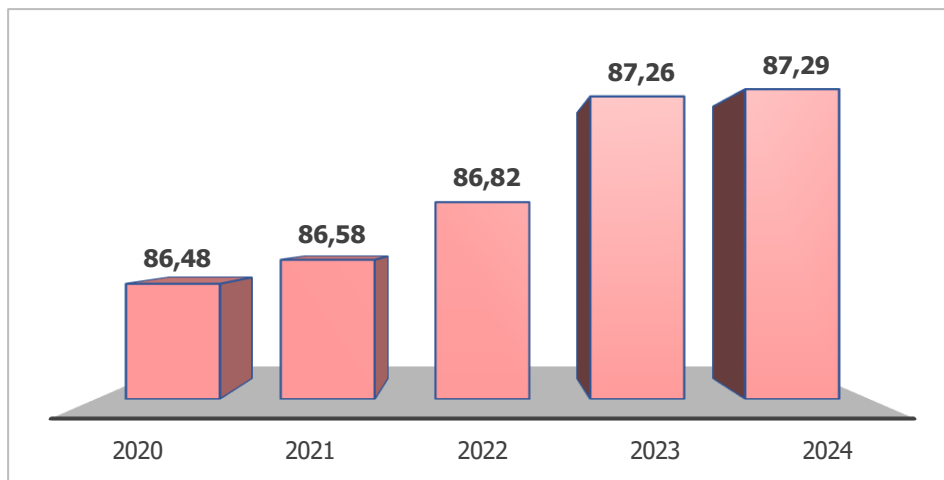
Grafik 2.27. IBANGGA Kabupaten Buru Selatan

Dari data yang terlihat bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2024, dengan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2024, mencapai nilai 59,76. Meskipun tahun 2023 tidak memiliki data yang tersedia—kemungkinan akibat tantangan teknis dalam proses pengumpulan atau pelaporan data—konsistensi tren positif ini patut dicermati. Dari perspektif indikator pembangunan, capaian IBangga Kabupaten Buru Selatan mulai mendekati kategori —Normal— pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan keluarga, namun sekaligus

mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih sistematis dan responsif, khususnya dalam penguatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan ketahanan sosial budaya. Pencapaian IBangga yang berkelanjutan juga menuntut sinergi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dan kelembagaan adat, mengingat karakteristik sosial dan budaya lokal yang khas di Kabupaten Buru Selatan.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan suatu daerah telah mengakomodasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG merefleksikan tingkat keadilan gender dalam distribusi hasil pembangunan; semakin mendekati nilai 100, maka semakin setara capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar jarak IPG dari angka 100, maka semakin menunjukkan adanya kesenjangan gender yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.



Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2025

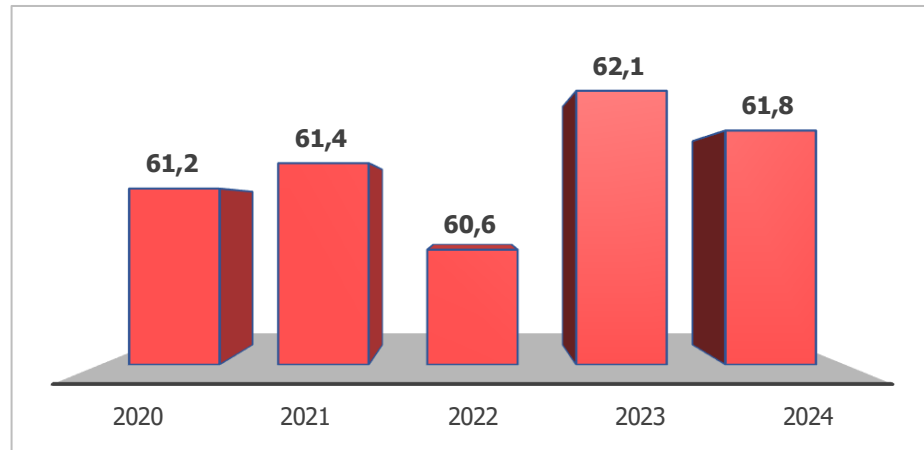
Grafik 2.28. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buru Selatan

Dari grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 87,29, meningkat dari 86,48 pada tahun 2020. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, dengan nilai IPG yang masih berada di bawah 90, terdapat jarak yang signifikan dari angka ideal 100, yang mencerminkan bahwa kesenjangan gender belum sepenuhnya teratasi.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan telah mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang strategis, khususnya dalam ranah politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Tidak seperti IPG yang berfokus pada kesenjangan hasil, IDG lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi dan

pemberdayaan, dengan mengukur ketimpangan gender dalam keterwakilan di parlemen, posisi pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan. Semakin tinggi nilai IDG, maka semakin besar peluang dan ruang yang tersedia bagi perempuan untuk berkontribusi secara setara dalam pembangunan.



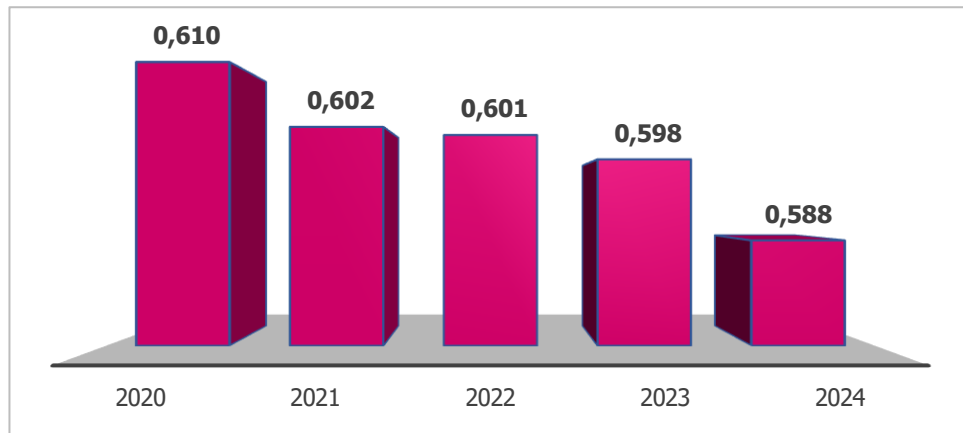
Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2025

Grafik 2.29. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Buru Selatan

Analisis tren Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Buru Selatan dari 2020 hingga 2024 menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif terhadap partisipasi perempuan. Lonjakan signifikan pada 2023 mencerminkan hasil dari intervensi kebijakan afirmatif atau peningkatan akses perempuan terhadap posisi pengambilan keputusan dan peran ekonomi produktif. Penurunan pada 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa capaian pemberdayaan gender tidak selalu linier, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta efektivitas pelaksanaan program. Pendekatan spasial seperti GIS memang sangat strategis untuk mengidentifikasi ketimpangan antarwilayah dalam konteks pemberdayaan gender, terutama dalam memetakan sebaran keterwakilan perempuan di sektor pemerintahan, usaha, dan komunitas lokal.

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang dirancang untuk mengukur sejauh mana ketidaksetaraan gender menghambat optimalisasi capaian pembangunan manusia. IKG berfokus pada tiga aspek utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi, yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan yang terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, IKG menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data untuk mendorong keadilan gender dalam pembangunan.



Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2025

Grafik 2.30. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buru Selatan

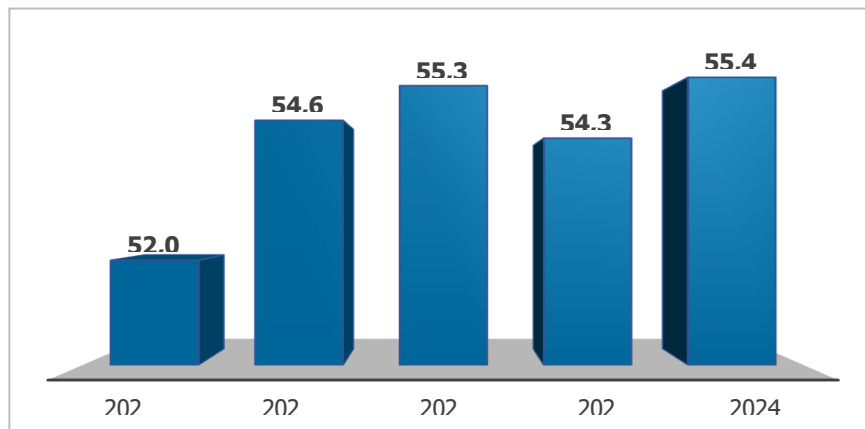
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Buru Selatan mengalami tren penurunan dari 2020 hingga 2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di daerah tersebut. Nilai IKG menurun dari 0,610 pada tahun 2020 menjadi 0,588 pada tahun 2024, yang berarti ketimpangan gender semakin berkurang, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan dalam akses dan partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, dan ketenagakerjaan. Capaian ini dapat menjadi sinyal positif bagi perumusan kebijakan yang lebih progresif, terutama dalam memperluas ruang pemberdayaan perempuan dan memastikan bahwa perbaikan yang telah terjadi dapat dipertahankan secara berkelanjutan di masa mendatang.

7. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi pemuda dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun saat ini pengukuran IPP masih terbatas pada level provinsi, kontribusi kabupaten/kota sebagai wilayah operasional utama program kepemudaan tidak dapat diabaikan. Aktivitas seperti penguatan kapasitas organisasi pemuda, pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelibatan pemuda dalam pengambilan keputusan lokal merupakan faktor-faktor yang secara agregat membentuk capaian IPP di tingkat provinsi. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan dan program di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Buru Selatan, sangat penting untuk mendorong pembangunan pemuda yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pada grafik, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Namun, penurunan menjadi 54,33 pada tahun 2023 dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program kepemudaan, baik dalam aspek akses pendidikan, lapangan kerja, maupun partisipasi aktif pemuda. Indeks tersebut diestimasikan meningkat pada tahun 2024.

Kontribusi kabupaten/kota seperti Kabupaten Buru Selatan menjadi sangat penting, mengingat pembangunan pemuda sesungguhnya berlangsung di tingkat lokal melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik daerah. Misalnya, keberhasilan program pelatihan kewirausahaan pemuda, peningkatan keterwakilan pemuda dalam forum-forum musyawarah, serta akses layanan kesehatan remaja di Buru Selatan akan secara tidak langsung memperkuat capaian IPP di tingkat provinsi. Oleh karena itu, meskipun data IPP belum tersedia pada level kabupaten/kota, penguatan kebijakan dan program pembangunan pemuda di daerah tetap menjadi kunci untuk memperbaiki dan mempertahankan tren positif IPP Provinsi Maluku di masa mendatang.



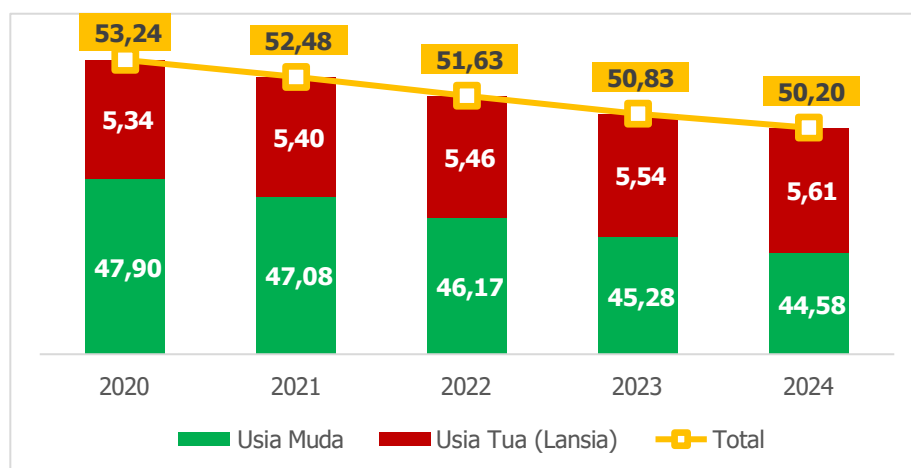
Sumber: Kemenpora RI (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.31. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang digunakan untuk mengukur tingkat beban tanggungan penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana kelompok usia produktif harus menanggung kebutuhan hidup kelompok usia yang secara ekonomi belum atau tidak lagi produktif.



Sumber : PSP Unpatti 2025

Grafik 2.32. Angka Ketergantungan Kabupaten Buru Selatan Tahun

Rasio ketergantungan penting untuk dianalisis karena dapat mencerminkan dinamika struktur penduduk, beban ekonomi rumah tangga, serta arah kebijakan pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan, semakin besar potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran penduduk usia kerja. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan perlunya penguatan layanan sosial dasar dan jaminan perlindungan bagi kelompok usia non-produktif.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, rasio ketergantungan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan penurunan total dari 53,24 pada tahun 2020 menjadi 50,20 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan ≥65 tahun), yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi dan pembangunan daerah. Secara rinci, rasio ketergantungan usia muda menurun secara konsisten dari 47,90 menjadi 44,58, menandakan adanya transisi demografi yang dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi. Sementara itu, rasio ketergantungan usia tua mengalami peningkatan moderat dari 5,34 menjadi 5,61, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan sosial dan kesehatan bagi kelompok lansia. Secara keseluruhan, tren penurunan rasio ketergantungan ini mencerminkan kondisi demografis yang semakin menguntungkan untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan perkembangan kinerja sektor primer yang berperan penting dalam menopang perekonomian daerah. Peningkatan nilai tambah sektor ini mencerminkan membaiknya aktivitas produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta meningkatnya kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas, dukungan teknologi, serta kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan pelaku usaha sektor primer.

Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan sarana produksi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Hal ini menegaskan peran strategis sektor tersebut dalam menyediakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah perdesaan.

Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan riil sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang berfluktuasi namun tetap tumbuh positif. Pada tahun 2020 sektor ini tumbuh sebesar 2,16 persen, kemudian melambat pada tahun 2021 menjadi 0,27 persen. Selanjutnya, pertumbuhan meningkat cukup kuat pada tahun 2022 mencapai 6,44 persen dan tetap tumbuh pada tahun 2023 sebesar 5,27 persen. Pada tahun 2024 (angka sementara), pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 3,37 persen, yang menunjukkan pertumbuhan masih berlanjut meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

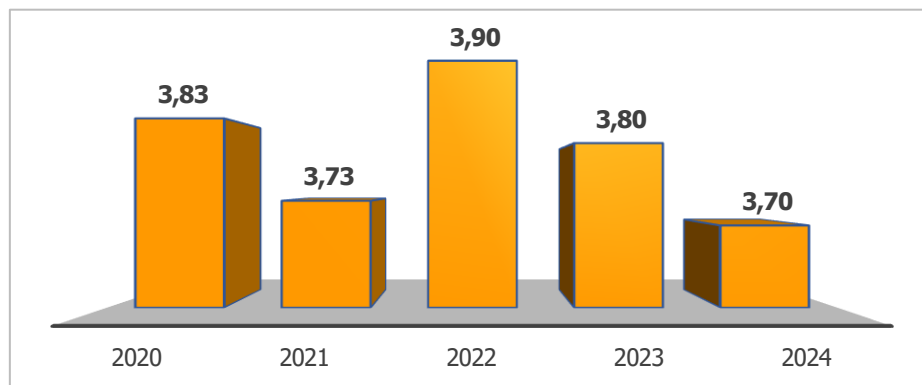
Tabel. 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Buru Selatan

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen)	2.16	0.27	6.44	5.27	3.37

Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan tahun 2025

2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, sektor ini memainkan peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola potensi sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Keberadaan industri pengolahan tidak hanya mencerminkan kapasitas produksi daerah, tetapi juga menunjukkan tingkat perkembangan struktur ekonomi yang bergerak dari sektor primer menuju sektor sekunder. Dengan demikian, analisis terhadap rasio PDRB Industri Pengolahan menjadi langkah krusial untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi dan potensi hilirisasi di Kabupaten Buru Selatan.



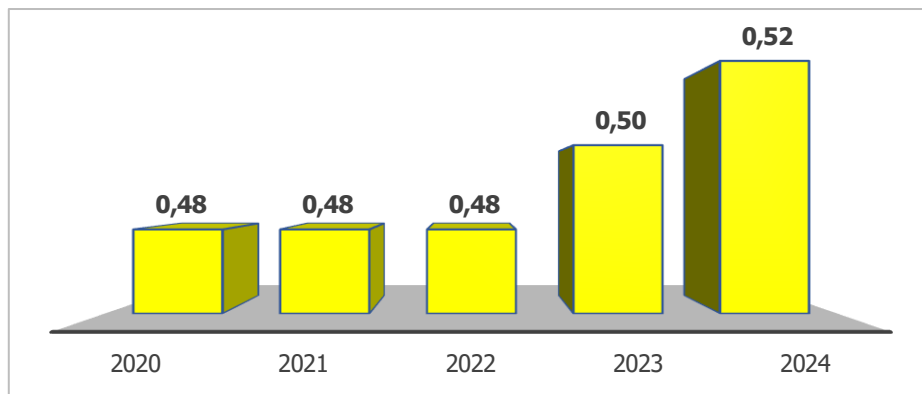
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.33. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Buru Selatan

Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024, mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan sektoral di wilayah tersebut. Nilai tertinggi tercatat sebesar 3,90 pada tahun 2022, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan investasi, inovasi produksi, atau optimalisasi sumber daya lokal. Namun, tren ini tidak bertahan, karena pada tahun 2024 rasio menurun menjadi 3,70, mengindikasikan adanya tantangan seperti keterbatasan bahan baku, hambatan distribusi, atau menurunnya daya saing industri lokal. Fluktuasi ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi struktural dan kapasitas adaptasi sektor industri pengolahan, serta menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri yang lebih berkelanjutan di masa depan.

3. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi, Makan, dan Minum merupakan cerminan penting dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan sektor jasa di suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, sektor ini memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui pemanfaatan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki wilayah tersebut. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, sektor ini juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menjadi penting untuk memahami sejauh mana perkembangan sektor jasa penunjang ini dalam struktur perekonomian daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.34. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Buru Selatan

Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan bertahap selama periode 2020 hingga 2024, menandakan pertumbuhan yang konsisten dalam kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Stabilitas rasio pada tahun-tahun awal, diikuti oleh kenaikan pada 2023 dan 2024, mencerminkan mulai menguatnya aktivitas ekonomi di bidang jasa, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan geliat sektor pariwisata. Kenaikan ini juga dapat diartikan sebagai indikasi adanya perluasan kapasitas layanan, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, atau kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pengembangan industri akomodasi dan kuliner lokal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa sektor Akomodasi, Makan, dan Minum memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus dikembangkan sebagai salah satu pilar perekonomian Kabupaten Buru Selatan.

4. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buru Selatan mencerminkan kontribusi sektor-sektor berbasis kreativitas dan inovasi terhadap perekonomian daerah. Ekonomi kreatif, yang mencakup subsektor seperti seni, desain, periklanan, musik, film, dan teknologi informasi, telah berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, sektor ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi tradisional. Peningkatan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dapat menjadi indikator

kemajuan dalam transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada keunggulan kreatif dan sumber daya lokal.

Secara nasional, data ekonomi kreatif umumnya disediakan oleh BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta instansi terkait lainnya. Namun, di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Buru Selatan, ketersediaan data yang spesifik dan terpilah mengenai kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB maupun ketenagakerjaan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan sektor ekonomi kreatif dalam struktur statistik daerah yang tersedia saat ini.

Proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB tercatat sebesar 13,03 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 13,23 persen, kemudian terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 13,5 persen.

Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan proporsi mencapai 13,8 persen, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 14,04 persen. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sektor ekonomi kreatif semakin berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Buru Selatan, dengan kontribusi yang terus menguat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif serta potensi ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel. 2.18. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Buru Selatan

No	Indikator Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	13.03	13.23	13.50	13.80	14.04

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Buru Selatan (data diolah)

5. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Buru Selatan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan wirausaha yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Indikator ini mencakup berbagai bentuk usaha, baik formal maupun informal, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu indikator proxy yang digunakan untuk mengukur rasio kewirausahaan adalah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Unit Usaha) dan cakupan bina kelompok pengarajin. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah, melalui berbagai program pembinaan dan pemberdayaan, berhasil meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha informal di tingkat masyarakat. Dengan meningkatnya cakupan pembinaan bagi kelompok pedagang dan usaha informal, diharapkan rasio kewirausahaan dapat tumbuh secara signifikan, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan memberikan kontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Capaian Rasio Kewirausahaan kabupaten buru selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai 1,40 persen meningkat menjadi 2,61 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha kecil, yang dapat mendorong pertumbuhan

rasio kewirausahaan di wilayah ini. Peningkatan jumlah unit usaha yang dibina menunjukkan adanya dorongan dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan penguatan ekosistem bisnis yang berfokus pada pengembangan wirausaha lokal. Meskipun demikian, tantangan seperti terbatasnya akses pasar, regulasi yang belum optimal, serta ketidakstabilan ekonomi, perlu menjadi perhatian agar usaha informal dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.

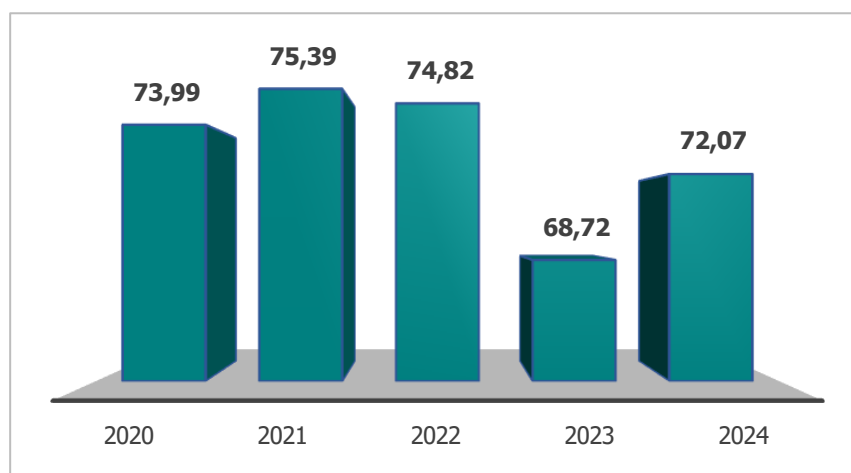
Tabel. 2.19. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Buru Selatan

No	Indikator Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kewirausahaan (%)	1.40	1.43	1.59	2.43	2.61

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, Bapelitbang kabupaten Buru Selatan (data diolah, 2025)

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Di Kabupaten Buru Selatan, TPAK mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja dan keterlibatan penduduk dalam aktivitas produktif yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya partisipasi angkatan kerja dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja, dorongan ekonomi lokal, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menyambut peluang usaha dan investasi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa menjadi sinyal adanya hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, atau ketimpangan gender dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis TPAK menjadi penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Buru Selatan.



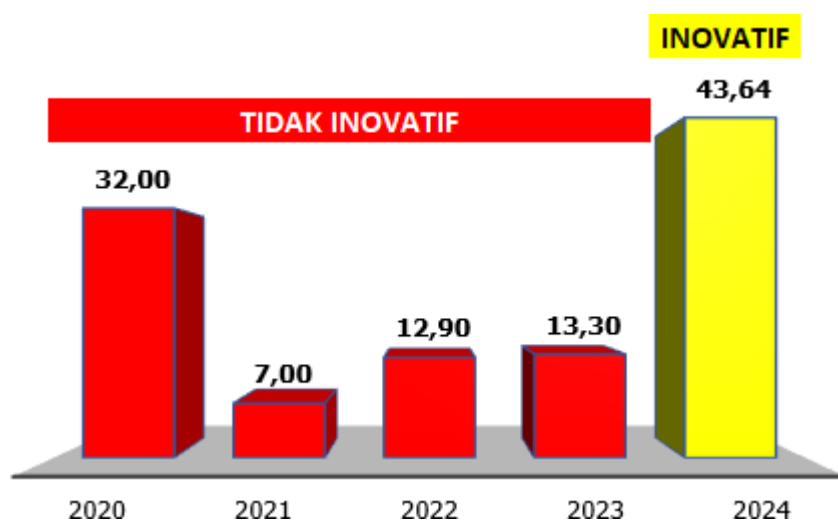
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buru Selatan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024, mencerminkan dinamika keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Setelah mengalami peningkatan pada awal periode, TPAK menurun tajam pada tahun 2023, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, atau pergeseran dalam struktur industri lokal yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Meskipun demikian, kenaikan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan adanya proses pemulihan yang positif, yang bisa jadi merupakan hasil dari stimulus pemerintah, program pelatihan tenaga kerja, atau membaiknya kondisi pasar kerja secara umum. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang adaptif dan responsif untuk menjaga kestabilan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut.

7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah disusun berdasarkan dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mencakup lima aspek utama yang harus dipenuhi agar suatu inovasi dapat dinilai sah dan layak. Pertama, inovasi harus mengandung unsur pembaharuan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Kedua, inovasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan/atau masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik atau efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, inovasi tidak boleh menimbulkan pembebanan atau pembatasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin aspek legalitas dan perlindungan terhadap masyarakat. Keempat, inovasi harus berada dalam ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaannya sah secara administratif. Kelima, inovasi harus memiliki potensi untuk direplikasi oleh perangkat daerah atau daerah lain, sehingga manfaatnya dapat diperluas. Kelima kriteria ini menjadi fondasi utama dalam menilai kelayakan dan dampak dari suatu inovasi daerah sebelum melangkah ke penilaian persyaratan khusus.



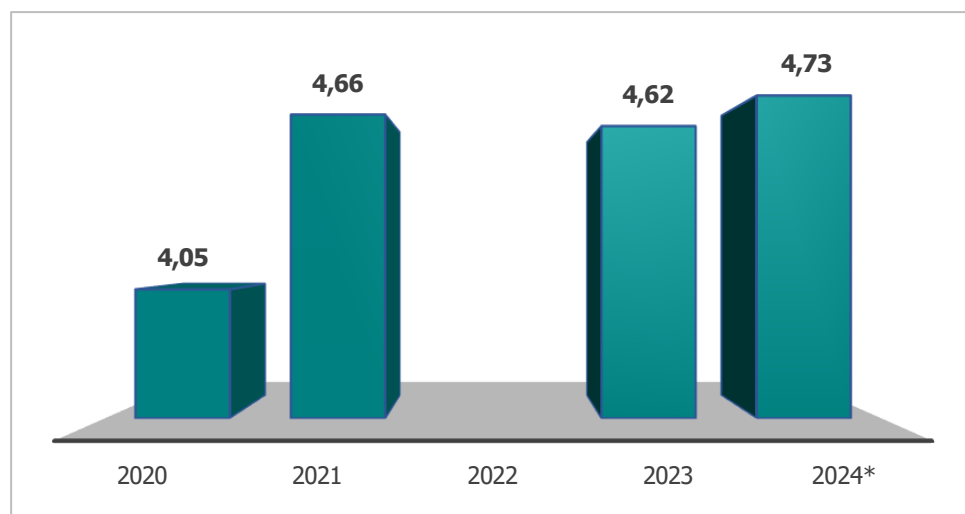
Sumber: Kemendagri RI (Data diolah, 2025)

Grafik 2.36. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buru Selatan

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren yang sangat dinamis dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 32,00, yang tergolong dalam kategori Tidak Inovatif, namun mengalami penurunan tajam menjadi 7,00 pada tahun 2021. Setelah penurunan tersebut, terjadi pemulihan secara bertahap dengan nilai indeks meningkat menjadi 12,90 pada tahun 2022, 13,30 pada tahun 2023, dan akhirnya melonjak signifikan menjadi 43,64 pada tahun 2024, memasuki kategori Inovatif. Lonjakan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang mendukung inovasi, peningkatan investasi dalam infrastruktur dan ekosistem inovasi, serta penerapan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kreativitas dan penerapan teknologi. Faktor-faktor seperti kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, dapat menjadi kontributor utama terhadap peningkatan indeks inovasi ini.

8. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperluas akses kesempatan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Indeks ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta perluasan akses dan kesempatan ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih holistik, indeks ini tidak hanya menilai peningkatan angka-angka makroekonomi, tetapi juga mengamati seberapa inklusif dan berkeadilan proses pembangunan tersebut. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Buru Selatan, indeks ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah tertinggal.



Keterangan: *Nilai estimasi Hasil expert judgement PSP Unpatti 2025

Sumber: Bappenas RI (Data diolah, 2025)

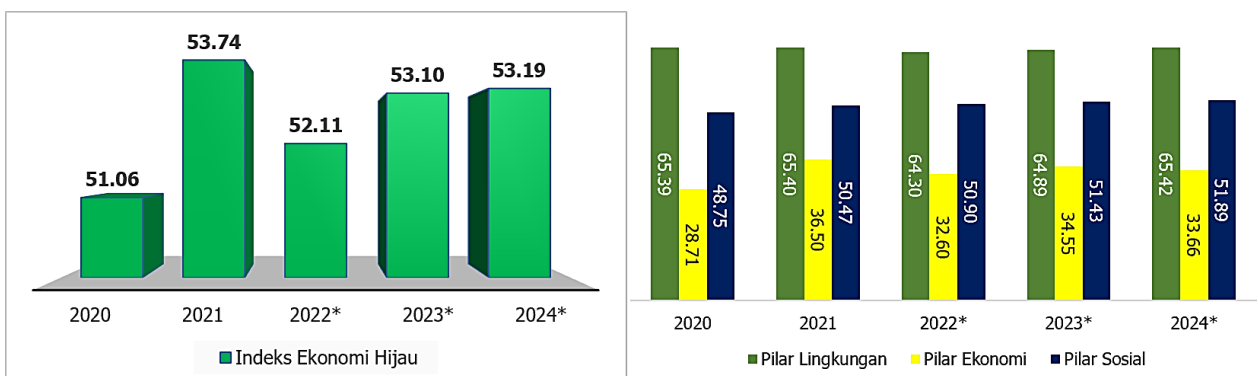
Grafik 2.37. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Buru Selatan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Buru Selatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2023. Penurunan nilai indeks terendah adalah 4,05 pada tahun 2020 mengindikasikan tekanan terhadap aspek inklusivitas ekonomi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap akses ekonomi masyarakat dan kinerja sektor usaha mikro. Pemulihan pada tahun 2021 dengan kenaikan indeks menjadi 4,66 mencerminkan respon kebijakan yang mulai efektif dalam memperluas akses dan kesempatan ekonomi, termasuk upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan penguatan jaring pengaman sosial. Meski mengalami sedikit koreksi menjadi 4,62 pada tahun 2023, nilai indeks tersebut diperkirakan meningkat pada tahun 2024 mejadi 4,73. Tren ini menunjukkan adanya kemajuan bertahap dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Ke depan, konsistensi dalam perbaikan tata kelola, pemerataan layanan publik, dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal menjadi kunci dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Buru Selatan.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi menuju ekonomi hijau telah menjadi salah satu strategi utama Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, Indeks Ekonomi Hijau digunakan sebagai instrumen evaluasi yang berbasis pada data yang komprehensif dan terintegrasi. Indeks ini mencakup 15 indikator yang terbagi dalam tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi mencakup indikator seperti intensitas emisi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mengukur kinerja ekonomi dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan. Pilar sosial, yang mencakup indikator seperti tingkat kemiskinan dan harapan hidup, menggambarkan dampak pembangunan ekonomi hijau terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pilar lingkungan mencakup indikator seperti tutupan lahan dan proporsi energi terbarukan, yang menggambarkan upaya dalam pelestarian alam dan pengurangan dampak perubahan iklim. Dengan menggunakan Indeks Ekonomi Hijau, pemantauan capaian pembangunan hijau dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan, memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2024

Grafik 2.38. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku

Berdasarkan tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku tahun 2020–2024, terlihat bahwa Pilar Lingkungan berada dalam kondisi stabil dengan nilai berkisar antara 64–65, mencerminkan upaya yang konsisten dalam menjaga kelestarian alam. Sementara itu, Pilar Sosial menunjukkan perbaikan bertahap, yang mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Pilar Ekonomi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan nilai terendah pada tahun 2020 (28.71) dan mengalami peningkatan bertahap yang diestimasi mencapai 33,66 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau di Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan terutama dalam dimensi ekonomi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi sumber daya, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, capaian indeks ini merefleksikan pentingnya optimalisasi potensi sektoral yang berbasis pada sumber daya alam, seperti perikanan, pertanian, dan ekowisata, untuk memperkuat Pilar Ekonomi tanpa mengabaikan dimensi lingkungan dan sosial. Untuk mendukung penguatan Pilar Ekonomi di Buru Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain: pertama, diversifikasi ekonomi hijau di tingkat lokal, dengan fokus pada pengembangan agroindustri ramah lingkungan dan ekowisata berbasis kearifan lokal yang dapat menciptakan nilai tambah tanpa merusak ekosistem. Kedua, peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja lokal melalui pelatihan keterampilan hijau (green skills) dan adopsi teknologi bersih untuk memastikan sektor-sektor utama tersebut lebih efisien dan berkelanjutan. Ketiga, integrasi kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka transformasi ekonomi hijau nasional, guna memastikan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, serta memaksimalkan potensi pembangunan ekonomi daerah dalam mendukung tujuan nasional. Keempat, peningkatan kualitas tata kelola lingkungan dan pengelolaan sampah terintegrasi untuk mempertahankan capaian Pilar Lingkungan yang sudah baik. Kelima, penguatan program pemberdayaan sosial berbasis komunitas untuk mendukung akselerasi Pilar Sosial secara inklusif dan mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Indeks Ekonomi Biru

Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Maluku pada tahun 2023 yang mencapai nilai 67,22, menempatkan Maluku pada peringkat kelima nasional, mencerminkan langkah awal yang signifikan dalam mengarusutamakan prinsip ekonomi biru dalam pembangunan daerah. Nilai ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara produktif dan berkelanjutan, yang mencakup aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir serta pelestarian ekosistem laut. Di dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, yang memiliki garis pantai yang luas dan ekosistem pesisir yang kaya, potensi besar untuk mendukung peningkatan nilai IBEI dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi utama.

Tabel 2.20. Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan

Kecamatan	Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepala Madan	5,223.87	5,223.87	3,421.84	3,456.85	3,491.41
Leksula	4,836.30	4,836.30	2,323.40	2,345.68	2,454.79
Fena Fafan	-	-			
Namrole	4,926.10	4,926.10	2,904.72	2,951.57	3,018.87
Waesama	1,789.98	1,789.98	2,199.20	2,224.06	2,275.58
Ambalau	1,206.84	1,206.84	1,558.85	1,588.57	1,600.12
Buru Selatan	17,983.09	17,983.09	12,408.01	12,566.73	12,840.77

Sumber: BPS/Dinas Perikanan Buru Selatan

C. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Pada tahun 2023, kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Provinsi Maluku tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni hanya sebesar 0,17%. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang juga dirasakan oleh Kabupaten Buru Selatan, yang menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan EBT, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, dan akses energi yang terbatas, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penetrasi EBT di Kabupaten Buru Selatan antara lain terbatasnya infrastruktur dan investasi di sektor energi terbarukan. Fasilitas pendukung EBT di wilayah ini masih sangat minim, sementara minat dan realisasi investasi di sektor tersebut belum optimal. Selain itu, rasio elektrifikasi yang masih di bawah rata-rata nasional juga menjadi masalah utama, yang berdampak pada rendahnya akses energi, terutama di kawasan pedesaan dan daerah-daerah terpencil di Buru Selatan. Kurangnya data yang memadai terkait potensi sumber daya EBT lokal, seperti energi laut, surya, dan bioenergi, turut menghambat perencanaan pembangunan infrastruktur EBT yang berbasis bukti dan sesuai kebutuhan daerah.

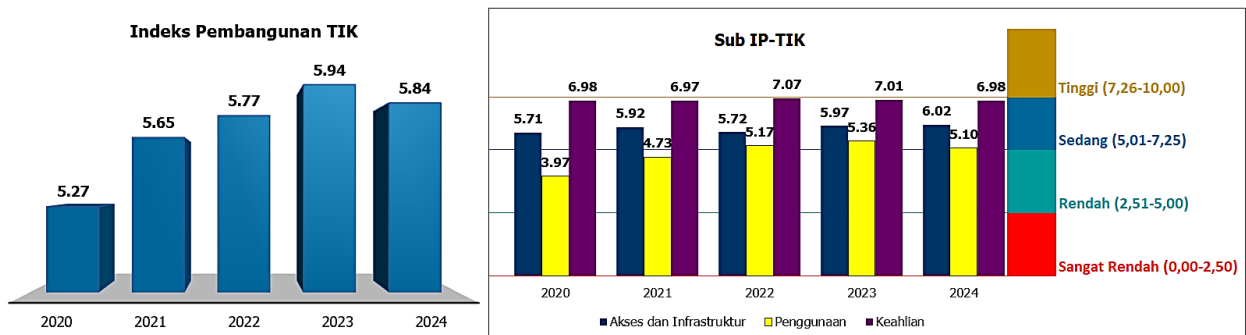
Di sisi lain, Kabupaten Buru Selatan menyimpan potensi besar dalam pengembangan EBT. Salah satunya adalah energi laut, mengingat posisi geografis Kabupaten Buru Selatan yang strategis di wilayah timur Indonesia, yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan arus laut dan gelombang sebagai sumber energi bersih. Selain itu, energi surya juga menjadi sumber potensial, mengingat tingginya intensitas penyinaran matahari sepanjang tahun, yang sangat ideal untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Air (Bedungan Waepao), terutama untuk wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik utama.

D. Transformasi Digital

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan Kabupaten Buru Selatan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. IP-TIK

mengukur sejauh mana wilayah ini telah mengembangkan infrastruktur digital, kualitas layanan internet yang tersedia, serta tingkat literasi digital masyarakat. Selain itu, indeks ini juga mencakup sejauh mana TIK telah terintegrasi dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, yang semuanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan nilai IP-TIK di Kabupaten Buru Selatan akan menjadi indikator utama dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan adaptif, memperkuat daya saing daerah di era global, serta memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Buru Selatan, pengembangan IP-TIK akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan yang berbasis teknologi dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.39. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku Tahun

Tren peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Maluku dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan implikasi yang juga dirasakan di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Buru Selatan. Peningkatan IP-TIK dari 5,27 pada tahun 2020 menjadi 5,84 pada tahun 2024 mencerminkan kemajuan dalam hal ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas pengguna TIK di daerah ini, meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Pada level sub-indeks, Peningkatan Akses dan Infrastruktur dari 5,71 ke 6,02 menunjukkan adanya kemajuan dalam hal konektivitas digital yang semakin baik. Peningkatan signifikan juga terjadi pada komponen Penggunaan dari 3,97 ke 5,10 (meskipun mengalami penurunan pada periode 2023-2024) menandakan bahwa adopsi TIK oleh masyarakat semakin luas, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Komponen Keahlian masih terjadi fluktuasi dan tidak terjadi peningkatan dalam 5 tahun terakhir, meskipun komponen tersebut menjadi penopang utama, karena menyumbang nilai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan kestabilan dan pemerataan untuk mempertahankan dan meningkatkan komponen ini.

Fluktuasi pada komponen keahlian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Buru Selatan masih memerlukan perhatian yang lebih serius, terutama dalam upaya meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis masyarakat. Oleh karena itu, tren ini menjadi dasar yang kuat untuk merancang strategi transformasi digital yang inklusif, dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur penunjang, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah-

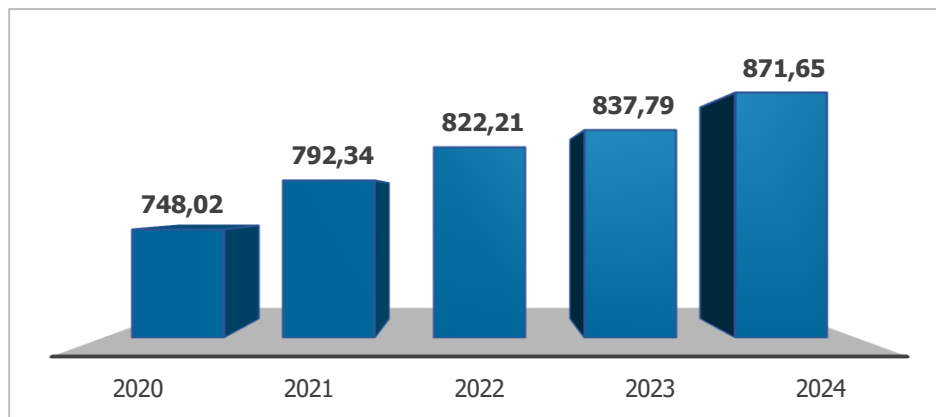
langkah ini akan memastikan pemanfaatan TIK yang berkelanjutan dan berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah kepulauan dan perdesaan.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat investasi fisik dalam perekonomian daerah, khususnya dalam bentuk penambahan aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, mesin, dan peralatan. Di Kabupaten Buru Selatan, PMTB berperan strategis dalam mendorong kapasitas produksi jangka panjang dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan nilai PMTB dapat mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi lokal serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemantauan tren PMTB menjadi relevan untuk menilai arah pembangunan struktural dan keberlanjutan investasi di wilayah ini.

Tren peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika positif dalam penguatan fondasi ekonomi daerah. Kenaikan nilai PMTB dari Rp748,02 miliar menjadi Rp871,65 miliar dalam lima tahun terakhir mencerminkan adanya peningkatan realisasi investasi fisik, yang mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan aset produktif lainnya. Kondisi ini menunjukkan membaiknya persepsi terhadap iklim investasi di daerah, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. PMTB yang terus meningkat juga menjadi indikasi adanya transformasi struktural ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan.



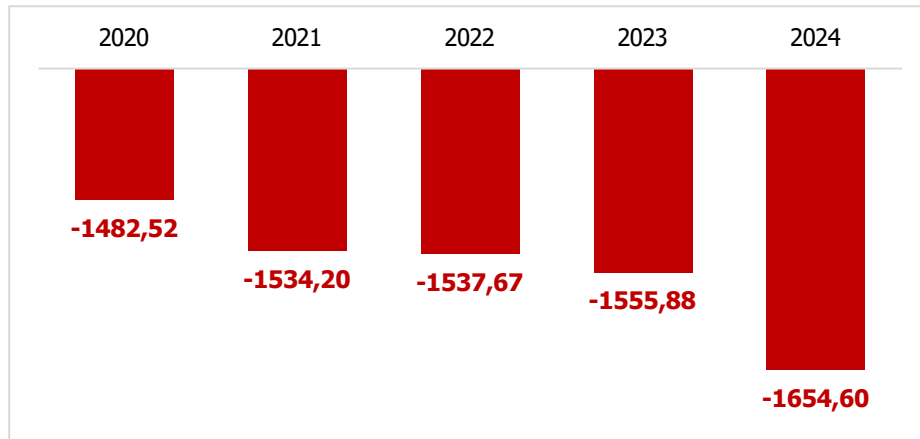
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.40. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Buru Selatan

2. Ekspor Barang dan Jasa

Net Ekspor Barang dan Jasa merupakan indikator penting yang mencerminkan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu daerah, menunjukkan kontribusi sektor perdagangan luar negeri terhadap perekonomian lokal. Di Kabupaten Buru Selatan, potensi ekspor sangat besar, terutama dari sektor pertanian dan kelautan. Komoditas seperti kelapa, kopra, dan hasil perikanan menjadi andalan dalam kegiatan ekspor daerah ini. Peningkatan nilai net ekspor dapat mencerminkan pertumbuhan produktivitas sektor-sektor tersebut serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah

dalam mendorong daya saing produk lokal di pasar global. Namun, tantangan seperti infrastruktur logistik, akses pasar, dan kualitas produk tetap perlu diperhatikan untuk memastikan pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekspor yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

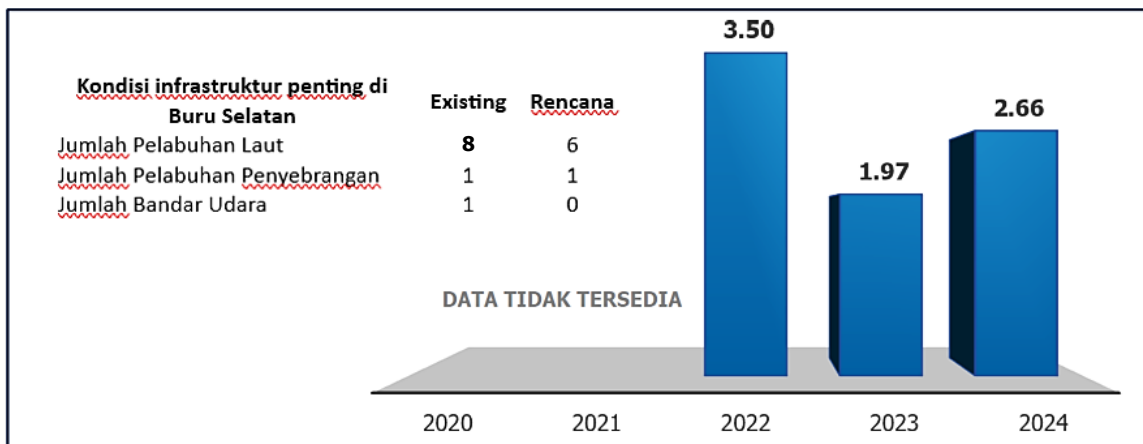
Grafik 2.41. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan

Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren defisit yang terus meningkat selama periode 2020 hingga 2024, dengan penurunan dari -1.482,52 miliar Rupiah pada 2020 menjadi -1.654,60 miliar Rupiah pada 2024. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap barang dan jasa dari luar daerah, serta lemahnya kontribusi sektor ekspor terhadap perekonomian lokal. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain keterbatasan daya saing produk unggulan daerah, infrastruktur logistik yang belum memadai, serta kurangnya diversifikasi komoditas ekspor. Untuk memperbaiki situasi ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan perlu mendorong hilirisasi produk unggulan, memperluas akses pasar domestik dan internasional, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung ekspor. Upaya ini penting guna memperkecil defisit neraca perdagangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indikator Infrastruktur

Indikator Infrastruktur merupakan bagian dari Pilar 2 dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Di Kabupaten Buru Selatan, indikator ini menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, dengan nilai sebesar 3,50 pada tahun 2022, menurun tajam menjadi 1,97 pada tahun 2023, lalu meningkat kembali ke angka 2,66 pada tahun 2024.



Sumber: BRIN (Data Diolah, 2025); Permenhub No. KP901 Tahun 2016; Dinas Perhubungan Prov. Maluku 2024

Grafik. 2.42. Indikator Proxy Infrastruktur (Pilar 2 IDSD) Kabupaten Buru Selatan

Sementara Ruas jalan terbangun di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun cenderung fluktuasi. Hal ini disebabkan terjadi perubahan status ruas jalan kabupaten berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan yang semula sebesar 465,95 km menjadi 384,29 Km di tahun 2023. Ruas jalan terbangun di kabupaten buru selatan dari tahun 2020 sepanjang 83,45 km atau 17,91 persen, meningkat menjadi 368,14 km atau sebesar 95,80 persen pada tahun 2024.

Tabel.2.21. Ruas Jalan di Kabupaten Buru Selatan

No	Infrastruktur	Panjang	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		(Km)	Jumlah Panjang terbangun (Km)	%	Jumlah Panjang terbangun (Km)	%	Jumlah Panjang terbangun (Km)	%	Jumlah Panjang terbangun (Km)	%	Jumlah Panjang terbangun (Km)	%
1	Jalan Kabupaten	465.95 Km Tahun 2019/384.29 Km Tahun 2023	83.45	17.91	402.46	86.37	340.36	73.05	356.94	92.88	368.14	95.80
2	Jalan Provinsi	115.70	72.25	62.45	46.00	39.76	46.00	39.76	76.03	65.71	85.70	74.07
3	Jalan Nasional	89.30	89.30	100.00	89.30	100.00	89.30	100.00	89.30	100.00	89.30	100.00

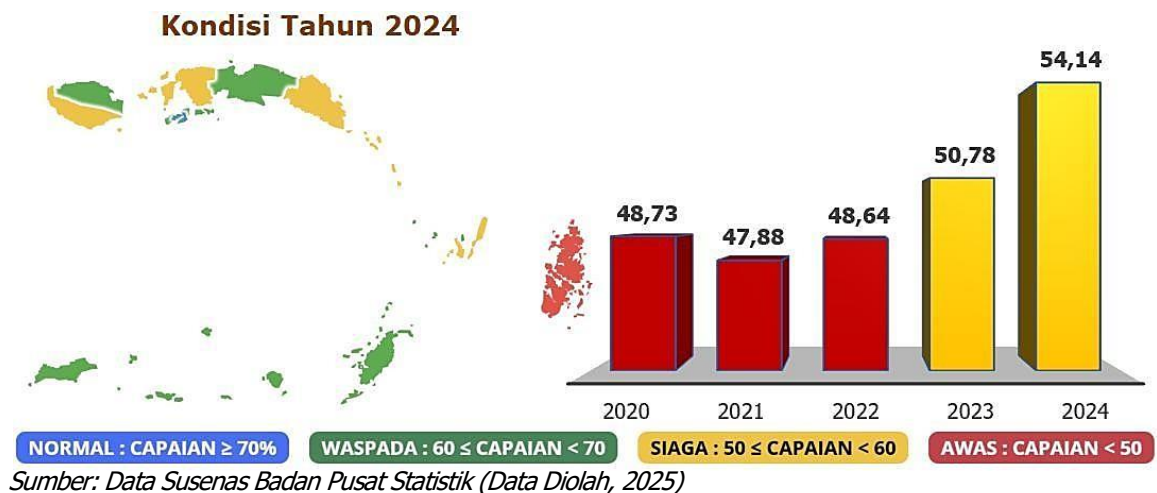
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan, Maluku Dalam Angka

Fluktuasi ini mencerminkan kondisi infrastruktur dasar yang masih belum stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas layanan. Keterbatasan pada aspek konektivitas jalan, akses air minum layak, dan elektrifikasi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi capaian indikator. Hal ini berdampak langsung terhadap efisiensi mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan infrastruktur masih menjadi isu struktural yang signifikan di Kabupaten Buru Selatan. Tingkat aksesibilitas wilayah yang rendah turut mempengaruhi efektivitas aktivitas ekonomi, pelayanan sosial, dan konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing daerah secara keseluruhan.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Indikator ini mencakup persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kualitas dasar, seperti ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai, penerangan, dan ventilasi yang baik. Akses terhadap hunian layak tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di Kabupaten Buru Selatan, pemenuhan hunian layak menjadi tantangan, mengingat terbatasnya infrastruktur dan ketersediaan fasilitas dasar, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.



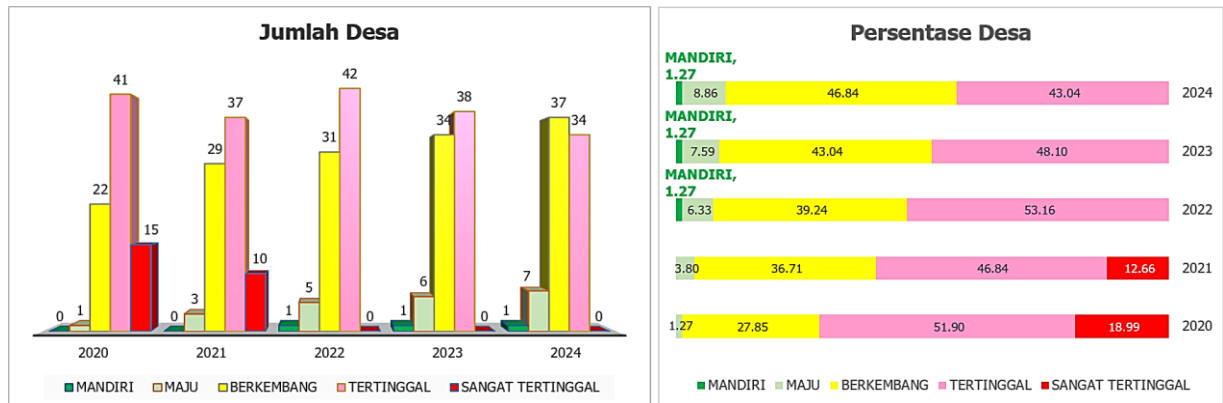
Grafik 2.43. Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Buru Selatan

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni tercatat sebesar 48,73%, dan meningkat menjadi 54,14% pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan dalam akses hunian layak, sebagian besar wilayah Kabupaten Buru Selatan masih berada dalam kategori Siaga. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas hunian layak perlu diprioritaskan lebih lanjut, dengan fokus pada wilayah yang masih memiliki akses terbatas. Peningkatan infrastruktur dasar, akses air bersih, dan perencanaan tata ruang yang lebih baik akan menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian hunian layak di seluruh wilayah.

3. Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Mandiri merupakan salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Indeks ini mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola potensi, pelayanan dasar, dan kelembagaan lokal secara berkelanjutan. Di Kabupaten Buru Selatan, capaian Indeks Desa Mandiri masih menunjukkan tantangan yang cukup besar, ditandai dengan masih dominannya desa-desa yang masuk dalam kategori berkembang atau tertinggal. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas kelembagaan, infrastruktur dasar, serta akses terhadap layanan publik dan ekonomi produktif di tingkat desa belum sepenuhnya merata. Peningkatan indeks ini sangat penting sebagai fondasi dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif,

partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat struktur perekonomian lokal dan memperkecil kesenjangan wilayah.



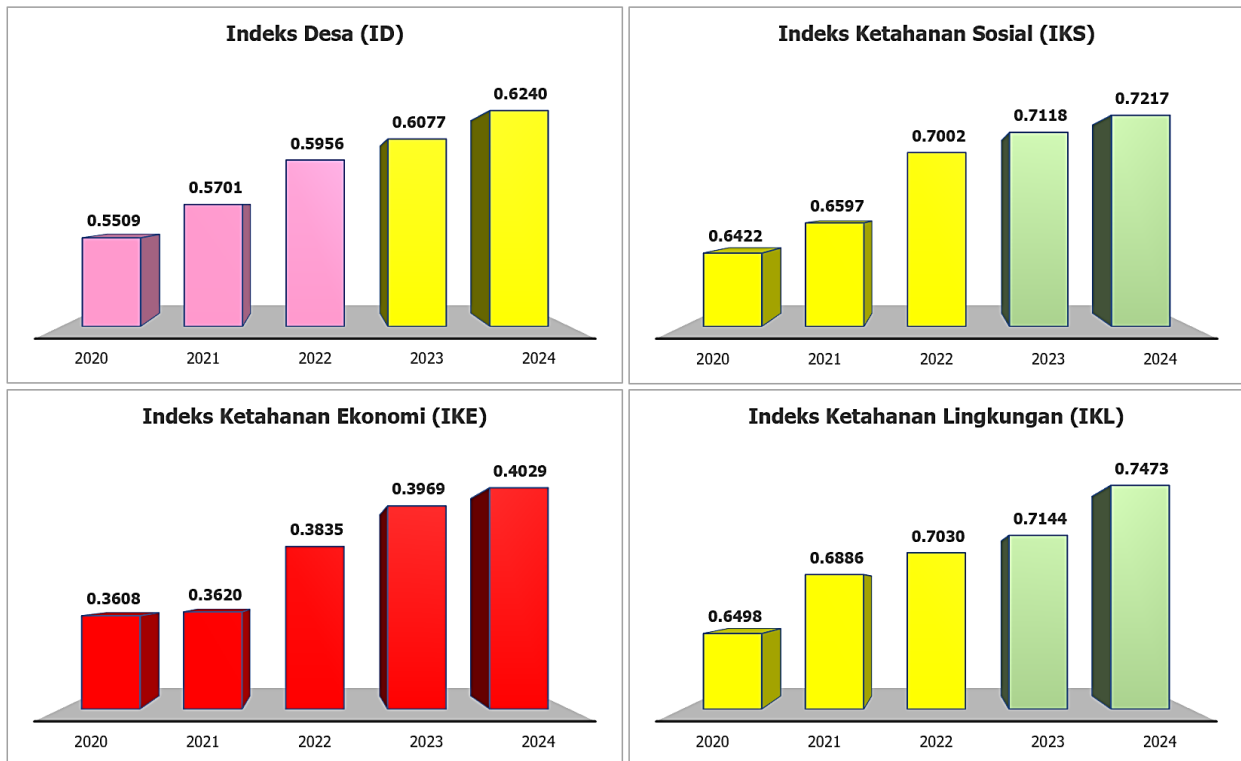
Sumber: Kemendes PDTT (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.44. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Buru Selatan

Perkembangan Indeks Desa Mandiri (ID) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan arah yang positif dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, terjadi pergeseran komposisi desa yang mencerminkan dinamika pembangunan desa secara gradual namun konsisten. Proporsi Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan signifikan dari 18,99% (15 desa) pada tahun 2020 menjadi 0% pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan status desa ke kategori yang lebih baik. Proporsi Desa Mandiri mengalami peningkatan namun belum signifikan sejak tahun 2020-2024 hanya mengalami kenaikan 1,27% yakni terdapat 1 desa yang berstatus Mandiri yaitu Desa Labuang. Proporsi desa yang termasuk kategori Maju dan Berkembang mengalami peningkatan, sedangkan kategori Tertinggal mengalami fluktuasi (namun turun dalam 3 tahun terakhir). Hal ini mencerminkan tantangan struktural dalam mendorong desa mencapai level kemandirian penuh, baik dari sisi kelembagaan, ketahanan ekonomi, maupun akses layanan publik. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa intervensi pembangunan desa telah menghasilkan dampak yang terukur, namun percepatan dan konsistensi kebijakan tetap diperlukan untuk memperkuat fondasi transformasi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

• **Gambaran Umum Capaian ID di Setiap Wilayah Kecamatan**

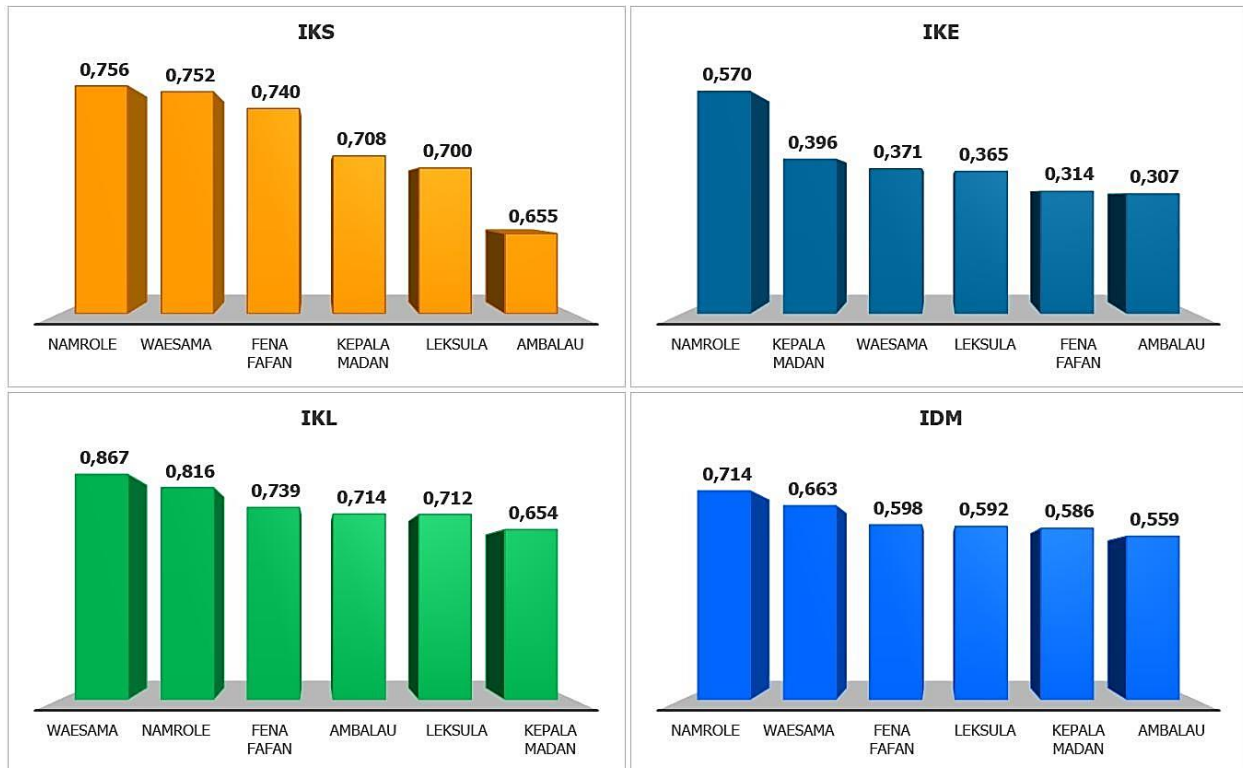
Gambaran umum capaian Indeks Desa (ID) per wilayah kecamatan di Kabupaten Buru Selatan memberikan perspektif yang lebih terperinci mengenai sebaran tingkat kemandirian desa di masing-masing wilayah administratif. Analisis per kecamatan menunjukkan adanya disparitas capaian pembangunan desa, di mana beberapa kecamatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan status desa dari tertinggal menjadi berkembang atau maju, sementara kecamatan lainnya masih menghadapi tantangan mendasar dalam aspek infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal. Sebaran desa tertinggal masih cukup dominan di kecamatan-kecamatan dengan keterbatasan akses geografis dan sarana transportasi, sedangkan desa-desa di wilayah dengan intervensi program pembangunan yang lebih intensif cenderung menunjukkan capaian ID yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemetaan capaian ID per kecamatan menjadi instrumen penting dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi kewilayahan.



Sumber: Kemendes PDTT (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.45. Capaian ID di Kabupaten Buru Selatan

Capaian Indeks Desa (ID) di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan skor selama periode 2020-2024. Perkembangan tersebut belum signifikan dalam 5 tahun terakhir, karena hanya meningkat dari kategori Tertinggal menjadi Berkembang. Dimensi yang menjadi pemberat dalam peningkatan ID di Kabupaten Buru Selatan adalah Ketahanan Ekonomi (IKE) karena peningkatannya sangat terbatas dan memberi kontribusi yang sangat kecil dibandingkan dimensi lain. Pada periode 2020-2024, dimensi tersebut masih berada pada kategori Sangat Tertinggal. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih kuat dalam pengembangan ekonomi lokal, penguatan UMKM desa, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dimensi Ketahanan Sosial (IKS) dan Ketahanan Lingkungan (IKL) menunjukkan tren peningkatan yang hampir sama, namun belum maksimal karena kenaikannya cukup lambat. Hingga tahun 2024 capaian Kabupaten Buru Selatan pada kedua dimensi tersebut masih berada pada kategori Maju. Capaian IKS mencerminkan adanya penguatan kapasitas sosial desa dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, namun belum optimal. Sementara itu, dimensi IKL mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur desa berjalan dengan baik dan masih perlu untuk ditingkatkan, mengingat sumber daya yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat besar. Meskipun belum maksimal, secara umum capaian IDM di Kabupaten Buru Selatan memperlihatkan bahwa upaya pembangunan desa telah memberikan dampak positif terutama pada aspek sosial, meskipun dimensi ekonomi dan lingkungan masih memerlukan penguatan kebijakan yang lebih strategis dan kontekstual.



Sumber: Kemendes PDTT (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.46. Capaian ID menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2024

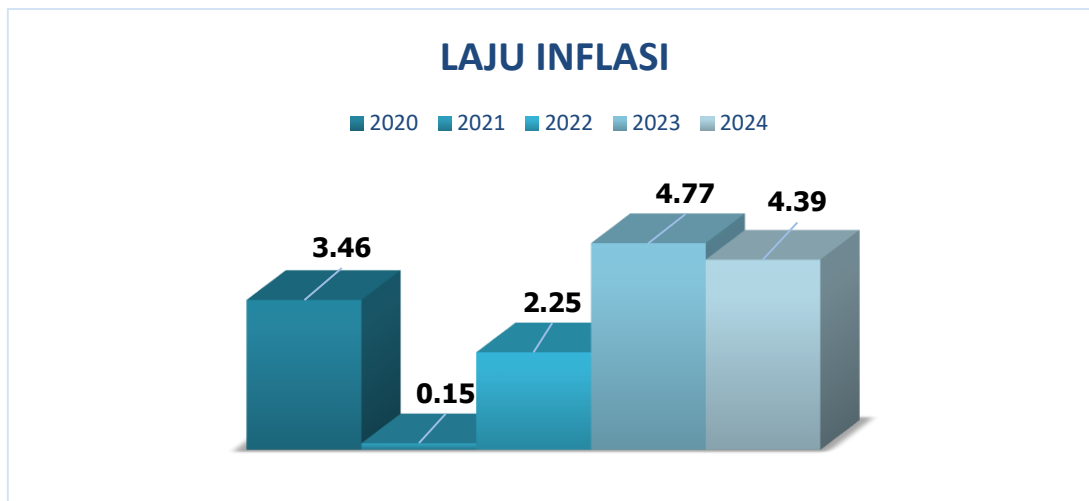
Capaian Indeks Desa (ID) tahun 2024 di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan adanya disparitas pembangunan antar wilayah yang mencerminkan ketimpangan dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Kecamatan Namrole mencatat nilai ID tertinggi sebesar 0,714, didukung oleh capaian optimal pada ketahanan sosial (IKS = 0,756), ekonomi (IKE = 0,570), dan lingkungan (IKL = 0,816), yang menunjukkan sinergi pembangunan antar dimensi secara relatif seimbang. Sebaliknya, Kecamatan Ambalau memiliki ID terendah yaitu 0,559, yang disebabkan oleh rendahnya capaian pada dimensi IKS (0,655) dan IKE (0,307), serta masih terbatasnya ketahanan lingkungan (IKL = 0,714). Ketahanan ekonomi secara umum menjadi dimensi dengan capaian terendah di sebagian besar kecamatan, dengan nilai IKE di bawah 0,400 pada empat dari enam kecamatan, mengindikasikan perlunya akselerasi program pemberdayaan ekonomi lokal, akses pasar, serta penguatan infrastruktur pendukung. Sementara itu, dimensi ketahanan lingkungan menunjukkan capaian relatif baik, terutama di Waesama (IKL = 0,867) dan Namrole (IKL = 0,816). Secara umum, capaian ID tahun 2024 menegaskan urgensi pendekatan pembangunan berbasis wilayah dan dimensi, khususnya dalam penguatan ketahanan ekonomi desa sebagai prasyarat penting menuju desa mandiri dan inklusif.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Indikator Stabilitas Ekonomi Makro (Pilar 4 IDSD)

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Pilar ini mencerminkan kondisi fiskal dan moneter yang relatif terkendali, termasuk pengelolaan inflasi, stabilitas harga, dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, stabilitas ekonomi makro

berperan penting dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengurangi volatilitas yang dapat menghambat investasi jangka panjang. Nilai indikator pada pilar ini dapat memberikan gambaran sejauh mana ketahanan ekonomi daerah mampu merespons tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas atau gangguan rantai pasok, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi secara menyeluruh.



Sumber: TPID Kabupaten Buru Selatan (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.47. Laju Inflasi Kabupaten Buru Selatan

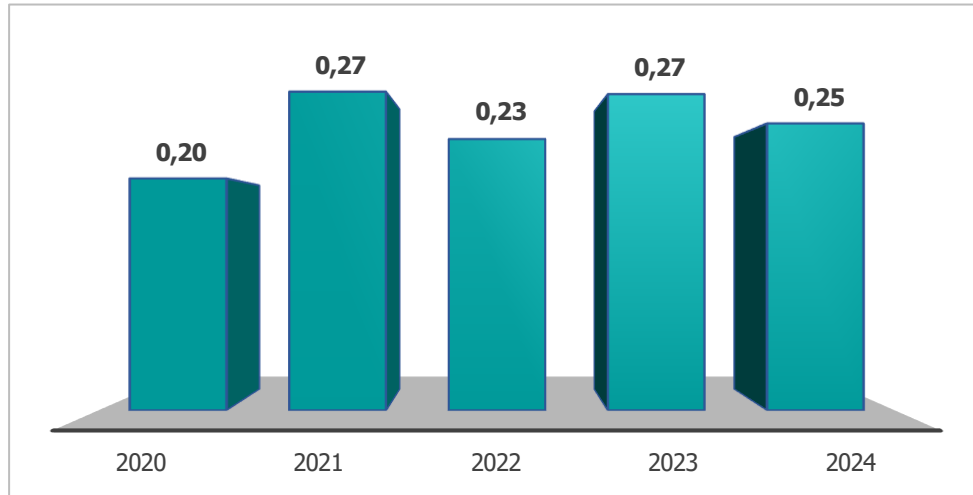
Pertumbuhan laju inflasi Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren peningkatan signifikan namun cenderung fluktuasi. Hal ini disumbang dari 1 (satu) kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan 1 (satu) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dimana pada tahun 2020 laju inflasi mencapai 3,46 persen, turun menjadi 0,15 persen di tahun 2021 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 4,39 persen. Angka ini menunjukkan ekonomi tumbuh, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga harga barang dan jasa tetap terjangkau, sementara inflasi terlalu rendah (deflasi) juga tidak baik karena kurang menarik bagi bisnis, dan inflasi tinggi (di atas 10%) berbahaya karena menurunkan daya beli dan stabilitas.

Pertumbuhan laju inflasi di atas masih berada dalam kategori ideal, sehingga menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan fiskal yang efektif, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan asli dari aktivitas ekonomi lokal. Di Kabupaten Buru Selatan, rasio ini berfungsi sebagai ukuran efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak, seperti pajak hotel, restoran, reklame, dan lainnya, dalam konteks struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer. Rasio yang rendah dapat mengindikasikan ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan belum optimalnya pemungutan pajak daerah, sementara rasio yang meningkat mencerminkan perbaikan dalam

basis pajak, administrasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, indikator ini penting untuk mengevaluasi kapasitas kemandirian fiskal daerah dan potensi penguatan pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.



Sumber: Diolah oleh PSP Unpatti 2025

Grafik 2.48. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Buru Selatan

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk menilai kapasitas fiskal dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, rasio ini menunjukkan fluktuasi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 0,27%, serta nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 0,20%. Ketidakstabilan rasio ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19, serta faktor internal seperti kapasitas administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak. Meskipun terdapat perbaikan pada beberapa tahun, capaian rasio yang relatif rendah menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total output ekonomi masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem perpajakan daerah, baik dari sisi kelembagaan, perluasan basis pajak, maupun intensifikasi pengawasan, agar kapasitas fiskal daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan mandiri.

3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)

Selama ini, data inklusi keuangan hanya tersedia pada tingkat provinsi melalui Sistem Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Hal ini menjadi kendala dalam pemantauan dan evaluasi kinerja inklusi keuangan secara lebih terperinci di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, dikembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) sebagai indikator alternatif (proxy indicator) yang bersifat komposit untuk mengukur tiga dimensi utama inklusi keuangan, yaitu akses, penggunaan, dan kedalaman layanan keuangan di daerah.

IAKD dirancang dengan memanfaatkan data dari sisi suplai (supply-side) maupun permintaan (demand-side), serta mencakup indikator strategis seperti jumlah kepemilikan rekening, sebaran titik layanan keuangan, dan pemanfaatan produk keuangan. IAKD berperan sebagai instrumen pemantauan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), alat

analisis ketimpangan akses keuangan antarwilayah, serta sebagai dasar perumusan kebijakan inklusi keuangan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Selain melengkapi fungsi SNLIK, IAKD mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih strategis, adaptif, dan terukur dalam perencanaan dan implementasi program-program perluasan akses keuangan, sekaligus menjadi acuan dalam optimalisasi intervensi kebijakan di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) Kabupaten Buru Selatan tercatat sebesar 2,0826, yang menempatkan Kabupaten Buru Selatan pada peringkat ke-444 dari 461 kabupaten/kota secara nasional, serta peringkat ke-10 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Capaian ini mencerminkan tingkat penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan yang masih relatif terbatas, sekaligus menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam pelaksanaan program inklusi keuangan di daerah.

Ke depan, arah kebijakan penguatan inklusi keuangan di Kabupaten Buru Selatan perlu difokuskan pada peningkatan indikator-indikator IAKD yang saat ini masih berada dalam kategori sedang. Upaya akseleratif melalui penguatan peran TPAKD, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong Kabupaten Buru Selatan menuju kategori —Unggul|| dalam pemeringkatan IAKD nasional.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan bersifat tepat guna, tepat sasaran, serta selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melalui IRH, diharapkan tercipta sistem regulasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

IRH merupakan mandat dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Untuk operasionalisasinya, IRH dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk Kabupaten Buru Selatan dalam lima tahun terakhir masuk dalam kategori buruk, dimana pada tahun 2020 IRH mencapai 32,65 poin meningkat menjadi 38,65 poin pada tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengukur sejauh mana capaian reformasi hukum di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusional daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

Tabel. 2.22. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Buru Selatan

No	Indikator Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	32.65	34.15	35.65	37.15	38.65

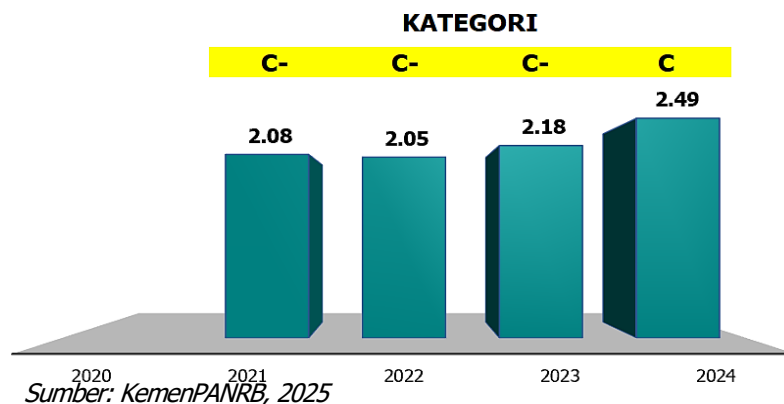
2. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IRB mencerminkan efektivitas penerapan prinsip *good governance* serta transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. IRB disusun oleh Kementerian PANRB berdasarkan delapan area perubahan utama, seperti manajemen perubahan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas kinerja, hingga pelayanan publik.

Pada tahun 2024, capaian IRB Kabupaten Buru Selatan berada pada kategori CC, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih berada pada tingkat cukup. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas institusional, khususnya dalam penguatan tata kelola, SDM aparatur, dan akuntabilitas kinerja, agar sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.

3. Indeks Pelayanan Publik (PP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP bertujuan menilai sejauh mana pelayanan publik memenuhi prinsip cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengukuran IPP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara berkala, berdasarkan enam aspek utama: Kebijakan Pelayanan; Profesionalisme SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Konsultasi dan Pengaduan; serta Inovasi Pelayanan. Nilai IPP menjadi dasar evaluasi kinerja unit pelayanan, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan.



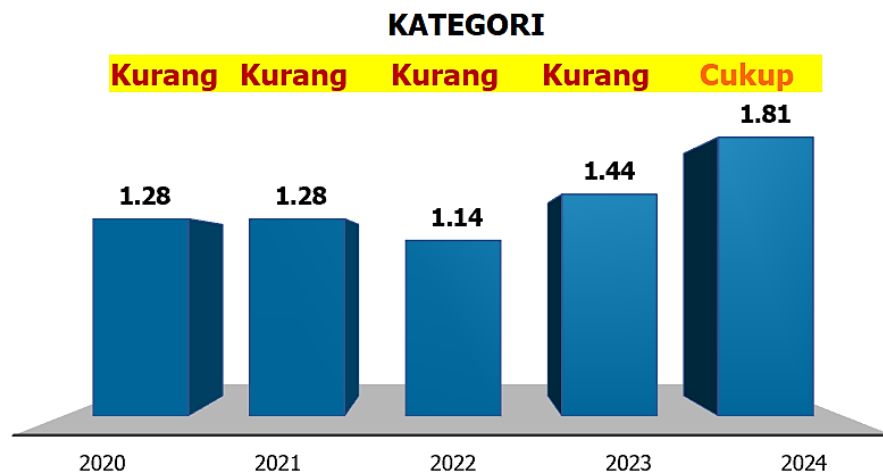
Grafik 2.49. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Buru Selatan

Capaian IPP Kabupaten Buru Selatan periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021–2023, IPP masih berada pada kategori C-, dengan skor berturut-turut 2,08 (2021), 2,05 (2022), dan 2,18 (2023). Pada tahun 2024, capaian IPP meningkat ke kategori C dengan skor 2,49. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam kualitas pelayanan publik, meskipun penguatan lebih lanjut masih diperlukan di seluruh aspek pelayanan, guna mendorong peningkatan kualitas layanan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPBE bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

Pengukuran SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara periodik, berdasarkan empat domain utama, yaitu: Kebijakan Internal SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Layanan SPBE. Nilai SPBE menjadi dasar evaluasi sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah terintegrasi dalam proses pemerintahan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pemberian layanan publik. Capaian SPBE juga menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sumber: KemenPANRB, 2025

Grafik 2.50. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Buru Selatan

Capaian SPBE Kabupaten Buru Selatan periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 hingga 2023, SPBE Kabupaten Buru Selatan berada dalam kategori Kurang. Pada tahun 2024, capaian SPBE meningkat ke kategori Cukup dengan skor 1,81. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meskipun penguatan lebih lanjut masih diperlukan, khususnya dalam penguatan tata kelola digital, integrasi sistem layanan, serta pengembangan inovasi layanan berbasis elektronik, guna mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital yang adaptif dan responsif.

5. Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. SAKIP bertujuan memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dilaksanakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented government).

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kementerian PANRB secara berkala, berdasarkan lima komponen utama: Perencanaan kinerja; Pengukuran kinerja; Pelaporan kinerja; Evaluasi kinerja internal; dan Pencapaian kinerja. Nilai SAKIP menjadi dasar evaluasi sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Peningkatan nilai SAKIP diharapkan dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat budaya kinerja di lingkungan pemerintahan.

Selama periode 2021–2024, capaian Indeks SAKIP Kabupaten Buru Selatan menunjukkan stabilitas pada kategori C, yang berarti pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah berjalan pada tingkat cukup. Kategori ini dicapai secara konsisten dalam empat tahun berturut-turut. Capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat pemenuhan dasar dalam penerapan manajemen kinerja, masih diperlukan penguatan yang lebih komprehensif dalam aspek perencanaan yang berbasis kinerja, pengukuran capaian hasil, serta pelaporan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, guna mendorong peningkatan kategori SAKIP di masa mendatang.

6. Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil tersebut dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional yang memberikan gambaran umum mengenai persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terhadap praktik integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2024, pelaksanaan survei pada 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan dua badan usaha milik negara (BUMN) menunjukkan skor 71,53 atau nilai Indeks Integritas Nasional meningkat sebesar 0,56 poin dari tahun sebelumnya, meskipun secara keseluruhan masih berada dalam kategori rentan. Temuan utama SPI 2024 antara lain masih adanya praktik suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun promosi/mutasi jabatan di berbagai instansi pemerintahan.

Bagi Kabupaten Buru Selatan, hasil dan temuan SPI 2024 ini menjadi perhatian penting, mengingat pemerintah daerah merupakan bagian dari entitas yang dinilai dalam SPI nasional. Meskipun skor spesifik Kabupaten Buru Selatan tidak dirinci dalam laporan nasional, kecenderungan temuan umum tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan integritas aparatur, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan arahan KPK agar setiap pemerintah daerah melakukan

evaluasi, perbaikan, serta penguatan pengendalian internal berdasarkan hasil SPI, guna mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

7. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda dan Perkada merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan regulasi daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana regulasi yang ditetapkan benar-benar diterapkan, ditaati, dan berdampak sesuai tujuan pembentukannya, termasuk melalui aspek sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan evaluasi.

Pada tahun 2024, capaian Kabupaten Buru Selatan berada pada angka 39,13%, yang menunjukkan bahwa kurang dari separuh Perda dan Perkada telah ditegakkan secara efektif. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan pada aspek kapasitas kelembagaan, koordinasi antar perangkat daerah, dan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan penegakan regulasi menjadi agenda strategis dalam RPJMD 2025–2029, guna memperkuat kepastian hukum, menciptakan ketertiban umum, serta mewujudkan tata pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

8. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi HAM merupakan indikator pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang mencerminkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di berbagai sektor pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM wilayah Maluku, capaian aksi HAM untuk Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai 54,30 persen meningkat menjadi 77,54 persen pada tahun 2024. Capaian ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan evaluasi kinerja HAM di tingkat daerah secara terukur dan terstandar.

Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan sistem pelaporan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan layanan publik, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak.

Tabel. 2.23 Capaian Aksi HAM Kabupaten Buru Selatan

No	Indikator Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Aksi HAM (Persen)	54.30	94.44	92.21	87.40	77.54

Sumber : Kemenkumham wilayah Maluku, 2025

9. Opini BPK Terhadap LKPD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Opini ini diberikan berdasarkan hasil audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

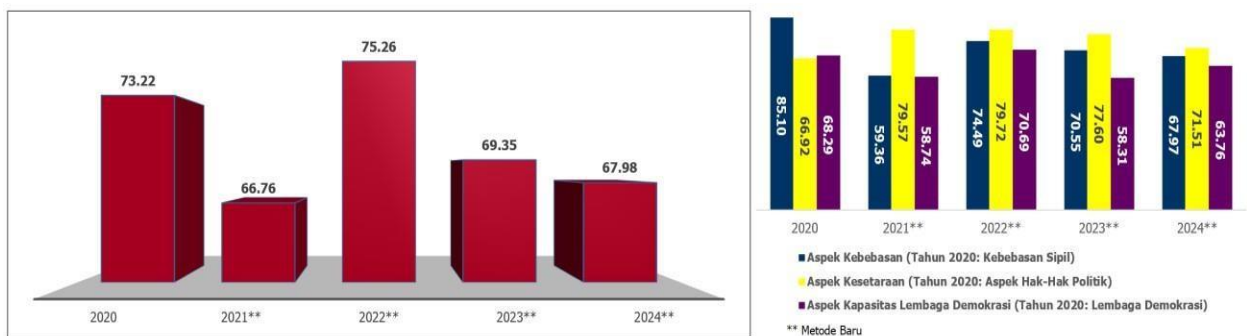
Selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2022 hingga 2024, Kabupaten Buru Selatan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun masih terdapat beberapa pengecualian, yang umumnya berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, aset tetap, atau penyajian akun-akun tertentu.

Capaian opini WDP secara berulang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan struktural dan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup penguatan sistem pengendalian intern, penatausahaan aset, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. IDI terdiri dari tiga dimensi utama: kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Indeks ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100, yang menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan di suatu daerah. IDI berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, IDI juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi publik serta perlindungan hak-hak sipil secara berkelanjutan. Dengan demikian, IDI memberikan arahan dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Grafik 2.51. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Maluku antara 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika dalam penerapan prinsip demokrasi, yang juga tercermin di Kabupaten Buru Selatan. Pada tahun 2020, IDI Provinsi Maluku mencapai 73,22, mencerminkan capaian cukup baik, dimana terdapat peningkatan partisipasi politik dan penguatan hak-hak sipil. Namun, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 69,35 disebabkan perubahan metodologi pengukuran, bukan kemunduran substansial. Pada tahun 2022, IDI kembali naik menjadi 75,26, yang menunjukkan kemajuan dalam tata kelola demokrasi dan kualitas pemilihan umum. Namun, pada

tahun 2023 dan 2024, IDI mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga kebebasan sipil dan efektivitas lembaga demokrasi, yang juga dirasakan di Kabupaten Buru Selatan. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, transparansi politik, dan fungsi lembaga demokrasi lokal.

Bagi Kabupaten Buru Selatan, IDI menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian dalam pengelolaan demokrasi lokal. Penguatan partisipasi politik masyarakat, perlindungan hak sipil, serta peningkatan kapasitas lembaga demokrasi menjadi langkah strategis untuk mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. Indikator Keamanan dan Ketertiban

Indikator Keamanan dan Ketertiban merupakan salah satu parameter penting dalam menilai stabilitas sosial dan kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, indikator ini mencerminkan tingkat gangguan keamanan, konflik sosial, serta efektivitas peran aparat dan lembaga masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Stabilitas keamanan yang terjaga secara konsisten menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan, investasi, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat daya tarik daerah dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.24. Indikator Keamanan dan Ketertiban Proxy Provinsi Maluku

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	303	177	128	-	-
2.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	5350	3139	2383	-	-

Sumber : BPS, Statistik Kriminal 2023

Berdasarkan data yang ada, untuk indikator rasio kriminalitas dan angka kejahatan Kabupaten Buru Selatan tidak tersedia, dan dapat dilihat untuk data Provinsi Maluku prokxy Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 303 ditahun 2020 menurun menjadi 128 ditahun 2022. Hal ini mengindikasikan untuk seluruh kabupaten kota Provinsi Maluku semakin baik.

3. Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang berhasil diselesaikan merupakan indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin keamanan lingkungan masyarakat. Indikator ini mencerminkan kapasitas responsif dan efektivitas koordinasi aparat dalam menangani potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Buru Selatan, pada tahun 2023 dan 2024, seluruh laporan gangguan Trantibum berhasil ditangani, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%.

Capaian ini mencerminkan tingginya kapasitas respons dan penanganan gangguan Trantibum secara efektif oleh aparat daerah. Ke depan, kinerja ini perlu dipertahankan dan diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik di tingkat lokal.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Sejak tahun 2022, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Buru Selatan tidak tersedia dalam sistem pemeringkatan nasional akibat ketidaklengkapan data pada salah satu pilar utama penyusun indeks. Ketiadaan nilai IDSD mencerminkan adanya kendala struktural dalam pengelolaan dan pelaporan data sektoral di tingkat daerah, yang berdampak langsung pada tidak terpenuhinya syarat kuantitatif minimum untuk estimasi IDSD. Dalam konteks perencanaan pembangunan, absennya indikator ini menjadi hambatan dalam mengukur secara objektif kinerja daya saing daerah serta efektivitas kebijakan pembangunan berbasis keunggulan lokal. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi statistik sektoral menjadi elemen fundamental guna menjamin keterukuran dan keterpantauan kinerja daya saing daerah secara berkelanjutan.

Meskipun Kabupaten Buru Selatan tidak memiliki nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) secara agregat sejak tahun 2022 akibat ketidaklengkapan data, kondisi terkini pada tahun 2024 masih dapat dicermati melalui komponen antar-pilar yang tersedia. Analisis terhadap pilar-pilar IDSD menunjukkan bahwa aspek keterampilan (skills), stabilitas ekonomi makro, dan dinamisme bisnis merupakan kekuatan relatif daerah. Ketiga pilar ini mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang mulai berkembang, kestabilan ekonomi lokal, serta potensi kewirausahaan yang mulai terbentuk.



Sumber: BRIN (Data Diolah, 2025)

Gambar 2.11. Kondisi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Buru Selatan

Pada tahun 2024, beberapa pilar mencatatkan nilai yang masih sangat rendah dan perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Pilar sistem keuangan (skor 1,20) dan kapabilitas inovasi (skor 1,48) mencerminkan lemahnya dukungan terhadap pembiayaan produktif dan rendahnya ekosistem inovasi, termasuk infrastruktur teknologi dan riset. Selain itu, pilar pasar tenaga kerja dengan skor 2,29 mengindikasikan adanya kendala struktural dalam efisiensi pasar kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketimpangan antar-pilar ini menandakan perlunya pendekatan penguatan daya saing yang lebih seimbang dan berbasis bukti, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.25. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buru Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,01	-0,01	5	3,5	5,01	5,53	5,02	4,58	4,97
1.02	Laju inflasi (%)	2,7	2,7	3,5	2,2	3,5	4,77	3,5	5,12	
1.03	PDRB per kapita (Rp.)	22.100.000	22.100.000	22.431.500	22.430.000	22.767.973	22.760.000	23.109.492	23.100.000	13.230.000
1.04	Indeks Gini	0,32	NA	0,31	NA	0,3	NA	0,29	NA	0,23
1.05	Rasio Penduduk miskin (%)	15,75	15,75	15,59	15,89	15,44	14,75	15,28	15,28	14,91
1.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,99	73,99	74,73	75,4	75,48	74,82	76,23	68,72	NA
1.07	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,31	2,31	2,3	1,63	2,29	0,98	2,28	0,97	1,35
1.08	Rasio penduduk yang bekerja (%)	97,69	97,68	97,7	98,05	97,71	99,02	97,72	99,03	NA
2	Kesejahteraan Sosial									
2.01	Pendidikan									
2.01.01	Angka melek huruf (%)	97,68	97,68	97,78	90,62	97,88	95,33	97,97	95,73	NA
2.01.02	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,69	12,7	12,7	12,71	12,83	12,72	12,84	NA
2.01.03	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,94	7,94	8,06	7,95	8,18	8,06	8,3	8,23	NA
2.01.04	Angka Partisipasi Kasar									
	- SD/MI	114,64	114,64	100	116,1	100	114,29	100	126,58	99,15
	- SLTP/MTs	88,48	88,48	88,92	86,8	89,37	80,76	89,81	100,53	88,48
	- SMA/SMK/MA	98,26	98,26	98,36	100,31	98,46	101,09	98,56	87,97	NA
2.01.05	Angka Partisipasi Murni									
	- SD/MI	97,86	97,86	97,96	97,83	98,06	96,96	98,15	96,99	97,86
	- SLTP/MTs	80,19	80,19	80,27	80,13	80,35	79,97	80,43	82,31	NA
	- SMA/SMK/MA	65,79	65,79	65,86	66,23	65,92	66,69	65,99	65,12	NA
2.01.06	Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan :									

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
2.01.06.01	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.06.02	SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.01.06.03	SMP/MTS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.01.06.04	SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.01.06.05	D1/D2/D3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.01.06.06	D4/S1/S2/S3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.03	Kesehatan									
2.03.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	99,14	90,85	100	90,03	100	89,13	100	84,23	NA
2.03.02	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	66,27	66,45	66,6	69,54	66,93	69,85	67,27	70,11	NA
2.03.03	Persentase Gizi buruk (%)	8,7	8,7	8,05	10	7,44	6	6,89	4,19	NA
2.04	Kesempatan Kerja									
2.04.01	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97.69	97,68	97.7	98,05	97.71	99,02	97.72	99,03	NA
2.04.02	Angka Partisipasi Kerja (%)	73.99	73,99	74.73	75,4	75.48	74,82	76.23	68,72	NA
2.05	Angka Kriminalitas									
2.05.01	Rasio Kriminalitas (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fokus Seni dan Budaya									
3.01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	3	1	3	1	3	1	3	1	NA
3.02	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	NA
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Pelayanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan									
1.01	Pendidikan dasar:									
1.01.01	SD/MI									
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	98	98	98,25	98,09	98,49	97,09	98,74	97,38	98
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah	97,77	95,14	98,01	100,43	98,26	100,09	98,51	119,65	-
	c. Rasio guru/ murid	54,5	54,5	54,78	86,6	55,06	91,34	55,34	111,98	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	52,55	NA	54,05	NA	55,55	NA	57,05	NA	NA
1.01.02	SMP/MTs									
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	95,21	95,21	95,45	94,76	95,69	93,68	95,93	93,44	98
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	94,47	94,46	94,71	94,87	94,94	95,08	95,18	113,15	114
	c. Rasio guru/ murid	100	119,55	100	148,87	100	167,95	100	221,49	NA
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-10.000)	45,6	NA	47,1	NA	48,66	NA	50,21	NA	NA
1.03	Fasilitas Pendidikan									
	1. Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	83,18	NA	83,6	NA	84,01	NA	84,43	NA	-
	2. Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs (%)	85,11	NA	85,54	NA	85,96	NA	86,39	NA	-
1.04	PAUD									
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	3.415	2.061	3.432	1.945	3.449	2.245	3.466	2.266	2300
1.05	Angka Putus Sekolah									
1.05.01	SD/MI	0,75	0,87	0,38	NA	0,19	NA	0,09	NA	0,87
1.05.02	SMP/MTs	4,8	11,79	2,4	14,09	1,2	16,15	0,6	NA	11,79
1.06	Angka Kelulusan									
	1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	97	NA	97,49	NA	97,97	NA	98,46	NA	NA
	2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	96	NA	96,86	NA	97,74	NA	98,62	NA	NA
	3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100	NA	100	NA	100	NA	100	NA	NA
	4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96	NA	96,86	NA	97,74	NA	98,62	NA	NA
	5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	97	NA	97,87	NA	98,75	NA	99,64	NA	NA
	6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	95,15	66,72	95,63	67,49	96,1	68,19	96,58	68,4	NA
2	Kesehatan									
2.01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	1,61	1,6	1,62	2,5	1,63	2,8	1,64	2,8	NA
2.02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan	0,66	0,65	0,69	0,66	0,73	0,66	0,76	0,68	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	penduduk (/1.000)									
2.03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	NA
2.04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0,2	0,29	0,21	0,4	0,22	0,26	0,23	0,25	NA
2.05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	7,39	6,14	7,76	6,51	8,15	2,36	8,55	2,33	15,49
2.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	2,4	2,4	2,52	2,4	2,65	2,4	2,78	1,1	NA
2.07	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	91	91	91,46	93,1	91,91	53,8	92,37	37,9	NA
2.08	Cakupan kelurahan UCI (%)	43	43	43,22	43	43,43	70,4	43,65	64,2	NA
2.09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	96,31	100	96,79	100	97,28	100	97,76	100	NA
2.1	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	50	50	52,5	50	55,13	50	57,88	43,8	34
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	63,6	30	66,78	8,45	70,12	47,49	73,62	23,22	NA
2.12	Cakupan kunjungan bayi (%)	70,29	82,2	73,8	82,6	77,49	73,6	81,37	87,3	NA
2.13	Cakupan puskesmas (%)	216,67	200	100	216,67	100	216,67	100	216,67	NA
2.14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46,91	46,91	53,48	46,91	60,96	46,91	69,5	50,62	NA
2.15	PHBS	60,5	83	60,8	67	61,11	54,12	61,41	35,5	NA
3	Pekerjaan Umum									
3.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63,89	19,04	66,75	24,33	69,93	24,33	73,11	13,6	NA
3.02	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1,95	1,79	1,96	1,79	1,97	1,78	1,98	1,74	NA
3.03	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	1,71	1,71	1,72	1,71	1,73	1,7	1,74	1,66	NA
3.04	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat Kristen	2,59	2,24	2,6	2,24	2,62	2,22	2,63	2,17	NA
3.05	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	76,1	NA	76,78	45,8	77,48	45,8	78,17	78,1	100
3.06	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	71,54	NA	72,88	68,7	74,22	67,8	75,56	40,19	NA

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
3.07	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	385,76	NA	389,23	NA	392,73	141,24	396,27	NA	NA
3.09	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	245,48	NA	251,62	118,64	257,75	118,64	263,89	NA	NA
3.1	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA
3.11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	100	NA	100	NA	100	NA	100	NA	80
3.12	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Perumahan									
4.01	Rasio rumah layak huni	0,12	NA	0,13	0,21	0,15	0,22	0,16	NA	-
4.02	Rasio permukiman layak huni	0,86	NA	0,9	NA	0,95		1	NA	NA
4.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	41,61	NA	43,5	85,92	45,84	86,28	47,78	NA	NA
4.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	31,78	NA	34,96	25,11	38,45	25,11	42,3	NA	49,72
4.05	Persentase permukiman yang tertata (%)	95,46	NA	95,69	NA	95,9	NA	96,11	NA	NA
4.06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	4,54	NA	4,31	NA	4,1	NA	3,89	NA	NA
4.07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	31,78	NA	28,92	NA	26,32	NA	23,95	NA	NA
4.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5,64	NA	5,36	NA	5,09	NA	4,84	NA	NA
4.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	73,82	NA	74,48	NA	75,15	NA	75,83	NA	NA
5	Penataan Ruang									
5.01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	34	NA	45,15	NA	47,3	NA	49,45	NA	1,2
5.02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13,55	NA	14,23	NA	14,91	NA	15,58	NA	22
6	Perencanaan Pembangunan Daerah									
6.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)									
6.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	95	100	95	100	95	100	95	NA
7	Perhubungan									
7.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	35.712	35.712	37.498	37.498	39.372	39.372	41.341	41.341	34956
7.02	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.03	Jumlah uji kir angkutan umum	0	0	0	0	0	0	146	0	NA
7.04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9	9	9	10	9	10	9	9	NA
7.05	Persentase layanan angkutan darat (%)	8,97	9,09	9,42	9,09	9,89	9,09	10,38	9,09	NA
7.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0	0	0	0	0	0	100	0	10
7.07	Pemasangan Rambu rambu	35	NA	36,5	NA	38	NA	39,5	NA	30
7.08	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,09	0,29	0,09	0,31	0,09	0,32	0,09	0,12
7.09	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	15.548	16.325	16.325	17.142	17.142	17.999	17.999	NA
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	12.995	12.995	13.645	13.645	14.327	14.327	15.043	15.043	NA
7.11	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	7.169	7.169	7.527	8.320	7.904	8.320	8.299	8.320	NA
8	Lingkungan Hidup									
8.01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	NA
8.02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	NA

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
8.03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	NA
8.04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	78	NA	78	79	80	79,5	82	80	50
8.05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	0	NA	0	1	2	1	3	NA	NA
8.06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	NA
8.07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	45	50	45	50	50	50	55	50	NA
8.08	Timbulan sampah yang ditangani (%)	100	35	100	30,88	100	30,88	100	30,88	NA
8.09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	0,4	9,73	0,4	9,73	1	9,73	2	9,73	NA
8.1	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	74	63,24	74	66,64	74,5	67,24	75	67,24	NA
8.11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (%)	50	NA	50	2,95	60	0,4	70	NA	NA
9	Pertanahan									
9.01	Luas Lahan bersertifikat (%)	0,01	NA	0,02	NA	0,04	NA	0,07	NA	NA
9.02	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Kependudukan dan Catatan Sipil									
10.01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	94,16	83,2	94,58	82,31	95	84,19	95,85	90,7	NA
10.02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	76,36	82,01	77,24	85,93	78,12	87,73	79,39	88,29	NA
10.03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	62,72	43,96	63,28	50,93	63,85	59,38	64,43	65,82	NA
10.04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
10.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
10.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	92,64	83,2	93,47	82,31	94,32	84,19	95,16	90,7	NA
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
11.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,5	61,78	57,62	63,57	57,73	62,54	57,85	55,38	NA
11.03	Rasio KDRT (%)	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	NA
11.04	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.05	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
12.01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,42	0,42	0,44	0,15	0,46	0,88	0,49	2,27	NA
12.02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12.03	Rasio akseptor KB (%)	16,87	NA	17,71	NA	18,6	NA	19,53	NA	NA
12.04	Cakupan peserta KB aktif/Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	54,5	54,47	54,77	55,26	55,05	27,58	NA	NA	NA
12.05	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	30,4	14,1	30,55	14,08	30,7	13,72	30,86	13,72	NA
13	Sosial									
13.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,98	72,4	62,41	76,64	65,53	69,85	68,81	66,62	66
13.02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	58,98	NA	62,41	NA	65,53	NA	68,81	50,73	NA
13.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	0,58	0,17	0,62	0,15	0,65	0,26	0,68	0,29	NA
13.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
13.05	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.06	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.07	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.08	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	27,05	100	27,28	100	23,6	100	27,91	NA
14	Ketenagakerjaan									
14.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
14.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	8,8	NA	9,24	NA	9,7	NA	10,19	NA	NA
14.04	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.07	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	4,62	5,05	4,8	5,3	5,22	5,57	5,1	5,1
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
15.01	Persentase koperasi aktif (%)	67,9	97,3	70	98	72,1	88,17	74,26	90	90
15.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03	Persentase BPR/LKM aktif (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Penanaman Modal									
16.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	227	789	252	831	277	875	319	921	6

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
16.03	Rasio daya serap tenaga kerja	2,39	1,44	2,52	1,49	2,65	1,49	2,78	1,49	1,49
16.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	94	95	94,5	95	95	95	95,5	95	95
17	Kebudayaan									
17.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	-	1	-	1	1	2	1	3	3
17.02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	9	2	9	2	9	2	9	-	NA
17.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu	10	7	10	7	10	7	10	13	13
18	Pemuda dan Olah Raga									
18.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	70,59	100	70,59	100	83,33	100	100	100
18.02	Persentase wirausaha muda (%)	41,33	0	43,4	0	45,57	0	47,84	0	NA
18.03	Cakupan pembinaan olahraga (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	0	0	0	0	1	0	1	0	NA
18.05	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	100	100	100	100	100	100	100	0	NA
18.06	Jumlah atlet berprestasi	1	0	1	0	1	1	1	0	NA
18.07	Jumlah prestasi olahraga	1	0	1	0	1	4	1	0	NA
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
19.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
20.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,21	1,1	1,27	1,1	1,33	1,1	1,4	1,08	NA
20.02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1,4	NA	1,47	NA	1,54	NA	1,62	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
20.03	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.04	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.05	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.06	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.07	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.08	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	1,78	3,91	1,87	3,91	1,96	3,91	2,06	3,91	NA
20.09	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
20.1	Tingkat waktu tanggap/response time rate (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.11	Indeks Resiko Bencana (%)	0,01	NA	0,01	NA	0,01	NA	0,01	NA	NA
20.12	Desa Rawan Bencana (desa)	37	18	37	29	34	NA	33	NA	NA
20.13	Desa Tangguh Bencana (desa)	45	13	45	13	48	13	49	13	NA
20.14	Tingkat Fasilitas Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.15	Tingkat Penanganan Bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.16	Jumlah Sistem Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.17	Maturitas SPIP (Level)	2,29	2	2,3	2	2,42	2	2,54	2	NA
20.18	Kapabilitas APIP (Level)	2	2	2,01	2	2,02	2	2,03	2	NA
21	Ketahanan Pangan									
21.01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras									
21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	0,74	0,6	0,94	0,6	1,34	0,6	1,74	0,94	NA
21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	63,05	2013	64,07	2013	65,05	2013	75,05	2347	1857
21.01.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan									
22.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
22.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.04	Persentase LSM aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.05	Persentase LPM Berprestasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.06	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.07	Persentase Posyandu aktif (%)	49,6	13,8	52,08	56,5	54,68	100	57,42	100	NA
22.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Statistik									
23.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.02	Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.03	Buku PDRB (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
24	Kearsipan									
24.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	2	1	2	1	2	1	2	1	NA
25	Komunikasi dan Informatika									
25.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi	59,02	45,6	62,72	45,6	72,72	45,6	77,72	45,6	NA
25.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	65,26	62,28	65,91	68,25	66,57	73,46	67,24	66,21	NA
25.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15,33	15,89	16,1	27,35	16,9	35,36	17,75	40,83	NA
26	Perpustakaan									

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
26.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	700	597	800	628	900	661	1,000,00	696	NA
26.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	450	325	500	342	550	360	600	379	NA
26.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	NA
26.04	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (buku)	450	325	500	342	550	360	600	379	NA
26.05	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	7	6	8	7	9	7	10	8	NA
	URUSAN PILIHAN									
1	Pertanian									
1.01	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	36,6	36,78	36,78	35,67	36,96	36,35	37,15	36,35	NA
1.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,34	NA	3,38	NA	3,42	NA	3,46	5,56	NA
1.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	1,21	NA	1,31	NA	1,81	NA	2,31	25,31	NA
1.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1,94	NA	1,95	NA	1,96	NA	1,97	1,8	NA
1.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	100	NA	100	NA	100	NA	100	56,87	NA
1.06	Cakupan bina kelompok petani (%)	38,54	NA	46,79	NA	55,04	NA	63,38	17,78	NA
1.07	Nilai tukar petani (%)	139,59	NA	140,29	NA	140,99	NA	141,69	104,85	NA
2	Kehutanan									
2.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0,01	NA	0,01	NA	0,01	NA	0,01	NA	NA
2.02	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	2,11	NA	2	NA	1,9	NA	1,81	NA	NA
2.03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0,26	0,59	0,26	0,59	0,26	0,59	0,26	0,59	NA
3	Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.01	Persentase rumah tangga pengguna listrik(%)	71,54	NA	72,88	68,7	74,22	67,8	75,56	40,19	NA
3.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1	0,94	1	1,11	1	1,11	1	1,11	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
3.03	Persentase pertambangan tanpa ijin (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	NA
4	Pariwisata									
4.01	Kunjungan wisata (%)	75,24	100	75,62	100	76	61,06	76,38	100	NA
4.02	Lama kunjungan Wisata (hari)	52	NA	52	NA	52	NA	52	NA	NA
4.03	PAD sektor pariwisata (%)	44,84	0,01	45,06	0,01	45,29	0,01	45,52	0,01	NA
5	Kelautan dan Perikanan									
5.01	Produksi perikanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02	Konsumsi ikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.03	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	55	80	60	80	68	80	75	80	NA
5.04	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.05	Nilai tukar nelayan (%)	115	120	117	120	118	120	119	122	NA
5.06	Produksi perikanan tangkap (ton)	14.933,00	14.933,01	15.008,00	14.933,01	15.083,00	12.407,20	15.158,00	12.956,10	NA
5.07	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	NA
6	Perdagangan									
6.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,6	-2,04	7,64	7,38	7,68	5,94	7,71	7,98	15,31
6.02	Ekspor Bersih Perdagangan (Poin)	-100	-104,51	-95	-103,08	-90	-94,32	-85	-88,75	NA
6.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Perindustrian									
7.01	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	4,22	-0,95	4,43	1,08	4,65	11,28	4,89	2,26	64,5
7.02	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Transmigrasi									
8.01	Transmigran swakarsa (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ASPEK DAYA SAING									
1	Kemampuan Ekonomi Daerah									
1.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	38.400.000	39.823.163	39.600.000	39.907.658	40.800.000	40.905.530	42.000.000	41.408.122	NA

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.02	Presentase konsumsi pangan perkapita (%)	51	54,79	51,5	52,96	52	53,06	52,5	52,72	NA
1.03	Presentase konsumsi non pangan perkapita (%)	30,5	29,39	31	28,68	31,5	28,33	32	28,14	NA
1.04	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	1.438.432	NA	1.467.200	NA	1.496.544	NA	1.526.475	NA	NA
1.05	Nilai Tukar Petani	139,59	104,45	140,29	104,6	140,99	104,77	141,69	104,85	NA
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur									
2.01	Aksesibilitas Daerah									
2.01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	NA	0,29	NA	0,31	NA	0,32	19,64	NA
1.02	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum									
1.02.01	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	35.712	30.202	37.498	303.503	39.372	36.450	41.341	30.660	NA
1.02.02	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	1.893	1.449	1.988	1.349	2.087	1.356	2.191	1.533	NA
1.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun									
1.03.01	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	69.208	57.898	72.669	57.778	76.302	57.575	80.117	57.600	NA
1.03.02	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	3.704	16.876	3.890	16.998	4.084	17.205	4.288	18.109	1.732,0
1.03.03	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	23.499	11.970	24.674	11.020	25.907	11.321	27.203	11.520	NA
1.03.04	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	235	80.678	247	81.445	259	80.576	272	80.640	NA
1.03.05	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	21.918	21.592	22.014	21.992	22.115	23.192	22.221	25.550	NA
1.03.06	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	9.592	9.430	10.071	10.021	10.575	10.556	11.104	10.800	NA
2.02	Penataan Wilayah									
2.02.01	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.02.02	Luas wilayah produktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.02.03	Luas wilayah industry (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.02.04	Luas wilayah banjir (%)	0	2,37	0	2,37	0	2,37	0	2,37	NA
2.02.05	Luas wilayah kekeringan (%)	6	NA	5,7	NA	5,42	NA	5,14	NA	NA
2.02.06	Luas wilayah perkotaan (%)	0,8	0,57	0,85	0,57	0,89	0,57	0,93	0,57	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
2.03	Fasilitas Perbankan dan lembaga keuangan non bank									
2.03.01	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.03.02	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	4	0	4	0	4	0	4	0	NA
2.04	Hotel dan Restoran									
2.04.01	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	35	35	36	35	37	35	38	35	NA
2.04.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	14	14	15	14	16	14	17	14	NA
2.04.02.01	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel berbintang (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.02.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	14	14	15	14	16	14	17	14	NA
2.05	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi									
2.05.01	Persentase RT pengguna air bersih (%)	71,54	NA	72,88	68,7	74,22	67,8	75,56	40,19	NA
2.05.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1	0,94	1	1,11	1	1,11	1	1,11	NA
2.05.03	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	86,84	99,08	87,27	99,08	87,71	99,11	88,15	99,11	NA
2.05.04	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	65,26	62,28	65,91	68,25	66,57	73,46	67,24	66,21	NA
3	Iklim Berinvestasi									
3.01	Angka kriminalitas (%)	0	0	0	0	0	3,6	0	0	NA
3.02	Jumlah demo (kali)	0	2	0	2	0	2	0	2	NA
3.03	Lama proses perijinan (Hari)	2	05-Jul	2	1	2	1	2	1	NA
3.04	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jenis)	19	21	20	21	20	21	21	21	NA
3.04.01	Jumlah dan macam pajak daerah (Jenis)	7	8	8	8	8	8	9	8	NA
3.04.02	Jumlah dan macam retribusi daerah (Jenis)	12	13	12	13	12	13	13	13	NA
3.05	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Buah)	19	28	20	28	20	28	20	28	NA
3.06	Presentase Index Desa Membangun/IDM (%)	6,17	29,11	6,48	40,51	6,8	46,84	7,14	51,85	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI / CAPAIAN SETIAP TAHUN								
		2020		2021		2022		2023		2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
4	Sumber Daya Manusia									
4.01	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	4,62	5,05	4,8	5,3	5,22	5,57	5,1	NA
4.02	Rasio ketergantungan (%)	61,98	56,02	61,42	46,05	60,87	44,29	60,32	48,95	NA

2.2. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Dukungan keuangan daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Tanpa dukungan dana yang memadai, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan serta layanan public lainnya tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, keuangan yang kuat akan mendorong kemandirian daerah dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Lebih jauh, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah serta keberlanjutan program-program strategis jangka panjang. Keuangan yang transparan dan akuntabel juga mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat menarik investasi dan memperkuat Masyarakat terhadap pemerintah daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya. Melalui analisis ini, dapat dilihat apakah pendapatan daerah telah dioptimalkan, belanja daerah dialokasikan secara tepat sasaran serta apakah tata kelola keuangan dilakukan sesuai prinsip transparansi dan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, analisis ini menjadi alat penting untuk perbaikan kebijakan fiskal daerah, evaluasi program kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

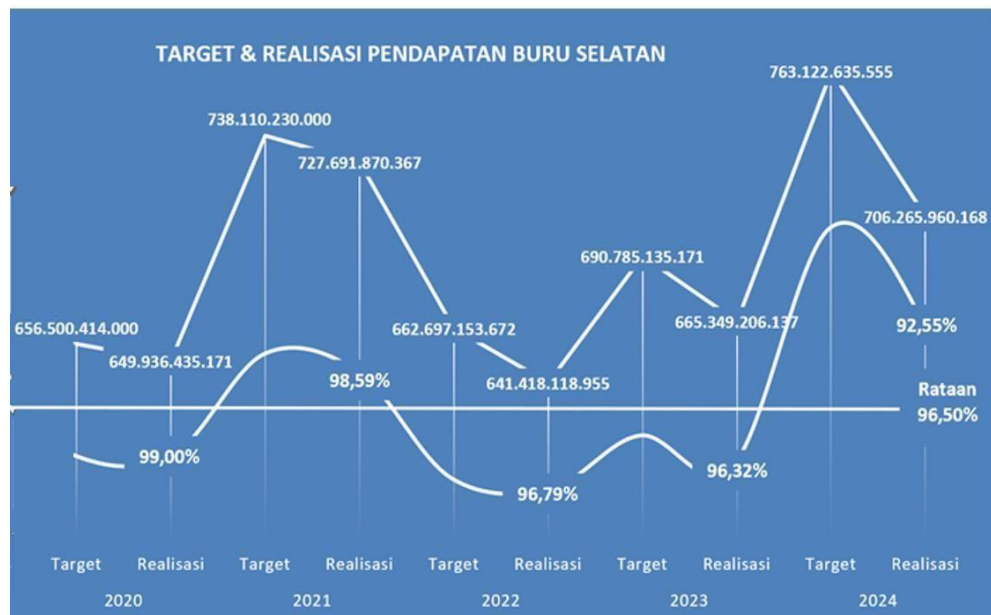
Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan anggaran, dimana pemerintah daerah menyusun rencana keuangan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan. Setelah itu, dilakukan penganggaran dengan menyusun dan menetapkan APBD bersama DPRD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, dimana pendapatan dikumpulkan dan belanja daerah direalisasikan sesuai rencana. Semua transaksi dicatat secara sistematis dalam tahap penatausahaan, yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Terakhir, kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada DPRD dan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber yang sah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya dalam suatu periode tertentu. Sumber dari pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. PAD berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-

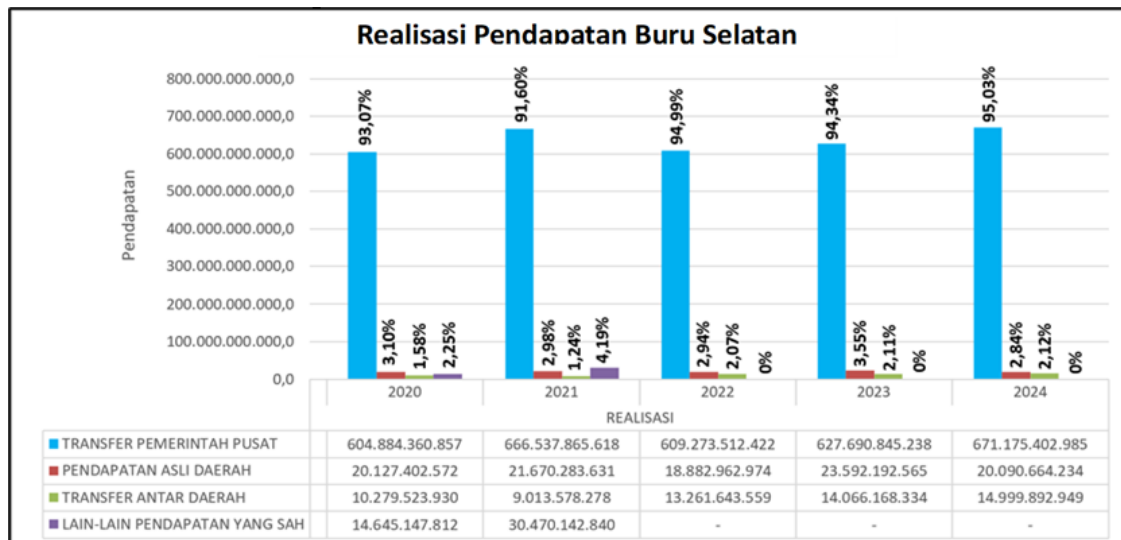
lain PAD yang sah. Sumber dari dana perimbangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berasal dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau provinsi dan penerimaan lain yang sesuai peraturan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024), pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan mengalami perkembangan fluktuatif yang cenderung menurun, Gambaran ini seperti terlihat pada Tabel Pendapatan dan Gambar 2.64. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 pendapatan daerah sebesar kurang lebih Rp.649,94 Miliar meningkat menjadi Rp.727,69 Miliar di Tahun 2021. Selanjutnya menurun lagi di Tahun 2022 dan kemudian meningkat mencapai Rp.665,35 Miliar di Tahun 2023. Di Tahun 2024 pendapatan juga tercatat meningkat mencapai Rp.706,27 Miliar. Realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan rata-rata sebesar 96,50%. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa secara rata-rata selama periode 5 tahun tersebut (2020 – 2024), laju pendapatan Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan sebesar -0,134%.



Gambar 2.12. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Dilihat dari sumber pendapatan, seperti terlihat pada Gambar berikut, diperoleh bahwa kontribusi pendapatan tertinggi berasal dari pendapatan transfer pusat, kemudian posisi kedua berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, selanjutnya pendapatan asli daerah, dan kontribusi terendah berasal dari sumber transfer antar daerah. Tergambar bahwa kontribusi pendapatan asli daerah berada pada kisaran 2,65 sampai 3 %, ini menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Buru Selatan masih tergolong sangat rendah.



Gambar 2.13. Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Buru Selatan

Tabel 2.26. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 – 2024 (Rp.)

NO	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
#####	PENDAPATAN	656.500.414.000	649.936.435.171	738.110.230.000	727.691.870.367	662.697.153.672	641.418.118.955	690.785.135.171	665.349.206.137	763.122.635.555	706.265.960.168
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.513.685.000,00	20.127.402.571,65	27.145.890.000,00	21.670.283.630,57	30.896.788.672,00	18.882.962.973,77	42.150.264.171,00	23.592.192.565,34	51.429.126.800,00	20.090.664.233,97
1	Pendapatan Pajak Daerah	2.603.700.000,00	2.820.336.994,91	3.639.872.000,00	4.065.922.356,00	5.028.230.000,00	3.796.577.522,00	6.700.096.800,00	4.788.569.430,08	12.000.096.800,00	4.641.088.521,78
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.171.800.000,00	3.325.647.657,00	3.602.753.000,00	3.220.185.645,00	4.902.753.000,00	4.012.130.625,00	5.331.250.000,00	5.876.873.183,00	7.131.250.000,00	5.316.360.137,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.242.314.000,00	4.242.313.250,00	4.491.054.000,00	4.491.054.077,80	2.253.594.672,00	2.487.405.328,00	5.400.517.371,00	5.400.517.371,00	4.279.380.000,00	4.188.484.018,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.495.871.000,00	9.739.104.669,74	15.412.211.000,00	9.893.121.551,77	18.712.211.000,00	8.586.849.498,77	24.718.400.000,00	7.526.232.581,26	28.018.400.000,00	5.944.731.557,19
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	14.495.871.000,00	615.163.884.787,00	675.595.689.000,00	675.551.443.896,00	628.800.365.000,00	622.535.155.981,00	648.634.871.000,00	641.757.013.572,00	711.693.508.755,00	686.175.295.934,00
I.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	516.945.799.000,00	604.884.360.857,00	666.595.689.000,00	666.537.865.618,00	616.400.365.000,00	609.273.512.422,00	631.280.871.000,00	627.690.845.238,00	696.693.508.755,00	671.175.402.985,00
I.2.1.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	-	516.534.980.436,00	577.713.289.000,00	577.655.465.618,00	541.462.975.000,00	534.336.298.203,00	550.172.004.000,00	546.581.978.238,00	619.734.036.755,00	594.215.930.985,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.339.599.000,00	6.292.789.366,00	10.898.286.000,00	10.334.321.024,00	7.418.136.000,00	7.942.401.379,00	3.260.832.000,00	5.049.237.288,00	1.993.949.000,00	1.993.949.000,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.112.783.000,00	8.351.496.707,00	7.022.368.000,00	12.414.996.935,00	7.654.792.000,00	9.499.599.118,00	10.734.767.000,00	10.734.767.000,00	6.797.427.000,00	6.411.196.651,00
3	Dana Alokasi umum	405.165.999.000,00	403.896.483.000,00	400.128.860.000,00	400.128.860.000,00	400.746.716.000,00	400.662.766.000,00	418.817.378.000,00	418.817.378.000,00	437.891.635.000,00	426.216.126.710,00
4	Dana Alokasi Khusus	98.327.418.000,00	97.994.211.363,00	159.663.775.000,00	154.777.287.659,00	125.643.331.000,00	116.231.531.706,00	117.359.027.000,00	111.980.595.950,00	173.051.025.755,00	159.594.658.624,00
I.2.1.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	88.351.815.000,00	88.349.380.421,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dana Penyesuaian	88.351.815.000,00	88.349.380.421,00	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	8.904.715.000,00	10.279.523.930,00	9.000.000.000,00	9.013.578.278,00	12.400.000.000,00	13.261.643.559,00	17.354.000.000,00	14.066.168.334,00	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	8.904.715.000,00	10.279.523.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.784.400.000,00	14.645.147.812,42	35.368.651.000,00	30.470.142.840,00	3.000.000.000,00	0.00	-	-	-	-
1	Pendapatan Hibah	17.784.400.000,00	14.645.147.812,42	14.012.000.000,00	12.012.000.000,00	0.00	0.00	-	-	-	-
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data perkembangan realisasi PAD Kabupaten Buru Selatan selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasinya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, rata-rata capaian realisasi tercatat sebesar 61,05% (Gambar 2.66). Laju peningkatan PAD sangat rendah, yaitu sebesar 1,10% per tahun.



Gambar 2.14. Perkembangan Realisasi Pendapatan PAD di Kabupaten Buru

Gambaran perkembangan kontribusi dari setiap sumber PAD di Kabupaten Buru Selatan secara jelas seperti tersaji pada Gambar 2.67. Terlihat bahwa rata-rata kontribusi PAD dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah yang terbesar (43,38%), namun dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Kontribusi terbesar kedua berasal Retribusi Daerah (20,51%), kemudian Pajak Daerah (19,66%) dan terkecil adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (16,45%).



Grafik 2.52. Kontribusi Sumber PAD Terhadap PAD Buru Selatan

Data di Tabel berikut memperlihatkan bahwa Pendapatan Buru Selatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat terbagi dalam 2 sumber, yaitu Transfer Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Transfer yang terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu rata-rata sebesar Rp.559,54 Miliar dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 2,59%, sedangkan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya rata-rata sebesar Rp.14,72 Miliar. Untuk Dana Perimbangan, kontribusi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum, yaitu rata-rata sebesar Rp.415,10 Miliar, kemudian diikuti oleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.130,08 Miliar, dan selanjutnya yang terkecil adalah Dana Bagi Hasil Pajak dengan rata-rata sebesar Rp.5,27 Miliar.

Tabel 2.27. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Buru Selatan

No	URAIAN	REALISASI					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	604.884.360.857	666.537.865.618	609.273.512.422	627.690.845.238	671.175.402.985	529.926.997.853
A	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	516.534.980.436	577.655.465.618	534.336.298.203	546.581.978.238	594.215.930.985	559.543.026.221
1	Dana Bagi Hasil Pajak	6.292.789.366	10.334.321.024	7.942.401.379	5.049.237.288	1.993.949.000	5.268.783.010
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.351.496.707	12.414.996.935	9.499.599.118	10.734.767.000	6.411.196.651	7.902.009.402
3	Dana Alokasi umum	403.896.483.000	400.128.860.000	400.662.766.000	418.817.378.000	426.216.126.710	415.101.303.285
4	Dana Alokasi Khusus	97.994.211.363	154.777.287.659	116.231.531.706	111.980.595.950	159.594.658.624	130.082.849.084
B	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	88.349.380.421	-	-	-	-	14.724.896.737
1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
2	Dana Penyesuaian	88.349.380.421	-	-	-	-	14.724.896.737

Sumber pendapatan transfer lain dari Kabupaten Buru Selatan berasal dari Transfer Antar Daerah dengan besaran selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata Rp.10,27 Miliar dan dengan laju pertumbuhan sebesar 9,91%. Selanjutnya kontribusi pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Syah rata-rata mencapai Rp.25,35 Miliar per tahun.

Tabel 2.28. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Buru Selatan

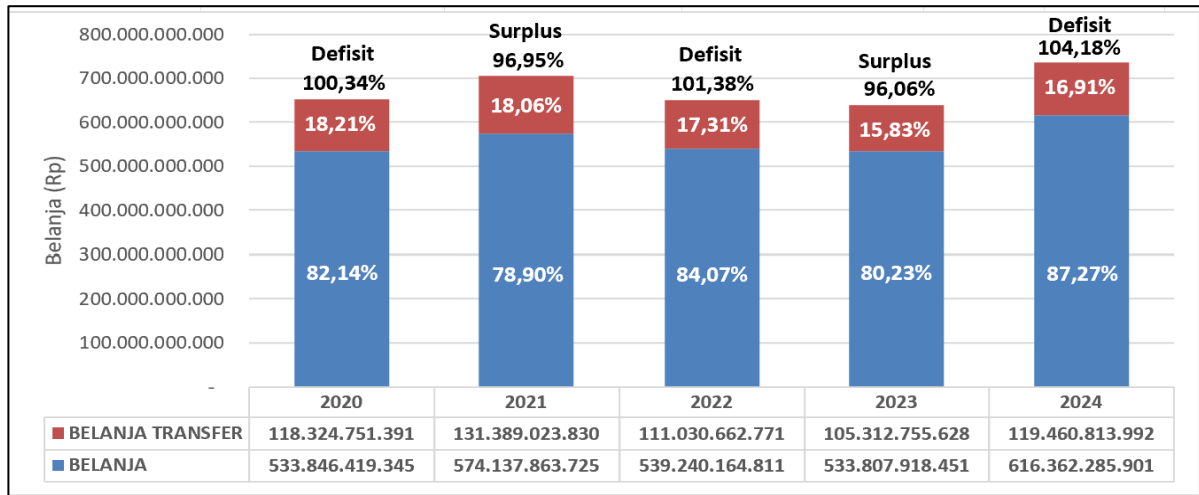
No	URAIAN	REALISASI					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
	TRANSFER ANTAR DAERAH	10.279.523.930	9.013.578.278	13.261.643.559	14.066.168.334	14.999.892.949	10.270.134.508
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.279.523.930	-	-	-	-	1.713.253.988
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.645.147.812	30.470.142.840	0.00	-	-	25.350.263.151
1	Pendapatan Hibah	14.645.147.812	12.012.000.000	0.00	-	-	5.983.562.635
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah direncanakan dalam APBD. Belanja daerah ini mencakup belanja operasional, belanja modal serta belanja tak terduga dan harus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Terlihat pada Gambar berikut bahwa Belanja (Belanja Operasi, Modal dan Tak Terduga) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif yang meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,98%. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh belanja transfer yang fluktuatif yang meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,96%. Proporsi belanja (belanja operasi-modal-dan belanja tak terduga) dari pendapatan adalah yang terbesar, yaitu berada pada

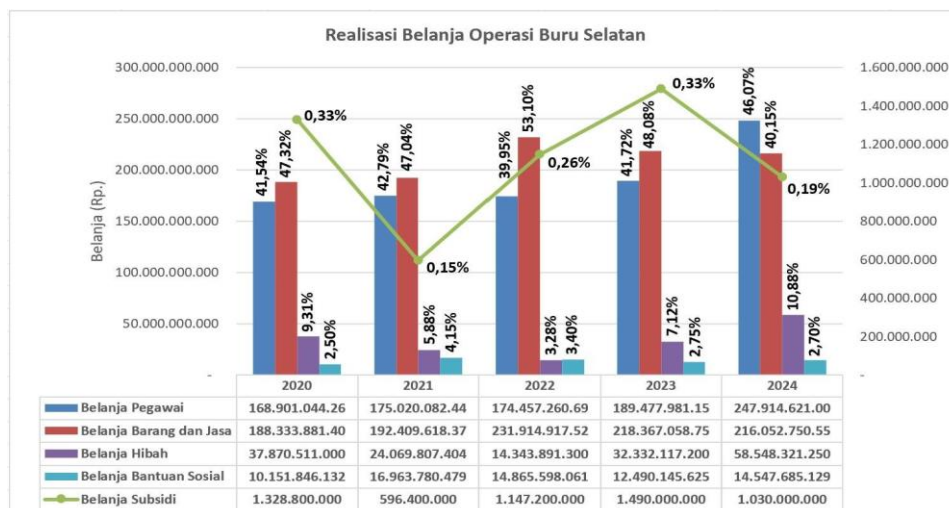
kisaran 78 – 87%, dan belanja transfer berada pada kisaran 15 – 18%. Data pada Gambar Belanja menunjukkan bahwa Tahun 2020, 2022 dan 2024 terjadi defisit anggaran pembangunan, namun bila dikurang dengan surplus belanja di tahun 2021 dan 2023 masih diperoleh surplus sebesar kurang lebih Rp.7,75 Miliar.



Grafik 2.53. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan

- Belanja Operasi**

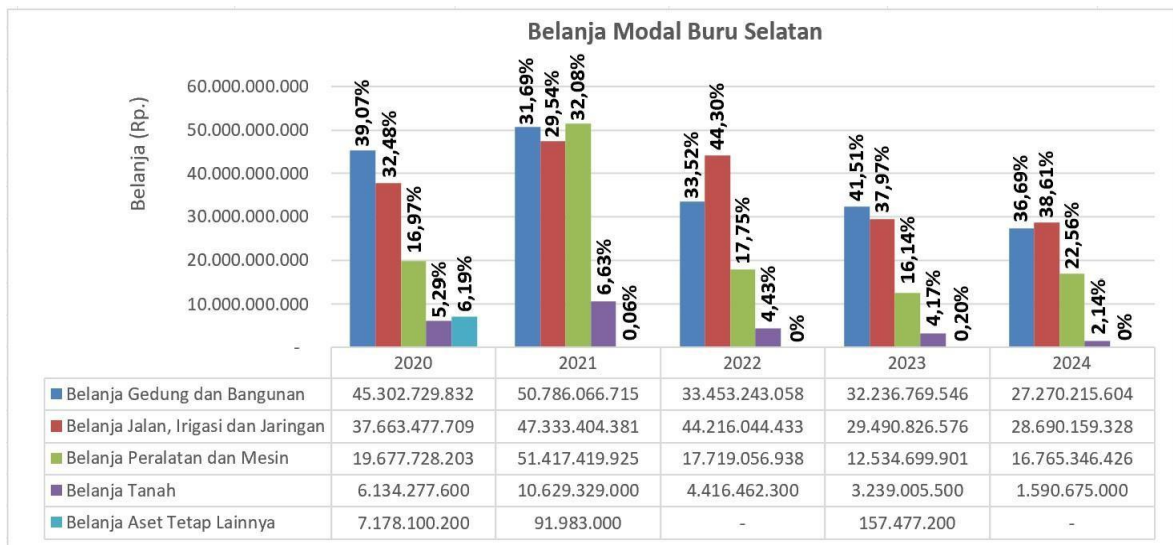
Hasil kajian realisasi belanja operasi seperti terlihat pada Gambar berikut, menunjukkan bahwa persentasi penggunaan yang tertinggi adalah untuk belanja barang dan jasa 46,94%, kemudian belanja pegawai 42,41%, selanjutnya belanja hibah 7,30%, belanja bantuan sosial 3,10% dan yang terendah adalah untuk belanja subsidi 0,25%. Belanja barang dan jasa rata-rata mengalami peningkatan per tahun sebesar 3,49%, sedangkan belanja pegawai mengalami peningkatan yang tertinggi yaitu sebesar 10,07% per tahun. Pertumbuhan belanja lainnya bersifat fluktuatif.



Grafik 2.54. Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Buru Selatan

• Belanja Modal

Hasil analisis di Gambar berikut memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja Modal Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan sebesar -6,55% per tahun. Nilai belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.160,26 Miliar dan terendah tercatat sebesar Rp.74,32 terjadi di tahun 2024. Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan-Irigasi-dan Jaring sama-sama mendominasi belanja modal, masing dengan rata-rata persentasi sebesar 36,50% dan 36,58%. Belanja Peralatan dan Mesin menempati urutan ketiga dengan rata-rata besaran 21,10% per tahun, berikutnya Belanja Tanah sebesar 4,53% per tahun dan yang terkecil adalah Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 1,29% per tahun.



Grafik 2.55. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Buru Selatan

Tabel 2.29. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan

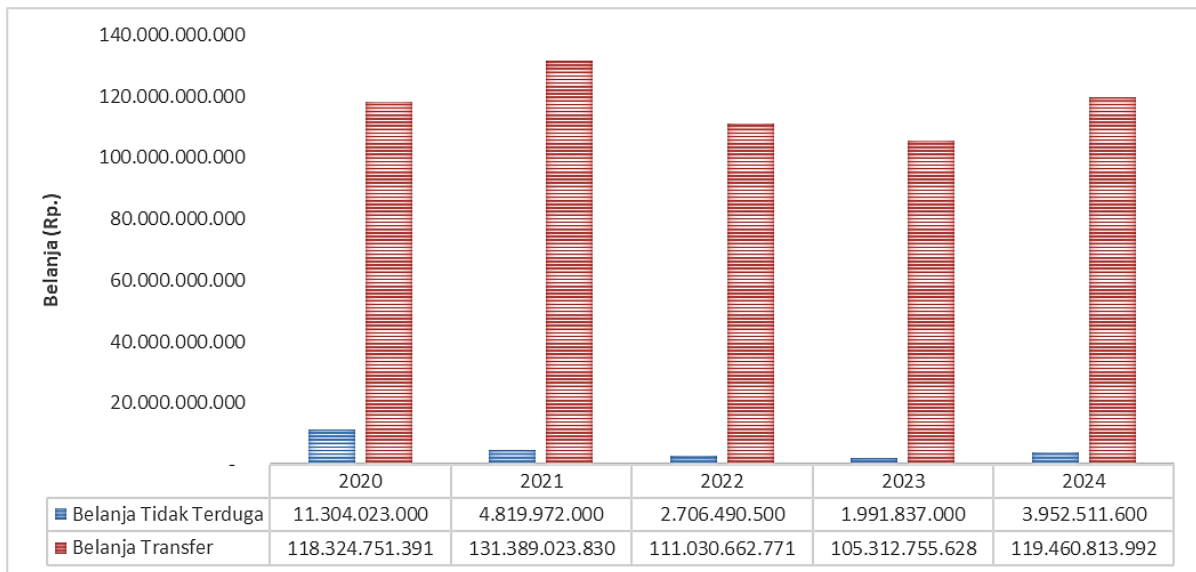
No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
II.	BELANJA	533.846.419.345,23	574.137.863.725,00	539.240.164.811,00	533.807.918.451,00	616.362.285.901,00
II.1	BELANJA OPERASI	406.586.082.801,23	409.059.688.704,00	436.728.867.582,00	454.157.302.728,00	538.093.377.943,00
1	Belanja Pegawai	168.901.044.262,00	175.020.082.449,00	174.457.260.697,00	189.477.981.150,00	247.914.621.008,00
2	Belanja Barang dan Jasa	188.333.881.407,23	192.409.618.372,00	231.914.917.524,00	218.367.058.753,00	216.052.750.556,00
3	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	1.328.800.000,00	596.400.000,00	1.147.200.000,00	1.490.000.000,00	1.030.000.000,00
5	Belanja Hibah	37.870.511.000,00	24.069.807.404,00	14.343.891.300,00	32.332.117.200,00	58.548.321.250,00
6	Belanja Bantuan Sosial	10.151.846.132,00	16.963.780.479,00	14.865.598.061,00	12.490.145.625,00	14.547.685.129,00
II.2	BELANJA MODAL	115.956.313.544,00	160.258.203.021,00	99.804.806.729,00	77.658.778.723,00	74.316.396.358,00
1	Belanja Tanah	6.134.277.600,00	10.629.329.000,00	4.416.462.300,00	3.239.005.500,00	1.590.675.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.677.728.203,00	51.417.419.925,00	17.719.056.938,00	12.534.699.901,00	16.765.346.426,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.302.729.832,00	50.786.066.715,00	33.453.243.058,00	32.236.769.546,00	27.270.215.604,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.663.477.709,00	47.333.404.381,00	44.216.044.433,00	29.490.826.576,00	28.690.159.328,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.178.100.200,00	91.983.000,00	0,00	157.477.200,00	0,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.178.100.200,00	91.983.000,00	0,00	157.477.200,00	0,00
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.304.023.000,00	4.819.972.000,00	2.706.490.500,00	1.991.837.000,00	3.952.511.600,00
1	Belanja Tidak Terduga	11.304.023.000,00	4.819.972.000,00	2.706.490.500,00	1.991.837.000,00	3.952.511.600,00
II.4	BELANJA TRANSFER	118.324.751.391,00	131.389.023.830,00	111.030.662.771,00	105.312.755.628,00	119.460.813.992,00
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-
SURPLUS/ DEFISIT		-2.234.735.565,16	22.164.982.811,57	-8.852.708.627,23	26.228.532.058,34	-29.557.139.725,03

Sumber : Dokumen LPJ Kabupaten Buru Selatan tahun 2020-2024

- **Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer**

Perkembangan belanja tidak terduga Kabupaten Buru Selatan 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan, rata-rata per tahun mencapai -7,30%. Di tahun 2020 belanja tak terduga sebesar Rp.11,30 Miliar dan di tahun 2024 hanya sebesar Rp.3,95 Miliar.

Perkembangan yang berbeda ditunjukkan oleh belanja transfer yang cenderung fluktuatif, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,96% per tahun. Di tahun 2020 belanja transfer sebesar Rp.118,32 Miliar dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp.119,46 Miliar.



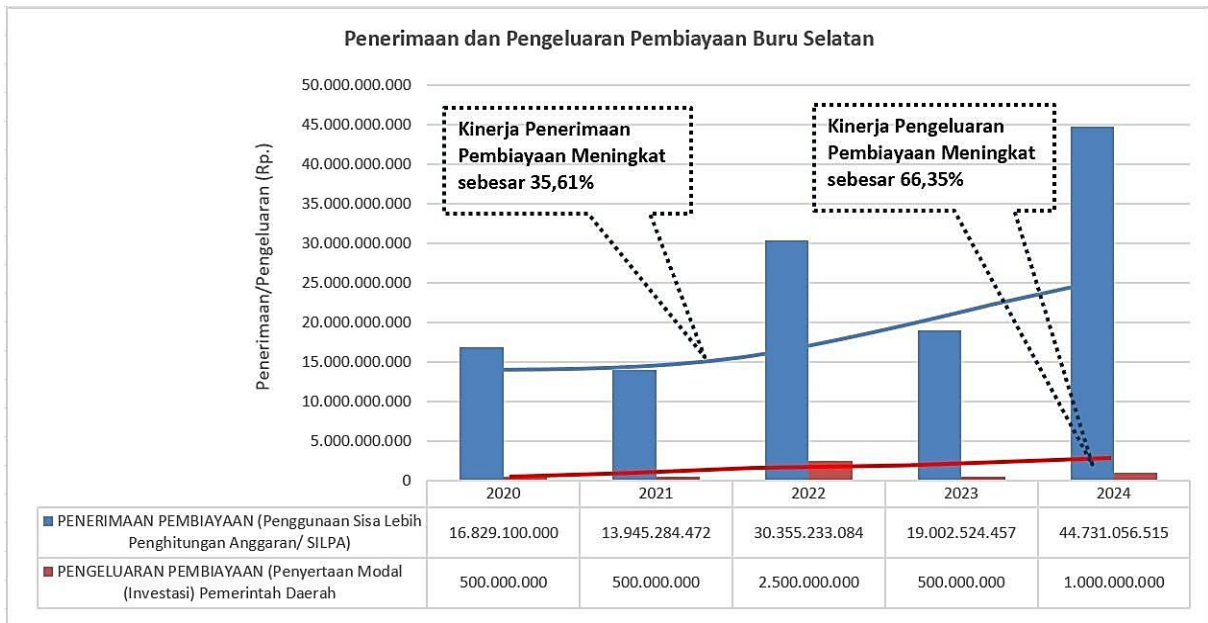
Grafik 2.56. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Buru Selatan

2.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Kinerja pembiayaan daerah adalah gambaran atas semua aktivitas penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Hal ini mencerminkan bagaimana daerah mengelola sumber dana non-pendapatan, seperti pinjaman dan investasi, yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus anggaran. Efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan ini menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Data menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah Buru Selatan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), di tahun 2019 tercatat sebesar Rp.21,16 Miliar dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp.44,73 Miliar. Terlihat pada Gambar bahwa perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun fluktuatif, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 33,61%.

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Buru Selatan juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun secara keseluruhan dengan trend yang masih bersifat positif. Pengeluaran di tahun 2019 tercatat sebesar Rp.4,25 Miliar dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp.1 Miliar. Secara rata-rata kinerja pengeluaran pembiayaan Kabupaten Buru Selatan meningkat sebesar 66,35%.



Grafik 2.57. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Buru Selatan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Besaran SILPA di tahun 2020 tercatat sebesar Rp.14,09 Miliar selanjutnya terus meningkat sampai tahun 2021 yang mencapai Rp.35,61 Miliar, selanjutnya menurun di tahun 2022 dan kemudian meningkat tajam di tahun 2023 yang mencapai Rp.44,73 Miliar. Di tahun 2024 (kecuali tahun 2023) SILPA Kembali menurun dan tercatat sebesar Rp.14,17 Miliar.

Perkembangan pertumbuhan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2020 – 2024 seperti tersaji pada Tabel berikut. Perkembangan pertumbuhan realisasi anggaran ini perlu diketahui karena informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun langkah kebijakan dalam memperkuat peningkatan pendapatan daerah dan mengatur proporsi belanja daerah.

Tabel 2.30. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	REALISASI					Rataan Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PENDAPATAN	649.936.435,171	727.691.870,367	641.418.118,955	665.349.206,137	706.265.960,168	0,28
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.127.402.571,65	21.670.283.630,57	18.882.962.973,77	23.592.192.565,34	20.090.664.233,97	5,99
1	Pendapatan Pajak Daerah	2.820.336.994,91	4.065.922.356,00	3.796.577.522,00	4.788.569.430,08	4.641.088.521,78	8,28
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.325.647.657,00	3.220.185.645,00	4.012.130.625,00	5.876.873.183,00	5.316.360.137,00	13,38
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.242.313.250,00	4.491.054.077,80	2.487.405.328,00	5.400.517.371,00	4.188.484.018,00	11,18
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.739.104.669,74	9.893.121.551,77	8.586.849.498,77	7.526.232.581,26	5.944.731.557,19	-8,58
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	615.163.884.787,00	675.551.443.896,00	622.535.155.981,00	641.757.013.572,00	686.175.295.934,00	2,40
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	604.884.360.857,00	666.537.865.618,00	609.273.512.422,00	627.690.845.238,00	671.175.402.985,00	2,31
1.2.1.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	516.534.980.436,00	577.655.465.618,00	534.336.298.203,00	546.581.978.238,00	594.215.930.985,00	0,64
1	Dana Bagi Hasil Pajak	6.292.789.366,00	10.334.321.024,00	7.942.401.379,00	5.049.237.288,00	1.993.949.000,00	-11,17
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.351.496.707,00	12.414.996.935,00	9.499.599.118,00	10.734.767.000,00	6.411.196.651,00	-0,42
3	Dana Alokasi Umum	403.896.483.000,00	400.128.860.000,00	400.662.766.000,00	418.817.378.000,00	426.216.126.710,00	-0,58
4	Dana Alokasi Khusus	97.994.211.363,00	154.777.287.659,00	116.231.531.706,00	111.980.595.950,00	159.594.658.624,00	8,39
1.2.1.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	88.349.380.421,00	-	-	-	-	0
1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0
2	Dana Penyesuaian	88.349.380.421,00	-	-	-	-	0
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	10.279.523.930,00	9.013.578.278,00	13.261.643.559,00	14.066.168.334,00	14.999.892.949,00	9,50
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.279.523.930,00	-	-	-	-	0
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.645.147.812,42	30.470.142.840,00	0,00	-	-	64,70
1	Pendapatan Hibah	14.645.147.812,42	12.012.000.000,00	0,00	-	-	54,83
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
II.	BELANJA	533.846.419.345,23	574.137.863.725,00	539.240.164.811,00	533.807.918.451,00	616.362.285.901,00	-1,80
II.1	BELANJA OPERASI	406.586.082.801,23	409.059.688.704,00	436.728.867.582,00	454.157.302.728,00	538.093.377.943,00	5,97
1	Belanja Pegawai	168.901.044.262,00	175.020.082.449,00	174.457.260.697,00	189.477.981.150,00	247.914.621.008,00	8,55
2	Belanja Barang dan Jasa	188.333.881.407,23	192.409.618.372,00	231.914.917.524,00	218.367.058.753,00	216.052.750.556,00	3,16
3	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-	0
4	Belanja Subsidi	1.328.800.000,00	596.400.000,00	1.147.200.000,00	1.490.000.000,00	1.030.000.000,00	-2,12
5	Belanja Hibah	37.870.511.000,00	24.069.807.404,00	14.343.891.300,00	32.332.117.200,00	58.548.321.250,00	101,08
6	Belanja Bantuan Sosial	10.151.846.132,00	16.963.780.479,00	14.865.598.061,00	12.490.145.625,00	14.547.685.129,00	6,22
II.2	BELANJA MODAL	115.956.313.544,00	160.258.203.021,00	99.804.806.729,00	77.658.778.723,00	74.316.396.358,00	-11,79
1	Belanja Tanah	6.134.277.600,00	10.629.329.000,00	4.416.462.300,00	3.239.005.500,00	1.590.675.000,00	-12,54
2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.677.728.203,00	51.417.419.925,00	17.719.056.938,00	12.534.699.901,00	16.765.346.426,00	20,05
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.302.729.832,00	50.786.066.715,00	33.453.243.058,00	32.236.769.546,00	27.270.215.604,00	-8,21
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.663.477.709,00	47.333.404.381,00	44.216.044.433,00	29.490.826.576,00	28.690.159.328,00	-3,39
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.178.100.200,00	91.983.000,00	0,00	157.477.200,00	0,00	19,74
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.178.100.200,00	91.983.000,00	0,00	157.477.200,00	0,00	19,74
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.304.023.000,00	4.819.972.000,00	2.706.490.500,00	1.991.837.000,00	3.952.511.600,00	-5,84
1	Belanja Tidak Terduga	11.304.023.000,00	4.819.972.000,00	2.706.490.500,00	1.991.837.000,00	3.952.511.600,00	-5,84
II.4	BELANJA TRANSFER	118.324.751.391,00	131.389.023.830,00	111.030.662.771,00	105.312.755.628,00	119.460.813.992,00	0,77
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-
		652.171.170.736,23	705.526.887.555,00	650.270.827.582,00	639.120.674.079,00	735.823.099.893,00	2,75
	SURPLUS/ DEFISIT	-2.234.735.565,16	22.164.982.811,57	-8.852.708.627,23	26.228.532.058,34	-29.557.139.725,03	-930,11
III	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.829.100.000,00	13.945.284.472,46	30.355.233.084,06	19.002.524.457,00	44.731.056.515,34	35,61
1	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	16.829.100.000,00	13.945.284.472,46	30.355.233.084,06	19.002.524.457,00	44.731.056.515,34	35,61
2	Pencairan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,35
1	Pembentukan Desa Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,35
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	16.329.100.000,00	13.445.284.472,46	27.855.233.084,06	18.502.524.457,00	43.731.056.515,34	37,77
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA	14.094.364.434,84	35.610.267.284,03	19.002.524.456,83	44.731.056.515,34	14.173.916.790,31	31,37

2.2.4. Neraca Keuangan Daerah

Data neraca keuangan daerah Buru Selatan, seperti terlihat pada Tabel berikut menunjukkan bahwa kondisi perkembangan ada yang mengalami perkembangan dengan rataaan yang positif, tetapi juga ada yang negatif. Demikian halnya juga dengan Kewajiban, ada yang menunjukkan perkembangan yang positif tetapi juga ada yang negatif. Kondisi secara rinci perkembangan dari neraca aset daerah adalah sebagai terlihat pada Tabel.

Tabel 2.31. Neraca Daerah Buru Selatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)					Rataan Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	ASET	-	-	-	-	-	-
1.1	ASET LANCAR	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Kas dan Setoran Kas	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	1.334.083.765,45	21.461.118.737,67	7.102.298.291,08	31.104.379.091,11	1.027.969.244,34	322,25
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerima	74,25	919.574,25	0,00	1.728.612.100,00	0,00	-60,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.366.351.483,25	403.475.269,13	228.539.017,85	93.225.564,66	182.356.036,66	-2,20
1.1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Kas Lainnya di Bendahara BLUD	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	Kas Lainnya di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	Kas Lainnya di BOS	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Kas di FKTP JKN	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	Kas di BOS	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Piutang Pajak	486.267.101,92	486.267.101,92	486.267.101,92	486.267.101,92	486.267.101,92	-
1.1.2.2	Piutang Retribusi	216.050.654,40	216.050.654,40	216.050.654,40	377.501.954,40	216.050.654,40	7,99
1.1.2.3	Piutang Denda Pajak	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Dana Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	113.427.888,00	-	-	-	-	-
1.1.3	Piutang Lainnya	0,00	4.589.738.526,00	4.483.141.446,00	4.483.141.446,00	4.372.718.362,00	-20,96
1.1.3.1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Penyisihan Piutang	-875.909.741,55	-1.225.081.165,86	-1.400.660.604,94	-1.400.660.604,94	-702.317.756,32	0,87
1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	158.888.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49
1.1.6	Persediaan	2.024.116.998,00	6.369.721.452,00	15.385.393.662,05	25.654.365.471,05	11.544.916.638,63	67,02
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Dana Bergulir Gerakan Masyarakat Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	21.037.166.284,44	418.211.233.531,41	23.558.198.472,44	23.608.911.087,44	24.608.911.087,44	360,10
1.3	ASET TETAP	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Tanah	340.303.227.216,38	351.246.783.296,38	348.594.704.233,38	350.442.840.233,38	352.171.365.233,38	87,61
1.3.2	Peralatan dan Mesin	340.303.227.216,38	405.337.305.029,41	418.211.233.531,41	444.962.332.424,70	472.433.897.167,19	5,91
1.3.3	Gedung dan Bangunan	512.174.028.818,00	554.290.487.457,00	585.873.190.169,50	603.694.547.769,50	628.862.268.393,50	5,38
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.555.056.585,33	998.096.077.477,33	1.058.557.332.236,33	1.088.543.258.427,33	1.123.419.067.630,33	5,22
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	926.555.056.585,33	26.775.838.093,00	23.589.077.116,00	23.526.774.316,00	23.526.774.316,00	536,65
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.715.424.950,00	99.936.313.127,00	97.205.183.092,00	115.833.292.247,00	118.234.327.703,00	3,12
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-
1.5.1	Barang Investasi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	10.013.081.425,00	16.773.374.615,00	16.823.374.615,00	16.823.374.615,00	13,56
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.5.6	Aset Lainnya	88.096.141.864,66	118.392.801.701,66	139.293.129.340,09	138.416.909.745,09	137.623.401.745,09	10,17
1.5.7	Aset Non Lancar Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp)					Rataan Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	191.941.410,57	220.757.554,57	-271.613.534,72	512.329.546,28	1.172.995.255,28	-33,78
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang Belanja	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	22.453.538,00	22255,34
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.441.152.986,00	11.498.654.105,00	11.498.654.105,00	11.498.654.105,00	11.498.654.105,00	0,101
3	EKUITAS	-	-	-	-	-	-
3.1	EKUITAS	1.677.810.563.498,44	1.759.576.893.480,16	1.746.008.373.839,91	1.763.846.531.696,77	1.802.685.282.119,50	3,30
3.1.1	Ekuitas	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Surplus/Defisit-LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.689.443.657.895,01	1.771.296.325.299,73	1.757.235.434.570,19	1.775.857.535.508,05	1.815.379.385.017,78	3,46

Tabel 2.32. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
III	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.829.100.000,00	13.945.284.472,46	30.355.233.084,06	19.002.524.457,00	44.731.056.515,34
1	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	16.829.100.000,00	13.945.284.472,46	30.355.233.084,06	19.002.524.457,00	44.731.056.515,34
2	Pencairan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
1	Pembentukan Desa Cadangan	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	16.329.100.000,00	13.445.284.472,46	27.855.233.084,06	18.502.524.457,00	43.731.056.515,34
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA	14.094.364.434,84	35.610.267.284,03	19.002.524.456,83	44.731.056.515,34	14.173.916.790,31

2.2.5. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan kebijakan yang jelas agar pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tanpa kebijakan yang terarah, penggunaan keuangan daerah beresiko tidak sesuai dengan prinsip good governance, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada hasil (outcome), mendorong kemandirian fiskal, serta menjaga disiplin anggaran. Secara hukum, kebutuhan akan kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi landasan dalam penyusunan APBD, pengelolaan dana transfer hingga pengawasan keuangan yang menjadi bagian penting dari Upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 5 (lima) tahun anggaran yang kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan RKPD untuk mengelola keuangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya RKPD akan dijadikan pedoman untuk penyusunan APBD dengan menggunakan prinsip dasar money follow programme yang berorientasi pada pencapaian indikator pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada, didukung oleh inovasi pelayanan dan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi. Pemerintah daerah juga akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui penguatan basis data, pemutakhiran informasi dan penegakan aturan yang tegas terhadap wajib pajak, serta pengembangan potensi lokal. Selain itu, pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ditingkatkan efektivitasnya dengan focus pada penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) secara akuntabel dan berorientasi hasil.

Kerjasama dengan sektor swasta dan antar daerah akan diperluas untuk menggali potensi investasi dan meningkatkan pendapatan berbasis kemitraan. Selanjutnya menjadi penting juga adalah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya. Disamping itu, penguatan regulasi, penegakan hukum serta penerapan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan pendapatan menjadi fondasi utama untuk mendukung tercapainya kemandirian fiskal daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. Fokus utama belanja adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi, serta memperkuat pembangunan manusia. Belanja diarahkan agar lebih produktif, efisien dan berorientasi pada

hasil (outcome-based budgeting), dengan memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat, transparan dan akuntabel. Selain itu, belanja daerah juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, dan dinamika geopolitik. Secara rinci poin arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas belanja untuk pelayanan publik dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan layanan dasar;
- Mendorong transformasi ekonomi daerah melalui dukungan belanja pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, UMKM dan ekonomi hijau;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dengan fokus pada infrastruktur dasar, konektivitas wilayah dan infrastruktur digital;
- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui internalisasi aspek ketahanan iklim dan pengurangan emisi karbon dalam program-program daerah;
- Penguatan tata Kelola keuangan daerah melalui peningkatan transparansi, efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Mendorong penguatan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui perbesaran porsi belanja untuk pengurangan kesenjangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Menjaga kesinambungan fiskal daerah dengan cara memastikan bahwa pertumbuhan belanja sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. Fokus utama belanja adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi, serta memperkuat pembangunan manusia. Belanja diarahkan agar lebih produktif, efisien dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting), dengan memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat, transparan dan akuntabel. Selain itu, belanja daerah juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, dan dinamika geopolitik. Secara rinci poin arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas belanja untuk pelayanan publik dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan layanan dasar;
- Mendorong transformasi ekonomi daerah melalui dukungan belanja pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, UMKM dan ekonomi hijau;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dengan fokus pada infrastruktur dasar, konektivitas wilayah dan infrastruktur digital;
- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui internalisasi aspek ketahanan iklim dan pengurangan emisi karbon dalam program-program daerah;
- Penguatan tata Kelola keuangan daerah melalui peningkatan transparansi, efektivitas

- perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Mendorong penguatan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui perbesaran porsi belanja untuk pengurangan kesenjangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Menjaga kesinambungan fiskal daerah dengan cara memastikan bahwa pertumbuhan belanja sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah.

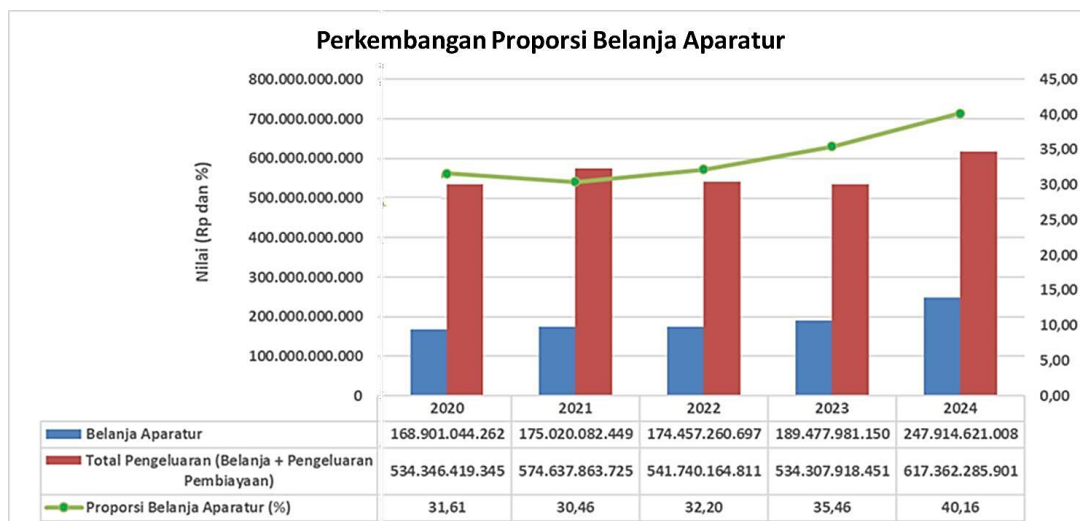
2.2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

▪ Analisis Belanja untuk Pemenuhan Aparatur

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buru Selatan sejak 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,82%, di tahun 2020 tercatat sebesar Rp.168.901.044.262 dan pada tahun 2024 mencapai Rp.247.914.621.008. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur seperti terlihat pada Gambar berikut.

Bila belanja aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan), maka proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 tercatat sebesar 31,61% dan di tahun 2024 mencapai 40,16%. Gambaran secara rinci seperti tersaji pada Gambar berikut.



Grafik 2.58. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buru Selatan

▪ Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Dipahami bahwa belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang harus dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Belanja ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Gambaran pengeluaran waji dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Buru Selatan, yaitu untuk belanja pegawai seperti telah dijelaskan sebelumnya. Data seperti tersaji pada Tabel berikut, memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan hanya diperuntukan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Tabel 2.33. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buru Selatan

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja					
1	Belanja Aparatur	168.901.044.262	175.020.082.449	174.457.260.697	189.477.981.150	247.914.621.008
B	Pengeluaran Pembiayaan					
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
	TOTAL	169.401.044.262	175.520.082.449	176.957.260.697	189.977.981.150	248.914.621.008

Data pada Tabel diatas memperlihatkan bahwa pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah perkembangannya selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Di tahun 2020 besaran pembiayaan ini tercatat Rp.500 juta dan di tahun 2024 menurun menjadi Rp.1 Miliar.

Selanjutnya mengacu dari Tabel di atas, dilakukan perhitungan proyeksi untuk diperoleh Gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat waji dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun kedepan untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah, hasil proyeksinya untuk tahun 2025 – 2029 seperti tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.34. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buru Selatan

No	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
A	Belanja					
1	Belanja Aparatur	269.783.405.255	291.652.189.502	313.520.973.749	335.389.757.996	357.258.542.242
B	Pengeluaran Pembiayaan					
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	748.724.792	497.449.584	246.174.376	0	0
	TOTAL (A + B)	270.532.130.047	292.149.639.086	313.767.148.125	335.389.757.996	357.258.542.242

b. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Buru Selatan dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai kebijakan anggaran 5 (lima) tahun yang lalu dalam menutup defisit riil anggaran daerah. Hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tersebut (2020 – 2024), kondisi surplus dan defisit anggaran secara rinci terlihat pada data di Tabel berikut. Data menunjukkan bahwa selama 3 tahun Kabupaten Buru Selatan mengalami difisit anggaran, yaitu tahun 2020 sebesar Rp.-2,73 Miliar, 2022 sebesar Rp.11.35 Miliar dan 2024 sebesar Rp.30,56 Miliar. Sebaliknya di tahun 2021 dan 2023 Buru Selatan mengalami surplus anggara, masing-masing sebesar Rp.21,66 Miliar dan 25,73 Miliar. Berdasarkan kondisi surplus/defisit tersebut, maka bila di rata-ratakan, pengelolaan keuangan Buru Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami surplus sebesar Rp.2.748.930.952.

Tabel 2.35. Kondisi Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	649.936.435.171	727.691.870.367	641.418.118.955	665.349.206.137	706.265.960.168
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	652.171.170.736	705.526.887.555	650.270.827.582	639.120.674.079	735.823.099.893
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
	Surplus/Defisit	- 2.734.735.565	21.664.982.812	- 11.352.708.627	25.728.532.058	- 30.557.139.725
	RATA-RATA SURPLUS/DEFISIT	2.748.930.952,49				

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Gambaran secara jelas tentang hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.36. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.094.364.435	35.610.267.284	19.002.524.457	44.731.056.515	14.173.916.790
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Investasi)	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
	SILPA Neto	14.594.364.435	36.110.267.284	21.502.524.457	45.231.056.515	15.173.916.790

Berdasarkan data di Tabel di atas, dari SILPA yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dipakai untuk menutupi deficit anggaran yang terjadi pada tahun 2020, 2022 dan 2024.

c. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi global, nasional, regional dan kondisi internal daerah. Atas dasar hal tersebut beberapa asumsi yang dipertimbangkan dalam analisis adalah sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian global saat ini akan terus bergejolak dengan adanya pemberlakuan penyesuaian tarif import baru dalam perdagangan antar negara. Kondisi ini tentu berdampak pada perekonomian nasional dan tentu berimbas pada perekonomian regional dan daerah;
- Kedepan, kondisi perekonomian nasional dan daerah diprediksikan tetap tumbuh cukup signifikan dengan laju inflasi yang dapat dikendalikan pada kisaran posisi lebih besar sama dengan 1,5 dan lebih kecil sama dengan 3,5;
- Melalui komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah akan didorong untuk ditingkatkan melalui perbaikan pengelolaan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah; dan
- Dengan mengecualikan kondisi tahun 2025, kedepan pendapatan transfer pemerintah pusat akan terus meningkat didukung juga dengan peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, terutama berasal dari bagi hasil pajak.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 – 2029 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.37. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
A	PENDAPATAN	756.846.754.850	776.957.406.692	797.068.058.534	817.178.710.375	837.289.362.217
1	Pendapatan Asli Daerah	20.099.838.336	20.109.012.438	20.118.186.540	20.127.360.642	20.136.534.744
2	Pendapatan Transfer	705.173.754.503	724.172.213.072	743.170.671.641	762.169.130.210	781.167.588.779
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.573.162.011	32.676.181.182	33.779.200.352	34.882.219.523	35.985.238.694
B	BELANJA	783.270.070.501	830.717.041.110	878.164.011.718	925.610.982.326	973.057.952.934
1	Belanja Operasi	577.143.663.741	616.193.949.538	655.244.235.336	694.294.521.134	733.344.806.932
2	Belanja Modal	82.138.831.934	89.961.267.510	97.783.703.086	105.606.138.661	113.428.574.237
3	Belanja Tak Terduga	4.241.044.947	4.529.578.294	4.818.111.640	5.106.644.987	5.395.178.334
4	Belanja Transfer	119.746.529.880	120.032.245.768	120.317.961.656	120.603.677.544	120.889.393.431
	Surplus/Defisit	- 26.423.315.651	- 53.759.634.418	- 81.095.953.184	- 108.432.271.951	- 135.768.590.717
C	PEMBIAYAAN	55.925.272.241	68.119.487.971	80.313.703.701	92.507.919.431	104.702.135.160
1	Penerimaan Pembiayaan	57.114.479.356	69.497.902.201	81.881.325.046	94.264.747.891	106.648.170.735
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.189.207.115	1.378.414.230	1.567.621.345	1.756.828.460	1.946.035.575
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA Tahun Berkenan)	29.501.956.590	14.359.853.553	- 782.249.484	- 15.924.352.520	- 31.066.455.557
	RATAAN DEFISIT SILPA 5 TAHUN			-3.911.247.418		

Hasil proyeksi memperlihatkan bahwa di tahun 2027 – 2029 kondisi SILPA negatif, dan secara rata-rata defisit SILPA berada pada kondisi kekurangan sebesar kurang lebih Rp.3,91 Miliar. Berdasarkan kondisi ini, maka tim anggaran pembangunan daerah (TAPD) dalam menyusun rencana anggaran perlu sejak dini memperhatikan data proyeksi anggaran ini, agar kebijakan efisiensi pada belanja-belanja tidak penting dapat mengembalikan kondisi rataan SILPA 5 tahunan menjadi positif.

2.2.7. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan sebagai dasar untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk digunakan dalam pengalokasi belanja pembangunan. Hasil perhitungan kapasitas riil ini untuk pembangunan Buru Selatan 5 tahun kedepan (2025 – 2029) seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan	756.846.754.850	776.957.406.692	797.068.058.534	817.178.710.375	837.289.362.217
2	Penerimaan Pembayaran	57.114.479.356	69.497.902.201	81.881.325.046	94.264.747.891	106.648.170.735
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	813.961.234.206	846.455.308.893	878.949.383.579	911.443.458.266	943.937.532.953

Atas dasar perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditentukan pengalokasian anggaran pembangunan Buru Selatan dengan skenario prioritas sebagai berikut:

- Prioritas I, alokasi anggaran ditujukan untuk belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- Prioritas II, alokasi anggaran ditujukan untuk belanja program perangkat daerah sebagai pelaksana tugas dan fungsi lainnya diluar prioritas I.

Mengacu dari skenario alokasi anggaran tersebut, maka perincian belanja prioritas pembangunan Buru Selatan tahun 2025 – 2029 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.39. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	813.961.234.206	846.455.308.893	878.949.383.579	911.443.458.266	943.937.532.953
1	Belanja Operasi	577.143.663.741	616.193.949.538	655.244.235.336	694.294.521.134	733.344.806.932
2	Belanja Prioritas I	165.772.299.326	161.182.951.548	156.593.603.770	152.004.255.992	147.414.908.215
a	Pendidikan 20% dari total belanja daerah	47.363.514.093	46.052.271.871	44.741.029.649	43.429.787.426	42.118.545.204
b	Kesehatan 10% dari total belanja daerah	23.681.757.047	23.026.135.935	22.370.514.824	21.714.893.713	21.059.272.602
c	Infrastruktur pelayanan publik 40% dari total belanja daerah	94.727.028.186	92.104.543.742	89.482.059.297	86.859.574.853	84.237.090.408
3	Belanja Prioritas II (program perangkat daerah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diluar prioritas I)	71.045.271.140	69.078.407.806	67.111.544.473	65.144.681.140	63.177.817.806
	TOTAL BELANJA PRIORITAS I + II	236.817.570.465	230.261.359.354	223.705.148.243	217.148.937.132	210.592.726.021
	PROPORSI BELANJA PRIORITAS I + II TERHADAP KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN (%)	29,09	27,20	25,45	23,82	22,31

Perhitungan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buru Selatan masih menggunakan pendekatan normal. Untuk itu kapasitas riil kemampuan keuangan untuk tahun 2025 belum bisa dikoreksi karena perubahan APBD tahun 2025 sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat belum ditetapkan oleh Pemerintah Buru Selatan dan DPRD.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan fondasi penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah. Identifikasi permasalahan dilakukan secara komprehensif dan partisipatif dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, serta aspirasi masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, permasalahan yang dihadapi merupakan refleksi dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan cita-cita pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Permasalahan ini tidak hanya muncul dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, kondisi geografis kepulauan, serta dinamika kebijakan di tingkat nasional dan global. Pemahaman terhadap permasalahan secara tepat dan mendalam menjadi kunci dalam merumuskan solusi strategis yang efektif, agar pembangunan daerah dapat diarahkan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berangkat dari permasalahan pembangunan daerah baik kewilayahan maupun sektoral, maka rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi kabupaten Buru selatan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Daya saing sumber daya manusia dan daerah masih rendah.** Daya saing sumber daya manusia dan daerah Kabupaten Buru Selatan masih tergolong rendah karena terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya infrastruktur pendukung ekonomi daerah. Kondisi geografis yang terpencil dan keterbatasan konektivitas juga menghambat arus informasi, investasi, dan inovasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kompetitif. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital dan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam

pengembangan potensi lokal menyebabkan sumber daya manusia belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap dinamika ekonomi modern

2. **Implementasi nilai-nilai kemuliaan akhlak masih perlu ditingkatkan.** Implementasi nilai-nilai kemuliaan akhlak di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan, hal ini karena kesadaran dan penerapan sikap jujur, disiplin, serta tanggung jawab sosial belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Kurangnya pembinaan karakter sejak dini dan peran aktif lingkungan sosial dalam menanamkan nilai moral menyebabkan nilai-nilai akhlak belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Masih belum optimalnya mutu pelayanan bidang sosial dasar.** Mutu pelayanan bidang sosial dasar di Kabupaten Buru Selatan masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung yang memadai. Banyak tenaga pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, belum memiliki kompetensi serta pelatihan yang cukup untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Kondisi geografis yang tersebar dan sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam pemerataan layanan kepada masyarakat di daerah terpencil.
Selain itu, koordinasi antarinstansi dan efektivitas program pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan agar pelayanan sosial dasar dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Kurangnya pengawasan, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan turut memperlambat peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur sosial, dan pengelolaan yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting untuk memperbaiki mutu pelayanan sosial dasar di Kabupaten Buru Selatan.
4. **Pembangunan kebudayaan, stabilitas sosial dan inklusifitas nilai adat belum optimal.** Pembangunan kebudayaan, stabilitas sosial, dan inklusivitas nilai adat di Kabupaten Buru Selatan belum optimal akibat dari masih terbatasnya perhatian terhadap pelestarian serta pengembangan potensi budaya lokal. Kegiatan pelestarian adat dan tradisi belum terintegrasi secara baik dalam program pembangunan daerah, sementara dukungan fasilitas kebudayaan seperti pusat seni, sanggar, dan ruang ekspresi masyarakat masih minim. Kurangnya dokumentasi dan regenerasi pelaku budaya juga menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal perlahan mulai terpinggirkan oleh pengaruh modernisasi.
Selain itu, stabilitas sosial dan inklusivitas nilai adat masih terhambat oleh lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan dan keberagaman. Beberapa wilayah masih menghadapi kesenjangan sosial serta perbedaan pandangan antar kelompok yang dapat memicu disharmoni sosial. Kurangnya ruang dialog dan kolaborasi antar komunitas adat serta belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi integrasi nilai budaya ke dalam kehidupan sosial menjadi tantangan utama dalam membangun masyarakat yang berkarakter inklusif dan harmonis di Kabupaten Buru Selatan.
5. **Angka kemiskinan dan stunting masih tinggi.** Angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih tinggi. Keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi menjadi salah satu penyebab. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi bantuan dan layanan sosial tidak merata, terutama di daerah pedalaman dan pesisir. Selain itu, lapangan kerja produktif masih terbatas, sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan tradisional yang rentan terhadap fluktuasi musim

dan harga. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan rumah tangga dan kemampuan memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Tingginya angka stunting juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang, pola asuh anak, serta masih terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di tingkat desa. Program intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal karena kurangnya koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan pendanaan. Untuk menekan angka kemiskinan dan stunting, dibutuhkan upaya terpadu melalui peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta edukasi gizi dan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Buru Selatan.

6. Ketahanan pangan masih rendah yang mendorong garis kemiskinan tinggi.

Ketahanan pangan di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih rendah, salah satu disebabkan oleh produktivitas sektor pertanian dan perikanan belum optimal, sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada kedua sektor tersebut. Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan tani, serta akses terhadap pupuk dan bibit unggul, membuat hasil produksi tidak stabil dan sulit bersaing di pasar. Kondisi cuaca yang tidak menentu serta minimnya teknologi pengolahan dan penyimpanan hasil panen juga menyebabkan ketergantungan masyarakat pada bahan pangan dari luar daerah, yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup.

Selain itu, lemahnya sistem distribusi dan pasar lokal mengakibatkan hasil pertanian masyarakat tidak terserap dengan baik, sehingga pendapatan petani dan nelayan belum dapat ditingkat secara signifikan. Kurangnya dukungan dalam pengembangan ekonomi pangan lokal dan minimnya edukasi tentang diversifikasi pangan turut memperburuk ketahanan pangan di wilayah ini. Akibatnya, daya beli masyarakat kian tergerus dan garis kemiskinan semakin tinggi karena kebutuhan dasar, terutama pangan, sulit dipenuhi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan ketahanan pangan perlu difokuskan pada penguatan produksi lokal, perbaikan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

7. Laju dan tingkat ketahanan ekonomi serta inklusifitas pelaksanaannya masih rendah.

Laju dan tingkat ketahanan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih rendah akibat dari struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan tradisional yang rentan terhadap perubahan cuaca, harga pasar, serta minimnya inovasi dan teknologi. Akses terhadap modal usaha, infrastruktur ekonomi, serta jaringan distribusi masih terbatas, sehingga pelaku ekonomi kecil sulit berkembang dan bersaing. Kondisi geografis yang tersebar di wilayah kepulauan juga menyebabkan biaya logistik tinggi dan menghambat arus barang serta investasi.

Inklusivitas pelaksana ekonomi pun belum optimal karena partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, masih rendah dalam kegiatan ekonomi produktif. Program pemberdayaan ekonomi belum merata dan sering kali belum sesuai dengan potensi lokal. Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menyebabkan peluang ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan.

- 8. Adanya keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, akses serta konektivitas antar wilayah.** Keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, akses, serta konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh belum meratanya pembangunan dan kualitas infrastruktur dasar. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil membuat pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi tidak merata. Banyak desa masih sulit dijangkau karena jalan rusak, belum beraspal dan belum tersedia, sementara akses terhadap listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi juga belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak pada lambatnya mobilitas barang, jasa, dan manusia antar wilayah dalam kabupaten.

Selain itu, indikator konektivitas ekonomi dan sosial masih lemah karena minimnya transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah terpencil. Keterbatasan investasi dan anggaran daerah memperlambat pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, potensi lokal sulit dikembangkan secara optimal dan kesenjangan antarwilayah semakin lebar. Diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis pemerataan agar seluruh wilayah di Kabupaten Buru Selatan dapat terhubung secara efektif dan produktif.

- 9. Produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan masih belum optimal.** Produktivitas dan hilirisasi sektor unggulan di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih belum optimal tergambarkan dari masih lemahnya indikator nilai tambah ekonomi, kapasitas produksi, dan pemanfaatan teknologi. Sebagian besar kegiatan ekonomi masih berfokus pada produksi bahan mentah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, tanpa diikuti dengan pengolahan lanjutan yang dapat meningkatkan nilai jual. Rendahnya akses terhadap teknologi, modal, serta sumber daya manusia terampil menyebabkan efisiensi dan daya saing produk lokal masih terbatas.

Selain itu, indikator dukungan infrastruktur industri dan rantai pasok juga masih lemah. Minimnya fasilitas pengolahan hasil, keterbatasan energi, serta kurangnya kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah membuat potensi sektor unggulan belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, dan kesempatan kerja yang tercipta pun belum signifikan. Untuk mengoptimalkan produktivitas dan hilirisasi, diperlukan penguatan kapasitas produksi, peningkatan akses pasar, serta kebijakan yang mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

- 10. Kondisi kapasitas fiskal sangat kecil dan dukungan PAD masih sangat rendah.**

Kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Buru Selatan yang sangat kecil dan dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah mencerminkan lemahnya indikator kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan masih minim. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya basis ekonomi produktif, rendahnya kepatuhan pajak, serta belum optimalnya pengelolaan aset dan potensi lokal sebagai sumber penerimaan daerah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik menjadi sempit.

Dampak dari rendahnya kapasitas fiskal ini adalah terhambatnya pelaksanaan program prioritas, keterbatasan investasi infrastruktur, dan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat indikator

kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dengan memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi, serta mendorong pengelolaan aset daerah secara produktif. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan lokal dan kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi strategi untuk memperluas sumber pendapatan daerah serta memperkuat ketahanan fiskal secara berkelanjutan.

- 11. Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan belum berjalan secara baik.** Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku belum berjalan secara baik karena lemahnya indikator transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi. Masih terdapat keterbatasan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan, di mana koordinasi antarperangkat daerah belum optimal. Proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data dan evaluasi kinerja, sehingga pelaksanaan program sering tidak tepat sasaran. Selain itu, sistem pengawasan internal dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan masih rendah, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Indikator efisiensi dan kualitas pelayanan publik juga menunjukkan kelemahan, terlihat dari masih lambatnya respon birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan efektif dan potensi penyalahgunaan anggaran meningkat. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem manajemen kinerja, meningkatkan kompetensi aparatur, dan menerapkan prinsip good governance secara konsisten, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

- 12. Potensi kejadian bencana alam dan perubahan iklim tinggi.** Potensi kejadian bencana alam dan dampak perubahan iklim di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku tergolong tinggi karena lemahnya indikator ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat. Secara geografis, wilayah ini rawan terhadap banjir, tanah longsor, kekeringan, serta gelombang tinggi akibat kondisi topografi dan cuaca ekstrem. Selain itu, aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan tanpa perencanaan yang berkelanjutan turut memperburuk risiko bencana. Kurangnya sistem peringatan dini, minimnya infrastruktur penanggulangan bencana, dan rendahnya kapasitas lembaga lokal memperlihatkan belum optimalnya kesiapan menghadapi ancaman tersebut.

Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui perencanaan pembangunan yang berbasis risiko bencana dan lingkungan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana. Selain itu, pemanfaatan data cuaca dan teknologi pemantauan dini harus dioptimalkan agar respon terhadap potensi bencana lebih cepat dan efektif, sehingga dampak sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.

- 13. Pencapaian pembangunan desa berstatus mandiri masih sangat rendah.**

Pencapaian pembangunan desa berstatus mandiri di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih sangat rendah karena lemahnya indikator kemandirian ekonomi, kapasitas kelembagaan, serta kualitas pelayanan dasar di tingkat desa. Dari sisi ketahanan sosial, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah dan semangat gotong royong mulai menurun. Sementara itu, ketahanan ekonomi desa masih lemah akibat keterbatasan akses permodalan, lapangan kerja, dan diversifikasi usaha. Dari aspek ketahanan lingkungan

pengelolaan sumber daya alam belum berkelanjutan dan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana juga turut memperlambat kemajuan menuju desa mandiri.

Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui pelatihan manajemen pembangunan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan berbasis potensi lokal. Penguatan ketahanan sosial dapat dilakukan dengan mendorong kolaborasi masyarakat dan lembaga adat, sementara ketahanan ekonomi ditingkatkan melalui pengembangan usaha mikro, pertanian modern, dan pariwisata berbasis desa. Dari sisi lingkungan, penting untuk menerapkan program pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Pendekatan terpadu ini akan membantu desa menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

14. Ketersediaan Data, Riset, dan Inovasi Pembangunan Daerah Belum Memadai.

Ketersediaan data, riset, dan pengembangan inovasi di Kabupaten Buru Selatan saat ini masih perlu ditingkatkan untuk menunjang penyusunan rencana dan pembuatan kebijakan berbasis pada bukti empiris (evidence-based policy). Penerapan Sistem Satu Data di tingkat daerah belum mencapai potensi penuhnya. Hal ini terlihat dari belum adanya integrasi data antar sektor, adanya keterbatasan dalam hal validitas dan akurasi data, serta penggunaan data spasial yang belum maksimal dalam perencanaan wilayah serta pemantauan kemajuan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan koordinasi lintas sektor menjadi kurang efektif dan kebijakan pembangunan sering kali tidak didukung oleh basis informasi yang kuat dan mutakhir.

Di sisi lain, kapasitas penelitian dan pengembangan di tingkat daerah masih terkendala oleh aspek kelembagaan, kapabilitas SDM, serta ketersediaan pendanaan. Kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk menghasilkan kajian aplikatif serta inovasi pembangunan belum sepenuhnya optimal. Konsekuensinya, output dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi belum mampu secara efektif menjawab tantangan pembangunan yang mendesak, seperti peningkatan sektor-sektor unggulan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan penguatan basis ekonomi berbasis potensi daerah. Keterbatasan pemahaman ilmiah dan data di kalangan pemangku kepentingan juga menghambat perwujudan tata kelola pembangunan yang adaptif, akurat, dan berorientasi hasil.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dapat memengaruhi arah dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dengan mengidentifikasi isu-isu strategis, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 164 ayat 2 dan 3 Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen

rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis perangkat daerah. Rumusan isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun panjang.

Dalam proses identifikasi isu strategis, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi publik dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai kebutuhan serta harapan masyarakat setempat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih inklusif dan responsif. Oleh karena itu, pengintegrasian isu strategis dalam perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

A. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional

Isu Strategis Global, Nasional dan Regional dalam dokumen ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.40. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional

ISU STRATEGIS		
GLOBAL	RPJPN 2025-2045	RPJPD PROVINSI MALUKU 2025-2045
1. Sustainable Development Goals (SDGs)	1. Produktivitas Rendah	1. Tingkat Perekonomian Rendah
2. Revolusi Industri 4.0	2. IPTEKIN dan Riset Lemah	2. Infrastruktur Dan Literasi Digital Rendah
3. Perubahan Iklim dan Bencana	3. Deindustrialisasi Dini	3. IPTEKIN dan Riset Lemah
4. Terorisme Global	4. Ekonomi Laut Belum Optimal	4. SDM berdaya saing terbatas
5. Perdagangan Bebas	5. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	5. Kemitraan dalam pembangunan belum Optimal
6. Demokrasi dan HAM	6. Integrasi Domestik Terbatas	6. Pelestarian budaya belum optimal dan potensi instabilitas sosial
7. Traffiking	7. Kualitas SDM yang makin rendah	7. Risiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah
	8. Kemiskinan	8 Kesenjangan antar wilayah
	9. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	
	10. Pembangunan belum berkelanjutan	
	11. Tata kelola pemerintahan belum optimal	
	12. Insfrastruktur dan Literasi Digital Rendah	

ISU STRATEGIS		
GLOBAL	RPJPN 2025-2045	RPJPD PROVINSI MALUKU 2025-2045
	13. Kapasitas dan Penegakan Hukum masih lemah	

Sementara itu, isu strategis jangka menengah mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel 2.41. Isu Strategis RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029

ISU STRATEGIS			
RPJMN WILAYAH MALUKU 2025-2029		RPJMD PROVINSI MALUKU 2025-2029	
1.	Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan pada sektor perikanan, pertanian, (cengkih) dan pertambangan (minyak)	1.	Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar serta Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau
2.	Belum optimalnya diversifikasi ekonomi khususnya pada pengembangan sektor pariwisata	2.	Kesenjangan Antar Wilayah
3.	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, serta sarana prasarana dan pengembangan kurikulum yang relevan)	3.	SDM Yang Berdaya Saing Terbatas
4.	Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana	4.	Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan Riset
5.	Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaan SDA	5.	Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Khususnya Hilirisasi Komoditas Unggulan
		6.	Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim Dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah
		7.	Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting
		8.	Pelestarian Budaya Belum Optimal Dan Potensi Instabilitas Sosial
		9.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

B. Isu Strategis Pembangunan Daerah (RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025 2045) dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 dan Isu Strategis KLHS Tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.42. Isu Strategis RPJPD, RPJMN dan KLHS RPJMD Kabupaten Buru Selatan

ISU STRATEGIS					
RPJPD BURU SELATAN 2025-2045		RPJMN 2025-2029		KLHS RPJMD BURU SELATAN 2025-2029	
1	Pembangunan Ekonomi, IPTEK dan Inovasi Belum Optimal	1	Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan pada sektor perikanan, pertanian, (cengkih) dan pertambangan (minyak)	1	Kerentanan Wilayah Terhadap Risiko bencana dan Perubahan Iklim
2	Kualitas SDM dan Literasi Masih Rendah	2	Belum optimalnya diversifikasi ekonomi khususnya pada pengembangan sektor pariwisata	2	Indeks Ketahanan Pangan masih rendah dan Prevalensi ketidakcukupan pangan tinggi
3	Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Belum Optimal dan Rendahnya Kapasitas Fiskal	3	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, serta sarana prasarana dan pengembangan kurikulum yang relevan)	3	Tingginya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah
4	Penegakan Hukum dan Demokrasi Belum Optimal	4	Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana	4	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan
5	Pelestarian dan Ketahanan Sosial Budaya Rendah	5	Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaan SDA	5	Keterbatasan infrastruktur dasar, sarana, prasarana dan pelayanan publik
6	Infrastruktur Rendah dan Kesenjangan Wilayah			6	Belum optimalnya akses layanan air bersih dan sanitasi layak, aman dan berkelanjutan
7	Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Kerentanan Daya Dukung Wilayah dan Kemandirian Pangan Lokal			7	Tata Kelola Pemerintahan, kapasitas Fiskal dan Penegakan Hukum Belum optimalnya
8	Kemitraan dan Kesenambungan Pembangunan Belum Optimal				

C. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

1) Rendahnya Produktivitas Sektor Unggulan

Sektor unggulan Kabupaten Buru Selatan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, mengalami penurunan produktivitas yang dipicu oleh rendahnya nilai tambah komoditas seperti kelapa, cengkih, pala, dan kakao, serta produksi hasil perikanan, yang belum diikuti oleh peningkatan rantai pasok, diversifikasi produk, dan pengembangan industri pengolahan. Di sisi lain, terdapatnya kesenjangan antara rasio luas lahan dan produksi komoditas perkebunan menunjukkan bahwa ada banyak masalah dalam hal budidaya, pemanfaatan teknologi pascapanen, produktivitas tenaga kerja, serta kurangnya akses ke pembiayaan sektor primer.

Terbatasnya sarana rantai dingin, ketersediaan pelabuhan perikanan yang tidak sesuai, dan minimnya industri berbasis maritim menjadi penyebab produksi di sektor perikanan tidak selalu berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan nelayan di beberapa

kecamatan. Untuk mendukung ekonomi hijau wilayah kabupaten Buru Selatan, hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan ekonomi lokal diperlukan intervensi perencanaan yang lebih agresif, modernisasi bisnis pertanian dan perikanan, serta optimalisasi dan hilirisasi produk unggulan.

2) Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah

Tantangan terbesar yang dihadapi kabupaten Buru Selatan dalam pemerataan pembangunan adalah belum optimalnya Konektivitas antar wilayah ini. Aksesibilitas transportasi darat, laut, dan udara, merupakan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buru Selatan belum optimal, dengan indikator seperti panjang jalan yang rusak, waktu tempuh antar kecamatan yang lama, serta keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan publik. Isu ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga memperburuk disparitas pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman, serta meningkatkan risiko isolasi sosial-ekonomi.

Tantangan utama dalam konektivitas antar wilayah terletak pada keterbatasan infrastruktur transportasi darat, yang merupakan moda utama untuk mobilitas intra-kabupaten. Faktor geografis seperti curah hujan tinggi dan tanah berpasir yang rentan longsor memperburuk kondisi jalan. Selain itu, konektivitas laut antar pulau kecil di sekitar Buru Selatan juga belum optimal, dengan hanya tersedia sejumlah pelabuhan (Namrole, Leksula) dengan fasilitas yang terbatas dan frekuensi pelayaran antar kecamatan hanya 2-3 kali per minggu, dengan kapasitas muat terbatas, sehingga distribusi bahan pokok dan hasil pertanian sering terhambat, terutama selama musim angin timur laut.

Implikasi strategis dari belum optimalnya konektivitas ini sangat luas dan multidimensi. Secara ekonomi, isolasi wilayah menghambat pengembangan sektor unggulan seperti pertanian (kelapa, cengkeh, dan pala), perikanan, serta pariwisata bahari. Di bidang sosial, konektivitas yang buruk meningkatkan angka kemiskinan dan stunting karena akses layanan dasar terbatas. Oleh sebab itu, isu ini memerlukan intervensi strategis melalui optimalisasi konektivitas antar wilayah yang bukan hanya solusi teknis, tetapi juga katalisator untuk transformasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan.

3) Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Masih Rendah.

Kualitas SDM merupakan pilar fundamental pembangunan berkelanjutan, karena memengaruhi produktivitas ekonomi, inovasi, dan daya saing wilayah. Namun, indikator-indikator kunci menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Buru Selatan masih rendah, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada dalam kategori sedang, tingkat pendidikan yang belum memadai, serta keterbatasan akses kesehatan dan keterampilan vokasi. Kondisi ini diperburuk oleh geografi terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas sosial-ekonomi, yang menghambat transformasi dari ketergantungan pada sektor primer ke ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini menandai perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan kapasitas manusia sebagai motor penggerak pembangunan.

Di sisi kesehatan, prevalensi stunting masih tinggi, penurunan akses air minum layak, serta capaian sanitasi aman yang berada pada kategori —siaga dan awas|| menunjukkan masih adanya kesenjangan pemenuhan standar pelayanan dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja lokal serta terbatasnya kesiapan SDM untuk beradaptasi dengan transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan. Implikasi strategis dari rendahnya kualitas SDM ini multidimensi dan saling terkait. Secara ekonomi, hal ini menghambat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena kurangnya inovasi dan efisiensi tenaga kerja, sedangkan dibidang sosial, dinamika kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan ada peningkatan kesenjangan dan konsentrasi kemiskinan ekstrem.

Tantangan kualitas SDM ini memerlukan strategi komprehensif melalui penguatan kualitas SDM meliputi perluasan akses layanan pendidikan melalui pembangunan sekolah inklusif (sekolah rakyat) dan program beasiswa, peningkatan kapasitas kesehatan dengan rekrutmen tenaga medis dan kampanye gizi, serta pengembangan keterampilan melalui kemitraan publik-swasta agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah

4) Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Fiskal Belum Optimal.

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Buru Selatan masih menghadapi tantangan pada aspek efektivitas birokrasi, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi layanan publik. Keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan ruang fiskal untuk program prioritas masih sempit, sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam mengeksekusi agenda pembangunan strategis. Kualitas belanja daerah yang belum sepenuhnya produktif juga memengaruhi pencapaian target pembangunan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Rendahnya kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan daerah, inovasi pelayanan, dan perencanaan berbasis data mengakibatkan kualitas pelayanan publik belum konsisten di seluruh wilayah. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal harus menjadi prioritas strategis meliputi implementasi sistem e-governance untuk transparansi penganggaran, reformasi fiskal melalui diversifikasi PAD dengan fokus pada pajak retribusi wisata dan pengelolaan aset daerah, serta pelatihan aparatur untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengawasan.

5) Kerentanan Terhadap Risiko Bencana dan Perubahan Iklim.

Kabupaten Buru Selatan, menghadapi tantangan krusial terkait kerentanan terhadap risiko bencana termasuk banjir, longsor, abrasi, serta kejadian ekstrem akibat perubahan iklim. Kondisi topografi yang didominasi kawasan pegunungan curam dan wilayah pesisir, ditambah perubahan pola curah hujan yang semakin tidak menentu, menyebabkan tingginya risiko bencana hidrometeorologi. Degradasi lingkungan di wilayah hulu dan peningkatan tutupan lahan kritis juga memperburuk risiko kejadian banjir dan tanah longsor, terutama di daerah aliran sungai Waemala, Waetina, dan Waekuma.

Di sisi lain, adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim masih rendah akibat keterbatasan informasi risiko, minimnya infrastruktur mitigasi, serta lemahnya kapasitas

kelembagaan dalam manajemen kebencanaan. Dampak perubahan iklim juga mengancam sektor pertanian, perikanan, ketersediaan air bersih, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas melalui penyusunan peta risiko bencana yang komprehensif, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, rehabilitasi ekosistem, serta pembangunan infrastruktur mitigasi yang terintegrasi di seluruh wilayah. Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim bukan hanya respons reaktif, tetapi investasi proaktif untuk keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.

6) Pembangunan Ekonomi yang Belum Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif merujuk pada proses pertumbuhan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok marginal. Sementara itu, keberlanjutan ekonomi mencakup integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berbasis keberlanjutan. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan, dengan tingkat inklusivitas rendah dan risiko ketidakberlanjutan. Akses pembiayaan, kapasitas usaha mikro dan kecil (UMK), serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas belum sepenuhnya optimal untuk mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses layanan publik di daerah terpencil.

Dari perspektif keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya alam yang belum berbasis prinsip ekonomi hijau berpotensi menimbulkan tekanan ekologis jangka panjang terhadap kawasan hutan dan pesisir. Rendahnya penerapan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya risiko degradasi lahan, penurunan kualitas air, dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati. Untuk itu, pembangunan ekonomi ke depan perlu diarahkan menuju transformasi ekonomi hijau dan biru melalui pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya ramah lingkungan, serta industri kreatif yang mendorong keterlibatan seluruh kelompok masyarakat.

7) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Prevalensi Stunting

Kemiskinan masih menjadi isu strategis utama di Kabupaten Buru Selatan, terutama pada wilayah pedesaan dan kantong-kantong permukiman yang memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar. Akar masalah kemiskinan berkaitan dengan rendahnya produktivitas sektor primer, terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian, dan tingginya biaya aksesibilitas antar wilayah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi yang belum optimal sehingga menghambat percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan jaminan sosial dan akses pembiayaan usaha bagi rumah tangga miskin juga menjadi hambatan bagi peningkatan pendapatan berkelanjutan.

Prevalensi stunting masih menjadi tantangan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor gizi, sanitasi, perilaku hidup sehat, dan kondisi lingkungan. Penurunan akses air minum layak, sanitasi aman yang masih rendah, serta keterbatasan intervensi gizi

sensitif dan spesifik menyebabkan risiko stunting tetap tinggi di beberapa wilayah. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan terintegrasi berbasis keluarga, penguatan layanan gizi ibu dan anak, peningkatan layanan sanitasi dan air minum, serta pengembangan ekonomi produktif bagi keluarga rentan.

8) Pelestarian Budaya dan Stabilitas Sosial yang Belum Optimal.

Pelestarian warisan budaya asli di Kabupaten Buru Selatan menghadapi tantangan, meskipun wilayah tersebut kaya akan tradisi, kearifan lokal, dan identitas kebudayaan yang substansial. Perkembangan arus modernisasi dan pengaruh budaya luar belum diimbangi dengan penguatan kelembagaan adat, dokumentasi warisan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Hal ini menyebabkan sebagian unsur budaya lokal berpotensi memudar dan kurang tersampaikan secara optimal kepada generasi penerus. Selain itu, potensi budaya lokal tersebut belum dioptimalkan secara strategis dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, sehingga kontribusi ekonomi kreatifnya belum maksimal.

Stabilitas sosial masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta potensi konflik sosial yang bersumber dari perebutan sumber daya atau perbedaan komunitas. Rendahnya tingkat inklusi sosial dan belum memadainya ruang publik berkontribusi pada partisipasi pembangunan yang tidak merata. Untuk meningkatkan pelestarian budaya dan stabilitas sosial, diperlukan penguatan kelembagaan adat, revitalisasi budaya lokal, perbaikan komunikasi sosial, serta pengembangan ruang publik dan aktivitas sosial yang dapat mempererat kohesi sosial dan identitas kolektif masyarakat Buru Selatan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan daerah merupakan proses yang berkelanjutan dan terpadu, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, penguatan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan arah pembangunan yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan serta potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal, memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, penyusunan visi dalam RPJMD 2025–2029 menjadi langkah awal dalam merumuskan harapan bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi arah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Visi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 dirancang sebagai refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi ini diharapkan menjadi pedoman yang mendorong akselerasi pembangunan di berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Visi dan Misi RPJMN 2025-2029, Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 dan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.

A. Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan 2025 - 2045

Visi Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045 :

“Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”

Misi Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045 :

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian yang berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN
4. Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah.

5. Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

B. Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2029

1. Visi

Merujuk pada Visi dan Misi RPJPD Kabuapten Buru Selatan 2025-2045 dan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan 2025-2029 maka dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 sebagai berikut :

“Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan”

Frasa **“Arah Baru”** dalam visi ini menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan menggunakan pendekatan strategis yang menekankan pada transformasi menyeluruh dalam visi, kebijakan dan pola pembangunan wilayah dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang lebih baik dan inklusif di dukung oleh potensi Sumber Daya Alam Lokal, SDM berkualitas, ekosistem layanan dan usaha yang bermartabat.

Kata **“Maju”** dalam visi ini berarti bahwa Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Kemajuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Buru Selatan sebagai daerah yang lebih sejahtera.

HUMANIS merupakan akronim dari kata **Harmonis, Unggul, Mandiri, Agamais, Nasionalis, Inklusif** dan **Solidaritas**. Berikut ini diuraikan makna dari masing-masing kata sebagaimana disebutkan.

Kata **“Harmonis”** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Kehidupan yang harmonis menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang stabil, kondusif, dan produktif, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkeadilan.

Harmonis mencerminkan terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam suasana yang saling menghormati, mendukung, dan bekerjasama; kehidupan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, solidaritas, dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan; Keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab bersama; lingkungan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera sebagai cerminan nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang menjadi identitas khas Buru Selatan.

Melalui semangat Harmonis, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang damai, inklusif, toleran, dan beretika, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang selaras dan seimbang dalam keberagaman.

Kata **“Unggul”** dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan mencerminkan tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas dan daya saing tinggi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Keunggulan ini tidak hanya diukur dari capaian angka

atau prestasi semata, tetapi juga dari kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat. Secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan akan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan layanan sosial dasar, layanan publik, akses dan konektivitas transportasi, ketahanan budaya serta keberlanjutan lingkungan.

Kata **"Mandiri"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan tekad untuk menciptakan daerah yang memiliki kemandirian di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kemandirian ini berarti kemampuan daerah untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Mandiri mencerminkan daerah yang kuat secara ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan lokal, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan; pemerintahan yang mampu merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengandalkan kapasitas dan sumber daya daerah sendiri; masyarakat yang memiliki daya juang, kreatifitas, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta berdaya saing di tengah dinamika global; kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.

Dengan semangat Mandiri, diharapkan Buru Selatan menjadi daerah yang tidak hanya mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, tetapi juga mampu membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kokoh, sehingga siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan secara berkelanjutan.

Kata **"Agamais"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral sebagai landasan etika dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata **"Nasionalis"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Nasionalis berarti menanamkan kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap simbol dan identitas negara, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Nasionalisme lokal menjadi kekuatan moral dan politik dalam membangun dari daerah untuk Indonesia.

Kata **"Inklusif"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan yang terbuka dan berpihak kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, gender, suku, agama, atau latar belakang budaya. Inklusif berarti pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Inklusif mencerminkan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya; pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, layanan publik, dan hak-hak sipil secara adil bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi; pengakuan dan penghormatan atas keberagaman sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang mendengar, memahami, dan menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Dengan semangat Inklusif, Kabupaten Buru Selatan diarahkan menjadi daerah yang ramah, terbuka, dan adil bagi semua warganya, di mana tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam proses kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kata **"Solidaritas"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan mencerminkan semangat kebersamaan, saling tolong-menolong, dan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai ini menjadi perekat sosial yang mencegah ketimpangan, memulihkan dari bencana, dan mempercepat kemajuan yang merata.

Kata **"Berkelanjutan"** dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan bertanggung jawab agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya sosial ekonomi secara lestari.

Berkelanjutan mencerminkan pembangunan daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap terjaga kelestariannya; penguatan sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, maupun perkembangan teknologi; upaya menjaga kesinambungan antar program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi jangka panjang daerah; mewujudkan keseimbangan antara kemajuan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas hidup manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Dengan semangat Berkelanjutan, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup yang layak bagi generasi masa depan, dalam lingkungan yang sehat, adil, dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan visi Kepala Daerah terpilih serta tujuan pembangunan nasional, penyusunan indikator sasaran visi merupakan bagian penting dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2030. Indikator-indikator ini disusun sebagai instrumen pengukur pencapaian visi daerah secara terukur, objektif, dan berkesinambungan. Keberadaan indikator ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai dasar penjabaran misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode perencanaan.

Visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029 merupakan representasi dari aspirasi masyarakat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator sasaran visi dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan berbasis data, agar dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan.

Indikator-indikator tersebut mencakup dimensi kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, yang secara agregat akan merepresentasikan tingkat pencapaian visi daerah. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan lima tahunan akan berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merumuskan misi pembangunan sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama periode 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi pedoman sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan agar berjalan secara terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

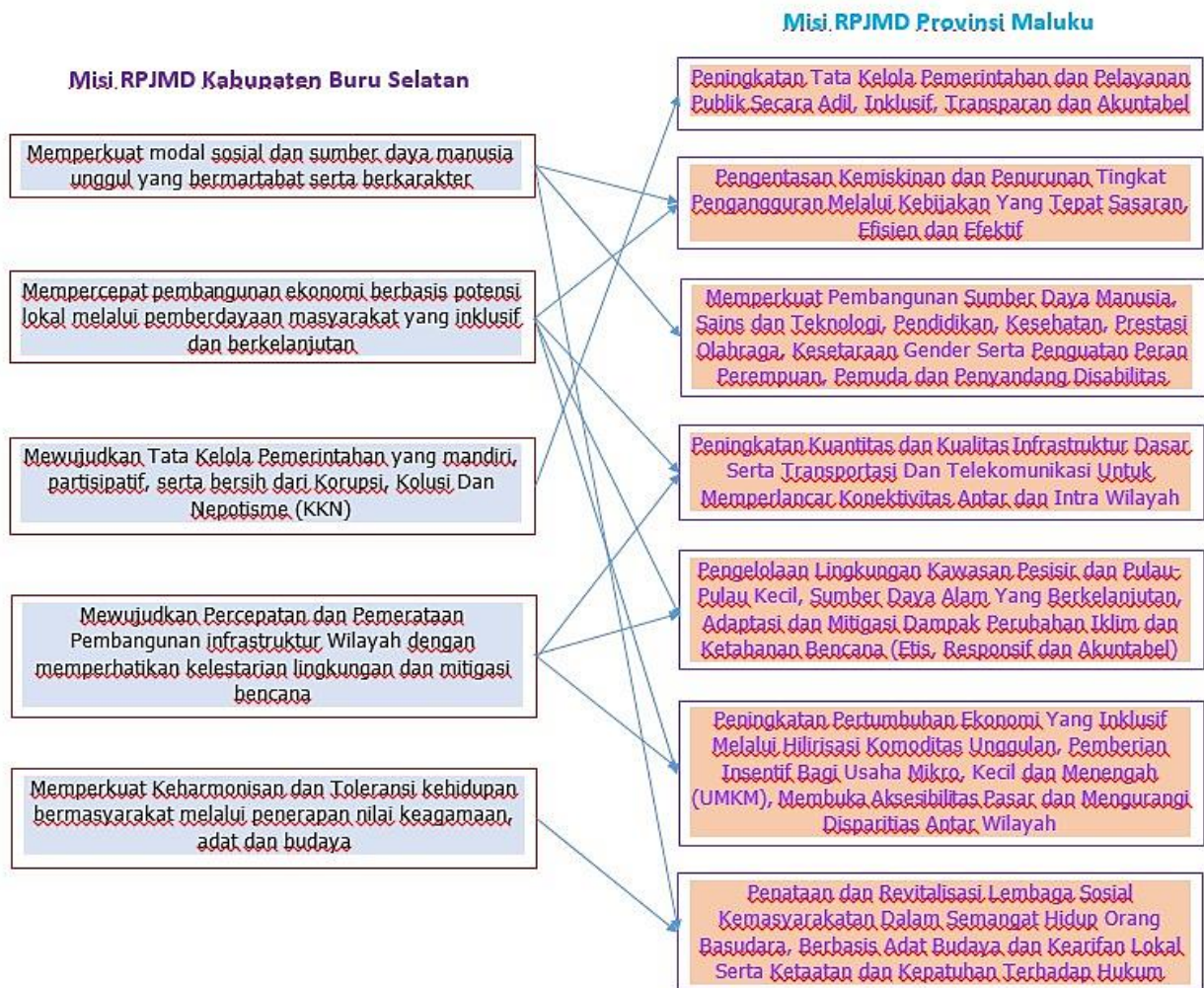
Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, potensi, dan karakteristik wilayah, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Penetapan misi juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mulai dari pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan global yang semakin cepat, terutama dalam konteks digitalisasi, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.

Berdasarkan Visi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dirumuskan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 sebagai berikut;

1. Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
4. Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
5. Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya.

Rumusan Misi RPJMD ini telah diselaraskan dengan rumusan Misi RPJMD Provinsi Maluku 2025- 2029 seperti terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar berjalan secara terukur, terfokus, dan berkelanjutan. Untuk memastikan tercapainya visi dan misi yang telah dirumuskan, diperlukan pernyataan tujuan yang jelas sebagai dasar dalam penentuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan dalam RPJMD ini disusun untuk memperjelas arah capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memperluas akses infrastruktur, maupun menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penetapan tujuan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan potensi kekayaan alam dan keunikan budaya yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan, tetapi juga tantangan pembangunan daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah, penguatan daya saing daerah, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan tujuan yang terukur dan selaras dengan prioritas nasional dan provinsi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Sasaran

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, penetapan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam menerjemahkan visi, misi, dan tujuan pembangunan ke dalam bentuk capaian yang lebih spesifik, terukur, dan realistis. Sasaran pembangunan merupakan instrumen utama untuk mengarahkan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya alam, budaya, dan kekuatan lokal yang besar. Oleh karena itu, sasaran pembangunan dirancang tidak hanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut, tetapi juga untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, seperti ketimpangan akses layanan dasar, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan ketahanan sosial serta lingkungan.

Dengan sasaran yang terukur, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah mampu memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sasaran ini juga menjadi dasar pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan secara berkala, sehingga setiap program yang dijalankan dapat diarahkan pada pencapaian hasil yang optimal.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Indikator RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan - Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter - Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Buru Selatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan bermartabat		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) - Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana - Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat										

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya										
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di Buru Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85	
			Angka Literasi/Numerasi (%)	50	60	70	80	90	100	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	-	-	-	-	-	-	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi (Persentase)							
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	50,00	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50	
			Indeks Literasi Digital (Angka)	3,92	4,05	4,19	4,33	4,48	4,63	
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	8,65	8,81	8,99	9,16	9,34	9,52	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,88	12,92	12,95	12,99	13,02	13,06	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	59,06	59,16	59,26	59,36	59,46	59,56	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	14,94	15,24	15,34	15,44	15,54	15,64	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))							
		Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan SDM di pasar kerja lokal maupun nasional.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	5,25	5,33	5,40	5,48	5,55	5,65	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	5,25	5,33	5,40	5,48	5,55	5,65	
		Menguatnya karakter melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai moral serta etika yang mendukung	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	80,16	83,05	86,03	89,12	92,32	95,64	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		terciptanya masyarakat yang bermartabat								
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	58,93	61,19	63,54	65,97	68,51	71,14	
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi tenaga medis, serta kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, produktif, dan berkarakter di Buru Selatan		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	71,38	72,48	73,58	74,68	75,78	76,88	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan di Buru Selatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	71,38	72,48	73,58	74,68	75,78	76,88	
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	4	4	3	3	2	2	
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	6	6	5	5	4	4	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	86,17	86,68	87,19	87,70	88,21	88,72	
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	60,12	63,27	66,42	69,57	72,72	75,64	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			((%))							
		Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan di daerah	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	92,68	92,90	93,68	93,90	94,68	94,90	
		Meningkatnya kampanye kesehatan dan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penerapan pola hidup sehat untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	65,09	75,53	86,11	96,69	100	100	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		masyarakat di Buru Selatan								
	Memperkuat modal sosial dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85	
		Meningkatnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang serta melaksanakan	Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan (Angka)	5	6	6	7	7	8	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		program-program pembangunan sosial dan ekonomi di Buru Selatan								
			Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi (%)	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
		Menguatnya jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi (%)	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	56,67	57,88	59,12	60,38	61,67	62,98	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		sosial dan ekonomi melalui forum-forum kolaboratif dan pelibatan aktif di tingkat local								
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,31	87,36	87,41	87,46	87,51	87,56	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat secara merata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19	5,42	5,68	5,88	6,48	6,71	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan ((%))	14,69	14,47	14,25	14,04	13,83	13,62	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	3,87	4,04	4,23	4,42	4,62	4,83	
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	23,66	23,99	24,33	24,67	25,01	25,36	
			Tingkat Inflasi ((%))	3,00	2,80	2,50	2,30	2,15	2,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	
			Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	0,01	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	0,240	0,290	0,300	0,350	0,390	0,490	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-	-	-	-	-	
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	2,5	2,8	3,0	3,5	3,8	4,0	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			(UMKM) (IUP) (%)							
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0,251	0,256	0,261	0,266	0,271	0,277	
			Inklusi Keuangan ((%))	2,25	2,33	2,41	2,49	2,58	2,62	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	307	318	329	340	351	355	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	-:-	-:-	-:-	-:-	-:-	-:-	
			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	2,50	2,64	2,78	2,94	3,10	3,70	
			Koefisien Variasi Harga antar wilayah tingkat kabupaten (%)	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,99	46,39	47,83	49,31	50,84	52,42	
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (%)	0,403	0,413	0,423	0,423	0,444	0,455	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2,25	2,33	2,41	2,49	2,58	2,62	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	7,63	7,67	7,71	7,75	7,79	7,84	
			Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	-	-	-	-	-	-	
			Total Kredit/PDRB ((%))	0,251	0,256	0,261	0,266	0,271	0,277	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	53,71	54,01	54,32	54,63	54,94	55,26	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	10,26	10,50	11,26	11,50	12,26	13,10	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	48,32	48,50	49,15	49,60	50,10	50,70	
		Terciptanya lapangan kerja dan wirausaha baru yang inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	25,36	27,55	29,94	32,53	35,32	38,31	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	13,00	14,00	15,00	17,00	19,00	21,00	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			((%))							
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	72,51	72,95	73,40	73,85	74,30	74,76	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,26	1,17	1,09	1,02	0,95	0,88	
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP) (%)	2,5	2,8	3,00	3,5	3,8	4,0	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	307	318	329	340	351	355	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,26	1,17	1,09	1,02	0,95	0,88	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan,		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	55	59,35	63,70	68,50	72,40	76,75	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	serta menjunjung tinggi integritas dan partisipasi public									
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsive	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,65	2,82	3,00	3,19	3,39	3,61	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,99	46,39	47,83	49,31	50,84	52,42	
			Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government) (Persentase)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	
		Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik KKN	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,06	2,34	2,66	3,02	3,44	3,91	
			Nilai SAKIP (Nilai)	30-50	50-60	60-70	60-70	70-80	70-80	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Indeks Merit (Indeks)	0-0	0.20-0.40	0.61-0.80	0.61-0.80	0.80-100	0.80-100	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	38,65	40,50	41,50	42,50	44,50	45,10	
			Indeks Integritas Nasional (Persentase)	70,17	70,27	70,37	70,47	70,57	70,67	
			Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	73,60	77,28	81,15	85,20	89,46	93,94	
			Persentase Penegakan Perda (%)	75	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	70,10	70,50	80,10	80,50	81,10	81,50	
			Persentasi implementasi rencana kelitbangan (%)	80	81	82	83	84	85	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,99	46,39	47,83	49,31	50,84	52,42	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Indeks Inovasi dan Riset Maritim (Indeks)	33,97	34,47	34,97	35,47	35,97	36,47	
			JJumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam (Angka)	1	1	1	1	1	1	
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan ((%))	14,69	14,47	14,25	14,04	13,83	13,63	
			Rasio Gini (Indeks)	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	
			Indeks Infrastruktur	2,78	2,90	3,02	3,15	3,29	3,43	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			(Angka)							
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,05	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	90	100	100	100	100	100	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	122,91	120,67	118,47	116,31	114,19	112,10	
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur (Angka)	2,78	2,90	3,02	3,15	3,29	3,43	
			Perkembangan Indeks Desa (Indeks)	0,644	0,664	0,685	0,707	0,729	0,752	
			Persentase Desa Mandiri (%)	1,27	2,53	3,80	5,06	6,33	7,59	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6,36	6,59	6,82	7,06	7,31	7,56	
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	-	-	-	-	-	-	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Pengolahan Sampah ((%))							
			Indeks Ketahanan Lingkungan (Indeks)	0,784	0,818	0,853	0,887	0,921	0,956	
			Kapasitas Air Baku ((%))	151,60	151,70	151,75	151,80	151,85	151,90	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	70	75	80	85	90	95	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	122,91	120,67	118,47	116,31	114,19	112,10	
			Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	86,92	87,79	88,67	89,56	90,45	91,36	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,04	
			Intensitas Energi Primer ((SBM/Rp Milyar))	233	230	225	220	215	212	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	54,40	55,50	56,60	57,70	58,90	60,00	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	32,16	31,32	30,51	29,73	28,96	28,21	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	55,61	57,12	58,67	60,26	61,90	63,58	
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	67,07	68,32	69,60	70,89	72,22	73,57	
			Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	187,66	188,20	188,60	188,90	190,50	190,70	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Akses sanitasi layak (%)	67,07	68,32	69,60	70,89	72,22	73,57	
			Rasio ketersediaan daya listrik (Rasio)	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	70	75	80	85	90	95	
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan harmonis melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, adat, dan budaya lokal		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	81,58	82,63	83,70	84,78	85,88	86,99	
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	81,58	82,63	83,70	84,78	85,88	86,99	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Terpeliharanya keberagaman budaya dan adat istiadat lokal sebagai identitas sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	59,88	60,38	60,88	61,38	61,88	62,88	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	80,16	83,05	86,03	89,12	92,32	95,64	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,31	87,36	87,41	87,46	87,51	87,56	
		Terciptanya kehidupan sosial yang toleran dan bebas dari konflik antar kelompok masyarakat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	38,65	40,50	41,50	42,50	44,50	45,10	
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area	64,93	65,28	66,32	67,43	68,25	69,28	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Tempat Tinggalnya ((%))							
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	-	10,00	20,00	30,00	30,00	40,00	
			Persentase Angka kriminal (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
			Rasio Kriminal (Rasio)	1,61	1,47	1,33	1,20	1,06	0,92	

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, terarah, dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merumuskan strategi dan arah kebijakan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Strategi dan arah kebijakan ini disusun untuk menjembatani visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi pedoman bagi perumusan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.

Strategi pembangunan dirancang sebagai pendekatan sistematis dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan di Kabupaten Buru Selatan, dengan mengutamakan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Sementara itu, arah kebijakan disusun sebagai pedoman teknis dalam proses penyusunan program prioritas dan penganggaran pembangunan, agar selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Arah kebijakan ini juga dirancang untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang berkembang, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi, termasuk adaptasi terhadap transformasi digital dan penguatan ketahanan daerah di tengah perubahan iklim global.

Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Buru Selatan 2025-2029

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan	1. Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter	1.1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Menyusun dan melaksanakan program pendidikan yang berfokus pada penguatan karakter, etika, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global	1.1.1. Kebijakan Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas: Menjamin penyediaan pendidikan yang setara di seluruh wilayah Buru Selatan, dengan menekankan pada pendidikan karakter, keterampilan teknis, dan nilai-nilai moral
		1.2. Pengembangan Infrastruktur Sosial: Meningkatkan akses dan kualitas fasilitas umum yang mendukung pengembangan sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya	1.2.1. Kebijakan Pengembangan SDM Unggul dan Berkarakter Berbasis Penguatan Infrastruktur Sosial: Menyusun kebijakan yang mendukung pembentukan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan karakter kuat melalui berbagai program pelatihan, kursus, dan workshop dan penguatan infrastruktur sosial
		1.3. Kolaborasi dan Kemitraan yang Inklusif: Memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan	1.3.1. Kebijakan Kolaborasi dan Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan: Mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
		1.4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi: Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan	1.4.1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan: Meningkatkan anggaran dan fokus pada

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		komunikasi dalam memperkuat jejaring sosial, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih efisien	pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai serta pengembangan profesionalisme tenaga medis di Buru Selatan
		1.5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan: Menyusun program-program yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah, serta menyadarkan masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat	1.5.1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat: Memperkuat kemampuan masyarakat melalui program pemberdayaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembangunan sosial
	2. Mempercepat Pembangunan Ekonomi berbasis potensi lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan	2.1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal: Mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang ada untuk dikembangkan menjadi produk unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti produk pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata	2.1.1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Lokal: Membuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		2.2. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi yang Mendukung Sektor-Sektor Unggulan Daerah: Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor-sektor, seperti transportasi, pasar, fasilitas pendukung produksi, dan teknologi informasi untuk mempermudah distribusi produk lokal	2.2.1. Kebijakan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi: Menyusun kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, akses pasar, dan efisiensi distribusi produk lokal

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		2.3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Menyusun dan melaksanakan program pelatihan, pendampingan, dan akses ke modal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha berbasis potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup mereka	2.3.1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan dan Pendampingan: Menyusun kebijakan yang memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global
		2.4. Peningkatan Akses ke Pasar dan Pembiayaan: Membuka akses bagi masyarakat untuk menjual produk lokal baik di pasar domestik maupun internasional, serta menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah diakses untuk usaha kecil dan menengah (UKM)	2.4.1. Kebijakan Akses Pembiayaan dan Modal Usaha: Mengembangkan skema pembiayaan yang memudahkan akses permodalan untuk masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang berbasis potensi lokal
		2.5. Pemberdayaan Sektor UMKM dan Koperasi: Mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai pilar utama ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan keterampilan, dukungan modal, dan akses ke teknologi	2.5.1. Kebijakan Penguatan Sektor UMKM dan Koperasi: Memperkenalkan kebijakan yang mendukung penguatan UMKM dan koperasi melalui pelatihan, pemberian insentif, dan fasilitasi akses pasar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran produk lokal
	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mandiri, Partisipatif, serta Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	3.1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dengan membuka akses informasi publik, memastikan	3.1.1. Kebijakan Transparansi Anggaran dan Laporan Keuangan: Mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah,

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		penggunaan anggaran yang jelas, serta laporan kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat	dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik
		3.2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal: Meningkatkan fungsi pengawasan baik dari lembaga internal pemerintahan maupun lembaga eksternal seperti masyarakat, LSM, dan media untuk meminimalkan potensi KKN	3.2.1. Kebijakan Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Menyusun kebijakan yang memperkuat lembaga pengawasan baik internal (inspektorat) maupun eksternal (lembaga independen dan masyarakat) untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap setiap kegiatan pemerintahan
		3.3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Mengintegrasikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan melalui forum-forum konsultasi publik, musyawarah, dan partisipasi langsung dalam program-program pemerintah	3.3.1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Memastikan bahwa kebijakan pemerintahan dapat diakses dan didiskusikan oleh masyarakat luas, melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, atau platform digital yang mengedepankan inklusivitas
		3.4. Penyuluhan dan Pendidikan Anti-KKN: Melakukan edukasi kepada seluruh pegawai negeri dan masyarakat tentang bahaya KKN serta pentingnya integritas, etika, dan profesionalisme dalam pelayanan publik	3.4.1. Kebijakan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah: Menyusun kebijakan yang berfokus pada peningkatan integritas dan etika kerja aparatur negara, melalui kode etik, pelatihan anti-KKN, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pegawai yang terbukti melakukan

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
			penyimpangan
		3.5. Penguatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah: Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pembinaan mengenai tata kelola yang baik, serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas	3.5.1. Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran KKN: Membuat kebijakan yang menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum terhadap praktek KKN, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh
	4. Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	4.1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur yang tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan	4.1.1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan: Menyusun kebijakan yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek infrastruktur, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan
		4.2. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur di Wilayah Terpencil: Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang atau terisolasi dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan, air bersih, listrik, dan	4.2.1. Kebijakan Pemerataan Infrastruktur di Wilayah Sulit Akses: Mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah yang kurang berkembang dengan memberi prioritas pada daerah-daerah yang membutuhkan akses terhadap fasilitas dasar, seperti transportasi, pendidikan,

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		komunikasi	kesehatan, dan komunikasi
		4.3. Integrasi Aspek Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur: Memastikan setiap proyek pembangunan infrastruktur memiliki analisis dampak lingkungan yang menyeluruh dan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan biodiversitas	4.3.1. Kebijakan Analisis Dampak Lingkungan yang Ketat: Menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap proyek infrastruktur untuk dilakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL), dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan rekomendasi mitigasi yang dihasilkan
		4.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan masukan terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut	4.4.1. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur: Mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi dan dampak sosial dapat diminimalkan
		4.5. Penggunaan Teknologi Hijau dan Energi Terbarukan: Menerapkan teknologi hijau, energi terbarukan, dan material ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur untuk meminimalkan jejak karbon dan menjaga keberlanjutan alam	4.5.1. Kebijakan Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Infrastruktur: Mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dalam proyek pembangunan infrastruktur, serta mendorong inovasi

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
			untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan material
			4.5.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan kawasan pesisir; Pengurangan sampah dan limbah, serta peningkatan pengelolaan air bersih; Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam
		4.6. Penguatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim: Integrasi mitigasi dan adaptasi bencana dalam setiap perencanaan pembangunan; Pembangunan infrastruktur tahan bencana dan tata ruang berbasis risiko; Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama kesiapsiagaan dan respon Bencana	4.6.1. Mitigasi dan Adaptasi Bencana: Pemutakhiran peta rawan bencana dan edukasi kebencanaan di masyarakat; Pembangunan infrastruktur evakuasi dan sistem peringatan dini; Penyusunan rencana kontinjensi daerah dan simulasi rutin
	5. Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya	5.1. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya: Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, adat, dan budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta menyelenggarakan program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama di masyarakat	5.1.1. Kebijakan Integrasi Nilai Keagamaan dan Budaya dalam Sistem Pendidikan: Menerapkan kebijakan yang memastikan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah, serta menyediakan pelatihan bagi guru dan pendidik tentang pentingnya mengajarkan toleransi dan keberagaman

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		5.2. Memfasilitasi Dialog Antar-Agama dan Antar-Suku: Membentuk platform untuk dialog dan kerjasama antar pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat, guna membangun saling pengertian dan memperkuat rasa toleransi di antara kelompok yang berbeda	5.2.1. Kebijakan Fasilitas Dialog dan Kolaborasi Antar-Komunitas: Membuat kebijakan yang mendukung terbentuknya forum-forum dialog antar umat beragama, suku, dan budaya, serta memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat persatuan
		5.3. Penguatan Organisasi Masyarakat Berbasis Nilai Sosial dan Keagamaan: Mendukung keberadaan dan perkembangan organisasi masyarakat yang berbasis nilai keagamaan, adat, dan budaya, yang dapat berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan potensi konflik secara Damai	5.3.1. Kebijakan Penguatan Organisasi Sosial dan Budaya: Mendukung dan memperkuat organisasi berbasis agama, adat, dan budaya yang berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, dengan memberikan akses pendanaan, pelatihan, dan fasilitas untuk kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai luhur
		5.4. Perayaan dan Penghargaan terhadap Keberagaman: Menyelenggarakan kegiatan budaya dan keagamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk merayakan keberagaman dan memperkuat rasa persatuan melalui acara bersama yang menghormati tradisi dan nilai-nilai agama	5.4.1. Kebijakan Penghargaan terhadap Keberagaman dalam Masyarakat: Mendorong program-program yang merayakan keberagaman dengan cara yang inklusif, seperti festival budaya bersama, acara keagamaan yang melibatkan berbagai komunitas, dan penghargaan terhadap upaya menjaga keharmonisan sosial

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		5.5. Peningkatan Peran Pemuda dalam Memelihara Toleransi: Mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam kegiatan yang mengedepankan persatuan dan toleransi antarumat beragama dan antarsuku melalui program kepemudaan, organisasi sosial, dan kegiatan bersama	5.5.1. Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dalam Kegiatan Sosial: Menyusun kebijakan yang mendorong pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, kebudayaan, dan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling pengertian di tengah masyarakat yang majemuk

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan Program Prioritas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Penetapan program prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan difokuskan pada isu-isu strategis dan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Program prioritas disusun sebagai jawaban atas tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Buru Selatan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdaya saing di era transformasi digital.

Melalui program prioritas, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berupaya mengarahkan pembangunan secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien, agar berbagai upaya pembangunan tidak berjalan secara parsial tetapi bersinergi lintas sektor, dengan orientasi pada hasil yang terukur dan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program-program prioritas ini diharapkan tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan di tingkat regional, nasional, maupun global.

Tabel 3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan - Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter - Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Buru Selatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan bermartabat			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
dan berkelanjutan - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) - Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana - Memperkuat						

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya						
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di Buru Selatan		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))		
				Indeks Literasi Digital (Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi (Persentase)		
				Angka Literasi/Numerasi (%)		
				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
			Meningkatkanya kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Buru Selatan	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Literasi/Numerasi (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			OPD Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan SDM di pasar kerja lokal maupun nasional.		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))		
		Menguatnya karakter melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai moral serta etika yang mendukung terciptanya masyarakat yang		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		bermartabat				
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))		
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi tenaga medis, serta kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, produktif, dan berkarakter di Buru Selatan			Usia Harapan Hidup (UHH)((tahun))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan di Buru Selatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Kesehatan	sesuai standar. (%)	DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				perizinan (Persentase)	DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta derajat kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun. (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA) (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Terkendalnya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber-KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase KB Pasca Persalinan (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan di daerah		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kampanye kesehatan dan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penerapan pola hidup sehat untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat di Buru Selatan		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
	Memperkuat modal sosial dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan sosial dan			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan					
		Meningkatnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang serta melaksanakan program-program pembangunan sosial dan ekonomi di Buru Selatan		Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi (%)		
				Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan (Angka)		
			Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Jaminan Sosial	(Persentase)		
			Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Penangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Menguatnya jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung		Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan				
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan sosial dan ekonomi melalui forum-forum kolaboratif dan pelibatan aktif di tingkat lokal		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			adat desa dalam pemberdayaan masyarakat		LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			OPD Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat secara merata					
				Tingkat Kemiskinan((%))		
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor ekonomi lokal		Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Kontribusi PDRB Pariwisata (%)		
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP) (%)		
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		
				Koefisien Variasi Harga antar wilayah tingkat kabupaten (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))		
				Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Total Kredit/PDRB ((%))		
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
				Inklusi Keuangan ((%))		
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
				Indeks Akses Keuangan		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Daerah (Indeks)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
				Tingkat Inflasi ((%))		
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (%)		
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)		
			Jumlah Event Promosi Pariwisata		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten			
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata		3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Koperasi mampu meningkatkan volume usaha, aset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga menjadi mandiri dan mampu bersaing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Kkal/Kapita/Hari)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			OPD Terjadinya peningkatan signifikan pada	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			rata-rata omzet dan aset UMKM, dengan indikator keberhasilan paling tinggi adalah perpindahan kategori usaha			
			Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Terjadi peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Terlaksannya Prasarana dasar seperti rumah transmigran, jalan/akses,	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			jembatan, sarana air bersih, dan listrik telah terbangun, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar kelayakan hun			
			Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		Terciptanya lapangan kerja dan wirausaha baru yang inklusif		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))		
				Persentase Penyandang		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))		
			Jumlah Event Promosi Pariwisata		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata		3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					INTELEKTUAL	
			Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Terlaksannya Prasarana dasar seperti rumah transmigran, jalan/akses, jembatan, sarana air bersih, dan listrik telah terbangun, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar kelayakan hun	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan	Terwujudnya implementasi program ketenagakerjaan yang berbasis data dan terarah	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP) (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Jumlah Event Promosi Pariwisata		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha (Perusahaan/UKM/IKM)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata		3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal (Investor)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (Rupiah)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi (Data)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			terkendalinya pelaksanaan penanaman modal di Daerah	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel,			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan partisipasi public					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsive		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government) (Persentase)		
			Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			pencatatan sipil	dan Pelaporan atas Peristiwa Penting tepat waktu (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase data sinkron dan OPD Pengguna data Kependudukan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik KKN		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
				Indeks Sistem		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Nilai SAKIP (Nilai)		
				Indeks Merit (Indeks)		
				Persentase Penegakan Perda (%)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		JJumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam (Angka)		
				Persentasi implementasi rencana kelitbangan (%)		
				Indeks Inovasi dan Riset Maritim (Indeks)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Daerah			
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat			Indeks Risiko Bencana(Indeks)		
				Rasio Gini(Indeks)		
				Tingkat Kemiskinan((%))		
				Indeks Infrastruktur(Angka)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin)		
				Persentase Penurunan Emisi GRK(Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah		Perkembangan Indeks Desa (Indeks)		
				Persentase Desa Mandiri (%)		
				Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatkan kualitas hunian dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			sistem drainase		SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut (Orang)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Jumlah Barang Melalui Dermaga (Ton)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya pengembangan permukiman	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Rasio)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kepemilikan KIR (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)		
				Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government) (Persentase)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Persentase Pemukiman Tertata	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Terlaksananya penyelenggaraan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			jalan		JALAN	
			Tersedianya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Terselenggaranya penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))		
				Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)		
				Kapasitas Air Baku ((%))		
				Intensitas Energi Primer ((SBM/Rp Milyar))		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
				Indeks Risiko Bencana		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				(Indeks)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
				Indeks Ketahanan Lingkungan (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)		
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lmbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Beracun (Limbah B3)		BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			OPD Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati			
				Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium (Persentase)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			terlaksananya dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengendalikan pembangunan agar tidak merusak lingkungan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
				Rasio ketersediaan daya listrik (Rasio)		
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))		
				Akses sanitasi layak (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)		
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya pengembangan permukiman	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (%)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Tersedianya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Terselenggaranya penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan harmonis melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, adat, dan budaya lokal			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari hari		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
		Terpeliharanya keberagaman budaya dan adat istiadat lokal sebagai identitas sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
		Terciptanya kehidupan sosial yang toleran dan bebas dari konflik antar kelompok masyarakat		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))		
				Persentase Angka kriminal (%)		
				Rasio Kriminal (Rasio)		
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

Program-program prioritas yang dikembangkan ini juga telah mengakomodir 10 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029; yaitu (1). Pendidikan dan Kesehatan Gratis; (2). Program Ketahanan Energi; (3). Perumahan Rakyat; (4). Pembangunan Infrastruktur; (5). Internet Satelit Gratis; (6). Pangan Rakyat; (7). Wirausaha dan UMKM; (8). Ketahanan Pangan Daerah; (9). Pemberdayaan Masyarakat Adat; (10). Program Buru Selatan BERAKHLAK. Selain itu, Program Prioritas dan indikasi kegiatan juga telah menyelaraskan dengan Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah kewilayahan Kabupaten Buru Selatan dalam RPJMN 2025-2029. Penjabaran program prioritas tersebut beserta indikasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4. Program Prioritas dan Indikasi Kegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan (penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka) dan Kesehatan (Peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan) Gratis	1. Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dengan output pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/Paket A; SMP/Paket B; Pengadaan dan distribusi seragam serta perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP/Sederajat.	1	01	02	2.01;2.02	0016; 0027
		2. Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik); Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1	01	02	2.01; 2.02; 2.03; 2.04	0029; 0032; 0042; 0018; 0010
		3. Subsidi biaya operasional sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tanpa pungutan (BOS Daerah).	1	01	02	2.01	0029; 0030

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		4. Pemenuhan dan Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan output penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pelayanan, Pemberian Insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik dengan output: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen yang bertugas di daerah terpencil.	1	01	02	2.01 2.02	0027 0040
		5. Peningkatan Sarana (kurikulum, Sistem penjaminan mutu pendidikan) dan Prasarana Fasilitas Pendidikan dengan output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta	1	01	02	2.01	0019 0048
			1	01	02	2.02	0012 0024
		peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh; Peningkatan Penyelenggaraan					

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		program kesetaraan dengan output pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat dengan output: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual					
		6. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Pemeriksaan kesehatan gratis yang non BPJS di Puskesmas dan Pustu termasuk fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja melalui pemberian makan bergizi gratis; pemberian insentif, jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	1	02	02	2.01	0024

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		7. Program pelayanan kesehatan keliling (pelayanan kesehatan bergerak/mobile health services) untuk menjangkau daerah terpencil dan kepulauan termasuk pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan output: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak serta pendayagunaan dokter spesialis; penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine dengan output: pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan telemedicine;	1	02	02	2.01	0007 0025
		8. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk alat medis dan ketersediaan tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (peningkatan kualitas RS); peningkatan kualitas	1	02	02	2.01	0002 0003 0006 0007 0009 0010

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana dan prasarana dan alat kesehatan dengan					
			1	02	03	2.02	0002
			1	02	03	2.03	0001
		output: peningkatan sarana puskesmas, pustu, pos yandu dan poskesdes; peningkatan RS Tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana obat dan alat kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan bergerak dan telemedicine serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung telemedicine; penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak					

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		dengan output: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting					
2	Program Ketahanan Energi	1. Koordinasi Pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Dinas Terkait di desa- desa terpencil dan wilayah belum teraliri listrik.	3	29	05	2.01	0003
		2. Penyediaan dan distribusi energi alternatif berbasis potensi lokal (seperti biogas dari limbah pertanian/perikanan dan biomassa).	3	29	05	3.04	0002
		3. Koordinasi dengan PLN untuk revitalisasi dan perluasan jaringan listrik desa (listrik desa terpadu) dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi.	3	29	05	3.06	0001
		4. Kerja sama mitra (NGO/Perguruan Tinggi/Swasta/BUMN) untuk pembangunan fasilitas energi terbarukan skala kecil-menengah (seperti mikrohidro di wilayah pesisir dan pegunungan).	3	29	05	3.05	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		5. Pemberian insentif dan subsidi alat hemat energi bagi rumah tangga kurang mampu (seperti lampu LED, kompor hemat energi, panel surya rumah tangga).	3	29	05	3.05	0003
		6. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pemeliharaan dan pengelolaan sistem energi terbarukan.	3	29	05	3.06	0002
		7. Kerja sama dengan pihak swasta dan BUMDes dalam pengembangan desa mandiri energi melalui skema investasi atau kemitraan.	2	13	03	2.01	0002
		8. Kerjasama (NGO/Perguruan Tinggi/Swasta/BUMN/P emprov) dalam penyusunan peta potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai dasar perencanaan dan investasi energi daerah.	3	29	05	3.05	0004
3	Perumahan Rakyat	1. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya	1	04	04	2.01	0004

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		(BSPS).					
		2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan pedesaan dan pesisir untuk meningkatkan kualitas hunian.	1	04	03	2.03	0002 0012
		3. Penyediaan rumah khusus bagi korban bencana alam dan masyarakat terdampak relokasi.	1	04	02	2.03	0001 0004 0007 0008 0009
		4. Pembangunan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan prasarana dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi).	1	04	03	2.01	0004
		5. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak di lingkungan permukiman rakyat.	1	04	05	2.01	0007 0008
		6. Fasilitasi legalitas tanah dan sertifikasi rumah warga miskin melalui kerja sama dengan BPN (sertifikasi hak milik).	2	10	12	7.02	0001
		7. Pengembangan rumah susun sederhana (rusunawa) untuk aparatur, dan buruh yang belum memiliki tempat tinggal.	1	04	02	2.01	0006
		8. Pendataan dan pemetaan kawasan kumuh sebagai dasar intervensi perumahan	1	04	03	2.02	0014

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.					
			1	04	03	2.03	0007
4	Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (Namrole-Leksula-Kepala Madan), antar desa dan kecamatan untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar.	1	03	10	2.01	0031 0032 0033 0034 0038 0039 0040 0042 0044 0046 PUPR
		2. Pengurusan Perizinan pembangunan jalan dan jembatan untuk kecamatan Fena Fafan	1	03	10	2.01	0029
		3. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Ambalau.	1	03	10	2.01	0031 0032 0033 0034 0038 0039 0040 0042 0044 0046
		4. Pembangunan Drainase	1	03	06	2.01	0012
		5. Revitalisasi Pasar Tradisional	3	30	02	2.01	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		6. Pembangunan dan Revitalisasi breakwater.	1	03	02	2.01	0092 0102 0106
		7. Pembangunan dan revitalisasi tanggul Sungai.	1	03	02	2.01	0103 0115 0126
		8. Pembangunan infrastruktur irigasi dan embung desa untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.	1	03	02	2.02	0002 0008 0014 0021
			3	27	03	2.02	0002 0011
		9. Pengembangan dan perbaikan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan permukiman, sekolah, dan fasilitas umum.	1	04	05	2.01	0007 0008
		10. Peningkatan infrastruktur pelabuhan rakyat dan dermaga penyeberangan untuk mendukung konektivitas antar pulau dan distribusi barang.	2	15	03	2.12	0003 0005
			2	15	03	2.15	0003
		11. Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan sosial, seperti pasar rakyat, ruang terbuka hijau, dan balai desa.	2	11	04	2.01	0004

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		12. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi pedesaan, seperti Starlink/BTS untuk akses Wi-Fi/internet publik, untuk mengurangi kesenjangan digital.	2	16	02	2.01	0017
		13. Penyusunan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan terpadu.	1	03	12	2.01	0003
5	Internet Satelit Gratis	1. Penyediaan dan pemasangan perangkat internet satelit gratis di desa-desa terpencil dan wilayah tanpa jaringan terestrial	2	16	02	2.01	0017
		2. Pembangunan pusat layanan internet desa (Wi-Fi publik) di fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan balai pertemuan.	2	16	02	2.01	0017
		3. Kerja sama dengan penyedia layanan satelit dan Kementerian Komunikasi dan digital dan atau pihak swasta untuk perluasan jaringan internet berbasis satelit.	2	16	02	2.01	0015

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		4. Penyediaan internet gratis bagi sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk mendukung transformasi digital pembelajaran.	1	01	02	2.03	0031
			1	01	02	2.04	0033
			1	01	02	2.02	0068
		5. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa agar dapat memanfaatkan internet untuk pendidikan, layanan publik, dan ekonomi digital, termasuk peningkatan literasi dengan output pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca dan peningkatan literasi digital.	2	16	03	3.02	0015
			2	16	03	4.02	0015
		6. Monitoring dan pemeliharaan perangkat internet satelit untuk memastikan konektivitas berjalan stabil dan berkelanjutan.	2	16	02	2.01	0019

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		7. Penguatan regulasi dan kelembagaan desa digital untuk mendukung pengelolaan layanan internet secara partisipatif dan akuntabel.	2	16	03	4.02	0013
		8. Integrasi layanan publik berbasis digital (e-government) dengan jaringan internet desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan informasi pembangunan.	2	16	03	4.02	0015
		9. Penyusunan Dashboard Evaluasi Indikator RPJMD	X	XX	01	2.01	0007
6	Pangan Rakyat	1. Penguatan Lumbung Pangan Desa dan Rumah Pangan Kita;	2	09	03	2.01	0002 0007
			7	01	03	2.06	0003
		2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis Daerah.	2	09	03	2.01	0002
		3. Pembangunan Infrastruktur dan Alat Pengolahan pasca panen.	2	09	02	2.01	0003
			3	27	03	2.01	0006
		4. Peningkatan Kapasitas Petani.	3	27	07	2.01	0002 0005

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
		5. Penguatan Kelembagaan petani dan pangan rakyat.	3	27	07	2.01	0002 0008
		6. Penguatan kelompok tani, nelayan dan rumah tangga produsen pangan lokal melalui bantuan bibit, alat pertanian, alat tangkap dan pelatihan teknis.	3	25	03	2.02	0001
			3	25	03	3.02	0004
		7. Pengembangan pertanian terpadu berbasis keluarga (pangan, hortikultura, ternak, dan perikanan skala rumah tangga).	2	09	03	2.01	0002 0007 0009
		8. Pemberdayaan perempuan dan UMKM pangan lokal melalui pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pangan tradisional.	3	25	06	3.04	0001
		9. Subsidi pangan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program bantuan pangan daerah (selain dari program nasional).	1	06	05	2.02	0003
		10. Pemanfaatan lahan tidur atau pekarangan produktif untuk menanam pangan strategis (padi, jagung,	3	27	03	2.01	0015

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		ubi, sayuran).					
		11. Penguatan peran TPID dalam monitoring harga dan distribusi bahan pangan pokok di pasar rakyat untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga ekstrem.	2	09	03	2.01	0008 0011 0012 0013 0014 0015
7	Wirausaha dan UMKM	1. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi pemuda, perempuan, dan pelaku usaha pemula untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan produksi	2	07	03	2.01	0004
			2	17	07	2.01	0015
			3	26	05	2.02	0001
			2	17	08	2.01	0002
		2. Fasilitasi bantuan modal usaha mikro melalui hibah bergulir atau akses ke lembaga keuangan (koperasi, BUMDes, bank mitra).	2	17	06	2.01	0006 0007 0008
			2	17	08	2.01	0002
		3. Pengembangan inkubator bisnis dan pusat layanan UMKM daerah untuk mendukung start-up dan usaha mikro berbasis potensi lokal.	2	17	08	2.01	0004 0005
			2	16	03	3.02	0013

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		4. Pemberdayaan UMKM berbasis sektor unggulan lokal (seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan kuliner tradisional).	2	17	07	2.01	0002 0004
			2	17	08	2.01	0002
		5. Digitalisasi UMKM melalui pelatihan pemasaran online dan e-commerce (penggunaan media sosial, marketplace, dan aplikasi lokal).	2	16	03	3.02	0014
			2	16	03	4.02	0014
		6. Fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi produk, dan perizinan terpadu untuk mendorong UMKM naik kelas	2	17	07	2.01	0003 0011
		7. Penyediaan sarana prasarana produksi dan pemasaran UMKM, seperti gerai UMKM, kios bersama, atau rumah produksi.	2	17	08	2.01	0006
			2	17	07	3.04	0001
			2	17	07	4.04	0001
		8. Penyelenggaraan expo, festival, dan promosi produk UMKM daerah baik di tingkat lokal maupun regional/nasional.	2	18	03	2.01	0002

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kgiatan	Sub Kegiatan
8	Ketahanan Pangan Daerah	1. Pengembangan Sentra Pangan Pola Transmigrasi sebagai penyangga ketahanan pangan daerah	3	32	04	2.01	0002
			2	09	02	2.01	0003
		2. Pengembangan sentra komoditi pangan untuk penguatan ketahanan pangan lokal	2	09	03	2.01	0002
		3. Pembangunan infrastruktur distribusi dan logistic pangan	2	09	02	2.01	0004 0006
		4. Penguatan armada dan sarana tangkap nelayan kecil	3	25	03	2.01	0002
		5. Peningkatan kapasitas pengolahan dan diversifikasi produk ikan dan pangan lainnya.	3	25	06	3.04	0001
			3	25	06	3.07	0001
			3	25	06	3.09	0001
		6. Pengembangan budidaya perikanan air tawar dan air laut	3	25	04	2.02	0001
		7. Penguatan kelembagaan dan akses permodalan untuk petani, peternak dan nelayan (Kredit Bunga Rendah)	2	09	03	2.01	0006 0010
			2	17	06	2.01	0006 0007 0008

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		8. Rehabilitasi ekosistem perikanan berkelanjutan.	3	25	04	2.04	0004
		9. Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok tani, nelayan, dan peternak untuk meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan strategis.	3	25	04	2.02	0001
			3	27	07	2.01	0002 0008
		10. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur untuk budidaya pangan rumah tangga dan komunitas.	2	09	03	2.01	0007
		11. Pengembangan sistem informasi pangan daerah (SIPD) untuk memantau produksi, distribusi, konsumsi, dan stok pangan secara real time.	3	30	04	2.02	0002
9	Pemberdayaan Masyarakat Adat	1. Inventarisasi, pengakuan, dan penetapan hak-hak masyarakat hukum adat termasuk wilayah adat, kelembagaan adat, dan sistem nilai lokal.	1	06	02	2.01	0002
			2	10	07	2.01	0002
			2	10	07	3.03	0001
			2	13	05	3.01	0015

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Penguatan kelembagaan adat melalui dukungan operasional, pelatihan kepemimpinan adat, dan fasilitasi musyawarah adat.	1	06	02	2.03	0004
			2	13	05	2.01	0002 0003 0004
		3. Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal seperti kerajinan, hasil hutan bukan kayu, pertanian adat, dan produk budaya khas.	3	28	08	3.01	0001
		4. Pelestarian bahasa, budaya, dan upacara adat melalui festival budaya, dokumentasi warisan budaya tak benda, dan muatan lokal di sekolah.	2	22	05	4.02	0005
		5. Fasilitasi penyelesaian konflik tenurial (sengketa atau pertentangan terkait kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah) dan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat secara partisipatif dan bermartabat.	2	10	07	3.02 3.09	0002 002
			1	06	02	2.01	0001
		6. Peningkatan akses layanan dasar untuk komunitas adat terpencil seperti pendidikan kontekstual,					

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		kesehatan berbasis komunitas, dan infrastruktur dasar.					
		7. Pelatihan dan pendampingan masyarakat adat dalam tata kelola wilayah adat termasuk konservasi, pertanian berkelanjutan, dan mitigasi bencana.	2	17	06	3.01	0004
			2	18	02	4.05	0001
		8. Pemberian bantuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dalam menghadapi sengketa lahan, eksploitasi sumber daya, atau diskriminasi.	2	10	07	4.07	0002
			2	10	07	4.09	0002
10	Program Buru Selatan BERAKHLAK	1. Sosialisasi dan edukasi nilai-nilai BERAKHLAK kepada seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat melalui workshop, seminar, dan kampanye budaya.	8	01	02	2.01	0006
		2. Pelatihan penguatan karakter dan etika kerja bagi ASN dan tenaga pendidikan yang mengedepankan integritas,	5	03	02	2.03	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		profesionalisme, dan pelayanan prima.					
			5	03	02	2.04	0007
		3. Pengembangan modul dan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai lokal dan nasional untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Buru Selatan.	1	01	03	3.01	0005
			1	01	03	3.02	0004
			1	01	03	4.01	0005
			1	01	03	4.02	0004
		4. Penguatan lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai penjaga dan penyebar nilai-nilai akhlak dan budaya di komunitas.	2	22	02	2.03	0001 0002
		5. Pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan rutin yang mempromosikan toleransi, gotong royong, dan solidaritas antarwarga.	8	01	05	2.01	0003
		6. Pengembangan media komunikasi publik untuk kampanye budaya dan etika BERAKHLAK secara masif.	2	16	02	2.01	0015

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		7. Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada individu atau kelompok yang berprestasi dalam menegakkan nilai-nilai BERAHLAK di lingkungan masyarakat dan pemerintahan.	5	03	02	2.04	0004
		8. Monitoring dan evaluasi penerapan nilai-nilai BERAHLAK dalam pelayanan publik dan lingkungan kerja pemerintahan secara berkala.	5	03	02	2.01	0012

3.3. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Penahapan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025–2029 disusun sebagai strategi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan berkelanjutan selama periode lima tahun pemerintahan. Penahapan ini menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam alur pembangunan tahunan yang realistis sesuai prioritas daerah, kapasitas fiskal, dinamika sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD tidak hanya menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, tetapi juga merumuskan tahapan implementasi agar proses pembangunan berlangsung secara bertahap dan saling menguatkan dari tahun ke tahun. Melalui penahapan ini, setiap agenda pembangunan diarahkan untuk memberikan dampak yang nyata, memastikan kesinambungan program lintas sektor, serta mencapai outcome pembangunan yang optimal di akhir periode.

Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025–2029 dibagi ke dalam lima tahap utama seperti terlihat pada Tabel 3.5. Penahapan ini menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan daerah sepanjang periode RPJMD. Dengan pelaksanaan pembangunan yang bertahap, fokus, dan terintegrasi, Kabupaten Buru Selatan diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan sosial, dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 3.5. Penahapan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029

Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029)
Penguatan Fondasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Dasar sebagai Landasan Pembangunan Daerah	Penguatan Daya Saing Daerah melalui Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penguatan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan	Pemantapan Kemandirian Daerah dan Keberlanjutan Pembangunan Menuju Tahap Jangka Panjang
Tahap I difokuskan pada 1. Reformasi Birokrasi; 2. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan; 3. Penyediaan Infrastruktur Dasar; 4. Penguatan Ketahanan Pangan.	Tahap II difokuskan pada 1. Hilirisasi Sektor Unggulan; 2. Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMDes; 3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi; 4. Perluasan Lapangan Kerja.	Tahap III difokuskan pada 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 2. Pelatihan Tenaga Kerja; 3. Pengurangan Kemiskinan dan Stunting; 4. Perlindungan Sosial; 5. Pemerataan Manfaat Pembangunan.	Tahap IV difokuskan pada 1. Percepatan Pembangunan Desa dan Wilayah Terpencil; 2. Pemerataan Infrastruktur; 3. Ekonomi Hijau; 4. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Tahap V difokuskan pada 1. Pemantapan Capaian RPJMD; 2. Peningkatan PAD; 3. Inovasi Daerah dan Digitalisasi Pemerintahan; 4. Konsolidasi dan Transisi RPJMD.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Dalam konteks tersebut, perumusan program perangkat daerah menjadi tahapan krusial yang menentukan efektivitas implementasi RPJMD. Proses ini tidak sekadar menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah ke dalam bentuk operasional, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pendekatan ilmiah, analisis empiris, serta prinsip-prinsip tata kelola pembangunan yang baik. Oleh karena itu, perumusan program perangkat daerah harus dipahami sebagai kegiatan teknokratis yang memadukan dimensi konseptual, normatif, dan pragmatis secara terpadu.

Kabupaten Buru Selatan, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan tingkat aksesibilitas yang masih terbatas, menghadapi tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi. Ketimpangan antarwilayah, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer menuntut perencanaan program yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini, perangkat daerah memiliki peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan yang bertugas mengkonversi arah kebijakan makro daerah menjadi intervensi programatik yang terukur dan berkelanjutan.

Perumusan program perangkat daerah merupakan proses yang menggabungkan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratis menekankan penggunaan metode ilmiah, analisis data, dan bukti empiris dalam menentukan prioritas pembangunan. Pendekatan partisipatif menjamin keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial, dalam proses perencanaan. Pendekatan politis menegaskan pentingnya penyelarasan antara visi kepala daerah dengan arah kebijakan pembangunan, sedangkan pendekatan top-down dan bottom-up memastikan keseimbangan antara kebijakan makro daerah dengan kebutuhan.

Dengan menggabungkan pendekatan tersebut, perumusan program perangkat daerah Kabupaten Buru Selatan diarahkan untuk menghasilkan rancangan program yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi hasil. Proses ini tidak hanya bertumpu pada pencapaian target kinerja semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan program menjadi instrumen penting dalam memastikan terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan program perangkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kasus Kabupaten Buru Selatan, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan dengan total belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat, yang secara langsung membatasi ruang fiskal daerah dalam merancang program yang bersifat inovatif dan berdaya saing.

Dalam situasi fiskal seperti ini, perumusan program perangkat daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya publik. Paradigma money follow program menjadi relevan untuk diterapkan, di mana alokasi anggaran diarahkan pada program-program prioritas yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap program yang dirumuskan perlu memiliki rasionalitas ekonomi, keterukuran capaian, serta kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi instrumen strategis untuk mengoptimalkan nilai guna setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah.

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah.

1. Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;

A. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan;
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

B. Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan RSUD; Kesehatan;

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

D. RSUD dr. Salim Alkatiri;

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

E. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;

- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 6) Program Pengembangan Permukiman;
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- 9) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

F. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan; Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman;

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Kawasan Permukiman;
- 3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

G. Pertanahan;

- 1) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 4) Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- 5) Program Penetapan Tanah Ulayat;
- 6) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- 7) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- 8) Program Penatagunaan Tanah;
- 9) Program Pengurusan Hak Atas Tanah.

H. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

▪ **Penanggulangan Bencana Daerah;**

- 1) Program Penanggulangan Bencana

▪ **Satuan Polisi Pamong Praja**

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

I. Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- 4) Program Penanganan Bencana.

2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;

A. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

▪ **Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;**

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

▪ **Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;**

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintah Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

B. Ketahanan Pangan;

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

C. Lingkungan Hidup;

▪ **Lingkungan Hidup;**

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH;
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 10) Program Pengolahan Persampahan

▪ **Kehutanan;**

- 1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 2) Program Pengelolaan Hutan Adat

▪ **Energi dan Sumber Daya Mineral;**

- 1) Program Pengelolaan Aspek Geologi;
- 2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

D. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

E. Perhubungan;

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran.

F. Komunikasi dan Informatika;

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

G. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

▪ **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;**

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 7) Program Pengembangan UMKM;
- 8) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi.

▪ **Tenaga Kerja;**

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial.

▪ **Transmigrasi;**

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- 2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

H. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Promosi Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

I. Kepemudaan dan Olahraga;

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 3) Program Kapasitas Kepramukaan.

J. Perpustakaan dan Kearsipan;

▪ **Perpustakaan;**

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

- **Kearsipan;**

- 1) Program Pengelolaan Arsip;
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- 3) Program Perizinan Penggunaan Arsip.

3. Urusan Pilihan :

A. Perikanan;

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

B. Pariwisata :

- **Kebudayaan;**

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- **Pariwisata;**

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

C. Pertanian;

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian;
- 5) Program Penyuluhan Pertanian.

D. Perindustrian dan Perdagangan :

- **Perindustrian;**

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

- **Perdagangan;**

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 4) Program Pengembangan Ekspor;
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

E. Sekretariat Daerah :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 3) Program Pengelolaan Perbatasan.

F. Sekretariat DPRD :

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

G. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

▪ **Perencanaan :**

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Penelitian Dan Pengembangan Daerah :**

- 1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 2) Program Riset Dan Inovasi Daerah

H. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

I. Pendapatan Daerah :

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

J. Kepegawaian Daerah :

- 1) Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Program Kepegawaian Daerah;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

K. Inspektorat Daerah :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

L. Kesatuan Bangsa dan Politik :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

M. Kecamatan :

- 1) Program Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Penyeleggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.1.2. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Buru Selatan yang termuat dalam dokumen RPJMD tahun 2025 – 2029 merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Peyusunannya menggunakan pendekatan normatif (belum menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran karena revisi RKPD 2025 belum ditetapkan) dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah dapat didanai secara realistis, efisien dan berkelanjutan. Kerangka ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan yang sah dan kemampuan fiskal daerah untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) yang sifatnya tahunan serta penyusunan dokumen pembangunan lainnya. Selain itu, penyusunan kerangka pendanaan ini menjadi landasan dalam menentukan prioritas anggaran serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follows program*, di mana alokasi anggaran harus mengikuti prioritas program pembangunan, bukan sebaliknya.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					203.419.348.9 00,00		203.462.703.9 39,00		205.576.103.0 51,00		206.767.778.6 84,00		208.078.239.1 00,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					145.342.402.0 25,00		145.536.781.6 90,00		145.615.365.9 10,00		145.790.808.8 75,00		145.804.751.6 08,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	91	92	94	145.342.402.0 25,00	95	145.536.781.6 90,00	98	145.615.365.9 10,00	98	145.790.808.8 75,00	100	145.804.751.6 08,00	1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					57.166.946.87 5,00		57.013.622.24 9,00		59.046.125.64 1,00		60.060.035.25 1,00		61.356.552.93 4,00	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Buru Selatan	Angka Literasi/Numerasi (%)	35	50	60		70		80		90		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	99,15	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	88,48	92,70	97,12		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	97,86	97,77	97,68		97,60		97,51		97,42		97,33		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI (%)	98,00	98,01	98,02		98,03		98,04		98,05		98,06		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs (%)	98,00	98,01	98,25		98,46		99,52		99,98		100,00		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,87	0,82	0,77		0,72		0,68		0,68		0,64		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs (%)	11,79	12,61	13,48		13,20		12,90		12,50		12,01		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI (%)	-	1,50	1,55		1,60		1,65		1,70		1,80		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs (%)	114	114,25	114,64		114,66		114,72		114,75		114,78		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI (%)	0	0	38		40		42		44		46		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs (%)	0	0	38		40		42		44		46		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatkannya kualitas pendidikan dan SDM masyarakat Buru Selatan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	95,40	96,00	96,50	57.166.946.87 5,00	97,00	57.013.622.24 9,00	97,50	59.046.125.64 1,00	98,00	60.060.035.25 1,00	98,50	61.356.552.93 4,00	1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	97,86	97,77	97,68		97,60		97,51		97,42		97,33		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	99,15	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	88,48	92,70	97,12		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Literasi/Numerasi (%)	35	50	60		70		80		90		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru Bersertifikat (%)	68,00	70,00	72,00		74,00		75,00		77,00		79,00		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah dengan Sarana Prasarana yang Layak (%)	61,00	61,50	62,00		62,50		63,00		63,50		64,00		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,87	0,82	0,77		0,72		0,68		0,68		0,64		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs (%)	11,79	12,61	13,48		13,20		12,90		12,50		12,01		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI (%)	98,00	98,01	98,02		98,03		98,04		98,05		98,06		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTs (%)	98,00	98,01	98,25		98,46		99,52		99,98		100		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI (%)	-	-	38		40		42		44		46		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs (%)	-	-	38		40		42		44		46		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI (%)	-	1,50	1,55		1,60		1,65		1,70		1,80		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs (%)	114	114,25	114,64		114,66		114,72		114,75		114,78		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Siswa pada	2.300	2.315	2.330		2.350		2.363		2.366		2.374		1.01.0.00.0.00.01

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jenjang PAUD (Angka)													.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM					910.000.000,0 0		912.300.000,0 0		914.611.500,0 0		916.934.558,0 0		916.934.558,0 0	
meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	12	17		19		21		23		25		1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	-	12	17	910.000.000,0 0	19	912.300.000,0 0	21	914.611.500,0 0	23	916.934.558,0 0	25	916.934.558,0 0	1.01.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					175.470.491.0 00,00		185.279.325.0 00,00		194.802.687.0 04,00		206.391.146.0 05,00		116.228.415.3 85,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					99.669.351.00 0,00		104.658.989.0 00,00		109.161.335.0 04,00		115.378.695.0 05,00		19.468.273.38 5,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	93	94	95	99.669.351.00 0,00	95	104.658.989.0 00,00	95	109.161.335.0 04,00	96	115.378.695.0 05,00	96	19.468.273.38 5,00	1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					71.872.889.00 0,00		76.495.677.00 0,00		81.310.456.00 0,00		86.465.008.00 0,00		91.985.332.00 0,00	
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta derajat kesehatan masyarakat	Penemuan Kasus TBC (%)	34,0	40,0	55,0		60,0		65,0		75,0		80,0		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	46,15	53,85	61,55		69,25		76,95		84,65		92,35		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	46,15	53,85	61,55		69,25		76,95		84,65		92,35		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. (Persentase)	46,48	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	30,00	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (Persentase)	76,09	77,09	78,09		79,09		80,09		81,09		82,09		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	70,5	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	9	8	7		6		5		4		3		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	40,00	44,35	48,70		53,05		57,40		61,75		66,10		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	5	4	4		3		3		2		2		1.02.2.14.0.00.03 .0001 - RSUD dr. Salim Alkatiri
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	5	4	4	18.000.000.00 0,00	3	19.800.000.00 0,00	3	21.780.000.00 0,00	2	23.958.000.00 0,00	2	26.353.000.00 0,00	1.02.2.14.0.00.03 .0001 - RSUD dr. Salim Alkatiri
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus TBC (%)	34,0	40,0	55,0	53.872.889.00 0,00	60,0	56.695.677.00 0,00	65,0	59.530.456.00 0,00	75,0	62.507.008.00 0,00	80,0	65.632.332.00 0,00	1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	70,5	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun. (Persentase)	46,48	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	30,00	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	9	8	7		6		5		4		3		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	46,15	53,85	61,55		69,25		76,95		84,65		92,35		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	40,0	44,35	48,70		53,05		57,40		61,75		66,10		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (Persentase)	76,09	77,09	78,09		79,09		80,09		81,09		82,09		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	46,15	53,85	61,55		69,25		76,95		84,65		92,35		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar (Persentase)	30,76	38,46	46,16		53,86		61,56		69,26		76,96		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					821.358.000,0 0		862.422.000,0 0		905.544.000,0 0		950.826.000,0 0		998.364.000,0 0	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi (Persentase)	15,49	18,00	20,51		23,02		25,53		28,04		30,55		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	100	100	100	821.358.000,0 0	100	862.422.000,0 0	100	905.544.000,0 0	100	950.826.000,0 0	100	998.364.000,0 0	1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi (Persentase)	15,49	18,0	20,51		23,02		25,53		28,04		30,55		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.650.000.000, 00		1.732.500.000, 00		1.819.128.000, 00		1.910.082.000, 00		2.005.584.000, 00	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	30,0	40,0	50,0		60,0		70,0		80,0		90,0		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
														Keluarga Berencana			
Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar (Persentase)	100	100	100	1.650.000.000,00	100	1.732.500.000,00	100	1.819.128.000,00	100	1.910.082.000,00	100	2.005.584.000,00	1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (Persentase)	100	100	100				100				100			100		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Sarana IRT yang memenuhi ketentuan (Persentase)	100	100	100				100				100			100		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persentase)	100	100	100				100				100			100		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	30,0	40,0	50,0				60,0				70,0			80,0		90,0
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.456.893.000,00		1.529.737.000,00		1.606.224.000,00		1.686.535.000,00		1.770.862.000,00				
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup (Persentase)	28,78	68,20	70,50	1.456.893.000,00	74,60	1.529.737.000,00	77,78	1.606.224.000,00	80,03	1.686.535.000,00	82,28	1.770.862.000,00	1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup (Persentase)	28,78	68,20	70,50		74,60		77,78		80,03		82,28		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penduduk dan Keluarga Berencana
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					39.638.597.39 0,00		38.043.767.60 0,00		38.975.267.60 0,00		39.835.267.60 0,00		41.042.767.60 0,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					6.157.927.600, 00		5.738.767.600, 00		5.800.267.600, 00		5.810.267.600, 00		6.262.767.600, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	94	95	96	6.157.927.600, 00	97	5.738.767.600, 00	98	5.800.267.600, 00	99	5.810.267.600, 00	100	6.262.767.600, 00	1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.350.000.000, 00		3.400.000.000, 00		3.450.000.000, 00		3.500.000.000, 00		3.505.000.000, 00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupat en/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	20	20	25		25		25		25		25		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupat en/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	20	20	25		3.350.000.000, 00		25		3.400.000.000, 00		25		3.450.000.000, 00
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.530.669.790, 00		3.590.000.000, 00		3.650.000.000, 00		3.750.000.000, 00		3.800.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	65,22	70	75		80		85		90		95		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	65,22	70	75		3.530.669.790,00		80		3.590.000.000,00		85		3.650.000.000,00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya pegelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	57,02	58	60		62		64		66		68		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Meningkatnya pegelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	57,02	58	60		750.000.000,00		62		750.000.000,00		64		750.000.000,00
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.000.000.000,00		2.015.000.000,00		2.075.000.000,00		2.075.000.000,00		2.075.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	80	83	87		91		95		98		100		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	80	83	87		2.000.000.000,00		91		2.015.000.000,00		95		2.075.000.000,00
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan permukiman	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1,20	1,23	1,29		1,34		1,34		1,36		1,37		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan permukiman	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1,20	1,23	1,29	200.000.000,00	1,34	300.000.000,00	1,34	350.000.000,00	1,35	400.000.000,00	1,37	450.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					13.800.000.000,00		11.850.000.000,00		11.850.000.000,00		11.850.000.000,00		11.850.000.000,00	
Tersedianya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1,20	1,23	1,29	13.800.000.000,00	1,34	11.850.000.000,00	1,34	11.850.000.000,00	1,35	11.850.000.000,00	1,37	11.850.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Tersedianya penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1,20	1,23	1,29		1,34		1,34		1,35		1,37		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1,20	1,23	1,29	600.000.000,00	1,34	600.000.000,00	1,34	600.000.000,00	1,36	600.000.000,00	1,37	600.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1,20	1,23	1,29		1,34		1,34		1,35		1,37		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					8.200.000.000,00		8.750.000.000,00		9.400.000.000,00		10.050.000.000,00		10.700.000.000,00	
Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	14,1	50	60	8.200.000.000,00	70	8.750.000.000,00	80	9.400.000.000,00	90	10.050.000.000,00	100	10.700.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	14,1	50	60		70		80		90		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN RUANG														
Terselenggarany a penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	22	23	24	1.050.000.000, 00	26	1.050.000.000, 00	27	1.050.000.000, 00	29	1.050.000.000, 00	30	1.050.000.000, 00	1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Terselenggarany a penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	22	23	24		26		27		29		30		1.03.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.645.251.40 0,00		16.280.828.22 0,00		16.333.461.38 1,00		16.388.726.20 0,00		16.446.754.26 0,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					2.872.045.400, 00		2.962.172.220, 00		3.014.805.381, 00		3.070.070.200, 00		3.128.098.260, 00	
Meningkatnya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	2.872.045.400, 00	94	2.962.172.220, 00	95	3.014.805.381, 00	97	3.070.070.200, 00	99	3.128.098.260, 00	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					8.248.206.000, 00		8.248.206.000, 00		8.248.206.000, 00		8.248.206.000, 00		3.128.098.260, 00	
Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	0	0	8.248.206.000, 00	50	8.248.206.000, 00	50	8.248.206.000, 00	50	8.248.206.000, 00	50	8.248.206.000, 00	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0		70		70		70		70		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	0	0		50		50		50		50		50

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Permukiman serta Pertanahan
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0		70		70		70		70		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.150.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00	
Persentase Permukiman Tertata	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	49,72	49,70	54,69	1.150.000.000, 00	57,43	2.000.000.000, 00	60,30	2.000.000.000, 00	63,31	2.000.000.000, 00	66,48	2.000.000.000, 00	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	54,14	55,61	57,12		58,67		60,26		61,90		63,58		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Persentase Permukiman Tertata	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	49,72	49,7	54,69		57,43		60,3		63,31		66,48		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	54,14	55,61	57,12		58,67		60,26		61,90		63,58		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					625.000.000,0 0		2.320.450.000, 00		2.320.450.000, 00		2.320.450.000, 00		2.320.450.000, 00	
Meningkatkan kualitas hunian dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	0,92	1,01	1,32	625.000.000,0 0	2,24	2.320.450.000, 00	3,35	2.320.450.000, 00	5,03	2.320.450.000, 00	6,54	2.320.450.000, 00	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatkan kualitas hunian	Persentase Rumah Tangga dengan	0,92	1,01	1,32		2,24		3,35		5,03		6,54		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Akses Hunian Layak (Persentase)													Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					750.000.000,0 0		750.000.000,0 0		750.000.000,0 0		750.000.000,0 0		750.000.000,0 0	
Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	76,51	77,28	78,05		79,61		82,00		86,10		91,26		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	76,51	77,28	78,05		79,61		82		86,10		91,26		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.518.271.02 0,00		13.269.812.72 2,00		13.692.370.09 4,00		14.731.201.80 4,00		16.022.953.28 4,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.978.271.020, 00		6.840.812.722, 00		6.931.270.094, 00		7.411.491.804, 00		7.891.272.284, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	87	88	89	1.299.804.000, 00	90	2.830.379.000, 00	91	2.585.793.000, 00	92	2.697.467.000, 00	93	2.771.845.000, 00	1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	91	92	95	3.678.467.020, 00	96	4.010.433.722, 00	98	4.345.477.094, 00	99	4.714.024.804, 00	100	5.119.427.284, 00	1.05.0.00.0.00.04 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM					700.000.000,0 0		1.100.000.000, 00		900.000.000,0 0		900.000.000,0 0		1.100.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM														
meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	70	75	77	700.000.000,0 0	79	1.100.000.000, 00	80	900.000.000,0 0	81	900.000.000,0 0	82	1.100.000.000, 00	1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	-	64,93	65,28		66,32		67,43		68,25		69,28		1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	70	75	77		79		80		81		82		1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	-	64,93	65,28		66,32		67,43		68,25		69,28		1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA					4.390.000.000, 00		4.829.000.000, 00		5.336.100.000, 00		5.869.710.000, 00		6.456.681.000, 00	
OPD Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	75	75	150	4.390.000.000, 00	200	4.829.000.000, 00	250	5.336.100.000, 00	300	5.869.710.000, 00	350	6.456.681.000, 00	1.05.0.00.0.00.04 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	75	75	150		200		250		300		350		1.05.0.00.0.00.04 .0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN					450.000.000,0 0		500.000.000,0 0		525.000.000,0 0		550.000.000,0 0		575.000.000,0 0	
meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	0	0	0		25		30		40		50		1.05.0.00.0.00.03 .0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	0	0	0		450.000.000,0 0		25		500.000.000,0 0		30		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.160.805.000, 00		6.747.580.906, 00		7.164.950.398, 00		7.674.494.293, 00		8.150.707.432, 00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					3.451.805.000, 00		3.741.717.000, 00		4.021.781.250, 00		4.322.061.373, 00		4.606.519.512, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	85	86	87	3.451.805.000, 00	88	3.741.717.000, 00	89	4.021.781.250, 00	90	4.322.061.373, 00	94	4.606.519.512, 00	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL					600.000.000,0 0		757.863.906,0 0		821.669.148,0 0		938.932.920,0 0		958.962.920,0 0	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)	70	75	76	600.000.000,0 0	78	757.863.906,0 0	79	821.669.148,0 0	80	938.932.920,0 0	85	958.962.920,0 0	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	70	75	76		78		79		80		85		1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Kepala Keluarga)													
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					497.000.000,0 0		543.000.000,0 0		559.500.000,0 0		582.500.000,0 0		633.225.000,0 0	
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	66,0	66,2	66,5	497.000.000,0 0	67,5	543.000.000,0 0	67,9	559.500.000,0 0	68,0	582.500.000,0 0	69,0	633.225.000,0 0	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	66,0	66,2	66,5		67,5		67,9		68,0		69,0		1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.250.000.000, 00		1.340.000.000, 00		1.395.000.000, 00		1.462.000.000, 00		1.580.000.000, 00	
Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial (Persentase)	50,80	59,50	60,00	1.250.000.000, 00	61,10	1.340.000.000, 00	62,20	1.395.000.000, 00	63,00	1.462.000.000, 00	64,00	1.580.000.000, 00	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial (Persentase)	50,80	59,50	60,00		61,10		62,20		63,00		64,00		1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					362.000.000,0 0		365.000.000,0 0		367.000.000,0 0		369.000.000,0 0		372.000.000,0 0	
Meningkatnya Penangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	70,00	72,00	73,00	362.000.000,0 0	74,00	365.000.000,0 0	75,00	367.000.000,0 0	76,00	369.000.000,0 0	80,00	372.000.000,0 0	1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	70,00	72,00	73,00		74,00		75,00		76,00		80,00		1.06.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN					440.000.000,0		456.000.000,0		472.000.000,0		488.000.000,0		504.000.000,0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					0		0		0		0		0	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					270.000.000,0 0		280.000.000,0 0		290.000.000,0 0		300.000.000,0 0		310.000.000,0 0	
Terwujudnya implementasi program ketenagakerjaan yang berbasis data dan terarah	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	125	126	127		128		129		130		131		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terwujudnya implementasi program ketenagakerjaan yang berbasis data dan terarah	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	125	126	127		270.000.000,0 0		128		280.000.000,0 0		129		290.000.000,0 0
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					170.000.000,0 0		176.000.000,0 0		182.000.000,0 0		188.000.000,0 0		194.000.000,0 0	
Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	17	18	19		20		21		22		23		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	16	17	18		19		20		21		22		23
Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	17	18	19	170.000.000,0 0	20	176.000.000,0 0	21	182.000.000,0 0	22	188.000.000,0 0	23	194.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	16	17	18		19		20		21		22		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN					260.000.000,0 0		260.000.000,0 0		260.000.000,0 0		260.000.000,0 0		260.000.000,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB					
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
ANAK																			
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN					100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0						
Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaa n Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,58	0,58	0,56		0,55		0,54		0,53		0,52		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,29	87,31	87,36		87,41		87,46		87,51		87,56		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaa n Gender	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	100	100.000.000,0 0	2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,29	87,31	87,36		87,41		87,46		87,51		87,56		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,58	0,58	0,56		0,55		0,54		0,53		0,52		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
2.08.03 -					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00						

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
OPD Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	5	8	10		12		14		16		20		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	5	8	10	75.000.000,00	12	75.000.000,00	14	75.000.000,00	16	75.000.000,00	20	75.000.000,00	2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	0:0	0.25:0.25	0.20:0.20		0.15:0.15		0.10:0.10		0.05:0.05		0.02:0.02		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	0:0	0.25:0.25	0.20:0.20	85.000.000,00	0.15:0.15	85.000.000,00	0.10:0.10	85.000.000,00	0.05:0.05	85.000.000,00	0.02:0.02	85.000.000,00	2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.971.945.900, 00		3.267.080.490, 00		3.579.876.539, 00		3.924.081.951, 00		4.285.777.255, 00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					2.257.844.500, 00		2.483.168.950, 00		2.731.265.845, 00		3.004.392.429, 00		3.304.831.668, 00	
Meningkatnya	Persentase	90	92	93	2.257.844.500,	94	2.483.168.950,	95	2.731.265.845,	96	3.004.392.429,	97	3.304.831.668,	2.09.0.00.0.00.01

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tata Kelola Pemerintahan	terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)				00		00		00		00		00	.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					149.000.000,00		163.900.000,00		180.290.000,00		198.319.000,00		218.150.900,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Kkal/Kapita/Hari)	1.983	2.400	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400		2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Kkal/Kapita/Hari)	1.983	2.400	2.400		149.000.000,00		2.400		163.900.000,00		2.400		180.290.000,00
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					335.072.900,00		369.580.190,00		401.618.209,00		436.761.629,00		465.319.023,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-	60,86	62,65	335.072.900,00	64,43	369.580.190,00	66,21	401.618.209,00	67,99	436.761.629,00	68,23	465.319.023,00	2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-	60,86	62,65		64,43		66,21		67,99		68,23		2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					215.000.000,00		233.900.000,00		248.698.000,00		264.803.960,00		275.690.238,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	33,01	32,50	32,30		31,50		31,20		30,60		30,10		2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya	Persentase Daerah	33,01	32,50	32,30	215.000.000.0	31.50	233.900.000.0	31.20	248.698.000.0	30.60	264.803.960.0	30.10	275.690.238.0	2.09.0.00.0.00.01

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penanganan kerawanan pangan	Rentan Rawan Pangan (%)				0		0		0		0		0	.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					15.028.500,00		16.531.350,00		18.004.485,00		19.804.933,00		21.785.426,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	1.857	2.100	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.09.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	1.857	2.100	2.100		2.100		16.531.350,00		2.100		18.004.485,00		2.100
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					4.768.912.000, 00		2.100.000.000, 00		2.110.000.000, 00		2.120.000.000, 00		2.130.000.000, 00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					4.670.912.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	50	50	60		70		80		90		100		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	80	80	80		80		80		80		80		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	80	80	80		4.670.912.000, 00		80		2.000.000.000, 00		80		2.000.000.000, 00
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	50	50	60		70		80		90		100		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					98.000.000,00		100.000.000,0 0		110.000.000,0 0		120.000.000,0 0		130.000.000,0 0	
Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	70	70	70		70		70		70		70		1.04.2.10.0.00.02 .0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	70	70	70		98.000.000,00		70		100.000.000,0 0		70		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					12.988.541.82 0,00		10.680.661.22 3,00		10.124.436.89 3,00		9.977.482.958, 00		11.001.596.12 2,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					7.383.541.820, 00		7.110.961.223, 00		7.124.690.893, 00		7.139.142.038, 00		7.154.508.385, 00	
terwujudnya dukungan administratif dan operasional yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	94	95	96	7.383.541.820, 00	97	7.110.961.223, 00	98	7.124.690.893, 00	99	7.139.142.038, 00	100	7.154.508.385, 00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.740.000.000, 00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		1.040.000.000, 00	
terlaksananya dokumen- dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengendalikan pembangunan agar tidak merusak lingkungan														
terlaksananya dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengendalikan pembangunan agar tidak merusak lingkungan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1.740.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	1.040.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.115.000.000,00		1.407.000.000,00		1.410.000.000,00		1.330.000.000,00		1.330.000.000,00	
tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium (Persentase)	0	0	35		40		45		50		55		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan	-	70	75		80		85		86		89		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))													Lingkungan Hidup
tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium (Persentase)	0	0	35	2.115.000.000,00	40	1.407.000.000,00	45	1.410.000.000,00	50	1.330.000.000,00	55	1.330.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	-	70	75		80		85		86		89		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					150.000.000,00		535.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Persentase RTH (Persentase)	-	-	-	150.000.000,00	-	535.000.000,00	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Persentase RTH (Persentase)	-	-	-		-		-		-		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					245.000.000,00		376.700.000,00		337.626.000,00		248.978.520,00		250.358.090,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lmbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	20		25		30		35		40		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B3)														
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lmbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	20	245.000.000,0 0	25	376.700.000,0 0	30	337.626.000,0 0	35	248.978.520,0 0	40	250.358.090,0 0	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					350.000.000,0 0		355.700.000,0 0		361.514.000,0 0		367.444.280,0 0		373.493.165,0 0	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	50	55	65		70		75		80		85		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	50	55	65	350.000.000,0 0	70	355.700.000,0 0	75	361.514.000,0 0	80	367.444.280,0 0	85	373.493.165,0 0	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					120.000.000,0 0		240.000.000,0 0		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA	Persentase MHA yang Ditingkatkan	0	0	35		40		45		50		55		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH	Kapasitasnya (Persentase)													Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	35	120.000.000,0 0	40	240.000.000,0 0	45	0,00	50	0,00	55	0,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					125.000.000,0 0		145.000.000,0 0		125.000.000,0 0		125.000.000,0 0		125.000.000,0 0	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	55	55	65		67		68		69		70		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	55	55	65	125.000.000,0 0	67	145.000.000,0 0	68	125.000.000,0 0	69	125.000.000,0 0	70	125.000.000,0 0	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	35		40		45		50		55		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	35	0,00	40	10.000.000,00	45	15.000.000,00	50	16.000.000,00	55	17.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hidup														
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					55.000.000,00		55.300.000,00		55.606.000,00		55.918.120,00		56.236.482,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pindana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	35	55.000.000,00	40	55.300.000,00	45	55.606.000,00	50	55.918.120,00	55	56.236.482,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pindana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	35		40		45		50		55		56.236.482,00
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					705.000.000,0 0		405.000.000,0 0		405.000.000,0 0		405.000.000,0 0		405.000.000,0 0	
Meningkatnya Tata Kelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0,2	0,3	0,4	705.000.000,0 0	0,5	405.000.000,0 0	0,6	405.000.000,0 0	0,7	405.000.000,0 0	0,8	405.000.000,0 0	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Sampah (Ton)	8.013,21	8.018,41	8.254,29		8.497,10		8.747,06		9.004,37		9.269,25		2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL					4.654.454.000, 00		4.892.111.080, 00		5.092.291.302, 00		5.333.205.128, 00		5.631.470.384, 00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					2.836.454.000, 00		2.958.111.080, 00		3.063.791.302, 00		3.206.205.128, 00		3.397.970.384, 00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	93	93,93	2.836.454.000, 00	94,87	2.958.111.080, 00	95,82	3.063.791.302, 00	98,78	3.206.205.128, 00	99,77	3.397.970.384, 00	2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM					1.128.000.000, 00		1.188.500.000, 00		1.245.000.000, 00		1.302.000.000, 00		1.361.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	84	85	85,70		86,6		87,03		87,64		88,52		2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	84	85	85,70		1.128.000.000, 00		86,6		1.188.500.000, 00		87,03		1.245.000.000, 00
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					335.000.000,0 0		353.500.000,0 0		365.500.000,0 0		380.000.000,0 0		394.500.000,0 0	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Pelaporan atas Peristiwa Penting tepat waktu (Persentase)	90	90,50	91		91,06		91,21		92,12		92,74		2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dan Pelaporan atas Peristiwa Penting tepat waktu (Persentase)	90	90,50	91		335.000.000,0 0		91,06		353.500.000,0 0		91,21		365.500.000,0 0
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N					355.000.000,0 0		392.000.000,0 0		418.000.000,0 0		445.000.000,0 0		478.000.000,0 0	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase data sinkron dan OPD Pengguna data Kependudukan (Persentase)	43	43,8	44,1		50,72		60,86		76,08		83,69		2.12.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase data sinkron dan OPD Pengguna data Kependudukan (Persentase)	43	43,8	44,1		355.000.000,0 0		50,72		392.000.000,0 0		60,86		418.000.000,0 0
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					6.412.000.000, 00		6.297.000.000, 00		6.312.000.000, 00		6.122.000.000, 00		6.262.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					3.922.000.000, 00		3.947.000.000, 00		3.822.000.000, 00		3.772.000.000, 00		3.772.000.000, 00	
Terwujudnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada perangkat daerah dengan Baik	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Persentase)	100	100	100	3.922.000.000, 00	100	3.947.000.000, 00	100	3.822.000.000, 00	100	3.772.000.000, 00	100	3.772.000.000, 00	2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					240.000.000,0 0		100.000.000,0 0		240.000.000,0 0		100.000.000,0 0		240.000.000,0 0	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	100	100		240.000.000,0 0		100		100.000.000,0 0		100		240.000.000,0 0
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0	
Meningkatnya penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0	0	5		10		15		20		25		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0	0	5	100.000.000,0 0	10	100.000.000,0 0	15	100.000.000,0 0	20	100.000.000,0 0	25	100.000.000,0 0	2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	0	0	1		2		3		4		5		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	0	0	1		2		3		4		5		1.650.000.000,00
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	50	60		70		80		90		100		2.08.2.13.0.00.01 .0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	50	60		70		80		90		100		500.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemberdayaan masyarakat														Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					36.516.051.00 0,00		38.341.854.00 0,00		40.258.963.00 0,00		42.271.917.00 0,00		44.385.477.00 0,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					10.010.000.00 0,00		10.510.500.00 0,00		11.036.038.00 0,00		11.587.836.00 0,00		12.167.220.00 0,00	
Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	48,8	56,0	60,8	10.010.000.00 0,00	63,9	10.510.500.00 0,00	66,0	11.036.038.00 0,00	67,4	11.587.836.00 0,00	68,3	12.167.220.00 0,00	1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	4,9	7,8	10,3		12,6		14,6		16,3		17,9		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	12,1	8,7	6,7		5,6		4,9		4,5		4,3		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	4,9	7,8	10,3		12,6		14,6		16,3		17,9		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	12,1	8,7	6,7		5,6		4,9		4,5		4,3		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	48,8	56,0	60,8		63,9		66,0		67,4		68,3		1.02.2.14.0.00.03.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					16.056.051.00 0,00		16.858.854.00 0,00		17.701.800.00 0,00		18.586.895.00 0,00		19.516.225.00 0,00	
Terkendalinya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber- KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	24,7	24.6-24.7	2.45-24.6	16.056.051.00 0,00	24.4-24.5	16.858.854.00 0,00	24.3-24.4	17.701.800.00 0,00	24.2-24.3	18.586.895.00 0,00	24.1-24.2	19.516.225.00 0,00	1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca Persalinan (Persentase)	30,59	32,59	35,29		37,99		40,69		46,09		48,79		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber- KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	24,7	24.6-24.7	24.5-24.6		24.4-24.5		24.3-24.4		24.2-24.3		24.1-24.2		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca Persalinan (Persentase)	30,59	32,59	35,29		37,99		40,69		46,09		48,79		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					10.450.000.00 0,00		10.972.500.00 0,00		11.521.125.00 0,00		12.097.186.00 0,00		12.702.032.00 0,00	
Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59,8	69,2	70,2		71,3		72,2		73,1		74,0		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA) (Indeks)	59,8	61,1	62,5		63,7		64,9		66,1		67,2		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	59,8	61,16	62,5	10.450.000.00 0,00	63,7	10.972.500.00 0,00	64,9	11.521.125.00 0,00	66,1	12.097.186.00 0,00	67,2	12.702.032.00 0,00	1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	59,8	61,1	62,5		63,7		64,9		66,1		67,2		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59,8	69,2	70,2		71,3		72,2		73,1		74,0		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA) (Indeks)	59,8	61,1	62,5		63,7		64,9		66,1		67,2		1.02.2.14.0.00.03 .0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.077.553.00 0,00		30.917.553.00 0,00		19.917.553.00 0,00		19.917.553.00 0,00		19.917.553.00 0,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					3.127.553.000, 00		3.117.553.000, 00		3.117.553.000, 00		3.117.553.000, 00		3.117.553.000, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	90	91	3.127.553.000, 00	92	3.117.553.000, 00	93	3.117.553.000, 00	94	3.117.553.000, 00	95	3.117.553.000, 00	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.150.000.000, 00		6.500.000.000, 00		5.500.000.000, 00		5.500.000.000, 00		5.500.000.000, 00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap	30	35	40		45		50		55		60		2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB					
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Kondisi Ideal (Persentase)				6.150.000.000,00		6.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00		5.500.000.000,00						
	Persentase Kepemilikan KIR (Persentase)	10	15	20		25		30		35		40		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	Persentase Layanan Angkutan Darat (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Rasio)	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat (Persentase)	10	10	10	6.150.000.000,00	10	6.500.000.000,00	10	5.500.000.000,00	10	5.500.000.000,00	10	5.500.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Rasio)	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	Persentase Kepemilikan KIR (Persentase)	10	15	20		25		30		35		40		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	30	35	40		45		50		55		60		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.800.000.000,00		21.300.000.000,00		11.300.000.000,00		11.300.000.000,00		11.300.000.000,00						
Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut (Orang)	34.946	40.000	45.000	1.800.000.000,00	50.000	21.300.000.000,00	55.000	11.300.000.000,00	60.000	11.300.000.000,00	65.000	11.300.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
	Jumlah Barang Melalui Dermaga (Ton)	81.732	85.000	90.000		95.000		100.000		105.000		110.000		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut (Orang)	34.946	40.000	45.000		95.000		50.000		100.000		55.000		60.000	60.000	110.000	65.000	11.300.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang Melalui Dermaga (Ton)	81.732	85.000	90.000				95.000				100.000			105.000		110.000		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.327.224.000,00		2.373.768.480,00		2.421.243.850,00		2.469.668.727,00		2.519.062.101,00						
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					2.079.224.000,00		2.120.808.480,00		2.163.224.650,00		2.206.489.143,00		2.250.618.925,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan					2.079.224.000, 00		2.120.808.480, 00		2.163.224.650, 00		2.206.489.143, 00		2.250.618.925, 00	2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					110.000.000,0 0		112.200.000,0 0		114.444.000,0 0		116.732.880,0 0		119.067.538,0 0	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	110.000.000,0 0	3,00	112.200.000,0 0	3,19	114.444.000,0 0	3,39	116.732.880,0 0	3,61	119.067.538,0 0	2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	3,10	3,40	3,60		3,80		4,00		4,30		4,60		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82		3,00		3,19		3,39		3,61		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	3,10	3,40	3,60		3,80		4,00		4,30		4,60		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					138.000.000,0 0		140.760.000,0 0		143.575.200,0 0		146.446.704,0 0		149.375.638,0 0	
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	1,81	2,06	2,34		2,66		3,02		3,44		3,91		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e- Government) (Persentase)	2,00	3,00	4,00		5,00		6,00		7,00		8,00		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi	40	45	48		50		53		55		60		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)													
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	1,81	2,06	2,34	138.000.000,0 0	2,66	140.760.000,0 0	3,02	143.575.200,0 0	3,44	146.446.704,0 0	3,91	149.375.638,0 0	2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	40	45	48		50		53		55		60		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government) (Persentase)	2,00	3,00	4,00		5,00		6,00		7,00		8,00		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.300.000.000,00		3.432.800.000,00		3.560.400.000,00		3.692.100.000,00		3.824.200.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.620.000.000,00		1.647.800.000,00		1.675.400.000,00		1.707.100.000,00		1.739.200.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	75	76	77	1.620.000.000,00	79	1.647.800.000,00	80	1.675.400.000,00	81	1.707.100.000,00	81	1.739.200.000,00	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	30	31	32		33		34		35		36		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	30	31	32	120.000.000,0 0	33	130.000.000,0 0	34	140.000.000,0 0	35	150.000.000,0 0	36	160.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					230.000.000,0 0		250.000.000,0 0		270.000.000,0 0		290.000.000,0 0		310.000.000,0 0	
Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	70	72	74	230.000.000,0 0	76	250.000.000,0 0	78	270.000.000,0 0	80	290.000.000,0 0	82	310.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase)	70	72	74		76		78		80		82		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	70	72	74		76		78		80		82		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (Persentase)	70	72	74		76		78		80		82		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					120.000.000,0 0		125.000.000,0 0		130.000.000,0 0		135.000.000,0 0		140.000.000,0 0	
Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	50	52	54	120.000.000,0 0	56	125.000.000,0 0	58	130.000.000,0 0	60	135.000.000,0 0	62	140.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	50	52	54		56		58		60		62		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					590.000.000,0 0		625.000.000,0 0		655.000.000,0 0		685.000.000,0 0		715.000.000,0 0	
Koperasi mampu meningkatkan	Peningkatan Partisipasi	20	21	22		23		24		25		26		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
volume usaha, aset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga menjadi mandiri dan mampu bersaing	Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)													Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi mampu meningkatkan volume usaha, aset, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga menjadi mandiri dan mampu bersaing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (Persentase)	20	21	22	590.000.000,0 0	23	625.000.000,0 0	24	655.000.000,0 0	25	685.000.000,0 0	26	715.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					520.000.000,0 0		544.000.000,0 0		568.000.000,0 0		592.000.000,0 0		616.000.000,0 0	
Terjadi peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	25	26	27		28		29		30		31		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terjadi peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	25	26	27	520.000.000,0 0	28	544.000.000,0 0	29	568.000.000,0 0	30	592.000.000,0 0	31	616.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000,0 0		111.000.000,0 0		122.000.000,0 0		133.000.000,0 0		144.000.000,0 0	
OPD Terjadinya	Update dan	21	22	23		24		25		26		27		2.17.3.32.2.07.01

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
peningkatan signifikan pada rata-rata omzet dan aset UMKM, dengan indikator keberhasilan paling tinggi adalah perpindahan kategori usaha	pengumpulan Data UMKM (Persentase)													.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terjadinya peningkatan signifikan pada rata-rata omzet dan aset UMKM, dengan indikator keberhasilan paling tinggi adalah perpindahan kategori usaha	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	21	22	23	100.000.000,0 0	24	111.000.000,0 0	25	122.000.000,0 0	26	133.000.000,0 0	27	144.000.000,0 0	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.861.000.000,00		2.959.000.000,00		3.017.000.000,00		3.055.000.000,00		3.097.000.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.301.000.000,00		2.399.000.000,00		2.457.000.000,00		2.495.000.000,00		2.537.000.000,00	
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	80	85	87	2.301.000.000,00	89	2.399.000.000,00	90	2.457.000.000,00	95	2.495.000.000,00	100	2.537.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)	6	8	10		10		10		10		12		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai investasi berskala nasional	30.456.595.506	33.502.255.705	36.547.915.904		39.593.576.103		42.639.236.302		45.684.896.501		48.730.556.700		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PMA dan PMDN (Rupiah)													Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)	6	8	10	200.000.000,0 0	10	200.000.000,0 0	10	200.000.000,0 0	10	200.000.000,0 0	12	200.000.000,0 0	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (Rupiah)	30.456.595. 506	33.502.255. 705	36.547.915. 904		39.593.576. 103		42.639.236. 302		45.684.896. 501		48.730.556. 700		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal (Investor)	1	1	2		2		3		4		5		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal (Investor)	1	1	2		100.000.000,0 0		2		100.000.000,0 0		3		100.000.000,0 0
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0	
Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha (Perusahaan/UKM/IK M)	610	630	660		690		720		750		780		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha (Perusahaan/UKM/IK M)	610	630	660	150.000.000,0 0	690	150.000.000,0 0	720	150.000.000,0 0	750	150.000.000,0 0	780	150.000.000,0 0	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB					
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	M)													Terpadu Satu Pintu					
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0						
terkendalnya pelaksanaan penanaman modal di Daerah	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN (%)	0:0	0:0	0:0	100.000.000,0 0	0:0	100.000.000,0 0	0:0	100.000.000,0 0	0:0	100.000.000,0 0	0:0	100.000.000,0 0	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	30,45	33,50	36,55		39,60		42,65		45,70		48,75		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
terkendalnya pelaksanaan penanaman modal di Daerah	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN (%)	0:0	0:0	0:0		0:0		0:0		0:0		0:0		0:0	0:0	0:0	0:0	100.000.000,0 0	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	30,45	33,50	36,55		39,60		42,65		45,70		48,75		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00						
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi (Data)	0	2	3		4		5		5		5		2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi (Data)	0	2	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan					

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.349.781.700,00		3.607.707.734,00		3.663.827.901,00		3.748.216.312,00		5.725.949.764,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.071.066.700,00		2.141.844.134,00		2.159.329.758,00		2.203.538.244,00		2.242.484.575,00	
Menikatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90,4	91,5	92,7	2.071.066.700,00	93,3	2.141.844.134,00	94,6	2.159.329.758,00	95,2	2.203.538.244,00	96,4	2.242.484.575,00	2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					476.058.000,00		495.100.320,00		514.904.332,00		535.500.506,00		556.920.525,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	65	70	75	476.058.000,00	77	495.100.320,00	79	514.904.332,00	83	535.500.506,00	85	556.920.525,00	2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	65	70	75		77		79		83		85		2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N					2.752.657.000,00		918.763.280,00		935.513.811,00		952.934.362,00		2.868.051.736,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga (Persentase)	10	11	16		17,5		19		20		25		2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	10	11	16	2.752.657.000,00	17,5	918.763.280,00	19	935.513.811,00	20	952.934.362,00	25	2.868.051.736,00	2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Persentase)													
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN					50.000.000,00		52.000.000,00		54.080.000,00		56.243.200,00		58.492.928,00	
Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	20	25	30	50.000.000,00	35	52.000.000,00	40	54.080.000,00	45	56.243.200,00	50	58.492.928,00	2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	20	25	30		35		40		45		50		2.19.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					62.000.000,00		63.240.000,00		64.504.800,00		65.794.896,00		67.110.794,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					62.000.000,00		63.240.000,00		64.504.800,00		65.794.896,00		67.110.794,00	
Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	1,00	1,20	1,80	62.000.000,00	2,20	63.240.000,00	2,60	64.504.800,00	3,00	65.794.896,00	3,30	67.110.794,00	2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	1,00	1,20	1,80		2,20		2,60		3,00		3,30		2.16.2.21.0.00.01 .0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.482.500.000, 00		3.440.250.000, 00		4.862.700.000, 00		6.981.969.500, 00		10.144.571.25 0,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN					1.852.500.000, 00		2.778.750.000, 00		4.168.125.000, 00		6.252.169.500, 00		9.378.281.250, 00	
Meningkatnya aktualisasi kesenian daerah, sarana prasarana lembaga adat, dan tersedianya dokumen PPKD	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	10	47	52	1.852.500.000, 00	54	2.778.750.000, 00	57	4.168.125.000, 00	60	6.252.169.500, 00	63	9.378.281.250, 00	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
2.22.03 - PROGRAM														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL														
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya														3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu														3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					630.000.000,0 0		661.500.000,0 0		694.575.000,0 0		729.800.000,0 0		766.290.000,0 0	
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	10	13	16	630.000.000,0 0	19	661.500.000,0 0	22	694.575.000,0 0	25	729.800.000,0 0	28	766.290.000,0 0	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	24	27	30		33		36		39		42		3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAA N					1.854.500.000, 00		1.936.500.000, 00		2.007.000.000, 00		2.081.500.000, 00		2.226.000.000, 00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					1.554.500.000, 00		1.603.500.000, 00		1.641.000.000, 00		1.677.000.000, 00		1.802.500.000, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	49,82	50,00	51,50	1.554.500.000, 00	52,50	1.603.500.000, 00	53,50	1.641.000.000, 00	54,50	1.677.000.000, 00	55,50	1.802.500.000, 00	2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N					300.000.000,0 0		333.000.000,0 0		366.000.000,0 0		404.500.000,0 0		423.500.000,0 0	
OPD Meningkatnya	Nilai tingkat kegemaran	67,47	70	71,5		72,5		73,5		74,5		75,5		2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	membaca masyarakat (Nilai)				300.000.000,00		333.000.000,00		366.000.000,00		404.500.000,00		423.500.000,00	Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	67,47	70	71,5		72,5		73,5		74,5		75,5		2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					169.700.000,00		196.500.000,00		216.235.000,00		246.760.000,00		287.200.000,00	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					69.700.000,00		76.500.000,00		86.235.000,00		96.760.000,00		107.200.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	1,29	2,00	2,50	69.700.000,00	3,50	76.500.000,00	4,00	86.235.000,00	4,50	96.760.000,00	5,00	107.200.000,00	2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	28	40	45	100.000.000,00	50	120.000.000,00	60	130.000.000,00	65	150.000.000,00	70	180.000.000,00	2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	5	10		15		20		25		30		2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	28	40	45		50		60		65		70		2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	5	10		15		20		25		30		2.23.2.24.0.00.02 .0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					7.989.302.000,00		8.602.414.000,00		7.859.414.000,00		7.672.414.000,00		7.692.414.000,00	

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.438.414.000,00		3.827.414.000,00		3.189.414.000,00		2.942.414.000,00		2.952.414.000,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	80	85	85	3.438.414.000,00	88	3.827.414.000,00	90	3.189.414.000,00	93	2.942.414.000,00	95	2.952.414.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.295.888.000,00		3.350.000.000,00		3.360.000.000,00		3.380.000.000,00		3.380.000.000,00	
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	-	-	-		-		-		-		-		3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	0	0	0	3.295.888.000,00	0	3.350.000.000,00	0	3.360.000.000,00	0	3.380.000.000,00	0	3.380.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					845.000.000,00		1.005.000.000,00		865.000.000,00		880.000.000,00		890.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya														3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0	0	0	845.000.000,00	0	1.005.000.000,00	0	865.000.000,00	0	880.000.000,00	0	890.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					410.000.000,00		420.000.000,00		445.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat	Jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat (Unit)	0	0	0	410.000.000,00	0	420.000.000,00	0	445.000.000,00	0	470.000.000,00	0	470.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					4.745.043.525,00		4.992.931.302,00		5.246.769.598,00		5.515.448.028,00		5.733.179.926,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PARIWISATA														
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					2.066.030.850, 00		2.172.092.993, 00		2.284.889.373, 00		2.405.473.792, 00		2.617.706.979, 00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	92	94	2.066.030.850, 00	95	2.172.092.993, 00	97	2.284.889.373, 00	98	2.405.473.792, 00	99	2.617.706.979, 00	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.251.057.675, 00		1.313.610.559, 00		1.379.291.087, 00		1.448.255.641, 00		1.370.668.423, 00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%)	75.000.000	75.000.000	93.750.000	1.251.057.675, 00	98.438.000	1.313.610.559, 00	103.350.00 0	1.379.291.087, 00	108.518.00 0	1.448.255.641, 00	113.944.00 0	1.370.668.423, 00	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	3.399	3.603	3.819		4.048		4.291		4.549		4.822		3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	282	299	317		336		356		377		400		3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					385.455.000,0 0		404.727.750,0 0		424.964.138,0 0		446.212.344,0 0		468.522.962,0 0	
Jumlah Event Promosi Pariwisata					385.455.000,0 0		404.727.750,0 0		424.964.138,0 0		446.212.344,0 0		468.522.962,0 0	
Meningkatnya promosi dan kerjasama pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	50	50	75		75		75		75		75		75
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					787.500.000,0 0		826.875.000,0 0		868.218.750,0 0		911.629.688,0 0		957.211.172,0 0	
Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata														

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10	20	30	787.500.000,00	40	826.875.000,00	50	868.218.750,00	60	911.629.688,00	70	957.211.172,00	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					255.000.000,00		275.625.000,00		289.406.250,00		303.876.563,00		319.070.390,00	
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	34	40	45	255.000.000,00	50	275.625.000,00	55	289.406.250,00	60	303.876.563,00	65	319.070.390,00	3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	191	288	432		648		972		1.458		2.187		3.26.2.22.0.00.01 .0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8.176.461.400,00		8.339.990.628,00		8.503.519.856,00		8.667.049.084,00		8.830.578.312,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.893.801.000,00		4.991.677.020,00		5.089.553.040,00		5.187.429.060,00		5.285.305.080,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	90	4.893.801.000	4.893.801.000	4.893.801.000,00	4.991.677.020	4.991.677.020,00	5.089.553.040	5.089.553.040,00	5.187.429.060	5.187.429.060,00	5.187.429.060	5.285.305.080,00	3.27.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.244.950.400,00		3.309.849.408,00		3.374.748.416,00		3.439.647.424,00		3.504.546.432,00	
Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB (Persentase)	90	91	92		93		94		95		96		3.27.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pertanian
Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)	90	3.244.950.400	3.244.950.400	3.244.950.400,00	3.309.849.408	3.309.849.408,00	3.374.748.416	3.374.748.416,00	3.439.647.424	3.439.647.424,00	3.504.546.432	3.504.546.432,00	3.27.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM					37.710.000,00		38.464.200,00		39.218.400,00		39.972.600,00		40.726.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	90	91	92	37.710.000,00	93	38.464.200,00	94	39.218.400,00	95	39.972.600,00	96	40.726.800,00	3.27.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Pertanian
Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	90	37.710.000	37.710.000		38.464.200		39.218.400		39.972.600		40.726.800		40.726.800,00
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					0,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					0,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00		7.445.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Sumber daya Alam Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0	0	0	0,00	1	7.445.000.000,00	1	7.445.000.000,00	1	7.445.000.000,00	1	7.445.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01 .0000 - Dinas Lingkungan Hidup
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.057.250.000,00		5.060.800.000,00		5.064.070.000,00		5.032.840.000,00		5.061.330.000,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.857.000.000,00		2.857.000.000,00		2.857.000.000,00		2.857.000.000,00		2.857.000.000,00	
Peningkatan kualitas layanan Publik Urusan Dinas Perdagangan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	50	65,8	67,2	2.857.000.000,00	71,8	2.857.000.000,00	72,1	2.857.000.000,00	74,9	2.857.000.000,00	80	2.857.000.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.653.000.000,00		1.653.000.000,00		1.653.000.000,00		1.653.000.000,00		1.653.000.000,00	

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	15,31	17,32	21,56	1.653.000.000,00	28,69	1.653.000.000,00	39,42	1.653.000.000,00	41,13	1.653.000.000,00	51	1.653.000.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, serta mengurangi disparitas harga	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	61,8	63,2	64,1	175.000.000,00	65,2	175.000.000,00	66	175.000.000,00	68	175.000.000,00	68,7	175.000.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00		182.000.000,00	
Peningkatan daya saing produk nasional, penyerapan tenaga kerja	Persentase peningkatan investasi di kabupaten (%)	50	62,8	67,2	182.000.000,00	68,4	182.000.000,00	72,1	182.000.000,00	74,9	182.000.000,00	75,5	182.000.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					132.650.000,00		131.150.000,00		147.250.000,00		112.850.000,00		132.650.000,00	
Meningkatnya kepercayaan konsumen, berkurangnya kasus peredaran barang berbahaya, dan meningkatnya keadilan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik yang adil	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	50	55	58,9	132.650.000,00	61	131.150.000,00	66	147.250.000,00	68	112.850.000,00	68,7	132.650.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					57.600.000,00		62.650.000,00		49.820.000,00		52.990.000,00		61.680.000,00	
Meningkatnya	Persentase Izin	61,8	62,3	64,1	57.600.000,00	65,2	62.650.000,00	66	49.820.000,00	68	52.990.000,00	70	61.680.000,00	3.30.3.31.0.00.02

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kemandirian bangsa, serta wujud nyata nasionalisme melalui peningkatan penggunaan produk lokal	Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)													.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					210.000.000,00		232.000.000,00		198.870.000,00		211.490.000,00		171.880.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					67.200.000,00		81.680.000,00		59.820.000,00		72.990.000,00		71.680.000,00	
Meningkatnya kontribusi industri terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan terwujudnya industri yang berkelanjutan dan terintegrasi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	3,70	3,87	4,04	67.200.000,00	4,23	81.680.000,00	4,42	59.820.000,00	4,62	72.990.000,00	4,83	71.680.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					45.000.000,00		65.000.000,00		47.000.000,00		55.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya target persentase pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah izin yang diterbitkan (disebut juga IKK Outcome) dan penggantian izin tradisional dengan sistem perizinan usaha berbasis risiko, seperti Nomor	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	62,5	63,2	66,2	45.000.000,00	68,4	65.000.000,00	69,5	47.000.000,00	74,2	55.000.000,00	75,5	45.000.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Induk Berusaha (NIB)														
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					97.800.000,00		85.320.000,00		92.050.000,00		83.500.000,00		55.200.000,00	
pemenuhan target persentase pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah izin yang diterbitkan (disebut juga IKK Outcome) dan penggantian izin tradisional dengan sistem perizinan usaha berbasis risiko, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait (%)	48	50	58	97.800.000,00	61	85.320.000,00	63	92.050.000,00	66	83.500.000,00	68,7	55.200.000,00	3.30.3.31.0.00.02 .0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.210.000.000,00		1.260.000.000,00		1.310.000.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					500.000.000,00		530.000.000,00		570.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00	
Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupat en	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	50	51	52		53		54		55		56		2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmiorasi	50	51	52	500.000.000,00	53	530.000.000,00	54	570.000.000,00	55	600.000.000,00	56	630.000.000,00	2.17.3.32.2.07.01 .0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupat en	(Persentase)													
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					600.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00		660.000.000,00		680.000.000,00	
Terlaksannya Prasarana dasar seperti rumah transmigran, jalan/akses, jembatan, sarana air bersih, dan listrik telah terbangun, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar kelayakan hun	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	50	51	52		53		54		55		56		2.17.3.32.2.07.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terlaksannya Prasarana dasar seperti rumah transmigran, jalan/akses, jembatan, sarana air bersih, dan listrik telah terbangun, berfungsi dengan baik, dan memenuhi standar kelayakan huni	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	50	51	52	600.000.000,00	53	620.000.000,00	54	640.000.000,00	55	660.000.000,00	56	680.000.000,00	2.17.3.32.2.07.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					58.284.530.795,00		60.990.111.928,00		63.443.594.395,00		66.271.031.572,00		68.986.883.090,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					48.462.558.295,00		50.593.936.628,00		52.267.307.325,00		54.448.484.810,00		56.523.859.119,00	
Meningkatnya Program Penunjang	Nilai SAKIP (Nilai)	50	30-50	50-60	638.900.000,00	60-70	780.470.000,00	60-70	805.040.000,00	70-80	829.610.000,00	70-80	854.180.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya tata kelolah pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	485.000.000,0 0	93	555.000.000,0 0	94	634.500.000,0 0	95	724.350.000,0 0	96	817.102.470,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0002 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	89	90	92	782.610.000,0 0	94	778.898.800,0 0	96	789.382.698,0 0	97	785.477.000,0 0	98	932.777.500,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0009 - Bagian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	30.605.000.00 0,00	93	31.762.000.00 0,00	94	32.768.000.00 0,00	95	33.772.000.00 0,00	96	34.782.000.00 0,00	4.01.0.00.0.00.01 .0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	88	89	90	922.000.000,0 0	91	958.200.000,0 0	92	988.500.000,0 0	93	1.019.700.000, 00	94	1.054.000.000, 00	4.01.0.00.0.00.01 .0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	900.000.000,0 0	93	910.000.000,0 0	94	920.000.000,0 0	95	930.000.000,0 0	96	940.000.000,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0008 - Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	99	99,99	99,99	1.421.950.000, 00	99,99	1.504.297.500, 00	99,99	1.538.497.750, 00	99,99	1.661.101.425, 00	99,99	1.737.601.100, 00	4.01.0.00.0.00.01 .0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	88	89	90	11.000.000.00 0,00	92	11.550.000.00 0,00	93	12.127.500.00 0,00	94	12.733.875.00 0,00	95	13.370.568.75 0,00	4.01.0.00.0.00.01 .0005 - Bagian Umum
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	528.886.095,0 0	93	572.144.008,0 0	94	615.401.925,0 0	95	658.659.838,0 0	96	701.917.752,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0001 - Bagian Pemerintahan Setda
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	93	94	1.178.212.200, 00	95	1.222.926.320, 00	96	1.080.484.952, 00	99	1.333.711.547, 00	100	1.333.711.547, 00	4.01.0.00.0.00.01 .0007 - Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN					8.099.000.000, 00		8.581.400.000, 00		9.288.680.000, 00		9.826.154.000, 00		10.383.681.65 0,00	

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESEJAHTERAA N RAKYAT														
Meningkatnya capaian program pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	90	92	93	824.000.000,0 0	94	947.600.000,0 0	95	1.071.200.000, 00	96	1.194.800.000, 00	97	1.318.400.000, 00	4.01.0.00.0.00.01 .0001 - Bagian Pemerintahan Setda
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	91,30	91,35	91,40	495.000.000,0 0	91,45	508.000.000,0 0	91,50	522.000.000,0 0	91,55	539.000.000,0 0	91,60	555.000.000,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0004 - Bagian Hukum
Meningkatnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	91	93	95	6.780.000.000, 00	96	7.125.800.000, 00	97	7.695.480.000, 00	98	8.092.354.000, 00	100	8.510.281.650, 00	4.01.0.00.0.00.01 .0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN					1.722.972.500, 00		1.814.775.300, 00		1.887.607.070, 00		1.996.392.762, 00		2.079.342.321, 00	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	90	91	92	199.500.000,0 0	93	231.425.000,0 0	94	240.388.750,0 0	95	280.997.062,0 0	96	353.946.621,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0002 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Proses Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Nilai)	25,88	27,17	28,53	900.000.000,0 0	29,95	910.000.000,0 0	31,45	920.000.000,0 0	33,03	930.000.000,0 0	34,68	940.000.000,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0008 - Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Evaluasi Pengawasan, Pengendalian Program dan Percepatan Penyerapan APBD (%)	89	90	91	623.472.500,0 0	92	673.350.300,0 0	93	727.218.320,0 0	94	785.395.700,0 0	95	785.395.700,0 0	4.01.0.00.0.00.01 .0009 - Bagian Administrasi Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					20.063.845.80 0,00		20.750.997.30 0,00		21.066.997.30 0,00		21.276.997.30 0,00		21.181.997.30 0,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					11.004.381.00 0,00		11.691.532.50 0,00		12.007.532.50 0,00		12.117.532.50 0,00		12.122.532.50 0,00	
Meningkatnya	Persentase	89,00	90,00	91,00	11.004.381.00	92,00	11.691.532.50	93,00	12.007.532.50	94,00	12.117.532.50	95,00	12.122.532.50	4.02.0.00.0.00.01

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tata kelola Pemerintahan	terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					9.059.464.800,00		9.059.464.800,00		9.059.464.800,00		9.159.464.800,00		9.059.464.800,00	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	55,00	70,00	71,00	9.059.464.800,00	72,00	9.059.464.800,00	73,00	9.059.464.800,00	74,00	9.159.464.800,00	75,00	9.059.464.800,00	4.02.0.00.0.00.01 .0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.964.871.300,00		11.107.983.828,00		11.281.275.767,00		11.963.499.307,00		12.318.148.535,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.521.224.500,00		6.420.036.288,00		6.391.430.849,00		6.861.662.146,00		6.987.719.512,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	80	81	82	5.521.224.500,00	83	6.420.036.288,00	84	6.391.430.849,00	85	6.861.662.146,00	86	6.987.719.512,00	5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.954.831.400,00		2.854.072.970,00		2.994.276.619,00		3.141.490.449,00		3.302.064.973,00	
Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Kinerja Prooram	Persentase Keselarasan RPJMD	80	85	90	1.954.831.400,00	92	2.854.072.970,00	93	2.994.276.619,00	95	3.141.490.449,00	95	3.302.064.973,00	5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan	dengan RKPD (Persentase)													Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					488.815.400,0 0		1.833.874.570, 00		1.895.568.299, 00		1.960.346.712, 00		2.028.364.050, 00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat,	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	80	85	90	488.815.400,0 0	92	1.833.874.570, 00	93	1.895.568.299, 00	95	1.960.346.712, 00	95	2.028.364.050, 00	5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya														
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	80	85	90		92		93		95		95		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					21.061.337.31 0,63		22.472.306.49 1,46		22.325.588.64 1,32		23.087.752.94 9,73		24.888.095.47 1,17	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.281.927.81 0,63		15.481.323.94 1,46		15.063.346.15 9,32		15.593.686.93 6,73		17.153.565.30 7,17	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	4.055.483.470,63	3,00	5.050.350.714,46	3,19	4.423.753.468,32	3,39	4.741.302.391,73	3,61	5.012.525.237,17	5.02.0.00.0.00.03 .0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	91	92	93	10.226.444.340,00	94	10.430.973.227,00	95	10.639.592.691,00	96	10.852.384.545,00	97	12.141.040.070,00	5.02.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					3.535.500.000,00		3.606.210.000,00		3.678.330.200,00		3.755.334.204,00		3.834.045.875,00	
Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	91	93	94	3.535.500.000,00	95	3.606.210.000,00	96	3.678.330.200,00	97	3.755.334.204,00	98	3.834.045.875,00	5.02.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK					781.000.000,00		796.620.000,00		812.552.400,00		828.803.448,00		845.379.517,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH														
Tersedianya dokumen barang milik daerah, dan kartu inventarisasi barang milik daerah	Persentase Penurunan Masalah Penilaian dan Pengakuan Aset (Persentase)	90	91	92	781.000.000,00	93	796.620.000,00	94	812.552.400,00	95	828.803.448,00	96	845.379.517,00	5.02.0.00.0.00.02 .0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.462.909.500,00		2.588.152.550,00		2.771.359.882,00		2.909.928.361,00		3.055.104.772,00	
Meningkatnya Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,84	3,01	3,04	2.462.909.500,00	3,05	2.588.152.550,00	3,07	2.771.359.882,00	3,08	2.909.928.361,00	3,09	3.055.104.772,00	5.02.0.00.0.00.03 .0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.287.300.000,00		7.007.345.000,00		7.732.704.000,00		8.523.924.800,00		8.981.874.800,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.554.950.000,00		5.010.445.000,00		5.511.489.000,00		6.062.637.800,00		6.281.465.800,00	
Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	4.554.950.000,00	93	5.010.445.000,00	94	5.511.489.000,00	95	6.062.637.800,00	97	6.281.465.800,00	5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.732.350.000,00		1.996.900.000,00		2.221.215.000,00		2.461.287.000,00		2.700.409.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sub Indikator Pengelolaan Manajemen ASN (Persentase)	73	74	75	1.732.350.000,00	76	1.996.900.000,00	77	2.221.215.000,00	78	2.461.287.000,00	79	2.700.409.000,00	5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang berkinerja minimal Baik (Persentase)	70	71	72		74		75		78		80		5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Dava Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN yang berpendidikan Minimal D3 (Persentase)	83	84	85		86		87		88		90		5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang disiplin (Persentase)	80	82	84		85		86		88		90		5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.433.000.000,00		1.590.000.000,00		1.800.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.433.000.000,00		1.590.000.000,00		1.800.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatus Sipil Negara	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	10	10	10	1.100.000.000,00	12	1.210.000.000,00	14	1.433.000.000,00	16	1.590.000.000,00	20	1.800.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01 .0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					152.492.300,00		401.122.365,00		417.178.484,00		434.037.408,00		451.739.278,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					152.492.300,00		281.122.365,00		295.178.484,00		309.937.408,00		325.434.278,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	80	80	81	152.492.300,00	82	281.122.365,00	83	295.178.484,00	84	309.937.408,00	85	325.434.278,00	5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang	80	80	81		82		83		84		85		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pembangunan daerah	Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)													Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00		120.000.000,00		122.000.000,00		124.100.000,00		126.305.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	0	0,00	50	120.000.000,00	52	122.000.000,00	53	124.100.000,00	55	126.305.000,00	5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	0		50		52		53		55		5.01.5.05.0.00.02 .0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					7.409.903.000,00		7.767.108.000,00		8.415.308.000,00		8.953.158.000,00		9.119.458.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.044.903.000,00		4.137.108.000,00		4.235.308.000,00		4.323.158.000,00		4.389.458.000,00	
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	89	90	92	4.044.903.000,00	94	4.137.108.000,00	96	4.235.308.000,00	97	4.323.158.000,00	98	4.389.458.000,00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.565.000.000,00		2.780.000.000,00		3.130.000.000,00		3.430.000.000,00		3.530.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	60	61	62	2.565.000.000,00	63	2.780.000.000,00	64	3.130.000.000,00	65	3.430.000.000,00	66	3.530.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
	Peningkatan Kebabılıtasan Aparat	60	61	62		63		64		65		66		6.01.0.00.0.00.01 .0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)													Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA N DAN ASISTENSI					800.000.000,0 0		850.000.000,0 0		1.050.000.000, 00		1.200.000.000, 00		1.200.000.000, 00	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	60	61	62	800.000.000,0 0	63	850.000.000,0 0	64	1.050.000.000, 00	65	1.200.000.000, 00	66	1.200.000.000, 00	6.01.0.00.0.00.01 .0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					14.898.325.00 0,00		15.075.488.16 5,00		15.314.619.83 6,00		15.625.556.83 2,00		16.031.738.90 0,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					13.437.485.00 0,00		13.583.148.16 5,00		13.776.479.83 6,00		14.046.516.83 2,00		14.396.998.90 0,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	2.160.201.000, 00	3,00	2.108.382.000, 00	3,19	2.108.382.000, 00	3,39	2.108.382.000, 00	3,61	2.108.382.000, 00	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - Kecamatan Waesama
Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	75	77	3.062.388.000, 00	79	3.123.753.160, 00	83	3.187.526.820, 00	85	3.253.588.832, 00	90	3.319.743.900, 00	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kecamatan Leksula
Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan yag baik.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	75	76	77	1.829.400.000, 00	78	1.869.400.000, 00	79	1.909.400.000, 00	80	2.039.400.000, 00	85	2.265.400.000, 00	7.01.0.00.0.00.06 .0000 - Kecamatan Fena Fafan
meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	2.398.717.000, 00	93	2.439.100.000, 00	94	2.472.580.000, 00	95	2.499.780.000, 00	96	2.532.500.000, 00	7.01.0.00.0.00.01 .0000 - Kecamatan Namrole
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	78	80	85	2.520.316.000, 00	88	2.571.316.000, 00	90	2.621.316.000, 00	95	2.659.316.000, 00	99	2.680.316.000, 00	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - Kecamatan Kepala Madan
Terlaksananya kegiatan pendukung urusan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	1.466.463.000, 00	3,00	1.471.197.005, 00	3,19	1.477.275.016, 00	3,39	1.486.050.000, 00	3,61	1.490.657.000, 00	7.01.0.00.0.00.05 .0000 - Kecamatan Ambalau

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					239.400.000,0 0		244.100.000,0 0		248.800.000,0 0		259.500.000,0 0		264.000.000,0 0	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,36	79,37	79,38	18.500.000,00	79,40	19.000.000,00	79,40	20.000.000,00	79,42	21.000.000,00	79,44	21.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - Kecamatan Kepala Madan
Meningkatnya Tingat Prtisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	45.000.000,00	3,00	45.000.000,00	3,19	45.000.000,00	3,39	50.000.000,00	3,61	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05 .0000 - Kecamatan Ambalau
Meningktanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,36	79,37	79,38	22.000.000,00	79,40	22.000.000,00	79,41	22.000.000,00	79,42	22.000.000,00	79,44	22.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - Kecamatan Waesama
Telaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	76	77	75.000.000,00	78	76.000.000,00	79	77.000.000,00	80	78.000.000,00	85	80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06 .0000 - Kecamatan Fena Fafan
Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,36	79,37	79,38	38.400.000,00	79,40	39.100.000,00	79,41	39.800.000,00	79,42	41.500.000,00	79,44	42.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01 .0000 - Kecamatan Namrole
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,36	79,37	79,38	40.500.000,00	79,39	43.000.000,00	79,40	45.000.000,00	79,43	47.000.000,00	79,44	49.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kecamatan Leksula
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					241.699.000,0 0		244.499.000,0 0		247.299.000,0 0		250.099.000,0 0		253.899.000,0 0	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelembagaan Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	88,23	88,25	88,27	60.000.000,00	88,29	60.000.000,00	88,30	60.000.000,00	88,31	60.000.000,00	33,22	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - Kecamatan Kepala Madan
meningkatkan pemberdayaan Masvarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang	88,23	88,25	88,27	69.000.000,00	88,29	69.800.000,00	88,30	70.600.000,00	88,31	71.400.000,00	88,32	72.200.000,00	7.01.0.00.0.00.01 .0000 - Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Desa/Kelurahan (Persentase)													Namrole
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	88,23	88,25	88,27	42.699.000,00	88,29	42.699.000,00	88,30	42.699.000,00	88,31	42.699.000,00	88,32	42.699.000,00	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - Kecamatan Waesama
Telaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	75	76	77	35.000.000,00	78	36.000.000,00	79	37.000.000,00	80	38.000.000,00	85	39.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06 .0000 - Kecamatan Fena Fafan
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarkat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	88,23	88,25	88,27	35.000.000,00	88,29	36.000.000,00	88,30	37.000.000,00	88,31	38.000.000,00	88,32	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kecamatan Leksula
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan dan Keterlibatan dalam kehidupan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	25.000.000,00	3,00	25.000.000,00	3,19	25.000.000,00	3,39	30.000.000,00	3,61	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05 .0000 - Kecamatan Ambalau
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					438.381.000,0 0		446.881.000,0 0		470.881.000,0 0		479.881.000,0 0		505.881.000,0 0	
Meningkatnya Kelancaran Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	95	96	97	60.000.000,00	98	61.000.000,00	99	62.000.000,00	100	63.000.000,00	100	64.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01 .0000 - Kecamatan Namrole
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di tingkat Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	20.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,19	25.000.000,00	3,39	25.000.000,00	3,61	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05 .0000 - Kecamatan Ambalau
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	95	96	97	172.881.000,0 0	98	172.881.000,0 0	99	172.881.000,0 0	100	172.881.000,0 0	100	172.881.000,0 0	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - Kecamatan Waesama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	95	96	97	60.500.000,00	98	62.000.000,00	99	64.000.000,00	100	66.000.000,00	100	69.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Leksula
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	75	76	77	125.000.000,00	78	131.000.000,00	79	147.000.000,00	80	153.000.000,00	85	170.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Fena Fafan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					516.360.000,00		531.860.000,00		546.160.000,00		559.560.000,00		580.960.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dalam Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	80	102	102	180.000.000,00	102	180.000.000,00	102	180.000.000,00	102	180.000.000,00	102	180.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Kepala Madan
Meningkatnya Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,49	2,65	2,82	56.000.000,00	3,00	60.000.000,00	3,19	63.000.000,00	3,39	65.000.000,00	3,61	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Ambalau
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	100	100	100	21.860.000,00	100	21.860.000,00	100	21.860.000,00	100	21.860.000,00	100	21.860.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Waesama
Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	80	102	102	115.000.000,00	102	117.000.000,00	102	118.300.000,00	102	119.700.000,00	102	121.100.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Namrole
Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	75	76	77	80.000.000,00	78	86.000.000,00	79	92.000.000,00	80	98.000.000,00	85	110.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Fena Fafan
Terwujudnya Program Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk	80	102	102	63.500.000,00	102	67.000.000,00	102	71.000.000,00	102	75.000.000,00	102	78.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Leksula

RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Desa.	urusan pemerintahan desa (Angka)													
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.012.022.740, 00		5.074.890.659, 00		13.453.495.40 6,00		18.678.928.26 1,00		5.325.523.941, 00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					2.080.451.000, 00		2.110.720.380, 00		2.135.984.906, 00		2.166.040.447, 00		2.286.983.535, 00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	90	91	92	2.080.451.000, 00	93	2.110.720.380, 00	94	2.135.984.906, 00	95	2.166.040.447, 00	96	2.286.983.535, 00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					800.000.000,0 0		800.000.000,0 0		800.000.000,0 0		800.000.000,0 0		800.000.000,0 0	
Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	80	90	91	800.000.000,0 0	92	800.000.000,0 0	93	800.000.000,0 0	94	800.000.000,0 0	95	800.000.000,0 0	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					66.400.000,00		66.400.000,00		66.400.000,00		260.400.000,0 0		66.400.000,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	90	90	90	66.400.000,00	90	66.400.000,00	90	66.400.000,00	90	260.400.000,0 0	90	66.400.000,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN					32.250.000,00		32.250.000,00		32.250.000,00		32.250.000,00		34.908.438,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ORGANISASI KEMASYARAKA TAN														
Meningkatnya Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90	90	90	32.250.000,00	90	32.250.000,00	95	32.250.000,00	95	32.250.000,00	95	34.908.438,00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.615.676.940, 00		1.647.990.479, 00		10.000.000.00 0,00		15.000.000.00 0,00		1.714.569.294, 00	
Meningkatnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	95	95	95	1.615.676.940, 00	95	1.647.990.479, 00	95	10.000.000.00 0,00	95	15.000.000.00 0,00	95	1.714.569.294, 00	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					417.244.800,0 0		417.529.800,0 0		418.860.500,0 0		420.237.814,0 0		422.662.674,0 0	
Meningkatnya Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	84	85	86	417.244.800,0 0	87	417.529.800,0 0	88	418.860.500,0 0	89	420.237.814,0 0	90	422.662.674,0 0	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)													
TOTAL KESELURUHAN					716.861.613.300.63		765.986.534.060.46		784.896.277.096.32		816.752.991.599.73		733.568.646.284.17	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1. Indikator Makro

Target indikator makro pembangunan merupakan seperangkat sasaran kuantitatif yang digunakan untuk mengarahkan, mengukur, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, penetapan target indikator makro bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi sebuah proses strategis yang berfungsi memastikan bahwa berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

**Tabel 4.2. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2025 – 2030**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,97	5,19	5,42	5,68	5,88	6,48	6,71
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp Juta	13,23	14,21	15,20	16,18	17,17	17,66	18,65
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,12	3,13
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,91	11,51	10,61	9,71	8,91	8,54	7,64
5	Rasio Gini	Indeks	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,54	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	87,62	92,19	96,80	101,64	106,72	112,06	87,62
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,35	1,26	1,17	1,09	1,02	0,95	0,88

4.2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. IKU disusun sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), guna memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan IKU daerah didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan. IKU menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengarahkan kinerjanya, sekaligus menjadi alat ukur akuntabilitas kepala daerah terhadap publik. Melalui IKU, pemerintah daerah dapat menilai sejauh

mana kebijakan pembangunan telah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19	5,42	5,68	5,88	6,48	6,71	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55	59,35	63,70	68,50	72,40	76,75	
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85	
4.	Tingkat Kemiskinan	(%)	14,69	14,47	14,25	14,04	13,83	13,63	
5.	Rasio Gini	Indeks	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,05	
7.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	3,87	4,04	4,23	4,42	4,62	4,83	
8.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	54,40	55,50	56,60	57,70	58,90	60,00	
9.	Indeks Infrastruktur	Angka	2,78	2,90	3,02	3,15	3,29	3,43	
10.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	23,66	23,99	24,33	24,67	25,01	25,36	
11.	Persentase Desa Mandiri	%	1,27	2,53	3,80	5,06	6,33	7,59	
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,26	1,17	1,09	1,02	0,95	0,88	
13.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,91	120,67	118,47	116,31	114,19	112,10	
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,05	
15.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	34,32	29,68	25,66	22,18	19,18	16,58	
16.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71,15	72,04	72,93	73,84	74,75	75,68	
17.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,07	5,17	5,27	5,38	5,49	5,6	

4.2.3. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IKD menggambarkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. IKD berperan penting sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui pengukuran IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu, IKD juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, daya saing daerah, serta kapasitas tata kelola pemerintahan.

**Tabel 4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)
Kabupaten Buru Selatan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,62	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,05	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	53,32	54,40	55,50	56,60	57,70	58,90	60,00	
3	Indeks Infrastruktur	Angka	2,66	2,78	2,90	3,02	3,15	3,29	3,43	
4	Perkembangan Indeks Desa	Indeks	0,624	0,644	0,664	0,685	0,707	0,729	0,752	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	30,88	33,33	35,01	36,65	37,75	38,56	39,89	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	70,00	71,50	72,35	73,48	74,25	75,60	76,01	
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi	(%)	33,01	32,16	31,32	30,51	29,73	28,96	28,21	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pangan (Prevalence of Undernourish ment)									
7	Kapasitas Air Baku	(%)	151,60	151,60	151,70	151,75	151,80	151,85	151,90	
8	Indeks Inovasi dan Riset Maritim	Indeks	-	33,97	34,47	34,97	35,47	35,97	36,47	
9	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0,74	0,78	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	65,84	67,07	68,32	69,60	70,89	72,22	73,57	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155,20	122,91	120,67	118,47	116,31	114,19	112,10	
12	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapi ta	187,66	187,66	188,20	188,60	188,90	190,50	190,70	
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	86,06	86,92	87,79	88,67	89,56	90,45	91,36	
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	65,22	70	75	80	85	90	95	
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	83,62	83,65	83,67	83,69	84,01	84,03	84,05	
16	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	233	233	230	225	220	215	212	
17	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	
18	Persentase Ketaatan Penggung Jawab dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan	Persenta se	50	55	65	70	75	80	85	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	oleh Pemerintah Daerah									
19	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	35	40	45	50	55	
20	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	0	0	20	25	30	35	40	
21	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	55	55	65	67	68	69	70	
22	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	94	95	96	97	98	99	100	
23	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium	Persentase	0	0	35	40	45	50	55	
24	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
25	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0	0	0	1	1	1	1	
26	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	(%)	49,72	49,7	54,69	57,43	60,3	63,31	66,48	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	hunian yang layak dan terjangkau									
28	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	0	35	40	45	50	55	
29	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	35	40	45	50	55	
30	Penanganan Sampah	Ton	8.013,21	8.018,41	8.254,29	8.497,10	8.747,06	9.004,37	9.269,25	
31	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	(%)	1.857	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
32	Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Ton	1,7	15,80	16,59	17,42	18,29	19,2	20,17	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	5,19	5,42	5,68	5,88	6,48	6,71	
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	70,28	71,38	72,48	73,58	74,68	75,78	76,88	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,54	69,40	70,27	71,14	72,03	72,94	73,85	
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	14,91	14,69	14,47	14,25	14,04	13,83	13,63	
5	Rasio Gini	Indeks	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	59,38	59,88	60,38	60,88	61,38	61,88	62,88	
7	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	23,34	23,66	23,99	24,33	24,67	25,01	25,36	
8.	Laju Pertumbuhan	(%)	3,37	3,73	4,12	4,45	4,94	5,25	5,75	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan									
9.	PDRB Ekonomi Kreatif	(%)	14,04	14,24	14,50	14,75	14,98	15,12	15,35	
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan	(%)	22,55	25,36	27,55	29,94	32,53	35,32	38,31	
9	Indeks Pembanguna n Pemuda	Nilai	55,49	56,67	57,88	59,12	60,38	61,67	62,98	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	34,00	92,68	93,90	95,68	96,90	98,40	100,00	
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	64,75	64,93	65,28	66,32	67,43	68,25	69,28	
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	54,39	65,09	75,53	86,11	96,69	100	100	
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	80,54	81,58	82,63	83,70	84,78	85,88	86,99	
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	19,00	21,00	
15	Angka Literasi/Nume rasi	%	35	50	60	70	80	90	100	
16	Indeks	Indeks	56,75	58,93	61,19	63,54	65,97	68,51	71,14	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Perlindungan Anak (IPA)									
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	74,08	80,16	83,05	86,03	89,12	92,32	95,64	
18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	40,00	
19	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	5	4	4	3	3	2	2	
20	Persentase kabupaten/kot a yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	10,56	12,56	14,35	16,25	18,56	20,15	22,06	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	72,07	72,51	72,95	73,40	73,85	74,30	74,76	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,35	1,26	1,17	1,09	1,02	0,95	0,88	
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	
24	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	49,82	50,00	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50	
25	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	7	6	6	5	5	4	4	
26	Cakupan kepesertaan jaminan	(%)	85,67	86,17	86,68	87,19	87,70	88,21	88,72	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kesehatan nasional (JKN)									
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,29	87,31	87,36	87,41	87,46	87,51	87,56	
28	Indeks Literasi Digital	Angka	3,79	3,92	4,05	4,19	4,33	4,48	4,63	
29	Persentase Angka kriminal	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
30	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,48	8,65	8,81	8,99	9,16	9,34	9,52	
31	Rasio Kriminal	Rasio	1,70	1,61	1,47	1,33	1,20	1,06	0,92	
32	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	57,67	60,12	63,27	66,42	69,57	72,72	75,64	
33	Akses sanitasi layak	%	65,84	67,07	68,32	69,60	70,89	72,22	73,57	
34	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,88	12,92	12,95	12,99	13,02	13,06	
35	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio	1,17	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	
36	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	58,96	59,06	59,16	59,26	59,36	59,46	59,56	
37	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	14,84	14,94	15,24	15,34	15,44	15,54	15,64	
38	Aset Dana Pensiun/PDR B	(%)	na	na	na	na	na	na	na	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
39	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2,27	2,3	2,36	2,38	2,4	2,45	2,45	
40	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12.840	13.000	13.325	13.658	13.999	14.348	14.348	
41	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	112,2	100	100	100	100	100	100	
42	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	39,70	35,00	31,50	28,00	24,50	21,00	19,60	
43	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	120	121	122	123	124	125	125	
44	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	20	21	22	23	24	24	25	
45	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	15	16	17	18	19	20	21	
46	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	84	85	86	87	88	89	90	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
47	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
48	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LKD)	Persentase	0	50	60	70	80	90	100	
49	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	50	52	54	56	58	60	62	
50	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	80	90	91	92	93	94	95	
51	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	
52	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	Persentase	90	90	90	90	95	95	95	
53	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	
54	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	Desa	0	0	5	10	15	20	25	
55	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut	Orang	34.946	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
56	Persentase Atlet Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase	10	11	16	17,5	19	20	25	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
57	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	10	13	16	19	22	25	28	
58	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	0	0	1	2	3	4	5	
59	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	90	91	92	93	94	95	
60	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90,4	91,5	92,7	93,3	94,6	95,2	96,4	
61	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
62	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	10	47	52	54	57	60	63	
63	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	191	288	432	648	972	1.458	2.187	
64	Jumlah Barang Melalui Dermaga	Ton	81.732	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000	
65	rasio panjang jalan per jumlah	Rasio	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kendaraan									
66	Persentase Kepemilikan KIR	Persentase	10	15	20	25	30	35	40	
67	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3.399	3.603	3.819	4.048	4.291	4.549	4.822	
68	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	30	35	40	45	50	55	60	
69	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	282	299	317	336	356	377	400	
70	Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Ikan	Unit	6	3	5	7	10	10	10	
71	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Unit	66	70	75	80	85	90	90	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	5,94	6,36	6,59	6,82	7,06	7,31	7,56	
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (IUP)	%	-	2,5	2,8	3,00	3,5	3,8	4,0	
3	Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi	%	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	3,70	3,87	4,04	4,23	4,42	4,62	4,83	
5	Jumlah kerjasama antara	Angka	5	5	6	6	7	7	8	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan									
6	Tingkat Inflasi	(%)	4,33	3,00	2,80	2,50	2,30	2,15	2,09	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,61	3,07	3,18	3,29	3,40	3,51	3,55	
9	Persentase Desa Mandiri	%	1,27	1,27	2,53	3,80	5,06	6,33	7,59	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	5,414	55,61	57,12	58,67	60,26	61,90	63,58	
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,64	44,99	46,39	47,83	49,31	50,84	52,42	
13	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	
14	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	0,282	0,240	0,290	0,300	0,350	0,390	0,490	
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	
16	Inklusi Keuangan	(%)	2,08	2,25	2,33	2,41	2,49	2,58	2,62	
17	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,18	1,32	1,43	1,53	1,63	1,18	1,32	
18	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,36	2,50	2,64	2,78	2,94	3,10	3,70	
19	Koefisien Variasi Harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	-	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	
20	Indeks Ketahanan	%	0,403	0,403	0,413	0,423	0,423	0,444	0,455	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Ekonomi (IKE)									
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	2,25	2,33	2,41	2,49	2,58	2,62	
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	7,59	7,63	7,67	7,71	7,75	7,79	7,84	
23	Total Kredit/PDRB	(%)	0,250	0,251	0,256	0,261	0,266	0,271	0,277	
24	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53,40	53,71	54,01	54,32	54,63	54,94	55,26	
25	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	10,02	10,26	10,50	11,26	11,50	12,26	13,10	
26	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	48,15	48,32	48,50	49,15	49,60	50,10	50,70	
27	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	64,5	65,8	66,2	68,4	69,5	70,6	71,8	
27	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	9,12	15	25	32,40	46	48,49	50,49	
28	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	10	20	30	40	50	60	70	
29	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	50	50	75	75	75	75	75	
30	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	61,8	62,3	64,1	65,2	66	68	70	
31	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	6	8	10	10	10	10	12	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
32	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal	Investor	1	1	2	2	3	4	5	
33	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN	%	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	
34	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	61,8	63,2	64,1	65,2	66	68	68,7	
35	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan	%	65	70	75	77	79	83	85	
36	Persentase jumlah hasil pemantauan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait	%	48	50	58	61	63	66	68,7	
37	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha	Perusahaan/UKM/I KM	610	630	660	690	720	750	780	
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	75.000.000	75.000.000	93.750.000	98.438.000	103.350.000	108.518.000	113.944.000	
39	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	34	40	45	50	55	60	65	
40	Kontribusi Sektor	Persentase	15,31	17,32	21,56	28,69	39,42	41,13	51	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Perdagangan terhadap PDRB									
41	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	94	95	96	97	98	99	100	
42	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	80	85	87	89	90	95	100	
43	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	50	62,8	67,2	68,4	72,1	74,9	75,5	
44	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	50	55	58,9	61	66	68	68,7	
45	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi	Data	0	2	3	4	5	5	5	
46	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	24	27	30	33	36	39	42	
47	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah	30.456.595.506	33.502.255.705	36.547.915.904	39.593.576.103	42.639.236.302	45.684.896.501	48.730.556.700	
48	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	30,45	33,50	36,55	39,60	42,65	45,70	48,75	
49	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA)	Indeks	59,8	61,1	62,5	63,7	64,9	66,1	67,2	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55	55	59,35	63,70	68,50	72,40	76,75	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	70,10	70,50	80,10	80,50	81,10	81,50	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,81	2,06	2,34	2,66	3,02	3,44	3,91	
4	Nilai SAKIP	Nilai	50	30-50	50-60	60-70	60-70	70-80	70-80	
5	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,49	2,65	2,82	3,00	3,19	3,39	3,61	
6	Indeks Merit	Indeks	0	0-0	0.20-0.40	0.61-0.80	0.61-0.80	0.80-100	0.80-100	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	38,65	38,65	40,50	41,50	42,50	44,50	45,10	
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	80	80	81	82	83	84	85	
9	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government)	Persentase	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	
10	Indeks Integritas Nasional	Persentase	70,07	70,17	70,27	70,37	70,47	70,57	70,67	
11	Jumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam	Angka	1	1	1	1	1	1	1	
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	77,54	77,85	78,15	78,65	78,90	79,00	79,25	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	66,76	73,60	77,28	81,15	85,20	89,46	93,94	
13	Persentase Penegakan Perda	%	39,17	75	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	35	30-50	50-60	60-70	60-70	70-80	70-80	
15	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	75	76	77	78	79	80	85	
16	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	91	92	93	94	95	96	
17	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	75	76	77	78	79	80	85	
18	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,23	88,25	88,27	88,29	88,30	88,31	88,32	
19	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	78	80	85	88	90	95	99	
20	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	75	77	79	83	85	90	
21	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	80	81	82	83	84	85	86	
22	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat	%	91	93	95	96	97	98	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
23	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	95	96	97	98	99	100	100	
24	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
25	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	93	94	95	96	99	100	
26	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	50	65,8	67,2	71,8	72,1	74,9	80	
27	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	20	25	30	35	40	45	50	
28	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	87	88	89	90	91	92	93	
29	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,23	88,25	88,27	88,29	88,30	88,31	88,32	
30	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,23	88,25	88,27	88,29	88,30	88,31	33,22	
31	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung	%	90	91	92	93	94	95	96	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	urusan pemerintahan									
32	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	80	102	102	102	102	102	102	
33	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	91	92	94	95	97	99	
34	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	91	92	94	95	98	98	100	
35	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	95	96	97	98	99	100	100	
36	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	75	76	77	78	79	80	85	
37	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	80	102	102	102	102	102	102	
38	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	80	102	102	102	102	102	102	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
39	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	95	96	97	98	99	100	100	
41	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	75	76	77	78	79	80	85	
42	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan	Persentase	88,23	88,25	88,27	88,29	88,30	88,31	88,32	
43	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	90	92	93	94	95	96	97	
44	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	85	86	87	88	89	90	94	
45	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,36	79,37	79,38	79,40	79,41	79,42	79,44	
46	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,36	79,37	79,38	79,39	79,40	79,43	79,44	
47	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,36	79,37	79,38	79,40	79,41	79,42	79,44	
48	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	76	77	78	79	80	85	
49	Nilai Indeks	Indeks	79,36	79,37	79,38	79,40	79,40	79,42	79,44	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kepuasan Masyarakat									
50	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	0	0	25	30	40	50	
51	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	75	75	150	200	250	300	350	
52	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100	100	100	100	100	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	95,40	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	%	97,86	97,77	97,68	97,60	97,51	97,42	97,33	
3	Persentase Guru Bersertifikat	%	68,00	70,00	72,00	74,00	75,00	77,00	79,00	
4	Persentase Sekolah dengan Sarana Prasarana yang Layak	%	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	
5	Jumlah Siswa pada Jenjang PAUD	Angka	2.300	2.315	2.330	2.350	2.363	2.366	2.374	
6	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI	%	-	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,80	
7	Angka	%	98,00	98,01	98,25	98,46	99,52	99,98	100,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Partisipasi Sekolah SMP/ MTs									
8	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SMP/ MTs	%	0	0	38	40	42	44	46	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	%	99,15	100	100	100	100	100	100	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	%	88,48	92,70	97,12	100	100	100	100	
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	%	11,79	12,61	13,48	13,20	12,90	12,50	12,01	
12	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	12	17	19	21	23	25	
13	Sekolah Kondisi Bangunan Baik SD/ MI	%	0	0	38	40	42	44	46	
14	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTs	%	114	114,25	114,64	114,66	114,72	114,75	114,78	
15	Angka Partisipasi Sekolah SD/ MI	%	98,00	98,01	98,02	98,03	98,04	98,05	98,06	
16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,87	0,82	0,77	0,72	0,68	0,68	0,64	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase RS pemerintah	Persentase	50,00	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dengan dokter spesialis sesuai standar									
3	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	93	94	95	95	95	96	96	
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	30,76	38,46	46,16	53,86	61,56	69,26	76,96	
5	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persentase	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	
7	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	46,48	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4	
8	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup	Persentase	28,78	68,20	70,50	74,60	77,78	80,03	82,28	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	46,15	53,85	61,55	69,25	76,95	84,65	92,35	
11	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persentase	40,00	44,35	48,70	53,05	57,40	61,75	66,10	
12	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	70,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
14	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	30,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
16	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	9	8	7	6	5	4	3	
17	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	Persentase	15,49	18,00	20,51	23,02	25,53	28,04	30,55	
18	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase	46,15	53,85	61,55	69,25	76,95	84,65	92,35	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terakreditasi paripurna									
20	Presentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persenta se	76,09	77,09	78,09	79,09	80,09	81,09	82,09	
21	Penemuan Kasus TBC	%	34,0	40,0	55,0	60,0	65,0	75,0	80,0	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangank abupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	20	20	25	25	25	25	25	
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persenta se	80	83	87	91	95	98	100	
3	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persenta se	1,20	1,23	1,29	1,34	1,34	1,36	1,37	
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	1,20	1,23	1,29	1,34	1,34	1,35	1,37	
5	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kot a	%	14,1	50	60	70	80	90	100	
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	57,02	58	60	62	64	66	68	
7	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persenta se	22	23	24	26	27	29	30	
8	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan	%	65,22	70	75	80	85	90	95	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	perpipaan (%)									
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a	%	0	0	0	50	50	50	50	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	70	70	70	70	
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	76,51	77,28	78,05	79,61	82,00	86,10	91,26	
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persenta se	0,92	1,01	1,32	2,24	3,35	5,03	6,54	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	75	75	100	150	200	250	300	
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persenta se	90	91	92	95	97	98	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70	75	77	79	80	81	82	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Penurunan PPKS	%	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	
2	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	66,0	66,2	66,5	67,5	67,9	68,0	69,0	
3	Persentase Masyarakat Miskin dan rentan yang mendapat Jaminan Sosial	Persentase	50,80	59,50	60,00	61,10	62,20	63,00	64,00	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	80,00	
5	Jumlah Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Bantuan Sosial	Kepala Keluarga	70	75	76	78	79	80	85	
AG	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan	%	5	8	10	12	14	16	20	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif									
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0:0	0.25:0.25	0.20:0.20	0.15:0.15	0.10:0.10	0.05:0.05	0.02:0.02	
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	33,01	38,27	37,68	37,08	36,48	35,89	36,98	
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/Kapita/Hari	1.983	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	1.857	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	-	60,86	62,65	64,43	66,21	67,99	68,23	
AI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50	50	60	70	80	90	100	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	
3	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	70	70	70	70	70	70	70	
AJ	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Proporsi Kebutuhan KB yang	%	61,6	62,4	63,1	63,9	64,5	65,2	65,8	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terpenuhi menurut alat/cara KB Modern									
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,45	15,20	14,95	14,7	14,45	14,2	13,95	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	48,8	56,0	60,8	63,9	66,0	67,4	68,3	
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59,8	69,2	70,2	71,3	72,2	73,1	74,0	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	24,7	24.6-24.7	2.45-24.6	24.4-24.5	24.3-24.4	24.2-24.3	24.1-24.2	
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	4,9	7,8	10,3	12,6	14,6	16,3	17,9	
7	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12,1	8,7	6,7	5,6	4,9	4,5	4,3	
8	Persentase KB Pasca Persalinan	Persentase	30,59	32,59	35,29	37,99	40,69	46,09	48,79	
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	59,8	61,16	62,5	63,7	64,9	66,1	67,2	
AK	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio Kenektivitas Darat	Rasio	0,40	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	
2	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,40	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	
AL	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	48	49,7	50,23	54,6	57,8	59,2	60,2	
AM	5.01 – PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	80	85	90	92	93	95	95	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	80	85	90	92	93	95	95	
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80	85	90	92	93	95	95	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	80	85	90	92	93	95	95	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	80	85	90	92	93	95	95	
AN	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	80	80	81	82	83	84	85	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	n									
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persenta se	0	0	0	50	52	53	55	

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai acuan arah pembangunan lima tahunan. Mengacu pada visi "**Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan**", seluruh strategi, program, dan kebijakan pembangunan telah dirumuskan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dokumen ini menjadi fondasi utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan yang terarah dan terukur demi kemajuan wilayah Buru Selatan.

Pembangunan daerah diarahkan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi unggulan daerah, terutama di sektor pertanian dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan ekonomi maritim, dan pariwisata. Pendekatan pembangunan yang terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pelestarian budaya lokal dengan modernisasi yang adaptif, sehingga menghasilkan pembangunan yang memiliki identitas khas Buru Selatan namun tetap mampu bersaing di era global.

Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia mendapat prioritas khusus dalam RPJMD 2025-2029, dengan fokus pada perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar kerja. Program-program pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan potensi daerah akan diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat akan diintensifkan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan penduduk.

Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu pilar penting dalam dokumen perencanaan ini, dengan penekanan pada pembangunan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik akan dirancang untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan pasar. Mendorong implementasi teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan akan diintegrasikan dalam pembangunan infrastruktur untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan lestari.

Keseluruhan substansi RPJMD menjadi dasar pijakan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi prinsip utama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif juga telah dirumuskan untuk memantau pencapaian target-target pembangunan serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Melalui implementasi RPJMD yang konsisten dan adaptif, Kabupaten Buru Selatan diharapkan dapat mewujudkan visinya sebagai daerah yang maju, HUMANIS dan berkelanjutan pada tahun 2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJMD harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah. Sebagai instrumen perencanaan yang menjembatani visi politik kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat, RPJMD sebagai visi teknokratik wajib diimplementasikan melalui mekanisme yang terukur dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran, efektivitas capaian, dan dampak berkelanjutan. Komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan dokumen perencanaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun pemerintah desa/negeri. Selain itu, pendekatan pembangunan juga harus responsif terhadap dinamika dan tantangan eksternal, termasuk perubahan iklim, kondisi geopolitik, dan perkembangan teknologi. Harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi prasyarat untuk menghindari tumpang tindih dan fragmentasi program serta memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan program prioritas nasional dapat disinergikan dengan program pembangunan daerah, sehingga terjadi percepatan pencapaian target di semua level pemerintahan.

Implementasi RPJMD harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi pemantauan kemajuan fisik dan keuangan, evaluasi kinerja program, serta penilaian dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan bukti. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan perlu diformalkan melalui mekanisme partisipatif yang terstruktur, sehingga terjadi pengawasan kolaboratif yang memperkuat akuntabilitas publik dan memperbaiki kualitas implementasi program.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kritis dalam pelaksanaan RPJMD yang efektif. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik, didukung oleh sistem insentif yang adil dan berbasis merit. Pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan manajemen program, harus menjadi agenda prioritas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dipercepat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah daerah. Dengan memperhatikan seluruh kaidah pelaksanaan ini, RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah berkelanjutan.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah dan evaluasi eksternal oleh instansi vertikal dan lembaga legislatif. Mekanisme pelaporan ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kegiatan, program, hingga kebijakan strategis, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan mengembangkan platform digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan capaian indikator kinerja secara real-time, sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan hambatan implementasi program.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur perencanaan, sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya. Proses pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi pembangunan triwulanan yang melibatkan seluruh kepala OPD, dengan agenda utama identifikasi capaian, tantangan, dan solusi percepatan program pembangunan. Aspek pengendalian anggaran mendapat perhatian khusus melalui evaluasi penyerapan dan efektivitas belanja daerah, dengan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup evaluasi terhadap konteks, input, proses, output, outcome dan impact dari setiap program dan kegiatan pembangunan. Metode evaluasi yang digunakan meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterlibatan pihak eksternal, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi juga akan difasilitasi untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil evaluasi. Hasil evaluasi tengah periode (mid-term review) RPJMD akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun-tahun berikutnya, serta menjadi dasar untuk melakukan revisi atau penyesuaian terhadap target dan strategi dalam RPJMD.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD akan dikomunikasikan secara berkala kepada masyarakat melalui forum-forum partisipatif dan media informasi yang dapat diakses secara luas. Mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap hasil evaluasi juga akan dibuka melalui sistem pengaduan masyarakat terintegrasi dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Temuan dan rekomendasi dari hasil evaluasi akan ditindaklanjuti secara sistematis dengan rencana aksi yang jelas, target waktu penyelesaian, dan penanggung jawab implementasi. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembelajaran berkelanjutan (continuous learning) dalam proses pembangunan, dengan menjadikan pengalaman pelaksanaan dan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi program pembangunan di masa mendatang.

5.4. Penutup

Dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif masyarakat, maka visi "**Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan**" dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah ini.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Selatan. (2025). **Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2025**. Namrole: BPS Kabupaten Buru Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) RI. (2024). **Statistik Indonesia 2024**. Jakarta: BPS.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025). **InaRISK: Data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan**.
- Badan Pangan Nasional. (2025). **Data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan**.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). **Indikator Daya Saing Daerah Kabupaten Buru Selatan**.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). **Kajian Risiko Bencana Indonesia 2023**. Jakarta: BNPB.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). **Data Iklim dan Cuaca Wilayah Maluku**. Jakarta: BMKG.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). **Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Nasional 2024**. Jakarta: BKKBN.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). **Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2003). **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara**.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045**.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.**
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). **Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku 2019–2023.**
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). **Rapor Pendidikan Indonesia Kabupaten Buru Selatan, 2024.**
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2025). **Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Buru Selatan, 2022– 2024.**
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). **Indeks Keluarga Sehat dan Data Stunting Kabupaten Buru Selatan.**
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). **Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan, 2022–2023.**
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2025). **Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku, 2019–2023.**
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2023). **Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023.** Jakarta: KLHK.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 2023.** Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2024). **Indeks Desa Membangun (IDM) Nasional 2024.** Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2024). **Profil Pendidikan Nasional 2024.** Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). **Profil Kesehatan Indonesia 2023.** Jakarta: Kemenkes RI.
- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. (2024). **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029.** Namrole: Bappelitbang Kabupaten Buru Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. (2023). **Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043.**